



# LAPORAN AKHIR

# RPKD

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

## KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025-2030



LPPM  
Universitas Muhammadiyah Buton



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR:13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah yang terukur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu mengatur pelaksanaan program dan kegiatan terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-245;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024-2030.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

BAB II  
PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPKD disusun dalam bentuk dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka:
  - a. percepatan penurunan kemiskinan Daerah;
  - b. pencapaian target program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*; dan
  - c. penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

### Pasal 3

Penyusunan Dokumen RPKD, dimaksudkan untuk:

- a. perumusan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. penetapan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. panduan intervensi program perangkat daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 4

Dokumen RPKD disusun dengan tujuan:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergitas para pihak dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan pengambilan kebijakan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar berusaha serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

### Pasal 5

- (1) Dokumen RPKD memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas program.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi indikator pencapaian penurunan kemiskinan di Daerah sampai dengan Tahun 2030.

## BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

### Pasal 6

- (1) Sistematika dokumen RPKD disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I   Pendahuluan
  - b. BAB II   Kondisi Umum Daerah;

- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
  - d. BAB IV Prioritas Program;
  - e. BAB V Lokasi Prioritas Program;
  - f. BAB VI Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan, dan sistematika penulisan.
  - (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pembangunan infrastruktur di daerah.
  - (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik bidang ketahanan pangan.
  - (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (Determinan), analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.
  - (6) Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah individu berdasarkan Data P3KE dan Indeks Desa Membangun.
  - (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program.

#### Pasal 7

Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI BUTON SELATAN,  
  
H. MUHAMMAD ADIOS

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2025

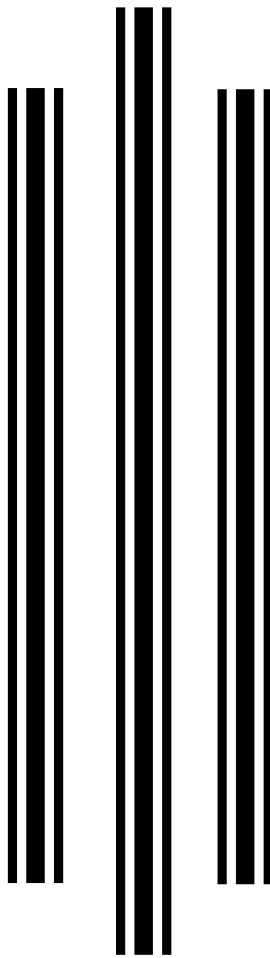
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LAODE DARUS SALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
(RPKD)  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025-2030**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
BATAUGA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Pendahuluan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan. Laporan Pendahuluan ini memuat latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, data awal wilayah perencanaan, kebijakan-kebijakan terkait serta metode pelaksanaan kegiatan.

RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2030 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

RPKD disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan politik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui kerangka kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Buton Selatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton pada tahun anggaran 2024.

Disusunnya dokumen RPKD ini berfungsi sebagai landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. RPKD kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-2029 menyajikan kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2030 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPKD ini dan kami berharap agar RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2030 dapat digunakan sebagai dasar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Buton Selatan.

Batauga,

2025

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**H. MUHAMMAD ADIOS**

Lampiran : **PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**

**NOMOR : TAHUN 2025**

**TANGGAL : 2025**

**TENTANG : RENCANA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN  
BUTON SELATAN TAHUN 2025-2030**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Hal.</b> |
|--|-------------|
| SAMPUL .....   | i           |
| KATA PENGANTAR .....   | ii          |
| DAFTAR ISI .....   | iii         |
| DAFTAR TABEL .....   | v           |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vii         |
| <br>   |             |
| BAB I. PENDAHULUAN .....   | 1           |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1           |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....   | 5           |
| 1.3. Dasar Kebijakan .....   | 6           |
| 1.4. Hubungan Antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya ..... | 8           |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....   | 9           |
| <br>   |             |
| BAB II. KONDISI UMUM DAERAH .....  | 11          |
| 2.1. Aspek Geografis .....   | 11          |
| 2.2. Aspek Demografi .....   | 27          |
| 2.3. Aspek Perekonomian .....  | 33          |
| 2.4. Aspek Pembangunan Manusia (IPM) .....   | 40          |
| 2.5. Aspek Pemerintahan .....  | 41          |
| 2.6. Aspek Ketenagakerjaan .....   | 42          |
| 2.7. Aspek Potensi Daerah .....  | 45          |
| 2.8. Aspek Kemiskinan .....  | 48          |
| 2.9. Kebijakan Daerah Terkait Kemiskinan Dalam RPJP, RPJMD,RPD .....                   | 52          |
| <br>   |             |
| BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH .....  | 54          |
| 3.1. Isu Strategis Kemiskinan Dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan .....            | 54          |
| 3.2. Kemiskinan Daerah .....   | 60          |
| 3.2.1. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan .....                           | 60          |
| 3.2.2. Penduduk Desil .....  | 63          |
| 3.2.3. Ketenagakerjaan .....   | 69          |

|  |     |
|--|-----|
| 3.2.4. Indek Pembangunan Manusia .....   | 71  |
| 3.2.5. Pengeluaran Rill (Per Kapita) Penduduk .....  | 72  |
| 3.2.6. Angka Harapan Hidup .....   | 73  |
| 3.2.7. Pendidikan .....  | 74  |
| 3.2.8. Prevalensi Stunting .....   | 82  |
| 3.2.9. Akses Air Rumah Tangga Layak .....  | 84  |
| 3.3. Analisis Karakteristik Kemiskinan .....   | 85  |
| 3.3.1. Karakteristik Kemiskinan Menurut Konsumsi .....   | 85  |
| 3.3.2. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan .....                              | 99  |
| 3.3.3. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan .....                                    | 106 |
| 3.3.4. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan .....                                   | 120 |
| 3.3.5. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar .....                          | 142 |
| 3.3.6. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan .....                             | 154 |
| <br>   |     |
| BAB IV. PRIORITAS PROGRAM .....  | 167 |
| 4.1. Analisis Program Prioritas Kemiskinan .....   | 167 |
| 4.2. Analisis Fiskal .....   | 191 |
| 4.3. Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Intervensi.....                                    | 198 |
| 4.4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .....                                      | 207 |
| 4.5. Target Penurunan Angka Kemiskinan .....   | 213 |
| 4.6. Arahan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan<br>tahun 2025-2030 ..... | 217 |
| <br>   |     |
| BAB V. LOKASI PRIORITAS .....  | 218 |
| 5.1. Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Eksttrim .....                                  | 218 |
| 5.2. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan .....  | 221 |
| 5.3. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan .....   | 223 |
| 5.4. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan .....  | 225 |
| 5.5. Prioritas Wilayah Bidang Perkebunan .....   | 228 |
| 5.6. Prioritas Wilayah Bidang Perikanan .....  | 230 |
| 5.7. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur .....  | 232 |
| 5.8. Hasil Komposit Wilayah Prioritas.....   | 241 |
| <br>   |     |
| BAB VI. PENUTUP .....  | 244 |
| 6.1. Kesimpulan.....   | 244 |
| 6.2. Saran .....   | 244 |
| 6.3. Rekomendasi Kebijakan.....  | 245 |

## DAFTAR TABEL

|            | <b>Hal</b>  |
|------------|---|
| Tabel 1.1  | Data Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan ..... 4   |
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan ..... 9   |
| Tabel 2.1  | Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan ..... 15  |
| Tabel 2.3  | Data Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..... 27   |
| Tabel 2.4  | Data Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Periode 2023-2030 ..... 31  |
| Tabel 2.5  | Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Desil 1-4 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 ..... 33  |
| Tabel 2.6  | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023 ..... 34   |
| Tabel 2.7  | Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 ..... 37   |
| Tabel 2.8  | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 ..... 39  |
| Tabel 2.9  | Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 ..... 41   |
| Tabel 2.10 | Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022-2023 ..... 42  |
| Tabel 2.11 | Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 ..... 43                      |
| Tabel 2.12 | Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 ..... 44 |
| Tabel 2.13 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 ..... 44  |
| Tabel 3.1  | Distribusi Capaian Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Tujuan di Kabupaten Buton Selatan ..... 54   |
| Tabel 3.2  | Isu Strategis Kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan ..... 59  |
| Tabel 3.3  | Masalah Kemiskinan Konsumsi ..... 99  |
| Tabel 3.4  | Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan..... 106   |
| Tabel 3.5  | Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Kesehatan ..... 120  |
| Tabel 3.6  | Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Pendidikan ..... 141   |
| Tabel 3.7  | Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Infrastruktur Dasar..... 153   |
| Tabel 3.8  | Masalah Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan..... 165  |
| Tabel 4.1  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ..... 173  |
| Tabel 4.2  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Kesehatan ..... 174  |
| Tabel 4.3  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..... 177   |
| Tabel 4.4  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ..... 178  |
| Tabel 4.5  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ..... 181  |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Tabel 4.6  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang PU dan Tata Ruang .....                                    | 183 |
| Tabel 4.7  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Pertanian .....  | 185 |
| Tabel 4.8  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan .....                                     | 186 |
| Tabel 4.9  | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan .....                               | 189 |
| Tabel 4.10 | Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan .....                        | 190 |
| Tabel 4.11 | APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2029-2022 .....  | 193 |
| Tabel 4.12 | Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022...   | 195 |
| Tabel 4.13 | Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi.....   | 201 |
| Tabel 4.14 | Indikator Realisasi dan Target Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan RPD/RPJMD di Kabupaten Buton Selatan ..... | 214 |
| Tabel 4.15 | Indikator Realisasi dan Target Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan RPKD di Kabupaten Buton Selatan .....      | 215 |
| Tabel 5.1  | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2023.....  | 218 |
| Tabel 5.2  | Hasil Komposit Prioritas Wilayah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tiap Bidang Kemiskinan .....                | 244 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   | <b>Hal.</b> |
|-------------|---|-------------|
| Gambar 1.1  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs .....   | 2           |
| Gambar 1.2  | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ...   | 9           |
| Gambar 2.1  | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan .....   | 11          |
| Gambar 2.2  | Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan .....  | 20          |
| Gambar 2.3  | Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Buton Selatan .....   | 22          |
| Gambar 2.4  | Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Buton Selatan   | 22          |
| Gambar 2.5  | Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Buton Selatan  | 23          |
| Gambar 2.6  | Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim di Kabupaten Buton Selatan .....                                    | 23          |
| Gambar 2.7  | Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Buton Selatan ..  | 24          |
| Gambar 2.8  | Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Buton Selatan .....                            | 24          |
| Gambar 2.9  | Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Buton Selatan .....   | 25          |
| Gambar 2.10 | Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton Selatan  | 25          |
| Gambar 2.11 | Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Buton Selatan .....  | 26          |
| Gambar 2.12 | Peta Multi Risiko Bencana di Kabupaten Buton Selatan .....  | 26          |
| Gambar 2.13 | Persentase Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 .....                  | 28          |
| Gambar 2.14 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) per Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 .....      | 29          |
| Gambar 2.15 | Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Buton Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 ..... | 29          |
| Gambar 2.16 | Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-2030 .....                             | 32          |
| Gambar 2.17 | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 .....        | 34          |
| Gambar 2.18 | Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2023 (%) .....                   | 40          |
| Gambar 2.19 | Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023 .....  | 49          |
| Gambar 2.20 | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Tahun 2021-2023 .....  | 49          |
| Gambar 2.21 | Jumlah Penduduk Miskin Menurut Aspek Geografis Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 .....      | 50          |
| Gambar 2.22 | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023 .....                          | 50          |
| Gambar 2.23 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023 .....                                 | 51          |
| Gambar 2.24 | Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023 .....                                 | 51          |
| Gambar 3.1  | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023 .....           | 61          |
| Gambar 3.2  | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan 2017-2023 .....  | 61          |
| Gambar 3.3  | Garis Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....  | 61          |
| Gambar 3.4  | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan 2017-2023 .....                                      | 62          |

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Gambar 3.5  | Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan 2017-2023 .....  | 63 |
| Gambar 3.6  | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 .....   | 63 |
| Gambar 3.7  | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Batauga Tahun 2023 .....   | 64 |
| Gambar 3.8  | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Sampolawa Tahun 2023 .....   | 65 |
| Gambar 3.9  | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Lapandewa Tahun 2023 .....   | 66 |
| Gambar 3.10 | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Batu Atas Tahun 2023 ...   | 66 |
| Gambar 3.11 | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Siompu Barat Tahun 2023 .....  | 67 |
| Gambar 3.12 | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Siompu Tahun 2023 .....  | 67 |
| Gambar 3.13 | Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Kadatua Tahun 2023 .....   | 68 |
| Gambar 3.14 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 .....   | 68 |
| Gambar 3.15 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023 .....          | 69 |
| Gambar 3.16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023 ..... | 70 |
| Gambar 3.17 | Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 .....             | 70 |
| Gambar 3.18 | IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....  | 71 |
| Gambar 3.19 | Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                  | 72 |
| Gambar 3.20 | AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....  | 72 |
| Gambar 3.21 | AHH Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023 .....                                   | 73 |
| Gambar 3.22 | Angka HLS Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 .....  | 74 |
| Gambar 3.23 | HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....  | 74 |
| Gambar 3.24 | HLS Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023 .....                                   | 75 |
| Gambar 3.25 | RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....  | 76 |
| Gambar 3.26 | RLS Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi Tahun 2023 ....  | 76 |
| Gambar 3.27 | APM di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022 .....   | 77 |
| Gambar 3.28 | APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022 ...   | 78 |
| Gambar 3.29 | APK SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022 .....   | 78 |
| Gambar 3.30 | APK SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022 .....  | 79 |
| Gambar 3.31 | APM SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022 ...   | 79 |
| Gambar 3.32 | APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022 .....   | 80 |
| Gambar 3.33 | APM SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022 .....  | 80 |
| Gambar 3.34 | AMH Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi Tahun 2019-2023 .....  | 81 |
| Gambar 3.35 | Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024 .....   | 82 |
|             | Prevalensi Stunting di Sulawesi Tenggara, Oktober 2024 .....   | 83 |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Gambar 3.36 | Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-   | 84  |
| Gambar 3.37 | 2024 .....   |     |
| Gambar 3.38 | Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2023 .....                  | 84  |
| Gambar 3.39 | Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....  | 86  |
| Gambar 3.40 | Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....   | 87  |
| Gambar 3.41 | Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                 | 87  |
| Gambar 3.42 | Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....           | 89  |
| Gambar 3.43 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....  | 90  |
| Gambar 3.44 | Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....   | 90  |
| Gambar 3.45 | Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                | 91  |
| Gambar 3.46 | Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                              | 92  |
| Gambar 3.47 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....  | 94  |
| Gambar 3.48 | Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....   | 94  |
| Gambar 3.49 | Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                | 95  |
| Gambar 3.50 | Analisis Posisi Relatif Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                | 96  |
| Gambar 3.51 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 ..... | 97  |
| Gambar 3.52 | Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....     | 97  |
| Gambar 3.53 | Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                          | 98  |
| Gambar 3.54 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....   | 100 |
| Gambar 3.55 | Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 .....               | 101 |
| Gambar 3.56 |  | 102 |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
|             | Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....            | 103 |
| Gambar 3.57 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 .....                           | 104 |
| Gambar 3.58 | Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... | 105 |
| Gambar 3.59 | Perkembangan AKI (per 100.000 kelahiran hidup) Tingkat Nasional .....  | 107 |
| Gambar 3.60 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....   | 108 |
| Gambar 3.61 | Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....  | 109 |
| Gambar 3.62 | Perkembangan AKB (per 1.000 kelahiran hidup) di Tingkat Nasional .....   | 110 |
| Gambar 3.63 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....  | 111 |
| Gambar 3.64 | Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....   | 112 |
| Gambar 3.65 | Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                              | 113 |
| Gambar 3.66 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023 .....  | 114 |
| Gambar 3.67 | Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023 .....               | 115 |
| Gambar 3.68 | Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 .....                           | 116 |
| Gambar 3.69 | Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 .....                           | 117 |
| Gambar 3.70 | Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 .....                                    | 117 |
| Gambar 3.71 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024 .....  | 118 |
| Gambar 3.72 | Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 .....                           | 119 |
| Gambar 3.73 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 .....                 | 121 |
| Gambar 3.74 | Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....  | 122 |
| Gambar 3.75 | Analisis Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022 .....               | 123 |
| Gambar 3.76 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....                  | 124 |
| Gambar 3.77 | Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022.....   | 125 |
| Gambar 3.78 |  |     |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Gambar 3.79 | Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022.....                         | 126 |
| Gambar 3.80 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....                                      | 127 |
| Gambar 3.81 | Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....  | 128 |
| Gambar 3.82 | Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022 .....                         | 129 |
| Gambar 3.83 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 .....                                      | 130 |
| Gambar 3.84 | Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 .....   | 131 |
| Gambar 3.85 | Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 .....                          | 132 |
| Gambar 3.86 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 .....                                    | 133 |
| Gambar 3.87 | Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 .....   | 133 |
| Gambar 3.88 | Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 .....                        | 134 |
| Gambar 3.89 | Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 .....                                     | 135 |
| Gambar 3.90 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022.....   | 136 |
| Gambar 3.91 | Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 .....                         | 137 |
| Gambar 3.92 | Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....   | 138 |
| Gambar 3.93 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 .....  | 139 |
| Gambar 3.94 | Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 .....                             | 140 |
| Gambar 3.95 | Analisis Posisi Relatif Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ..... | 142 |
| Gambar 3.96 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023.....        | 143 |
|             |   | 144 |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| Gambar 3.97  | Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 .....        | 145 |
| Gambar 3.98  | Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....                 | 146 |
| Gambar 3.99  | Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023.....  | 147 |
| Gambar 3.100 | Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023 .....          | 148 |
| Gambar 3.101 | Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 .....               | 148 |
| Gambar 3.102 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023.....  | 149 |
| Gambar 3.103 | Analisis Relevansi Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 .....               | 150 |
| Gambar 3.104 | Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ..... | 151 |
| Gambar 3.105 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021.....                          | 152 |
| Gambar 3.106 | Analisis Relevansi Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... | 155 |
| Gambar 3.107 | Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Ton/Tahun) .....  | 156 |
| Gambar 3.108 | Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras Setiap Penduduk di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Gram/Orang/Hari) .....                          | 156 |
| Gambar 3.109 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Rata-Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021.....                         | 157 |
| Gambar 3.110 | Analisis Relevansi Jumlah Rata-Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021 .....                                       | 158 |
| Gambar 3.111 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 .....   | 159 |
| Gambar 3.112 |   | 159 |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| Gambar 3.113 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022.....                      | 161 |
| Gambar 3.114 | Analisis Efektivitas Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022..                                      | 162 |
| Gambar 3.115 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022.....                                  | 162 |
| Gambar 3.116 | Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022....  | 163 |
| Gambar 3.117 | Analisis Perkembangan Antar Waktu Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022.....   | 164 |
| Gambar 3.118 | Analisis Efektivitas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022.....  | 165 |
| Gambar 4.1   | Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022.....  | 168 |
| Gambar 4.2   | Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022.....  | 169 |
| Gambar 4.3   | Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022.....  | 171 |
| Gambar 4.4   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Sosial</i> .....   | 172 |
| Gambar 4.5   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i> .....   | 174 |
| Gambar 4.6   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i> .....  | 176 |
| Gambar 4.7   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</i> .....  | 178 |
| Gambar 4.8   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Kesehatan</i> .....  | 180 |
| Gambar 4.9   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i> .....   | 182 |
| Gambar 4.10  | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i> .....  | 184 |
| Gambar 4.11  | <i>Theory of Change (TOC) Bidang PerumahanRakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i> .....   | 186 |
| Gambar 4.12  | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang</i> .....   | 188 |
| Gambar 4.14  | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Pertanian</i> .....  | 190 |
| Gambar 5.1   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Ketahanan Pangan</i> .....   | 210 |
| Gambar 5.2   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Kelautan dan Perikanan</i> .....   | 220 |
| Gambar 5.3   | <i>Theory of Change (TOC) Bidang Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Visi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045</i> ..... | 221 |
| Gambar 5.4   | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan AngkaKemiskinan Ekstrem dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buton Selatan .....   | 222 |
| Gambar 5.5   | Peta Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem .....  | 223 |
| Gambar 5.6   | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Tenaga Kerja di Kabupaten Buton Selatan .....   | 224 |
|              | Peta Lokasi Prioritas Bidang Ketenagakerjaan .....  | 225 |
|              | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Murid di Kabupaten Buton Selatan .....   |     |
|              | Peta Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan .....   |     |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Gambar 5.7  | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Angka Kemiskinan Ekstrem dan Tenaga Medis di Kabupaten Buton Selatan ..... | 226 |
| Gambar 5.8  | Peta Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan .....   | 227 |
| Gambar 5.9  | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Luas Kebun Kelapa di Kabupaten Buton Selatan .....   | 228 |
| Gambar 5.10 | Peta Lokasi Prioritas Bidang Perkebunan .....  | 229 |
| Gambar 5.11 | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Perikanan Tangkap di Kabupaten Buton Selatan .....   | 231 |
| Gambar 5.12 | Peta Lokasi Prioritas Bidang Perikanan .....   | 232 |
| Gambar 5.13 | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jalan Rusak di Kabupaten Buton Selatan .....         | 233 |
| Gambar 5.14 | Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Jalan .....   | 234 |
| Gambar 5.15 | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penyediaan air Layak di Kabupaten Buton Selatan..    | 235 |
| Gambar 5.16 | Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Air .....   | 236 |
| Gambar 5.17 | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penyediaan air Layak di Kabupaten Buton Selatan .... | 238 |
| Gambar 5.18 | Peta Lokasi Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Sanitasi .....  | 239 |
| Gambar 5.19 | Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penerangan Listrik di Kabupaten Buton Selatan .....  | 240 |
| Gambar 5.20 | Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Listrik .....   | 241 |

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**H. MUHAMMAD ADIOS**



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia dan/atau ketidakmampuan kapabilitas. Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh sebagian besar bangsa di dunia, terutama oleh negara sedang berkembang. Secara umum penyebab terjadinya kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan yang rendah, kurang perhatian dari pemerintah atas distribusi kekayaan nasional yang tidak merata (*gini ratio*), keterbatasan infrastruktur ekonomi, perubahan iklim yang membatasi atau menurunkan kualitas sumberdaya alam, konflik sosial, dan peperangan. Dari faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berdampak, pada potensi kerawanan sosial di antaranya kriminalitas, dan bahkan pada tingkatan yang ekstrim akan menyebabkan disintegrasi sosial dan konflik komunal. Secara konseptual kemiskinan diposisikan sebagai isu ekonomi dan isu sosial karena kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak salah jika dinyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan hingga saat ini isu kemiskinan masih menjadi agenda penting serta menjadi prioritas pertama tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dilakukan secara terpadu.

SDGs sendiri merupakan keberlanjutan dari Agenda Pembangunan Milenium atau yang kita kenal juga dengan Millenium Development Goals (MDGs). MDGs yang berakhir di tahun 2015, masih menyisakan pekerjaan rumah dengan terdapatnya enam indikator MDGs yang belum dapat mencapai target, salah satunya adalah masalah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama TPB/SDGs dan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dilakukan secara terpadu.





**Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs**

Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target pada Tujuan 1 TPB/SDGs, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak alokasi anggaran yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Tetapi, juga seberapa efektif anggaran tersebut membantu dalam mempercepat target tercapai. Ketepatan lokus, fokus, dan modus menjadi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan ketepatan tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang valid dan mutakhir. Penyusunan kebijakan harus berbasis pada bukti. Pada sisi yang lain, kebijakan yang inklusif penting untuk diutamakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama dampak yang ditinggalkan pasca Pandemic Covid-19 yang lalu.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan umumnya menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need*). BPS melukiskan kemiskinan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan definisi kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan saja, tetapi harus dilihat dari banyak aspek yang saling terkait.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah. Setiap pemerintahan menginginkan tingkat kemiskinan yang rendah dan telah mengupayakannya melalui berbagai program





pengentasan kemiskinan. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi agenda kebijakan penting di Indonesia karena secara moral Pemerintah mengemban tanggungjawab amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang secara eksplisit menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian dari penjabaran tersebut dicetuskanlah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD, dimana RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD diturunkan dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun (Rencana Aksi Tahunan). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK kabupaten/Kota) dibentuk sebagai wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota.

TKPK Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. TKPK Kabupaten/Kota menjalankan fungsi:

1. Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan Kabupaten/Kota,
2. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan,
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan,
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan,





5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan,
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Buton pada tahun 2014. Sejak berdirinya kabupaten ini, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dan salah satu permasalahan yang paling utama hingga saat ini adalah kemiskinan. Tercatat tren kemiskinan sejak tahun 2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan Data BPS, garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan terus meningkat nilainya tiap tahun. Tercatat pada tahun 2023, garis kemiskinan mencapai 290.203 rupiah/perkapita/bulan. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah penduduk miskin tahun 2023 di Kabupaten Buton Selatan yang mengalami sedikit peningkatan yaitu mencapai  $\pm 11.800$  jiwa dengan persentase penduduk miskin 14,76%. Dimana tahun 2022, penduduk miskin sebanyak  $\pm 11.570$  jiwa atau 14,41%. Adapun indeks kedalaman kemiskinan di Kab. Buton Selatan yaitu dari 1,87 di tahun 2021, lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 2,12 dan sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 2,00. Selain itu, kondisi garis kemiskinan juga mengakibatkan kondisi indeks keparahan kemiskinan yang meningkat di tahun 2023 sebesar 0,44.

**Tabel 1.1. Data Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan**

| No. | Indikator                          | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.  | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 11,71   | 11,57   | 11,80   |
| 2.  | Persentase Penduduk Miskin         | 14,62   | 14,41   | 14,76   |
| 3.  | Indeks Keparahan Kemiskinan        | 0,38    | 0,43    | 0,44    |
| 4.  | Indeks Kedalaman Kemiskinan        | 1,87    | 2,12    | 2,00    |
| 5.  | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 253.877 | 264.666 | 290.203 |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2022-2024

Keadaan saat ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan tergolong masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, harus segera diatasi dan sangat perlu dilakukan tindak penanggulangan. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buton





Selatan melalui Balitbang akan segera melaksanakan upaya mitigasi non struktural melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025 – 2029. Dokumen RPKD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan suatu kebijakan untuk terciptanya sinergitas antar *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan, merumuskan ide-ide dan strategi-strategi efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Buton Selatan, serta terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penetapan strategi dan program. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
4. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

1. Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Selatan pada periode tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan selama periode tahun 2025-2029;





3. Sebagai tolok ukur keberhasilan TKPK Kabupaten Buton Selatan dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan target pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Menjadi instrumen dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Menjadi instrumen sinkronisasi kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian sampai dengan evaluasi di tingkat daerah hingga pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara inklusif; dan
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 1.3. Dasar Kebijakan

Penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Buton Selatan tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan;





9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;





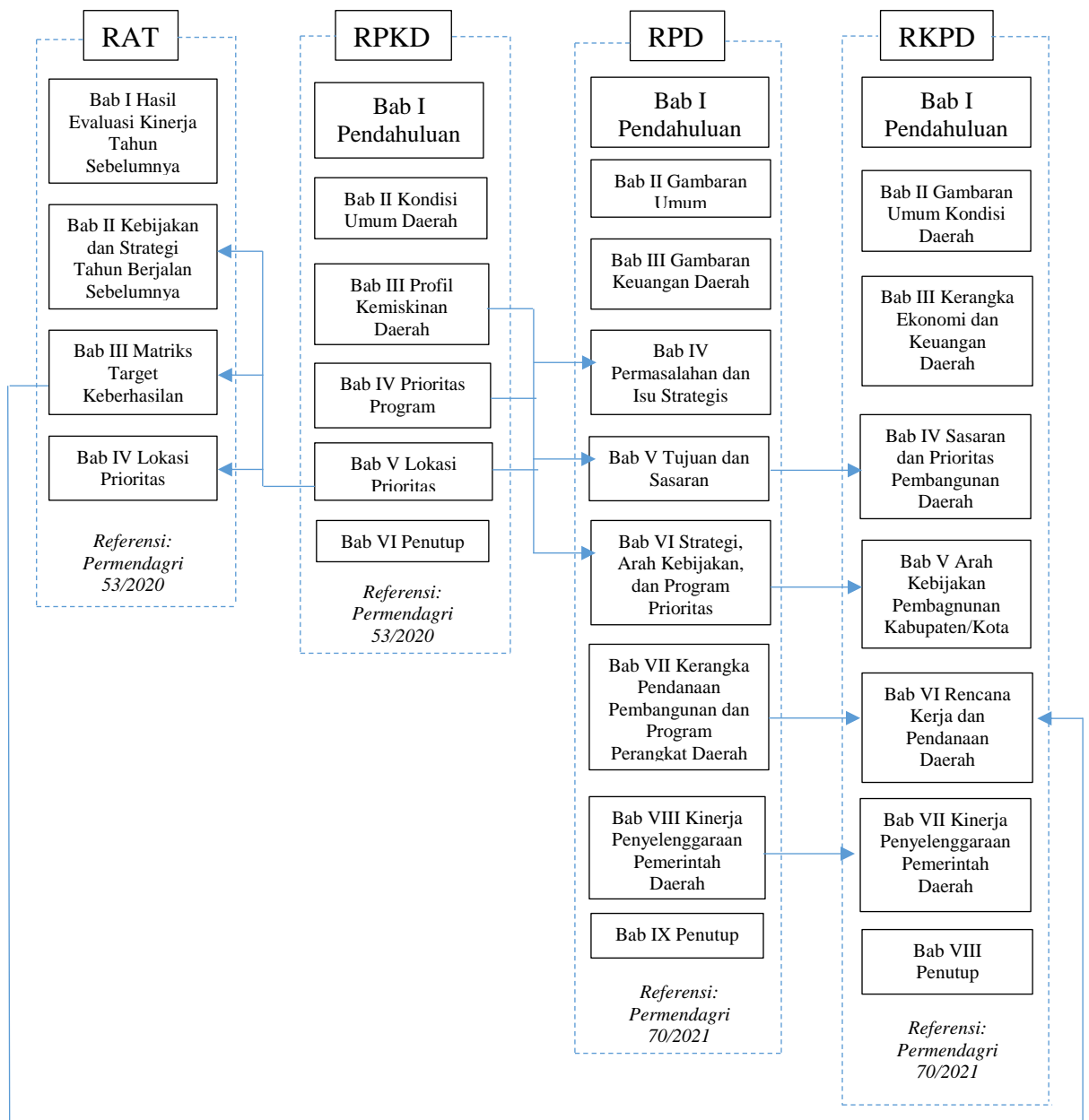
19. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 515 Tahun 2023 tentang Penetapan Data Sasaran Keluarga miskin Ekstrem di Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 518 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Buton Selatan.

#### **1.4. Hubungan Antara Dokumen RPKD dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Dokumen RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program yang merupakan satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 pada Diktum KESATU menjelaskan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen tersebut menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023 hingga 2026. Artinya, pada rentang periode tersebut, RPKD akan menjadi bagian dari RPD di Kabupaten Buton Selatan.





**Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029 memuat:

#### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dari penyusunan dokumen RPKD. Selain itu, pada bab ini juga diulas mengenai hubungan antara dokumen RPKD dan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta sistematika penulisan dokumen.





## Bab II Kondisi Umum Daerah

Menyajikan deskripsi ringkas terkait karakteristik wilayah baik secara geografi, demografi, pemerintahan, sosial budaya dan perekonomian.

## Bab III Profil Kemiskinan Daerah

Menjelaskan hasil analisis karakteristik kemiskinan makro dan mikro di Kabupaten Buton Selatan. Analisis dilakukan dengan melakukan identifikasi posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas intervensi perbaikan, hingga relevansi perkembangan untuk capaian setiap indikator.

## Bab IV Prioritas Program

Pada bagian ini, rekomendasi prioritas program disajikan berdasarkan pada empat jenis analisis yakni analisis akar masalah (determinan) kemiskinan, analisis keterkaitan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta pengembangan logika program. Lebih lanjut pada bab ini juga menganalisis kondisi fiskal, analisis kelembagaan, hingga analisis strategi, arah kebijakan dan program prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan. Keempat analisis tersebut kemudian menghasilkan isu-isu strategis yang mengerucut pada prioritas program yang diperlukan untuk menjawab setiap tantangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan.

## Bab V Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas disajikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Berpijak pada analisis tersebut, kemudian dilakukan analisis kuadran wilayah untuk menentukan lokasi prioritas program.

## Bab VI Penutup

Menyajikan kesimpulan utama dari dokumen RPKD ini.

Rancangan Peraturan Daerah sebagai suplemen memuat arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur serta terpadu agar dapat dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Buton Selatan.





## BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1. Aspek Geografis

#### 2.1.1. Letak dan Batas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis letak wilayah Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton berada dibagian selatan Kabupaten Buton, memanjang dari Utara ke Selatan diantara  $5^{\circ}28'00''$ –  $6^{\circ}42'00''$  Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara  $122^{\circ}16'00''$ – $122^{\circ}50'00''$  Bujur Timur. Wilayah ini meliputi sebagian Pulau Buton dan beberapa pulau di sebelah selatan Pulau Buton.

Secara geografis sebagian daratan Kabupaten Buton Selatan berada di Pulau Buton bagian selatan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang dilingkupi oleh perairan laut lepas dengan relief pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah dan undak-undak pantai hasil pengangkatan serta pesisir dan paparan laut dangkal-menengah-dalam. Keberadaan wilayah kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan





Secara administratif batas-batas Kabupaten Buton Selatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 adalah:

- Sebelah Utara:  
Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kelurahan Labalawa Kecamatan Murhum, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Bugi, Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo (Kabupaten Buton).
- Sebelah Timur:  
Desa Kaongkeongkea, Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Desa Wabula I, Desa Wasuemba Kecamatan Wabula (Kabupaten Buton) dan Laut Flores.
- Sebelah Selatan:  
Laut Flores.
- Sebelah Barat:  
Laut Flores.

### 2.1.2. Luas Wilayah

Berdasarkan Data BPS Buton Selatan Dalam Angka 2024, Kabupaten Buton Selatan memiliki luas kawasan perairan laut sebesar 668,32 km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratan ± 546,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis, sebagian daratannya berada di Pulau Buton dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dilingkupi oleh perairan laut lepas. Wilayah ini memiliki relief pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan undak-undak pantai hasil pengangkatan, serta pesisir dan paparan laut dangkal-menengah-dalam. Wilayah kabupaten Buton Selatan tersebar ke dalam tujuh wilayah kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan**

| No. | Kecamatan          | Ibu Kota Kecamatan | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Persentase Luas Wilayah (%) |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Batauga            | Laompo             | 148,53                          | 27,17                       |
| 2.  | Sampolawa          | Mambulu            | 221,95                          | 40,61                       |
| 3.  | Lapandewa          | Lapandewa          | 89,67                           | 16,41                       |
| 4.  | Kadatua            | Kaofe              | 24,04                           | 4,40                        |
| 5.  | Siompu             | Biwinapada         | 38,62                           | 7,07                        |
| 6.  | Siompu Barat       | Molona             | 14,58                           | 2,67                        |
| 7.  | Batu Atas          | Ujung              | 9,19                            | 1,68                        |
|     | Total Luas Wilayah |                    | 546,58                          | 100                         |

Sumber: BPS, Buton Selatan Dalam Angka, 2024





### 2.1.3. Kondisi Geografis

Secara geologis, Kabupaten Buton Selatan berada pada ketinggian 0-800 m di atas permukaan air laut, dengan sudut lereng 0 – 8 %, 8 - 15 % dan 15 - 25 % serta 25 - 45 %. Kondisi topografi tanah di Kabupaten Buton Selatan umumnya bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Kondisi geologi dan tata lingkungan di Kabupaten Buton Selatan memberikan gambaran tentang satuan geomorfologi. Adapun satuan geomorfologinya dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Satuan Geomorfologi perbukitan lipatan patahan;
- 2) Satuan Geomorfologi Perbukitan lipatan;
- 3) Satuan Geomorfologi Perbukitan undak-undak terumbu karang; dan
- 4) Satuan Geomorfologi dataran rendah pantai.

Keempat satuan geomorfologi tersebut di atas dikendalikan oleh faktor litostratigrafi (susunan batuan) dan struktur geologi perlipatan dan patahan. Hasil pelapukan beberapa jenis litostratigrafi di wilayah Kabupaten Buton Selatan akan berubah menjadi tanah yang terdiri dari:

- 1) Tanah Kambisols tanpa menunjukkan adanya gejala hidromorfik;
- 2) Tanah Litosols yang dicirikan oleh lapisannya yang sangat dangkal;
- 3) Tanah Aluvium yang berlambang dari endapan sungai (Fluviatil) dengan solum yang cukup dalam dengan drainase buruk;
- 4) Tanah Organosol yang berasal dari bahan organik dengan kadar gambut 150-200 cm;
- 5) Tanah Gleisols yang selalu jenuh air dengan kondisi tanah yang belum matang; dan
- 6) Tanah Podolik yaitu tanah yang berasal dari bahan induk batu lempung yang kaya K-Na Feldspar.

Keberadaan struktur geologis (patahan dan pelipatan) mengontrol keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Selatan memiliki sungai besar yang berada di Kecamatan Sampolawa yang memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, irigasi, dan kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan genetika aliran sungainya, maka sungai-sungai utama dan anak-anak sungai di Kabupaten Buton Selatan dapat di kelompokkan menjadi:





- 1) Sungai Konsekuen dimana aliran sungai searah dengan arah kemiringan lapisan sedimen yang mengarah ke arah Barat Laut untuk sayap *antiwin* sebelah Barat Laut dan mengalir searah kemiringan lapisan ke arah Tenggara dari Sayap *Antiklim* Tenggara, dan
- 2) Sungai Subsekmen dimana sungai – sungainya mengalir searah dengan arah jalur/*strike* perlapisan yang ke arah Timur Laut - Barat Daya.
  - i. Sedangkan pola aliran sungai yang dimiliki oleh banyak sungai di Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut:
- 3) Pola aliran dendritic/mendanau: menunjukkan bahwa sifat fisik pada DAS relatif homogen, terdapat di Sungai Wondoke;
- 4) Pola aliran radial dan sentripetal: mengikuti puncak topografi yang relatif melingkar, mengikuti pola Punggung Baratnya Buton Selatan, terdapat di kepulauan;
- 5) Pola aliran trellis dan rektangular: dikendalikan oleh pola struktur sesar atau patahan serta perlipatan yang berarah Timur Laut – Barat Daya; dan
- 6) Pola aliran paralel: terdapat di sungai DAS Sampolawa dan Batauga.

#### **2.1.4. Iklim**

Secara umum iklim Kabupaten Buton Selatan terdiri atas musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei – Oktober yang terbawa oleh Angin Timur yang kering dan bertiup dari daratan Benua Australia. Musim hujan terjadi antara bulan November – Maret yang terbawa oleh Angin Barat yang mengandung uap air dan tertiup dari Benua Asia ke Samudra Pasifik. Khusus bulan April dan sebagian Mei arah angin di daerah Kabupaten Buton Selatan tidak menentu, demikian juga dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba. Curah hujan terendah terdapat di seluruh wilayah yaitu 497.00/mm/tahun dan maksimum sebesar 2.644 mm/tahun, dengan hari hujan 58-305 hari/tahun. Sedangkan suhu udara berkisar antara 22,7<sup>0</sup>C (minimum) dan 34<sup>0</sup>C (Maksimum), yang berdasarkan klasifikasi Schmidt Ferguson (1951) maka Kabupaten Buton Selatan termasuk tipe D.

#### **2.1.5. Oceanografi**

Dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton Selatan memiliki perairan laut yang luas dan sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan wisata





bahari. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton Selatan antara lain: Cakalang, Teri, Layang, Gembung, Udang, dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara, dan lainnya yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini.

Kegiatan perikanan dan pengembangan pariwisata merupakan isu-isu strategis di Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan perikanan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, yang didukung oleh perairan laut yang masih terjaga. Untuk hasil produksi perikanan tertinggi di Kabupaten Buton Selatan yaitu hasil perikanan tangkap. Pengembangan hasil perikanan tangkap dapat didukung dengan alat tangkap dan sarana tangkap yang lengkap. Sehingga untuk prospek ke depannya diharapkan pengembangan kawasan perikanan lebih dikembangkan lagi, dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimiliki sehingga hasil produksi perikanan dapat meningkat.

#### 2.1.6. Penggunaan Lahan

Kondisi kawasan Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 didominasi oleh hutan rimba dan semak belukar/alang-alang. Dari seluruh total lahan yang ada, terdapat sekitar 49,95% berupa hutan rimba dan 31,90% berupa semak belukar/alang-alang. Penggunaan lahan terluas selanjutnya adalah tanah kosong/gundul seluas 8,42%. Tempat permukiman dan kegiatan penduduk hanya mencakup 0,79% dari total wilayahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan lahan untuk pembangunan wilayah Kabupaten Buton Selatan masih cukup besar. Penggunaan lahan di Kabupaten Buton Selatan secara rinci adalah sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.2. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan**

| No. | Penggunaan Lahan               | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | Air Tawar                      | 0,36      | 0,001          |
| 2.  | Air Tawar Sungai               | 71,95     | 0,132          |
| 3.  | Dermaga Laut                   | 4,80      | 0,009          |
| 4.  | Hutan Rimba                    | 27.302,23 | 49,95          |
| 5.  | Pasir/Bukit Pasir Darat        | 23,04     | 0,009          |
| 6.  | Pasir/Bukit Pasir Laut         | 4,91      | 0,009          |
| 7.  | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 433,29    | 0,793          |
| 8.  | Perairan Asin                  | 0,11      | 0,00002        |
| 9.  | Perkebunan/Kebun               | 3.244,87  | 5,94           |
| 10. | Semak Belukar/Alang-Alang      | 17.436,53 | 31,90          |





|     |                           |               |            |
|-----|---------------------------|---------------|------------|
| 11. | Tanah Kosong/Gundul       | 1.316,20      | 8,42       |
| 12. | Vegetasi Budidaya Lainnya | 218,89        | 0,40       |
|     | <b>Total Lahan</b>        | <b>54.659</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020

### 2.1.7. Arahan Tata Ruang

Pembagian kawasan wilayah Kabupaten Buton Selatan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 terdiri atas:

- 1) Kawasan Peruntukan Lindung, terbagi atas:
  - a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 6.529 Ha yang tersebar di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, dan Kecamatan Lapandewa.
  - b) Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 451 Ha, terdiri atas:
    - i. Kawasan sempadan pantai, terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Siompu Barat yang ditetapkan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
    - ii. Kawasan sempadan sungai, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wurugana, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangana, DAS Baubau, DAS Kadatua dan DAS Siompu yang tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Batu Atas.
  - c) Kawasan konservasi, yaitu terdiri atas:
    - i. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Suaka Pulau Kecil Kawi-Kawia di Kecamatan Batu Atas seluas kurang lebih 47 Ha; dan
    - ii. Kawasan lindung geologi seluas kurang lebih 73 Ha, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air tersebar di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan





Siompu dan Kecamatan Siompu Barat dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air.

- 2) Kawasan Peruntukan Budidaya, terdiri atas:
  - a) Kawasan hutan produksi, seluas kurang lebih 16.ha, terbagi atas:
    - i. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga; dan
    - ii. Kawasan hutan produksi tetap, terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga.
  - b) Kawasan perkebunan rakyat, seluas kurang lebih 1.688 Ha terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa.
  - c) Kawasan pertanian seluas kurang lebih 17.505 Ha, terdiri atas:
    - i. Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa. Pada kawasan tanaman pangan terdapat penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu seluas kurang lebih 282 Ha di Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa;
    - ii. Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Lapandewa;
    - iii. Kawasan perkebunan, terdapat di Kecamatan Kadatua, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Batu Atas.
  - d) Kawasan pertambangan dan energi, seluas kurang lebih 2.382 Ha, berupa potensi pertambangan meliputi:
    - i. WUP Batubara di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Batauga;
    - ii. WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Batauga; dan
    - iii. WUP Mineral Logam di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Batauga.
  - e) Kawasan peruntukan industri, seluas kurang lebih 89 Ha yang berada di Kecamatan Sampolawa.





- f) Kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 321 Ha berada di Kecamatan Batauga, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Sampolawa, dan Kecamatan Siompu.
- g) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 6.389 Ha, terdiri atas:
  - i. Kawasan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, dan Kecamatan Siompu; dan
  - ii. Kawasan permukiman perdesaan tersebar di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Sesuai dengan isu strategis penataan ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2040 disebutkan bahwa potensi pengembangan sistem perkotaan secara berhierarki dan bersinergi, sebagai berikut:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Batauga, merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Mambulu Kecamatan Sampolawa dan Biwinapada Kecamatan Siompu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdapat di Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kaofe Kecamatan Kadatua, Molona Kecamatan Siompu Barat dan Ujung Kecamatan Batu Atas merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan sistem transportasi, dapat mengembangkan kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem transportasi sampai ke pusat produksi perikanan, pertanian dan pelayanan pariwisata;
- 2) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi Tsunami serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, industri perikanan megapolitan dan pariwisata;
- 3) Mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih;
- 4) Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- 5) Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.





### **2.1.8. Pariwisata**

Pengembangan kegiatan wisata juga diperlukan di Kabupaten Buton Selatan dengan banyaknya tempat wisata berupa wisata alam bahari, wisata alam pegunungan, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan. Rencana pengembangan daya tarik wisata yang ada diharapkan sesuai dengan potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di Kabupaten Buton Selatan.

### **2.1.9. Kebencanaan**

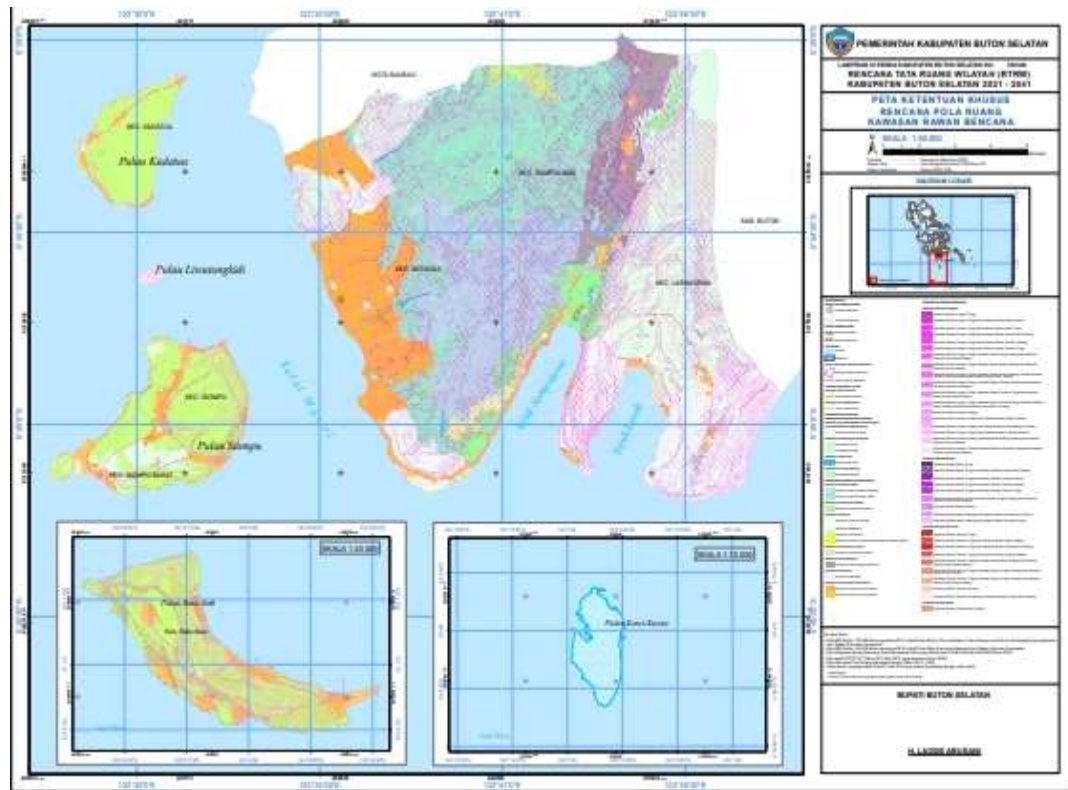
Berdasarkan tatanan susunan litostatigrafi dan pola struktur geologi, serta kondisi tipografi dan satuan geomorfologi, maka hal-hal yang perlu diantisipasi sesuai kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJP Kabupaten Buton Selatan 2025-2045 adalah:

- 1) Terdapatnya bidang lemah;
- 2) Terdapatnya medium pergerakan tanah dan batuan; dan
- 3) Adanya medium rambas pergerakan gelombang gempa.

Hal ini di tambah dengan adanya pusat gempa yang dapat terdeteksi seperti yang termuat dalam peta Seismo Tektonik Indonesia (Pusat Survei Geologi Indonesia, 2014) sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur Pantai Kecamatan Wabula (Kabupaten Buton) yang berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa (Kabupaten Buton Selatan) dengan kedalaman pusat gempa yang berada di laut diatas 150 Km dengan kekuatan gempa di atas 6 SR;
- 2) Pulau Batu Atas sebelah Barat yang pusat gempunya terdapat di laut dengan kedalaman di atas 150 Km dan kekuatan gempa antara 5 – 6 SR; dan
- 3) Pusat gempa yang terletak di antara Pulau Kadatua, tepatnya di Teluk Lasongko dengan kedalaman di atas 150 Km, dan kekuatan gempunya di antara 5 – 6 SR;
- 4) Bencana Gempa juga pernah terjadi dengan kekuatan gempa sekitar 5-6 SR terjadi di kedalaman 20 Km di kecamatan Batauga.





**Gambar 2.2. Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kabupaten Buton Selatan perlu mewaspadai berbagai bencana yang dapat timbul sebagai berikut:

- 1) Bencana Geologi dari dalam (indogen) atau *Geological Hazard* yang terdiri atas:
  - a) Gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami jika dikatul dengan dislokasi atau pematahan di dasar laut, serta gerakan tanah pada patahan dan lereng terjal di daratan; dan
  - b) Longsor dan amblesan (*land subsidence*).
- 2) Bencana alam dari luar (eksogen) yang terdiri atas:
  - a) Curah hujan yang sangat tinggi dan pasang yang juga sangat tinggi dapat mengakibatkan bahaya banjir;
  - b) Kebakaran hutan, pada saat terjadi angin kencang dapat memicu terjadinya kebakaran serta rebasan aspal yang ada di wilayah ini; dan
  - c) Wabah penyakit sebagai akibat dari bencana tersebut di atas.

Sedangkan berdasarkan data Indonesia Resiko (*InaRISK*) multi ancaman pada Kabupaten Buton Selatan yang ditampilkan oleh BNPB dari tahun 2015 hingga tahun 2022 bahwa kondisinya cenderung menurun. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 risiko bencana cenderung stagnan pada skor 164,40, selanjutnya tahun 2019



mengalami penurunan dengan skor 155,93 dan stagnan hingga tahun 2020 serta pada tahun 2021 meningkatkan dengan skor 158,47 selanjutnya stagnan hingga tahun 2022. Data InaRISK BNPB Kabupaten Buton Selatan terhadap indeks risiko bencana multi ancaman pada tahun 2022 dalam kategori tinggi dengan skor 158,47 ditopang oleh:

- 1) Risiko Bencana Tsunami dengan skor 24,00;
- 2) Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan skor 36,00;
- 3) Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi dengan skor 36,00;
- 4) Risiko Bencana Kekeringan dengan skor 24,00; dan
- 5) Risiko Bencana Cuaca Ekstrem dengan skor 13,60.

Sedangkan risiko bencana dengan kategori sedang yaitu:

- 1) Risiko Bencana Banjir,
- 2) Risiko Bencana Gempa Bumi, serta
- 3) Risiko Bencana Tanah Longsor.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Buton Selatan adalah:

- 1) Rawan Tanah Longsor

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan tanah longsor, meliputi: Kecamatan Batauga, Kecamatan sampolawa, yaitu desa Jayabakti, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Siompu Barat serta Kecamatan Lapandewa.

- 2) Rawan Gempa Bumi

Kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan termasuk ke dalam Sesar Besar (Mayor) dan Sesar Kecil (minor).

- 3) Rawan Tsunami

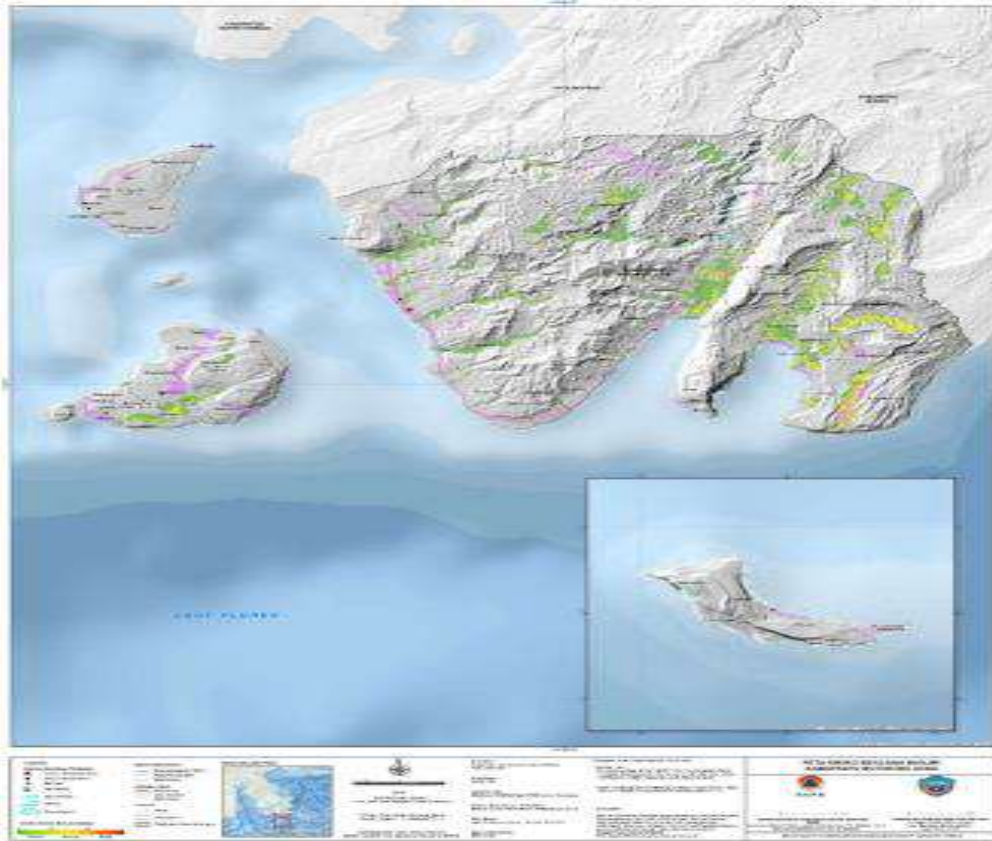
Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan gelombang pasang meliputi seluruh pesisir di Kabupaten Buton Selatan.

- 4) Rawan Banjir

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa.

Berikut ini disajikan gambar peta sebaran risiko bencana di Kabupaten Buton Selatan yang dioalah dari berbagai sumber:

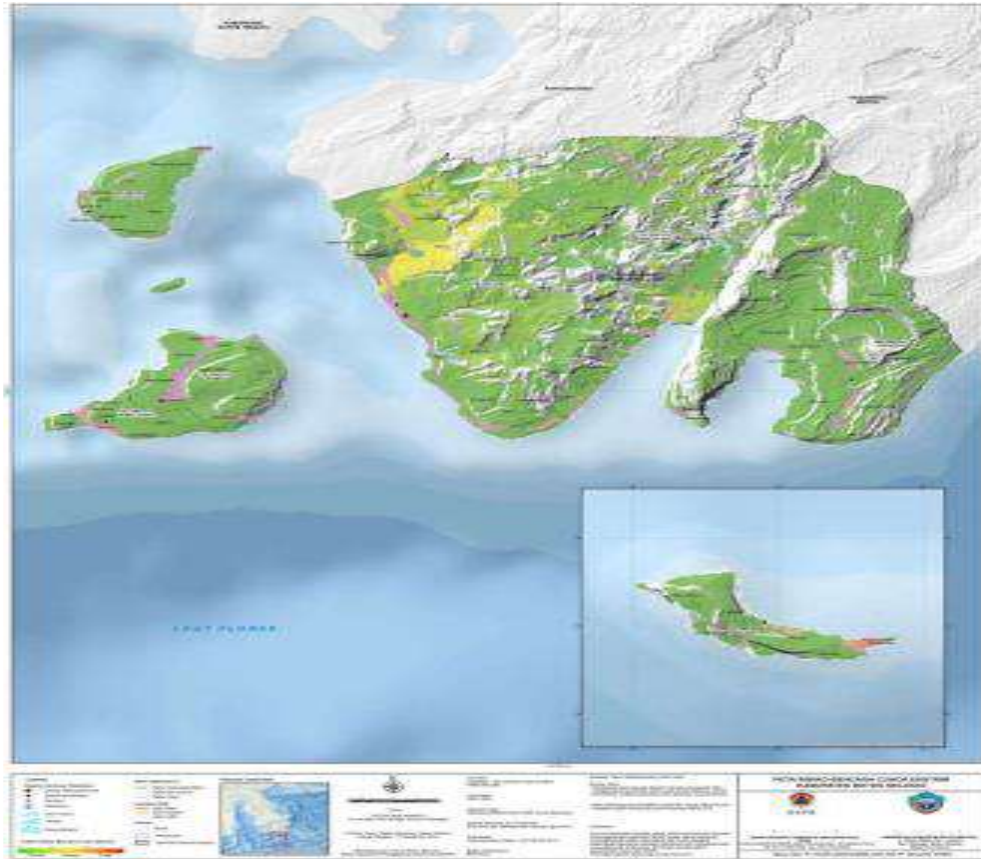




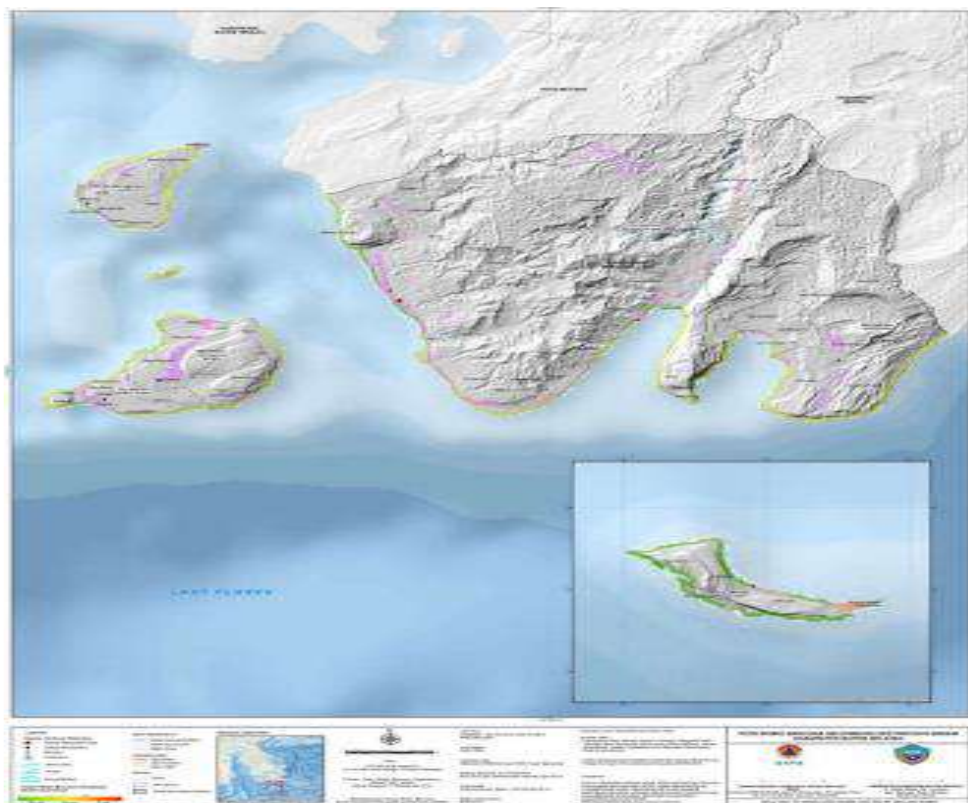
**Gambar 2.3. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Buton Selatan**



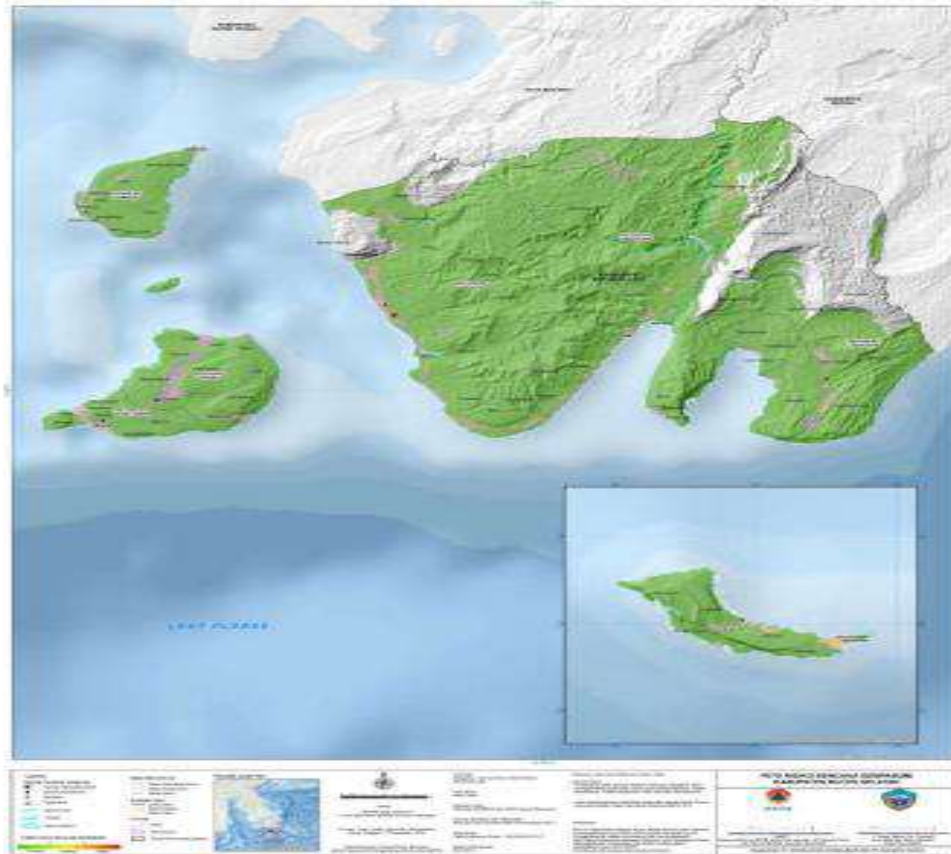
**Gambar 2.4. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Buton Selatan**



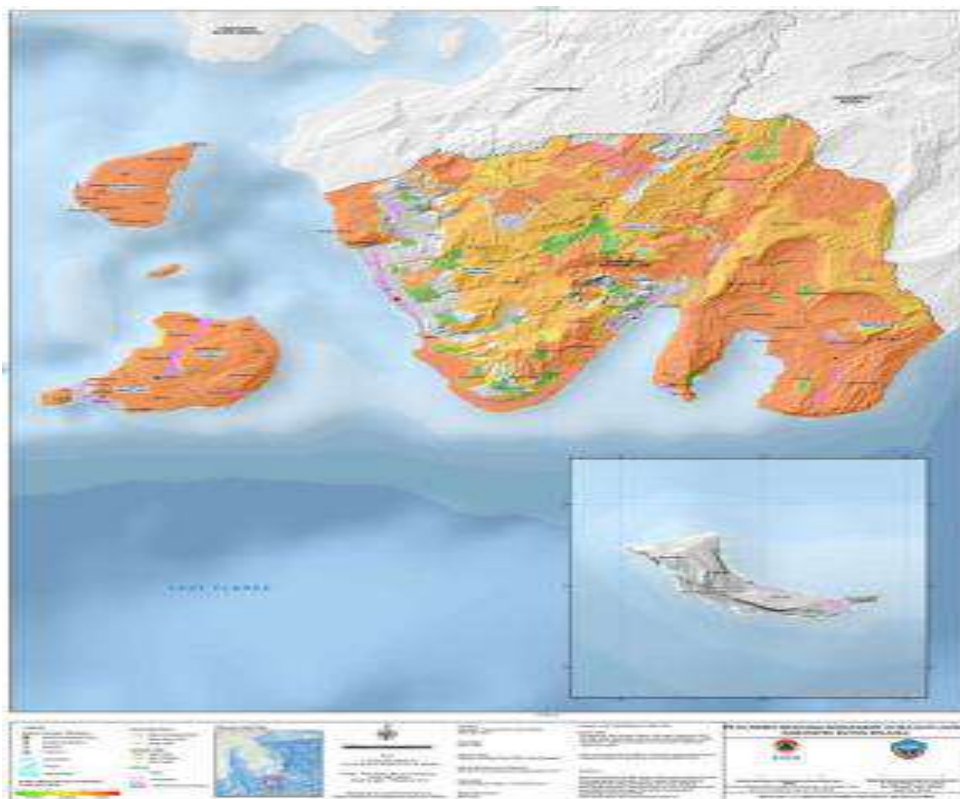
**Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Buton Selatan**



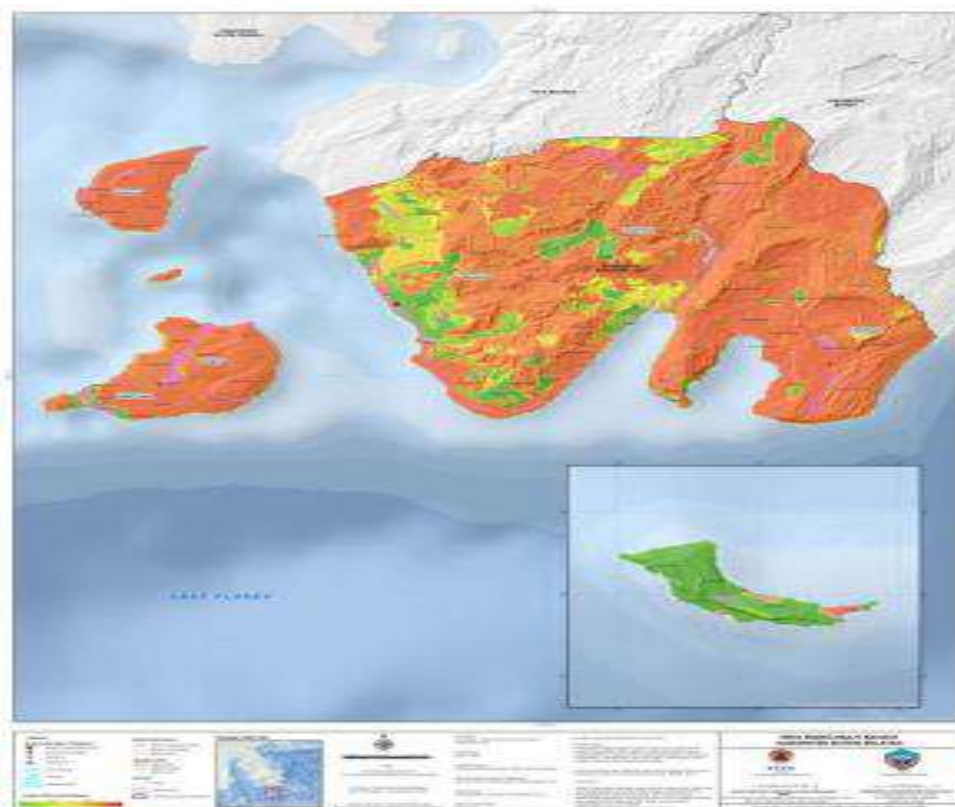
**Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Buton Selatan**



**Gambar 2.12. Peta Multi Risiko Bencana di Kabupaten Buton Selatan**



## 2.2. Aspek Demografi

### 2.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kondisi demografi menunjukkan jumlah penduduk yang berubah pada tiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun wilayah. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 tercatat sebanyak 101.635 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28%, kepadatan penduduk 185,95 jiwa/Km<sup>2</sup> dan rasio sex yaitu 98,77. Selanjutnya jika dilihat dari kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Batu Atas yaitu 1.395,10 jiwa/Km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Sampolawa yaitu 113,76 jiwa/Km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lapandewa yaitu 1,44% dan terendah adalah Kecamatan Batauga yaitu 0,14%.

Berdasarkan Data Buton Selatan dalam angka tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten Buton Selatan adalah sebanyak 101.580 jiwa, atau tumbuh sebesar 1,28 persen terhadap jumlah penduduk tahun sebelumnya.

**Tabel 2.3. Data Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan Tahun 2023**

| Kecamatan    | Total Penduduk (ribu jiwa) | Rasio Jenis Kelamin | Persentase Penduduk (%) | Laju Pertumbuhan 2022-2023 (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Batu Atas    | 12.821                     | 97,09               | 12,61                   | 1,44                           | 1.395,10                                   |
| Lapandewa    | 10.377                     | 99,40               | 10,21                   | 2,00                           | 115,72                                     |
| Sampolawa    | 25.249                     | 99,42               | 24,84                   | 1,41                           | 113,76                                     |
| Batauga      | 18.821                     | 98,18               | 18,52                   | 0,14                           | 126,72                                     |
| Siompu Barat | 11.915                     | 102,38              | 11,72                   | 1,85                           | 817,22                                     |
| Siompu       | 11.736                     | 100,55              | 11,55                   | 1,66                           | 303,88                                     |

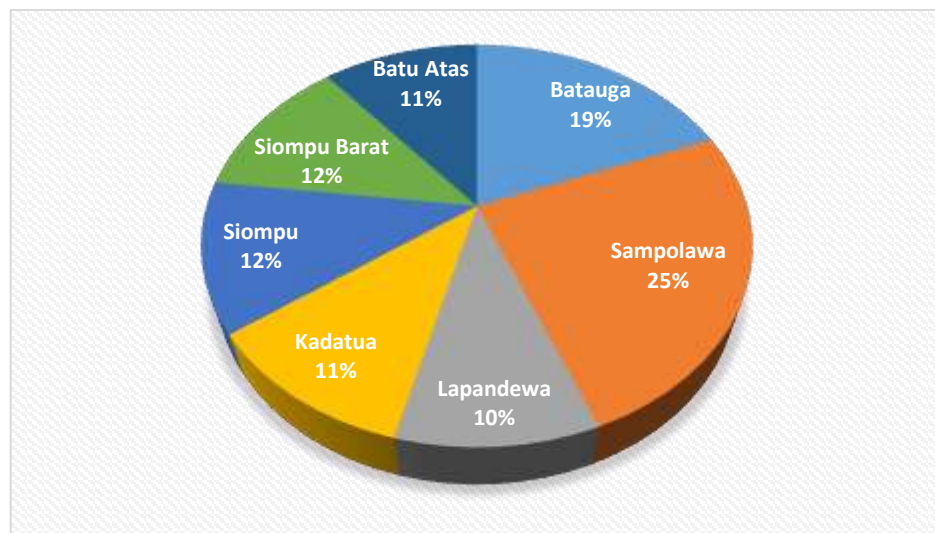




|                      |                |              |            |             |               |
|----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| Kadatua              | 10.716         | 93,99        | 10,54      | 1,08        | 445,76        |
| <b>Buton Selatan</b> | <b>101.635</b> | <b>98,77</b> | <b>100</b> | <b>1,28</b> | <b>185,95</b> |

Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2024

Dilihat dari pola persebaran penduduknya, pada tahun 2023 sebagian besar penduduk atau sebesar 25.249 Jiwa (24,84 persen) penduduk Kabupaten Buton Selatan menetap di Kecamatan Sampolawa dan persebaran terkecil, dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kadatua yaitu sebesar 10.716 Jiwa (10,54 persen). Namun, jika ditinjau dari kepadatan penduduk, Kecamatan Batuatas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 1.395,10 penduduk per kilometer persegi.

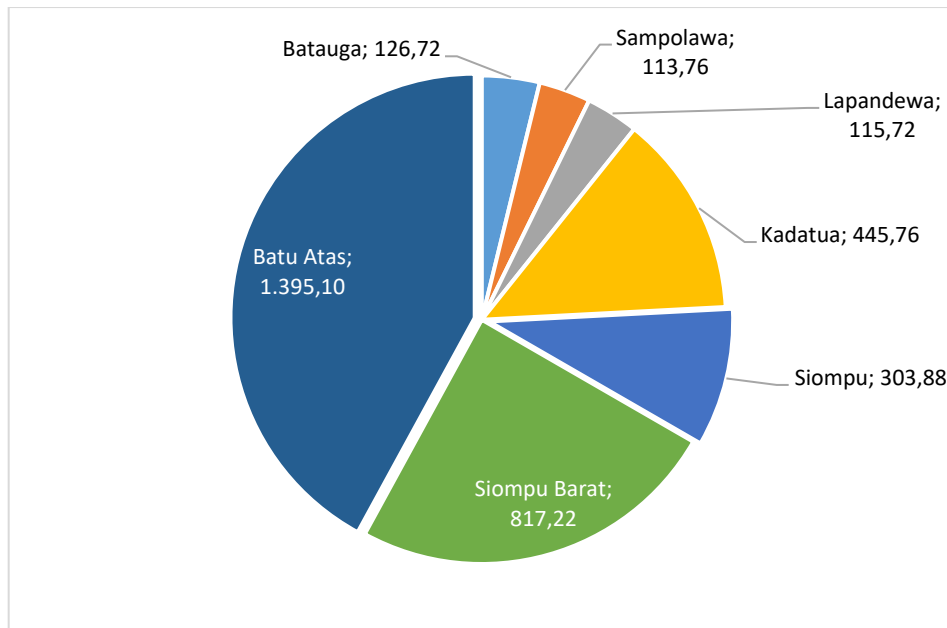


Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2024, Diolah.

**Gambar 2.13. Persentase Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

Sedangkan untuk kepadatan penduduk terkecil adalah kecamatan Sampolawa yaitu sebanyak 113,76 penduduk per kilometer persegi. Secara keseluruhan jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan adalah sebanyak 185,95 penduduk per kilometer persegi.

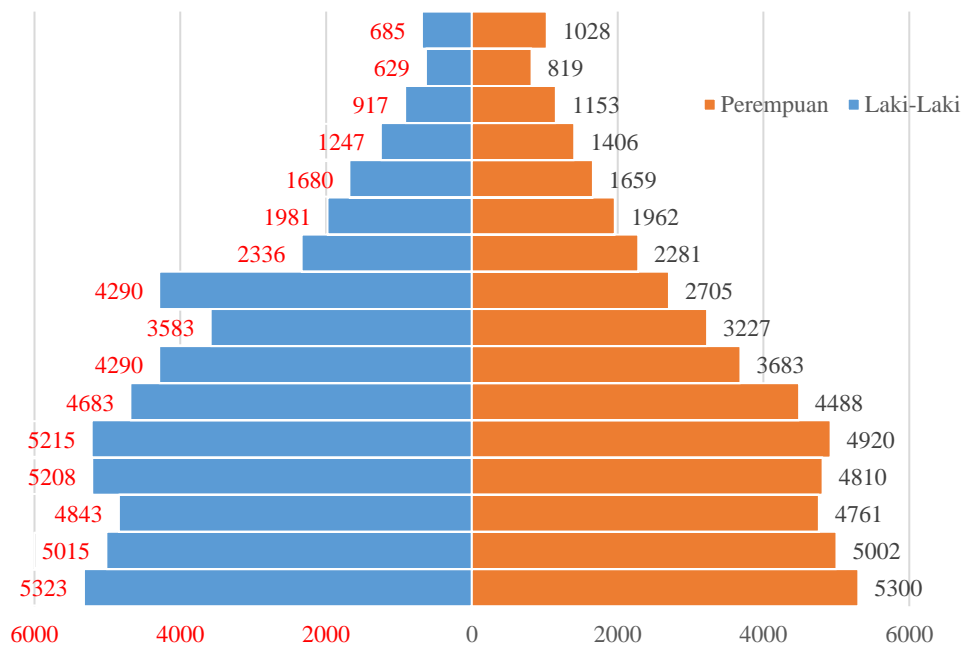




Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2024, Diolah.

**Gambar 2.14. Kepadatan Penduduk ( jiwa/km<sup>2</sup>) per Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

### 2.2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur



Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2024. (Data diolah)

**Gambar 2.15. Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Buton Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

Penduduk Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 64.104 Jiwa atau 64,38%.





Selanjutnya usia 0-14 Tahun sebanyak 30.244 Jiwa atau 30,37% dan usia >65 Tahun sebanyak 5.231 Jiwa atau 5,25%.

Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Buton Selatan, menggambarkan sebagian besar penduduk berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda ini merupakan potensi yang perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

### 2.2.3. Proyeksi Penduduk Tahun 2025 – 2030

Proyeksi penduduk memiliki berbagai manfaat, seperti sebagai perencanaan pembangunan pada tingkat lokal maupun nasional, pemenuhan kebutuhan air bersih, penyediaan infrastruktur dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan rencana di masa yang akan datang (Badan Pusat Statistik Jakarta-Indonesia, 2010). Oleh karena itu, perhitungan proyeksi penduduk diperlukan untuk mengetahui berapa banyak sampah yang akan dihasilkan di masa depan. Beberapa metode, termasuk metode komponen dan matematik, dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk yang akan datang.

Pada penulisan ini, proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan metode matematik yang merupakan estimasi dari populasi secara keseluruhan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan populasi secara matematik. Metode ini terdiri dari tiga model, yaitu: metode aritmatik, metode geometrik dan metode eksponensial (BPS Jakarta-Indonesia, 2010).

#### 1) Metode Aritmatik

Metode aritmatik dalam memproyeksikan penduduk mengasumsikan bahwa jumlah penduduk di masa depan akan bertambah dengan jumlah yang konstan setiap tahunnya. Berikut formula perhitungan yang dapat digunakan:

$$Pt = Po (1 + rt)$$

#### 2) Metode Geometrik

Metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara pesat dari waktu ke waktu. Pada metode ini, laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama setiap tahunnya. Berikut formula yang dapat digunakan:

$$Pt = Po (1 + r)^t$$





### 3) Metode Eksponensial

Metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi sedikit demi sedikit setiap tahunnya (Adioetomo dan Samosir, 2010).

Berikut formula yang dapat digunakan:

$$Pt = Po . e^{rt} \quad \text{dimana} \quad r = \frac{1}{t} \ln \left( \frac{Pt}{Po} \right)$$

Keterangan:

Pt = Jumlah penduduk pada tahun t

Po= Jumlah penduduk pada tahun dasar: laju pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

e = Bilangan pokok dari sistem logaritma natural (ln) yang nilainya adalah 2.7182818

Data jumlah penduduk tahun 2023 hasil perhitungan BPS dalam Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2024 dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk tahun-tahun ke depannya. Berikut adalah data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan periode 2023-2030 menggunakan metode perhitungan aritmatik, geometrik dan eksponensial.

**Tabel 2.4. Data Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Periode 2023-2030**

| Tahun | Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa) |         |         |
|-------|---------------------------------|---------|---------|
|       | I                               | II      | III     |
| 2023  | 101.635                         | 101.635 | 101.635 |
| 2024  | 102.936                         | 101.765 | 102.936 |
| 2025  | 104.237                         | 101.895 | 102.283 |
| 2026  | 105.538                         | 102.026 | 102.067 |
| 2027  | 106.839                         | 102.156 | 101.959 |
| 2028  | 108.140                         | 102.287 | 101.894 |
| 2029  | 109.441                         | 102.418 | 101.851 |
| 2030  | 110.741                         | 103.339 | 101.820 |

Sumber: Hasil Analisa, 2024





**Gambar 2.16. Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-2030**

#### 2.2.4. Jumlah Rumah Tangga

Bersumber dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-4 Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan dengan status kesejahteraan 40 persen terbawah sebanyak 8.525 rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 45.189 anggota rumah tangga. Adapun jumlah penduduk rumah tangga dalam kondisi 10 persen terendah (desil 1) atau sangat miskin sebanyak 13.873 jiwa dengan 2.240 rumah tangga. Sedangkan jumlah penduduk dengan kondisi 10-20% terendah (desil 2) atau miskin yaitu sebanyak 13.523 jiwa dengan 2.482 rumah tangga. Rumah tangga dalam kondisi 20-30% terendah (desil 3) atau status hampir miskin yaitu sebanyak 2.155 rumah tangga dengan 10.483 jiwa.

Adapun rumah tangga dalam kondisi 30-40% terendah (desil 4) atau rentan miskin sebanyak 1.648 rumah tangga atau 7.310 jiwa. Sementara rumah tangga dalam kondisi mampu hingga sangat mampu di Kabupaten Buton Selatan atau masuk dalam kategori Desil 4+ yaitu sebanyak 55,54 persen atau 56.446 jiwa dari total anggota rumah tangga. Berikut ini jumlah rumah tangga dan anggota rumah tangga dijelaskan pada Tabel 2.5.





**Tabel 2.5. Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Desil 1-4 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023**

| Kecamatan  | Jumlah Rumah Tangga |              |              |              | Jumlah (jiwa) |               |               |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | Desil 1             | Desil 2      | Desil 3      | Desil 4      | Desil 1       | Desil 2       | Desil 3       | Desil 4      |
| Batauga  | 182                 | 378          | 348          | 323          | 1.166         | 2.165         | 1.722         | 1.673        |
| Sampolawa  | 521                 | 720          | 561          | 399          | 3.235         | 3.939         | 2.873         | 1.856        |
| Lapandewa  | 55                  | 188          | 202          | 184          | 385           | 1.090         | 1.124         | 940          |
| Batu Atas  | 791                 | 330          | 284          | 203          | 4.770         | 1.543         | 872           | 422          |
| Siompu Barat   | 238                 | 302          | 229          | 169          | 1.540         | 1.766         | 1.292         | 787          |
| Siompu   | 67                  | 234          | 247          | 167          | 526           | 1.357         | 1.394         | 834          |
| Kadatua  | 386                 | 330          | 284          | 203          | 2.251         | 1.663         | 1.206         | 798          |
| <b>Total</b>   | <b>2.240</b>        | <b>2.482</b> | <b>2.155</b> | <b>1.648</b> | <b>13.873</b> | <b>13.523</b> | <b>10.483</b> | <b>7.310</b> |
| <b>Total jumlah rumah tangga Desil 1-4 adalah sebanyak 8.525 rumah tangga.</b> |                     |              |              |              |               |               |               |              |
| <b>Total jumlah individu Desil 1-4 adalah sebanyak 45.189 individu</b>         |                     |              |              |              |               |               |               |              |
| <b>Total jumlah individu masuk Desil 4+ adalah sebanyak 56.446 individu.</b>   |                     |              |              |              |               |               |               |              |

*Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Buton Selatan Desil 1-4 Tahun 2023, Diolah 2024.*

## 2.3. Aspek Perekonomian

### 2.3.1. Pertumbuhan PDRB

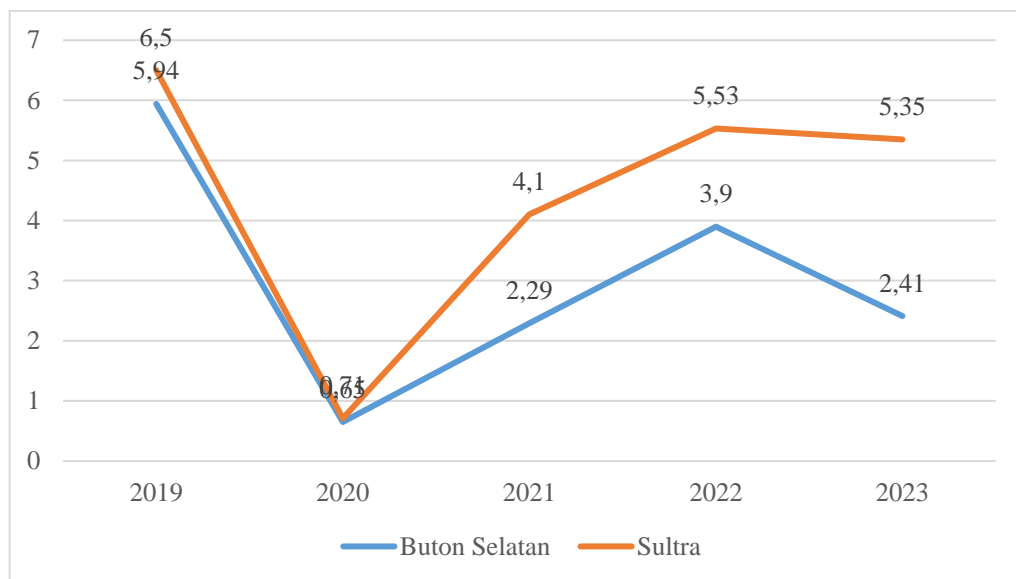
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Secara umum, kondisi makro ekonomi kabupaten Buton Selatan mengalami fluktuasi yang menunjukkan dinamisasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara umum fluktuatif. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 sebesar 5,94% berada di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 6,50%. Selanjutnya, pada tahun 2020, angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan menurun secara signifikan menjadi -0,71%, berada di bawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu -0,65%. Pada tahun





2021, angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik menjadi 2,29%, namun masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 4,10%. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik menjadi 3,90%, tetapi tetap di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 5,53%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan turun menjadi 2,41%, masih berada di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 5,35%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan disajikan pada grafik berikut:



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

**Gambar 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023**

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor komunikasi dan informasi sebesar 8,82%, jasa lainnya sebesar 7,45%, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 7,02%. Peningkatan lapangan usaha informasi dan komunikasi disebabkan oleh peningkatan pelanggan untuk usaha penjualan pulsa telepon dan internet di Buton Selatan selama tahun 2023.

**Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023**

| No | Lapangan Usaha                      | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |
|----|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,46 | 5,34  | 2,96  | 8,57  | 7,02   |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian         | 0,14 | -9,87 | -3,53 | -0,52 | -2,68  |
| 3. | Industri Pengolahan                 | 3,26 | -2,7  | 2,3   | 7,12  | -19,92 |





|     |   |             |              |             |            |             |
|-----|---|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 4.  | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 5,95        | 1,29         | 8,93        | 7,66       | 5,85        |
| 5.  | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur             | 2,79        | 3,75         | 0,13        | -0,8       | 5,59        |
| 6.  | Konstruksi  | 8,54        | -0,69        | 9,42        | -1,31      | 1,39        |
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda         | 8,56        | -5,15        | 6,56        | 6,05       | 4,59        |
| 8.  | Transportasi dan Pergudangan                                    | 7,61        | -1,59        | -0,07       | 1,52       | 0,48        |
| 9.  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 7,69        | -3,8         | 0,54        | 7,69       | 4,15        |
| 10. | Informasi dan Komunikasi  | 7,69        | 7,27         | 3,74        | 9,4        | 8,82        |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 5,09        | 1,9          | 2,14        | 5,4        | 4,26        |
| 12. | Real Estat  | 2,11        | 0,91         | 3,22        | 4,15       | -2,3        |
| 13. | Jasa Perusahaan   | 4,6         | -2,34        | 0,55        | 8,53       | 4,49        |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 7,14        | -0,32        | -0,03       | -0,07      | 6,14        |
| 15. | Jasa Pendidikan   | 6,34        | 6,73         | 3,32        | 6,46       | 6,64        |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 7,39        | 9,83         | 0,79        | 4,8        | 0,79        |
| 17. | Jasa Lainnya  | 3,29        | -0,23        | 0,72        | 6,5        | 7,45        |
|     | <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>                           | <b>4,87</b> | <b>-1,39</b> | <b>2,29</b> | <b>3,9</b> | <b>2,41</b> |

Sumber: BPS, Buton Selatan Dalam Angka, 2024

### 2.3.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bergantung dari tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang berasal bantuan pemerintah pusat dan atau setingkat di atasnya bagi pemerintah tingkat Kabupaten dan Kota.

Pendapatan daerah merujuk pada dana atau sumber keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja langsung, belanja tidak langsung, serta belanja per urusan dan belanja per fungsi. Pada kasus lain, belanja daerah





dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah (yang dipisahkan), dan sumber lain yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer dapat berupa Dana Perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil dengan pemerintah pusat dan provinsi (dari Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan yang sah dapat bersumber dari hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi daerah, dana bagi hasil pajak dana dari bantuan pemerintah kabupaten lain (bila ada), dan sumber lain yang sah.

PAD di Kabupaten Buton Selatan diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah (yang dipisahkan), dan sumber lain yang sah. Dana Perimbangan di Kabupaten Buton Selatan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak Dari Sumber Daya Alam) dengan pemerintah pusat dan provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dari sumber lain-lain dapat bersumber dari hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, dana penyesuaian dan dana otonomi, dana dari bantuan pemerintah kabupaten lain (bila ada), dan sumber lain yang sah.

Berdasarkan sumber-sumber keuangan tersebut, jumlah total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2018-2022 adalah fluktuatif. Pendapatan Pemerintah tertinggi terjadi tahun 2021, sedangkan terendah pada tahun 2019. Nilai rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 sebesar Rp 604.618,58 juta/tahun atau kurang lebih Rp 605 milyar/tahun. Berikut ini disajikan data pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan Selama Tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan Tabel 2.7. berikut:





**Tabel 2.7. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

| Jenis Pendapatan  | Jumlah (juta rupiah) |                  |                  |                  |                  |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2018                 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
| <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>   | <b>25.863,3</b>      | <b>5.749,4</b>   | <b>19.905,8</b>  | <b>21.564,3</b>  | <b>30.353,4</b>  |
| Pajak Daerah  | 1.629,8              | 1.441,0          | 1.983,6          | 2.294,0          | 3.014,4          |
| Retribusi Daerah  | 1.125,1              | 793,4            | 2.601,0          | 3.368,7          | 3.116,4          |
| Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 620,0                | -                | 2.016,7          | 2.488,3          | 2.542,9          |
| Lain-lain PAD yang Sah  | 22.488,5             | 3.514            | 13.304,4         | 13.413,4         | 21.679,8         |
| <b>Pendapatan Transfer</b>  | <b>484.914,3</b>     | <b>483.260,8</b> | <b>472.089,2</b> | <b>477.362,7</b> | <b>528.008,3</b> |
| Bagi Hasil Pajak  | 6.785,2              | 8.054,1          | 4.563,3          | 5.398,5          | 7.956,0          |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                                  | 9.305,0              | 4.459,9          | 18.590,2         | 18.299,3         | 86.653,0         |
| Dana Alokasi Umum   | 343.792,8            | 343.792,8        | 336.333,9        | 345.963,0        | 335.221,3        |
| Dana Alokasi Khusus   | 125.031,4            | 126.954,0        | 112.601,8        | 107.702,1        | 98.178,0         |
| <b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>  | <b>65.854,6</b>      | <b>73.275,8</b>  | <b>126.048,1</b> | <b>142.811,7</b> | <b>71.780,7</b>  |
| Pendapatan Hibah  | 7.470,0              | -                | 26.476,4         | 18.612,2         | -                |
| Dana Darurat  | -                    | -                | -                | -                | -                |
| Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya             | 7.537,3              | 6.887,1          | 7.631,7          | 15.983,4         | -                |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah   | -                    | -                | -                | -                | -                |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                 | -                    | -                | -                | -                | -                |
| Dana Desa   | 50.847,3             | 50.847,3         | 61.807,6         | 62.350,0         | 50.028,0         |
| Dana Insentif   | -                    | -                | 30.132,4         | 28.612,8         | 3.140,5          |
| Lainnya   | -                    | 15.541,4         | -                | 17.253,4         | 18.612,2         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>576.632,2</b>     | <b>556.536,5</b> | <b>618.043,1</b> | <b>641.738,8</b> | <b>630.142,3</b> |

Sumber:

1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2020 (Nurdin dkk., 2023);
2. Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Kementerian Keuangan (2021); dan Tahun Anggaran 2021, Kementerian Keuangan (2020);
3. Perda Kabupaten Buton Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton Selatan Tahun 2022





## 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

### 2.3.3. Kemandirian Daerah

Guna mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Buton Selatan dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan dan penggunaan rasio keuangan itu sendiri harus disesuaikan dengan data APBD. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan rasio keuangan, diantaranya adalah analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, analisis Rasio Efektivitas, dan analisis Rasio Aktivitas.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (dana perimbangan). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (dana transfer/perimbangan) adalah semakin rendah, begitupun sebaliknya. Perhitungan Rasio ini rumuskan dilakukan dengan persamaan berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Hasil analisis dari persamaan tersebut disajikan pada Tabel 2.8 berikut. Dari data tabel ini diketahui bahwa nilai rasio keuangan daerah Buton Selatan selama tahun 2018-2022 berkisar antara 1,19-5,75% dengan nilai rata-rata rasio adalah 4,2%. Sesuai dengan kriteria penilaian, dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Buton Selatan adalah belum mandiri atau masih sangat rendah, yang berarti ketergantungan terhadap dana eksternal dalam hal ini dana transfer atau perimbangan dari pemerintah pusat masih tinggi. Sehingga bias dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan masih sangat tinggi.





**Tabel 2.8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

| No               | Tahun | Jumlah (Juta Rupiah) |                     | Rasio (%)  | Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah   |
|------------------|-------|----------------------|---------------------|------------|---|
|                  |       | PAD                  | Pendapatan Transfer |            |   |
| 1.               | 2018  | 25.863,3             | 484.914,3           | 5,33       | Kondisi Fiskal Belum Mandiri yang berarti Tingkat Ketergantungan Fiskal Sangat Tinggi |
| 2.               | 2019  | 5.749,4              | 483.260,8           | 1,19       |   |
| 3.               | 2020  | 19.905,8             | 472.089,3           | 4,22       |   |
| 4.               | 2021  | 21.564,3             | 477.362,7           | 4,52       |   |
| 5.               | 2022  | 30.353,4             | 528.008,3           | 5,75       |   |
| <b>Rata-Rata</b> |       |                      |                     | <b>4,2</b> |   |

Keterangan:

0-25% = Sangat Rendah (Belum Mandiri)

51-75% = Sedang (Mandiri)

26-50% = Rendah (Menuju Mandiri)

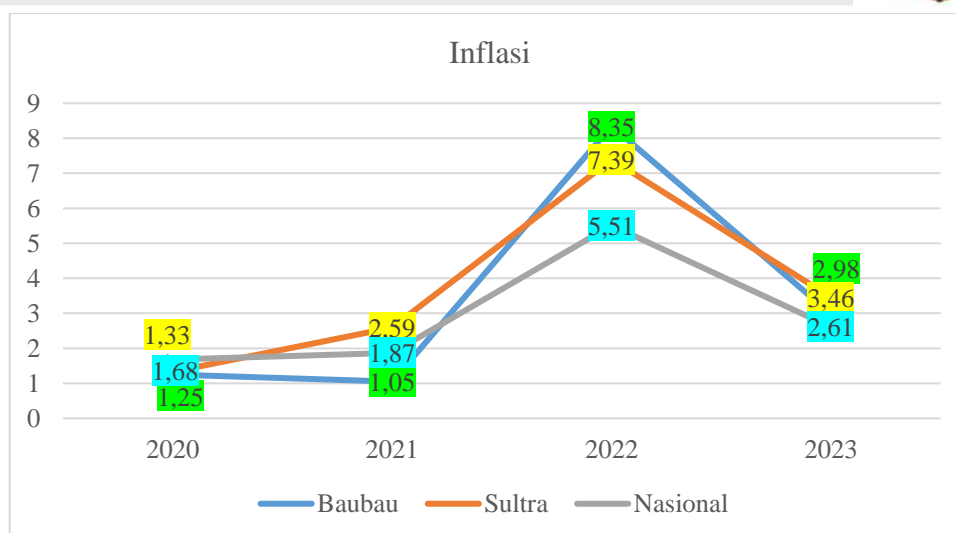
76-100% = Tinggi (Sangat Mandiri)

#### 2.3.4. Inflansi Daerah

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

Inflasi Kabupaten Buton Selatan diukur dengan pendekatan tingkat inflasi di daerah terdekat, yaitu Kota Baubau, yang berarti perkembangan inflasi di Kota Baubau berpengaruh pada inflasi di Kabupaten Buton Selatan. Pada November 2023, inflasi Kota Baubau berada pada angka 2,98%, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 3,46% namun lebih tinggi dari inflasi nasional yang telah terkendali pada tingkat 2,61%.





Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Baubau, dan Nasional, 2024

**Gambar 2.18. Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)**

#### 2.4. Aspek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Melihat pada angka IPM Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2018-2020, peningkatan capaian kemajuan pembangunan manusia menunjukkan peningkatan. Angka IPM Kabupaten Buton Selatan pada 2018 sebesar 64,37 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 64,60. Di tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 64,99. Kenaikan ini merupakan capaian positif bagi pemerintah daerah sebagai wilayah baru, meskipun masih memiliki berbagai catatan yang harus diperbaiki pada pembangunan di masa yang akan datang.

Tercatat untuk tahun 2021, indikator kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup sebesar 67,69 dan mengalami peningkatan signifikan terhadap tahun sebelumnya, begitu pula dengan indikator pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah mengalami peningkatan signifikan menjadi 13,24 di tahun 2021.





Sedangkan rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dari angka 7,53 menjadi 7,54.

Indikator kemajuan pembangunan manusia lainnya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Dalam kurun waktu empat tahun, kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin sebesar 15,99 persen dan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 1,88 pada tahun 2020 menjadi 14,11 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin menjadi 14,62 persen.

## 2.5. Aspek Pemerintahan

### 2.5.1. Jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dan partai politik

Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 ada sebanyak 20 orang. Dengan komposisi: Fraksi PDI-P sebanyak 5 orang, Partai Hanura sebanyak 4 orang, Partai Demokrat sebanyak 3 orang, partai PKS dan Golkar masing-masing sebanyak 2 orang, Fraksi PKB, PPP, Gerindra, dan Nasdem masing-masing sejumlah 1 orang.

**Tabel 2.9. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022**

| Partai Politik | Jumlah (orang) |           |           |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                | Laki-Laki      | Perempuan | Total     |
| PDI-P          | 3              | 2         | 5         |
| Demokrat       | 3              | -         | 3         |
| Hanura         | 4              | -         | 4         |
| PKS            | 1              | 1         | 2         |
| Golkar         | 2              | -         | 2         |
| PKB            | 1              | -         | 1         |
| Gerindra       | 1              | -         | 1         |
| PPP            | -              | 1         | 1         |
| Nasdem         | 1              | -         | 1         |
| <b>Total</b>   | <b>16</b>      | <b>4</b>  | <b>20</b> |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, 2023

### 2.5.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan Organisasi dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebanyak 1.925 orang, dengan komposisi sebagai berikut:





**Tabel 2.10. Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022-2023**

| Jabatan                           | 2021         |            |              | 2022       |            |              |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                   | Laki-Laki    | Perempuan  | Total        | Laki-Laki  | Perempuan  | Total        |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Utama     | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
| Jabatan pimpinan Tinggi Madya     | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama   | 41           | 1          | <b>42</b>    | 40         | 1          | <b>41</b>    |
| Administrator                     | 115          | 23         | <b>138</b>   | 124        | 33         | <b>157</b>   |
| Pengawas                          | 154          | 95         | <b>249</b>   | 94         | 63         | <b>157</b>   |
| Eselon V                          | 1            | -          | <b>1</b>     | -          | -          | -            |
| Jabatan Fungsional Dosen          | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
| Jabatan Fungsional Guru           | 392          | 423        | <b>815</b>   | 373        | 426        | <b>799</b>   |
| Jabatan Fungsional Medis          | 37           | 188        | <b>225</b>   | 27         | 169        | <b>196</b>   |
| Jabatan Fungsional Teknis         | 35           | 13         | <b>48</b>    | 65         | 70         | <b>135</b>   |
| Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | 251          | 224        | <b>475</b>   | 242        | 198        | <b>440</b>   |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.026</b> | <b>967</b> | <b>1.993</b> | <b>965</b> | <b>960</b> | <b>1.925</b> |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, 2024

## 2.6. Aspek Ketenagakerjaan

### 2.6.1. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi / data ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) dan mempunyai pekerjaan (bekerja) atau sedang mencari pekerjaan





(pengangguran terbuka). Penduduk yang bekerja tidak hanya meliputi penduduk yang sedang bekerja, tetapi juga sementara tidak bekerja karena suatu sebab, misalnya pegawai yang sedang cuti, petani yang sedang menunggu panen dan sebagainya. Sedangkan pencari kerja adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja seperti diketahui sangat tergantung pada struktur penduduk, sifat demografis serta keadaan sosial ekonomi daerah. Sedangkan bukan Angkatan Kerja, adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (tidak aktif secara ekonomis).

**Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

| Kegiatan Utama                  | Jumlah (orang) |               |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                 | Laki-Laki      | Perempuan     | Total         |
| <b>I. Angkatan Kerja</b>        | <b>29.209</b>  | <b>21.337</b> | <b>50.546</b> |
| 1. Bekerja                      | 27.791         | 20.573        | 48.364        |
| 2. Pengangguran Terbuka         | 1.418          | 764           | 2.182         |
| <b>II. Bukan Angkatan Kerja</b> | <b>6.103</b>   | <b>12.909</b> | <b>19.012</b> |
| 1. Sekolah                      | 2.599          | 2.771         | 5.370         |
| 2. Mengurus Rumah Tangga        | 945            | 8.706         | 9.651         |
| 3. Lainnya                      | 2.559          | 1.432         | 3.991         |
| <b>Jumlah/Total</b>             | <b>35.312</b>  | <b>34.246</b> | <b>69.558</b> |
| <b>TPAK</b>                     | <b>82,72</b>   | <b>62,31</b>  | <b>72,67</b>  |
| <b>Tingkat Pengangguran</b>     | <b>4,85</b>    | <b>3,58</b>   | <b>4,32</b>   |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, 2024

### 2.6.2. Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam jangka waktu paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Sedangkan tidak bekerja atau pengangguran terbuka meliputi mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan an tidak mencari





pekerjaan karena putus asa, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

| Status Pekerjaan Utama                                 | Jumlah (orang) |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|
|  | Laki-Laki      | Perempuan     | Total         |
| Berusaha sendiri                                       | 7.425          | 5.929         | <b>13.354</b> |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 4.677          | 2.914         | <b>7.591</b>  |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar             | 831            | 42            | <b>873</b>    |
| Buruh/karyawan/ pegawai                                | 10.537         | 5.139         | <b>15.676</b> |
| Pekerja bebas  | 1.012          | 86            | <b>1.098</b>  |
| Pekerja keluarga/tak dibayar                           | 3.309          | 6.463         | <b>9.772</b>  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>27.791</b>  | <b>20.573</b> | <b>48.364</b> |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, 2024

### 2.6.3. Karakteristik Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama

Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan alam sekitarnya.

**Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

| Kecamatan     | Jumlah Penduduk (orang) |           |           |          |          |          |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|               | Islam                   | Protestan | Katolik   | Hindu    | Budha    | Lainnya  |
| Batu Atas     | 12.820                  | 0         | 1         | 0        | 0        | 0        |
| Lapandewa     | 10.377                  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Sampolawa     | 25.241                  | 2         | 6         | 0        | 0        | 0        |
| Batauga       | 18.788                  | 4         | 29        | 0        | 0        | 0        |
| Siompu Barat  | 11.905                  | 1         | 9         | 0        | 0        | 0        |
| Siompu        | 11.734                  | 1         | 1         | 0        | 0        | 0        |
| Kadatua       | 10.715                  | 1         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah</b> | <b>101.580</b>          | <b>9</b>  | <b>45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, 2024





## 2.7. Aspek Potensi Daerah

### 2.7.1. Potensi Perikanan

Wilayah Kabupaten Buton Selatan terdapat potensi perikanan berupa:

- 1) Jenis Ikan Pelagis besar yang hidup di perairan di lepas pantai yang bermigrasi dengan kecepatan 25 – 27 Km/jam serta dapat hidup pada kedalaman 40 – 100 M, adapun Jenis Ikan Pelagis besar tersebut adalah:
  - a) Tuna Ekor Kuning (*Thunnus Albacores*),
  - b) Tuna Matabesar (*Thunnus Obesins*),
  - c) Tuna Albecora (*Thunnus Alalunga*),
  - d) Tuna Sirip Biru (*Thunnus Macoyii*),
  - e) Tuna Abu-abu (*Thunnus Tonggol*),
  - f) Cakalang (*Katsuwonus Pelamis*),
  - g) Tongkol (*Enthyunus Affinis*), dan
  - h) Lisong (*Auxis rochei*).
- 2) Ikan Pelagis Kecil yang berada disekitar permukaan laut atau sedikit di bawah muka laut paling dalam pada bagian tengah kedalaman laut, yang terdiri atas:
  - a) Ikan Layang (*Decaptrus Russelli*),
  - b) Ikan Kembung (*Restrelliger Kawgerta*),
  - c) Ikan Tongkol (*Enthyunnus Affinis*),
  - d) Ikan Losong (*Auxis Rochei*).
- 3) Ikan jenis Demersal yang berada disekitar dasar laut yang mengembangkan dirinya di muka laut yaitu:
  - a) Komersil Utama seperti: Ikan Kerapu (*Serranidae*), Ikan Bawal Putih (*Pampus spp*), Ikan Kakap (*Lates Calcasiter*), Ikan Manyung (*Arridre*), Ikan Bambang (*Lutjanidae*), Ikan Jenaha (*Lutjanus Jhoni*), Ikan Kawe (*Carangoides sp*), dan Ikan Nomei (*Harpodonidae*).
  - b) Komersil Kedua yaitu: Ikan Gerot-gerot (*Pommadasys spp*), Ikan Bawal Hitam (*Fernio Niger*), Ikan Kurisi (*Nempteridae*), Ikan Galamah (*Sciannidae*), Ikan Lencam (*Lethrinas spp*), Ikan layur (*Trichiurus spp*), Ikan Karo (*Polynemus spp; Elentheronema spp*), Ikan Kakap Ketang (*Drepanidae*), Ikan Baronang (*Siganus spp*), Ikan Pari (*Dasytis Annotatus*), dan Ikan Cucut (*Larscharhing Amblyrhynchos*).





- c) Komersil Ketiga terdiri atas: Ikan Betek (*Leiog nathidae*), Ikan Beleso (*Syadontidre*), Ikan Kurniran (*Mulliodae*), Ikan Mata Besar (*Prian Canthyrus spp*), Ikan Kerong-kerong (*Therapon spp*), Ikan Gabus Laut (*Pherapon spp*), dan Ikan Besot (*Silagon spp*).
- 4) Jenis udang antara lain: Udang Terbang (*Banana Shrimp*), Udang Putih (*Pennaens Marguinsis*), Udang Windu (*Tiger Shrimp*), Udang Windu Hitam (*Pennaeny Manodom*), dan Kelompok Lainnya.
- 5) Sedangkan Potensi Ekosistem Laut lainnya pada wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut: Ekosistem Terumbu Karang, Ekosistem padang Lamun (*Seagress*), dan Ekosistem Laut Bebas.

### 2.7.2. Potensi Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Buton Selatan adalah seluas kurang lebih 17.505 Ha, terdiri atas:

- 1) Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa. Pada kawasan tanaman pangan terdapat penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu seluas kurang lebih 282 Ha di Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa;
- 2) Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Lapandewa;
- 3) Kawasan perkebunan, terdapat di Kecamatan Kadatua, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Batu Atas.

Disamping itu terdapat juga kawasan peruntukan budidaya hutan produksi, seluas kurang lebih 16.ha, terbagi atas:

- 1) Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga.; dan
- 2) Kawasan hutan produksi tetap, terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga.

Terdapat juga kawasan perkebunan rakyat, seluas kurang lebih 1.688 Ha terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa.





### 2.7.3. Potensi Pariwisata

Pembagian kawasan wilayah Kabupaten Buton Selatan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 mengalokasikan kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 321 Ha berada di Kecamatan Batauga, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Sampolawa, dan Kecamatan Siompu.

### 2.7.4. Potensi Daerah Lainnya

Potensi daerah lainnya adalah:

- 1) Potensi pertambangan dan energi, seluas kurang lebih 2.382 Ha, berupa potensi pertambangan meliputi:
  - a) WUP Batubara di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Batauga;
  - b) WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Batauga; dan
  - c) WUP Mineral Logam di Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Batauga.

#### 2) Potensi Aspal Alam Buton

Adapun potensi Aspal Alam Buton di wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Berada di Waesiu (Rongi) Kecamatan Sampolawa Seluas 97,69 Ha dengan perkiraan cadangan sebesar 3.516.000 ton, dikelola oleh PT. Olah Bumi El Cipta; dan
  - b) Masih terdapat di Waesiu Kecamatan Sampolawa seluas 740 Ha yang dikelola oleh PT. Metrik El Cipta;
- #### 3) Potensi Panas Bumi (Geotermal) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Desa Rongi

Buton Selatan memiliki potensi panas bumi (geothermal) yang berguna untuk energi listrik. Lokasi potensi energi panas bumi di Kabupaten Buton Selatan terdapat di Rongi, Kecamatan Sampolawa, telah dilakukan pengamatan lapangan bahwa:

- a) Potensi ini berada pada pinggiran kali yang merupakan zona patahan yang memotong reservoir panas bumi;





- b) Sumber air berbau belerang/sulfur;
- c) Temperatur 400 – 750 C;
- d) Mengeluarkan uap air; dan
- e) Total potensi energi panas bumi di Kabupaten Buton Selatan di Rongi berkisar 5 MW, perlu dieksplorasi detail.

Pemanfaatan geothermal jauh lebih hemat dibandingkan dengan pemakaian minyak dan gas bumi apabila dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selain itu pemanfaatan geothermal lebih ramah lingkungan dan dapat dijadikan obyek wisata.

#### 4) Potensi Mineral Logam Mulia

Aktivitas Geotermal menjadi penciri akan terdapatnya aktivitas epitermal (*epithermal Gold*), terlebih dengan ditemukannya singkapan intrusi Batuan Beka Diorit yang terdapat di sebelah utara hulu sungai Lakologou berupa pecahan batolit yang dipotong oleh Sesar Anjak Sampolawa di Sungai Waesia dan Sungai Sampolawa di Desa Rongi.

#### 5) Potensi Pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

Adapun potensi kawasan di wilayah Kabupaten Buton Selatan yang dapat dikembangkan menjadi PLTA terletak pada sungai Sampolawa dengan debit 5,40 m<sup>3</sup>/detik, yang dapat menghasilkan kapasitas Energi listrik sebesar 480 KW Listrik.

#### 6) Potensi Sumber Daya Hutan

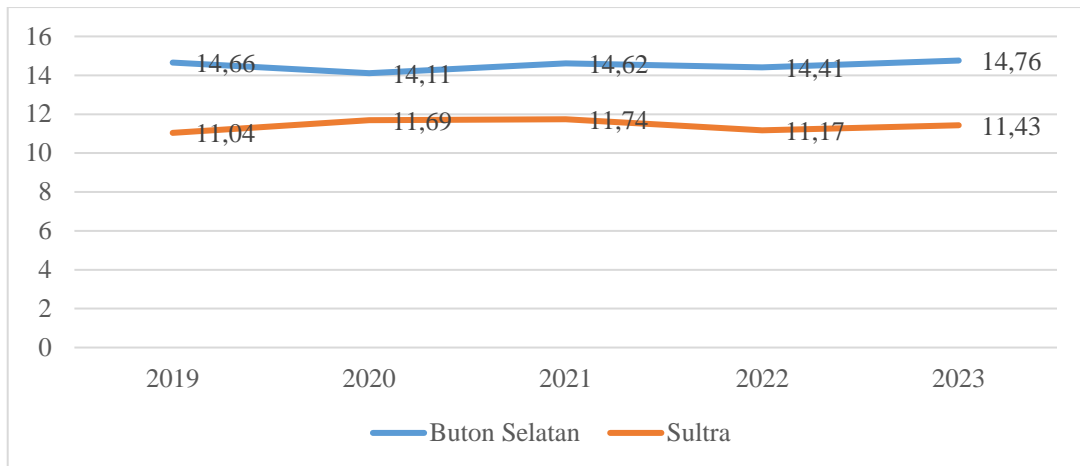
Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup melimpah, salah satunya adalah potensi sebaran kayu jati umumnya berada di wilayah daratan Buton Kabupaten Buton Selatan.

## 2.8. Aspek Kemiskinan

### 2.8.1. Profil Umum Penduduk Miskin Menurut Kecamatan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan sebesar 11,57 ribu jiwa atau 14,41% sedangkan pada tahun 2023 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,88% atau 14,76 ribu jiwa.





Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Diolah 2024

**Gambar 2.19. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023**

Jumlah penduduk miskin tahun 2023 di Kabupaten Buton Selatan yang mengalami sedikit peningkatan yaitu mencapai  $\pm 11.800$  jiwa dengan persentase penduduk miskin 14,76%. Dimana tahun 2022, penduduk miskin sebanyak  $\pm 11.570$  jiwa atau 14,41% dan 11,71 ribu jiwa atau 14,62% pada tahun 2021.

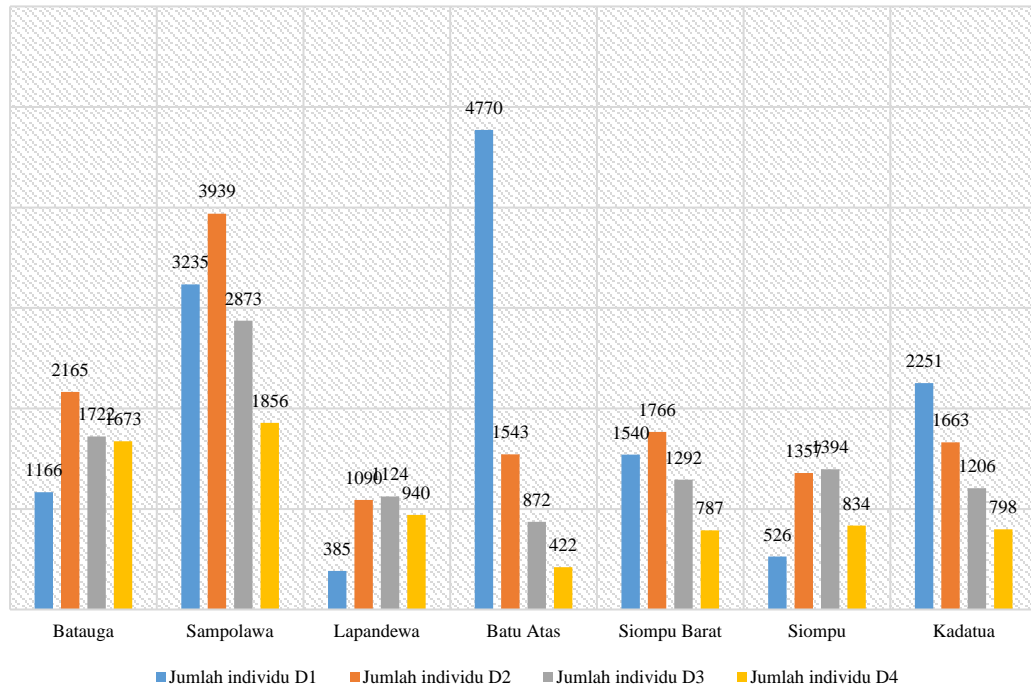


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Diolah 2024

**Gambar 2.20. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023**

Adapun sebaran jumlah penduduk miskin tahun 2023 di Kabupaten Buton Selatan menurut kecamatan dilihat pada gambar berikut:

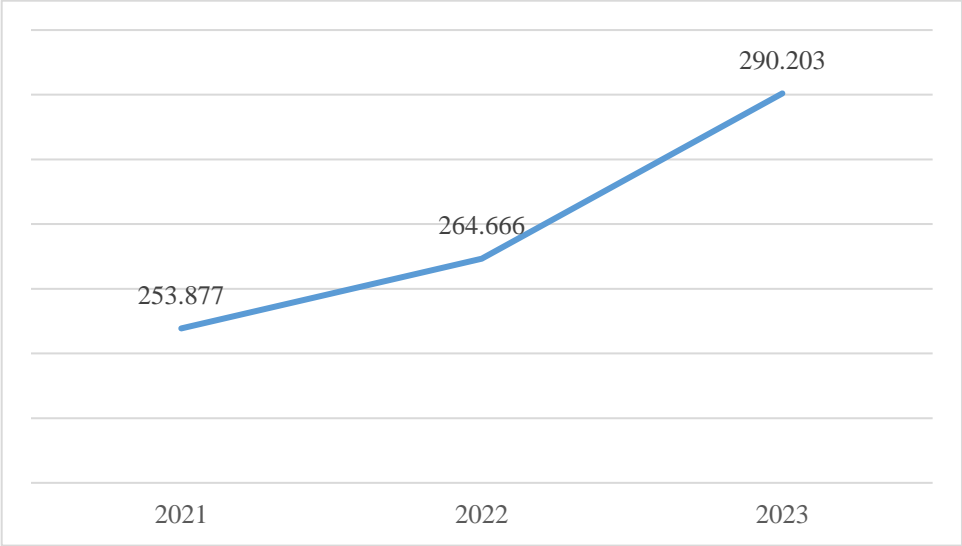




Sumber: Data P3KE 2023, Diolah 2024  
**Gambar 2.21. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Aspek Geografis Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

**2.8.2. Garis Kemiskinan**

Dilihat dari tren garis kemiskinan dalam tahun 2021-2023 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut,



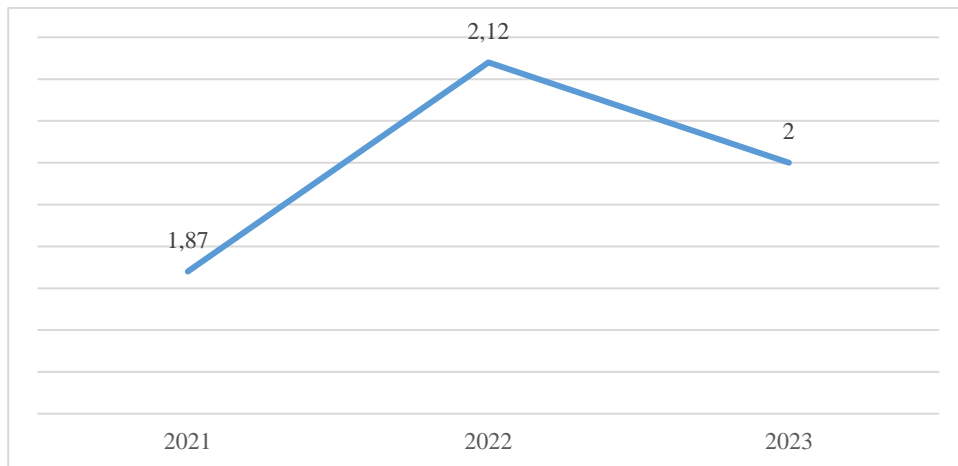
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Diolah 2024  
**Gambar 2.22. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023**





### 2.8.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dilihat dari tren kedalaman kemiskinan dalam tahun 2021-2023 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan angka yang dinamis atau fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut,

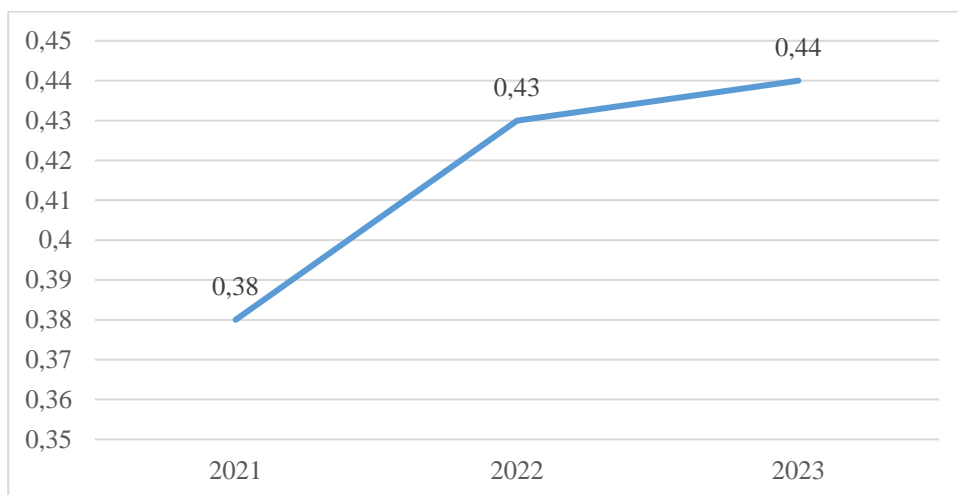


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Diolah 2024

**Gambar 2.23. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023**

### 2.8.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan dalam tahun 2021-2023 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan angka peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut,



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Diolah 2024

**Gambar 2.24. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023**





## 2.9. Kebijakan Daerah Terkait Kemiskinan Dalam RPJP, RPJMD, RPD

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah. Setiap pemerintahan menginginkan tingkat kemiskinan yang rendah dan telah mengupayakannya melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi agenda kebijakan penting di Indonesia karena secara moral Pemerintah mengemban tanggungjawab amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang secara eksplisit menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian dari penjabaran tersebut dicetuskanlah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD, dimana RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD diturunkan dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun (Rencana Aksi Tahunan). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK kabupaten/Kota) dibentuk sebagai wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota.

TKPK Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. TKPK Kabupaten/Kota menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan Kabupaten/Kota;





- 2) Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 5) Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Kebijakan daerah terkait kemiskinan di dalam RPJP, RPJMD, RPD di Kabupaten Buton Selatan diantaranya adalah:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;
- 3) Keputusan Bupati Nomor 515 Tahun 2023 tentang Penetapan Data Sasaran Keluarga miskin Ekstrem di Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 4) Keputusan Bupati Nomor 518 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Buton Selatan.





## BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH

### 3.1. Isu Strategis Kemiskinan Dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan

Dalam skala nasional, salah satu kerangka yang digunakan sebagai justifikasi adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. SDGs sendiri menentukan ketercapaian target pada tahun 2030 namun kemudian Presiden menginstruksikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dipercepat menjadi tahun 2024, lebih awal dari target SDGs di tahun 2030. Instruksi tersebut dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hasil analisis capaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada masing-masing Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Buton Selatan berkaitan langsung dengan masalah kemiskinan. Secara rinci, distribusi capaian pembangunan berkelanjutan berdasarkan tujuan di Kabupaten Buton Selatan disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1. Distribusi Capaian Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Tujuan di Kabupaten Buton Selatan**

| TPB | Tujuan  | Persentase Jumlah Indikator (%) |                                |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------------|
|     |   | Sudah Mencapai Target Nasional  | Belum Mencapai Target Nasional |
| 1   | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun   | 32                              | 68                             |
| 2   | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | 64                              | 36                             |
| 3   | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                          | 38                              | 62                             |





|    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| 4  | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua   | 69        | 31        |
| 5  | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan   | 71        | 29        |
| 6  | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan  | 25        | 75        |
| 7  | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua  | 0         | 0         |
| 8  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua  | 63        | 37        |
| 9  | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi   | 64        | 36        |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara  | 25        | 75        |
| 11 | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan  | 31        | 69        |
| 12 | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan  | 60        | 40        |
| 13 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya  | 50        | 50        |
| 15 | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | 100       | 0         |
| 16 | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan                        | 67        | 33        |
| 17 | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan   | 29        | 71        |
|    | <b>Total Capaian</b>  | <b>49</b> | <b>51</b> |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

Berdasarkan capaian indikator TPB di atas, isu strategis kemiskinan terfokus pada pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai





target dan juga indikator yang belum dilaksanakan serta disesuaikan dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan menjadi salah satu fokus prioritas dan dapat dilihat pada RPJPD Kabupaten Buton Selatan sebagai haluan pembangunan utama. RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2045 merupakan tahap pembangunan jangka panjang kedua, serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2025-2045 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Buton Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Ekonomi Biru Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”**. Terwujudnya visi tersebut, tercermin dalam 6 (enam) sasaran visi yaitu:

1. **Peningkatan Ekonomi yang Tinggi**

Dalam upaya mencapai ekonomi yang kuat, Kabupaten Buton Selatan menetapkan sasaran untuk meningkatkan pendapatan per kapita dari Rp 22,23 juta pada tahun 2025 menjadi Rp 86,82 juta pada tahun 2045. Selain itu, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan ditargetkan naik dari 2,89% menjadi 7,01%. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) juga menjadi indikator penting, meskipun tidak memiliki baseline yang terukur pada saat ini.

2. **Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang**

Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dari 14,41% pada tahun 2025 menjadi hanya 0,19% pada tahun 2045. Rasio gini, yang merupakan indikator ketimpangan, dipertahankan dalam rentang 0,290-0,300. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan meningkat dari 2,04% menjadi 2,46%.

3. **Kepemimpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah**

Untuk mewujudkan visi daerah, Kabupaten Buton Selatan menargetkan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah yang saat ini berada pada angka nol, menjadi antara 4,00 hingga 4,50 pada tahun 2045.

4. **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 65,44 pada tahun 2025 menjadi 72,33 pada tahun 2045.





## 5. **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana**

Kabupaten Buton Selatan menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 71,36 pada tahun 2025 menjadi 88,68 pada tahun 2045. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) juga menjadi sasaran utama, meskipun tidak ada baseline terukur yang disediakan.

## 6. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, sasaran ditetapkan dalam bentuk peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari kategori "Cukup" dengan skor 50,52 pada tahun 2025 menjadi kategori "Memuaskan" dengan skor antara 80-90 pada tahun 2045.

Masing-masing sasaran visi ini dirancang untuk selaras dengan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan tujuan akhir mencapai visi besar Kabupaten Buton Selatan 2045. Untuk menuju dan mencapai visi tersebut, terdapat 6 (enam) misi yaitu:

### 1. **Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**

Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dicapai melalui optimalisasi pembangunan kesehatan untuk semua yang fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur dan layanan pendidikan, dan perlindungan sosial adaptif melalui kepastian jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi khususnya untuk kelompok rentan. Dengan ini diharapkan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkualitas.

### 2. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan**

Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru. Ini akan dicapai melalui penguatan terhadap sektor ekonomi biru, pengembangan pariwisata bahari dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas pasar, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta





pengembangan teknologi berbasis keunggulan daerah. Selain itu, akan diterapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, didorong transformasi digital, dan diperkuat peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan ini, diharapkan Kabupaten Buton Selatan dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

### 3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Transparan, dan Bersih dari Korupsi**

Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kompeten, transparan, dan bebas dari korupsi melalui penyederhanaan regulasi, transformasi digital dalam layanan pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan pengawasan pembangunan, serta pengembangan *smart government*, pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, dan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan layanan perizinan berbasis digital, penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara dan penguatan integritas partai politik untuk memastikan integritas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

### 4. **Menjaga Keamanan Daerah, Melalui Stabilitas Ekonomi, Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Energi, Air dan Pangan**

Misi ini merupakan komitmen untuk memastikan bahwa Kabupaten Buton Selatan tetap aman dan stabil melalui penciptaan fondasi yang kokoh dalam aspek-aspek kunci. Perwujudan stabilitas ekonomi dilakukan melalui pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemampuan fiskal daerah, dan pengendalian terhadap inflasi. Penguatan ketahanan sosial budaya dilakukan melalui penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, menghormati keberagaman, dan mempromosikan nilai-nilai saling pengertian dan toleransi. Pemerintah juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional, memperkuat lingkungan keluarga, serta melindungi kelompok rentan seperti anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, serta menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketergantungan pada sumber daya energi yang tidak terbarukan, dengan meningkatkan diversifikasi energi dan mengadopsi





teknologi yang ramah lingkungan. Upaya juga dilakukan dalam pemenuhan hak dasar atas pangan dan air, dengan memastikan pasokan yang stabil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

**5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Tangguh Terhadap Bencana**

Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana dengan melalui edukasi gaya hidup berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap pencemaran air dan udara. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sektor pesisir dan kelautan, penerapan pertanian berkelanjutan, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah.

**6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas**

Kabupaten Buton Selatan berfokus pada pembangunan infrastruktur kewilayahan yang merata dan berkualitas dengan mengalokasikan investasi untuk jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perumahan dan mengoptimalkan tata ruang dan konektivitas antar pulau.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan, secara khusus kemiskinan disasar pada isu-isu strategis dan dimasukkan ke dalam indikasi program *pro-poor*. Program-program yang termasuk ke dalam kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2. Isu Strategis Kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan**

| No | Isu Kemiskinan                    | Keterangan  |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | Kesehatan untuk semua             | Optimalisasi penanganan stunting dan eliminasi penyakit menular                     |
|    |                                   | Peningkatan pendayagunaan tenaga medis terutama di daerah sulit akses dan terpencil |
|    |                                   | Pengembangan pelayanan kesehatan primer di tingkat desa dan kelurahan               |
|    |                                   | Jaminan gizi pada 100 hari pertama kelahiran  |
|    |                                   | Pengendalian konsumsi dan peredaran produk negatif                                  |
| 2  | Pendidikan berkualitas dan merata | Penerapan wajib PAUD dan wajib belajar 12 tahun                                     |
|    |                                   | Investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai                                   |
|    |                                   | Peningkatan kualitas, kompetensi, dan distribusi guru di semua satuan pendidikan    |





|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | Revitalisasi pendidikan nonformal dengan program yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat                            |
|   |  | Membangun kerja sama dengan industri untuk program vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja                       |
|   |  | Pemanfaatan teknologi digital, termasuk IoT   |
|   |  | Peningkatan kompetensi sumber daya manusia usia produktif   |
|   |  | Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D)  |
| 3 | Perlindungan sosial adaptif  | Pemenuhan hak pelayanan dasar, jaminan perlindungan social, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan                 |
|   |  | Peningkatan kualitas manusia dalam kelompok rentan  |
|   |  | Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas angkatan kerja   |
|   |  | Memberdayakan masyarakat agar adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim  |
|   |  | Meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja   |
|   |  | Mendukung penguatan tata kelola dan kelembagaan data (REGSOSEK) di tingkat kabupaten                                      |
|   |  | Meningkatkan jangkauan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan   |
| 4 | Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non Pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi |
|   |  | Pemberdayaan dan pengembangan UMKM  |
|   |  | Pengembangan iklim penanaman modal  |
|   |  | Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata  |
|   |  | Penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana pertanian  |
|   |  | Pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya                                     |
|   |  | Perencanaan, pengendalian, dan pengembangan industri  |
|   |  | Peningkatan sarana distribusi perdagangan   |
|   |  | Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja  |
|   |  | Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan   |
|   |  | Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat   |
| 5 | Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup  | Penyelenggaraan jalan beserta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase  |
|   |  | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional  |
|   |  | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah  |
|   |  | Pengolahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum   |
|   |  | Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh  |

Sumber: RPJPD dan RPKD Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

### 3.2. Kemiskinan Daerah

#### 3.2.1. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya sebagai instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar daerah dan

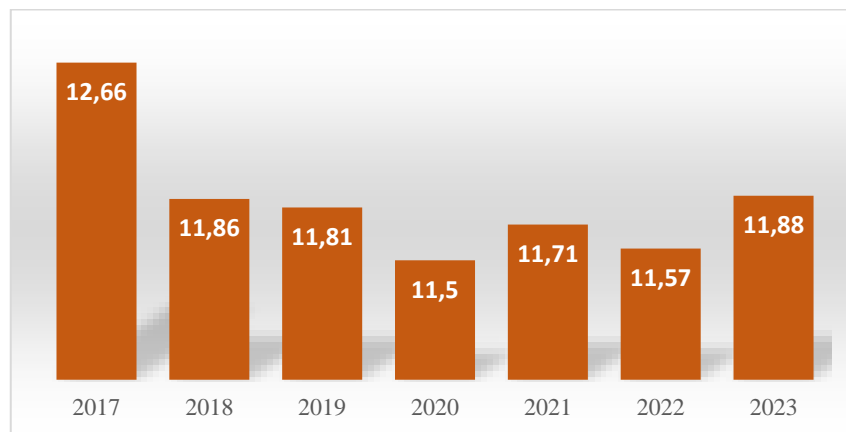




antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Posisi Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergolong di bawah/nyaris paling bawah dibanding daerah kabupaten/kota sekitarnya. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan tergolong masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

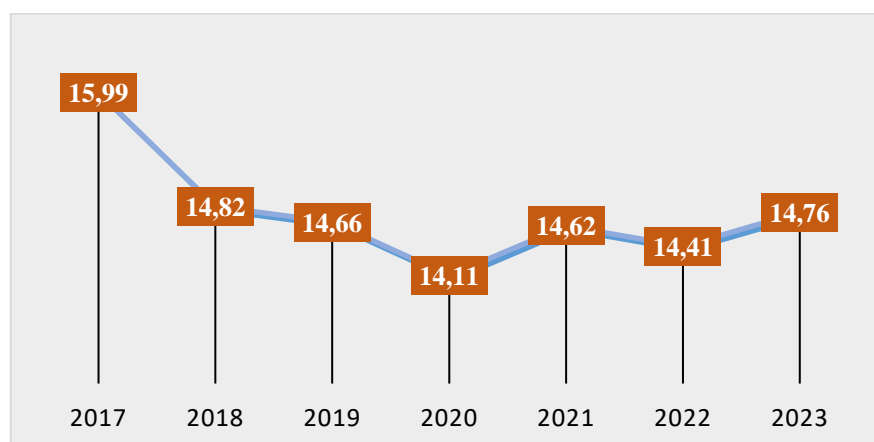
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan dalam kurung waktu 2017-2023 menunjukkan penurunan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 penduduk miskin tahun 2017 sekitar 12,66 ribu jiwa turun menjadi 11,88 ribu jiwa ditahun 2023. Kemiskinan terendah terjadi di tahun 2020 yakni 11,50%.



Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**

Tingkat kemiskinan Kabupaten Buton Selatan selama periode 2017-2023 disajikan pada Gambar 3.2.



Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

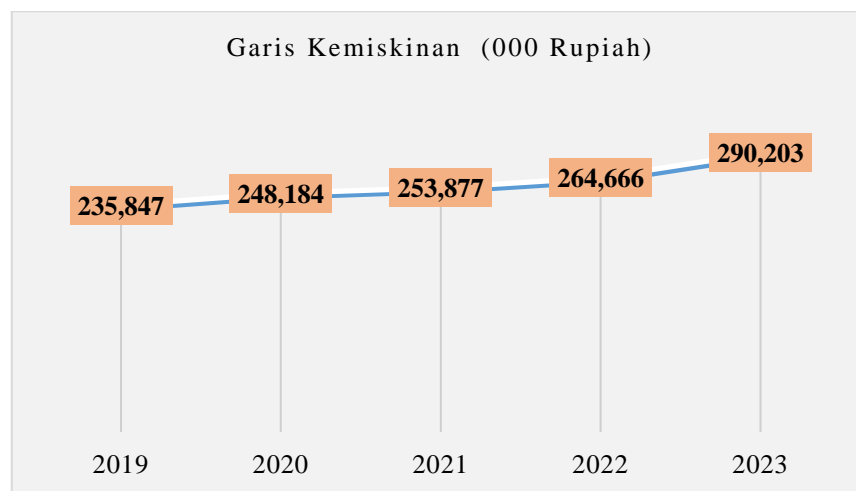
**Gambar 3.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**





Dilihat dari angka (persentase) kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan linear dengan kurva penduduk miskin. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2 bahwa kemiskinan tahun 2017-2023 menunjukkan penurunan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2 penduduk miskin tahun 2017 sekitar 15,99% turun menjadi 14,76% ditahun 2023. Artinya terjadi penurunan kemiskinan sekitar 1,23% atau 0,18% per tahun.

Rata-rata garis kemiskinan di Kabupaten Buton tahun 2019 sebesar Rp 235.847,00. Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.3 angka ini kemudian bertambah dengan mencatatkan garis kemiskinan masing-masing tahun 2021 menjadi Rp 253.877,00 dan tahun 2023 menjadi Rp 290.203,00.

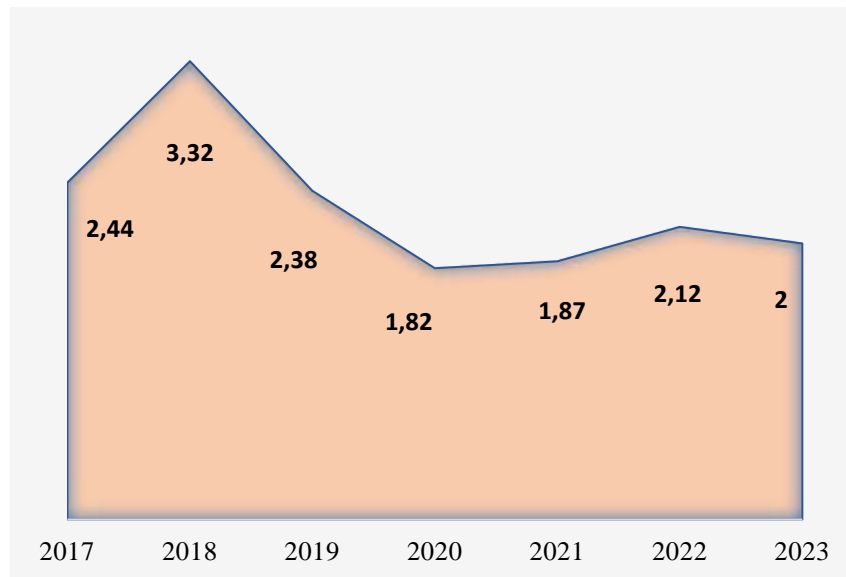


Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.3. Garis Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

Kedalaman kemiskinan sempat mengalami peningkatan ditahun 2018 yakni 3,32 yang sebelumnya 2,44. Kedalaman kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2020 yakni 1,82 yang selanjutnya kembali menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022. Perkembangan kedalaman kemiskinan tersebut selengkapnya disajikan pada Gambar 3.4.

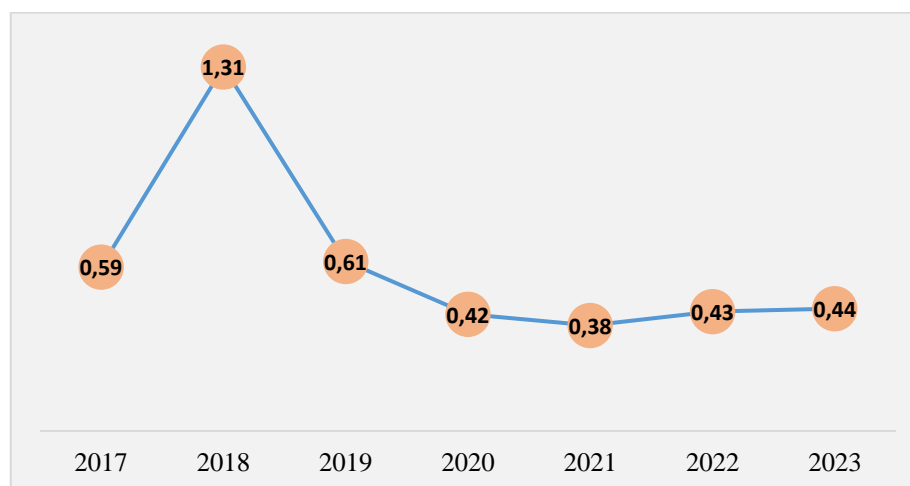




Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5, indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi ditahun 2018 yakni 1,31 meningkat signifikan disbanding tahun 2017. Tahun 2019-2021 indeks keparahan mengalami perbaikan dengan tren penurunan yang cukup signifikan. Tetapi kemudian menjadi perhatian adalah tahun 2020 dan 2023 ada kecenderungan peningkatan.



Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.5. Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**

### 3.2.2. Penduduk Desil

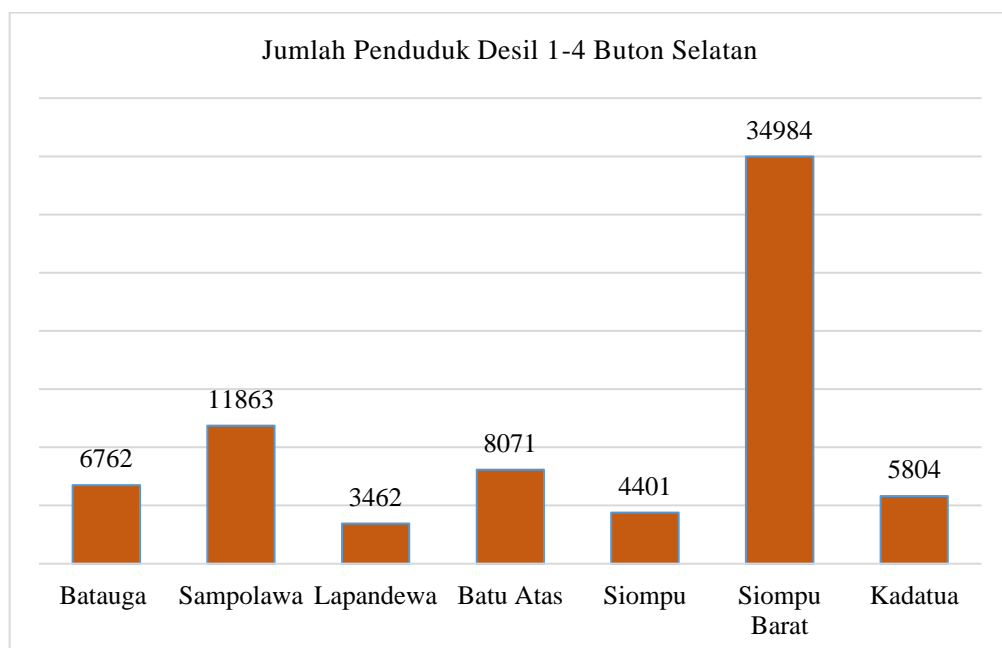
Aspek lain yang menggambarkan kemiskinan dilihat angka penduduk desil. Penduduk desil adalah kelompok persepuluhan rumah tangga yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Desil merupakan metode



kuantitatif untuk membagi data yang diperingkat menjadi 10 sub-bagian yang sama besarnya. Berikut ini adalah pengelompokan desil rumah tangga:

- Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya;
- Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20%;
- Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30%;
- Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40%; dan
- Desil 10 adalah keluarga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Untuk Desil 1-4 merepresentase kelompok masyarakat yang belum sejahtera. Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.6, daerah yang paling tinggi dengan penduduk belum Sejahtera terdapat di Kecamatan Siompu Barat sekitar 34.984 jiwa. Angka ini sangat besar dan terjadi gap yang sangat jauh disbanding dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran penduduk yang belum Sejahtera secara umum berada di Kecamatan Siompu Barat. Sementara itu, penduduk yang masuk Desil 1-4 yang paling rendah adalah di Kecamatan Lapandewa yakni 3.462 jiwa.



*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

**Gambar 3.6. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023**

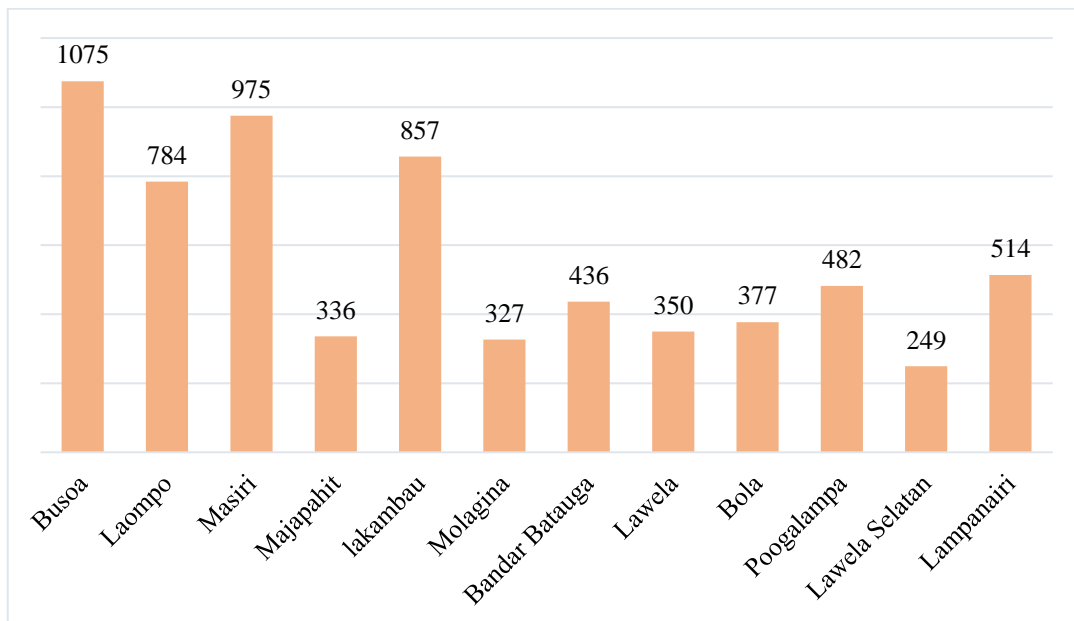
#### a. Kecamatan Batauga

Pada Gambar 3.7 diperoleh bahwa dari total penduduk Kecamatan Batauga (6.762 jiwa) yang masuk Desil 1-4 terdistribusi pada semua desa/kelurahan. Adapun





yang terbanyak terjadi di Busoa, diikuti Masiri, Lakambau, dan Laompo. Untuk desa/kelurahan yang masuk Desil 1-4 terendah ada di Lawela Selatan, diikuti Molagina, dan Lawela.



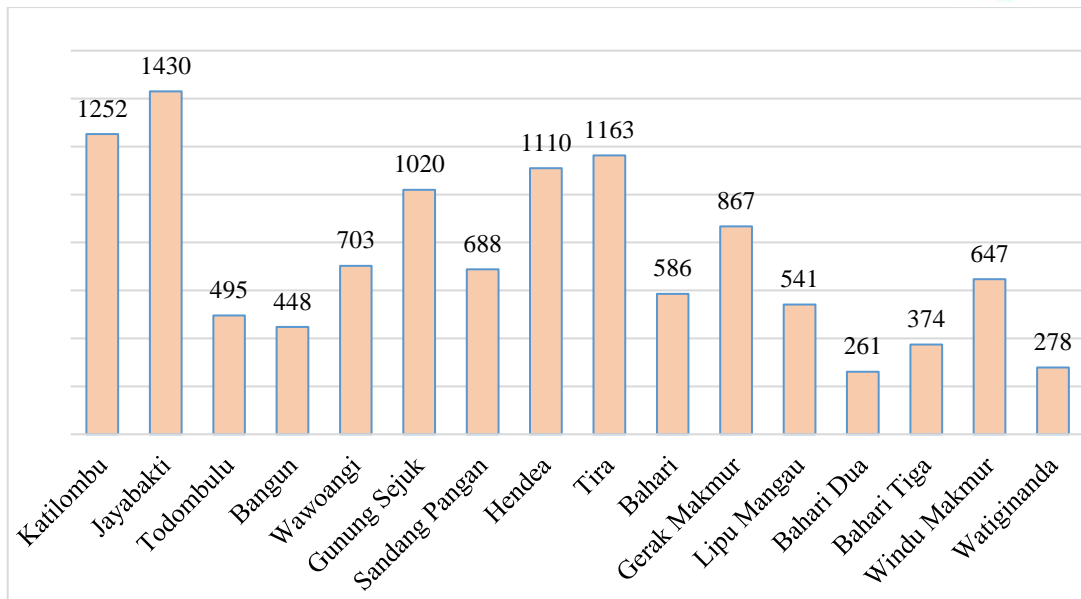
Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.7. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Batauga Tahun 2023**

#### b. Kecamatan Sampolawa

Penduduk yang tergolong Desil 1-4 di Kecamatan Sampolawa sebanyak 11.863 jiwa yang terdistribusi pada semua desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang tergolong Desil 1-4 diatas seribu jiwa berada di Jayabakti, disusul Katilombu, Tira, Hendea, dan Gunung Sejuk. Daerah dengan jumlah penduduk terendah Desil 1-4 dibawah 300 jiwa adalah di Bahari Dua, dan Watiginanda. Data tersebut selengkapnya dilihat pada infografis berikut:



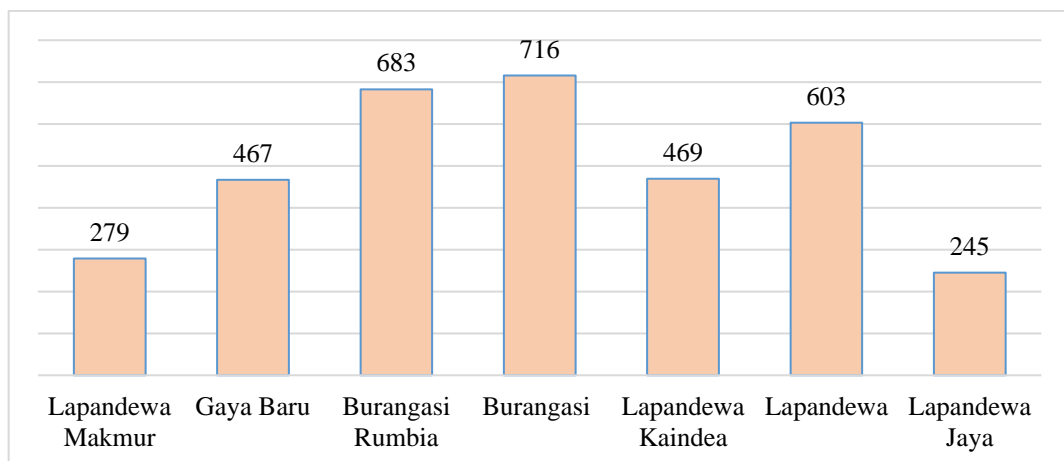


Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.8. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Sampolawa Tahun 2023**

### c. Kecamatan Lapandewa

Penduduk yang tergolong Desil 1-4 di Kecamatan Lapandewa sebanyak 3.462 jiwa, juga terdistribusi pada semua desa/kelurahan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.9, penduduk yang tergolong Desil 1-4 terbanyak yakni di atas enam ratus jiwa berada di Burangasi, disusul Barangasi Rumbia, dan Lapandewa. Sementara itu, penduduk yang tergolong Desil 1-4 terendah (di bawah tiga ratus jiwa) berada di Lapandewa Jaya, dan Lapandewa Makmur.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

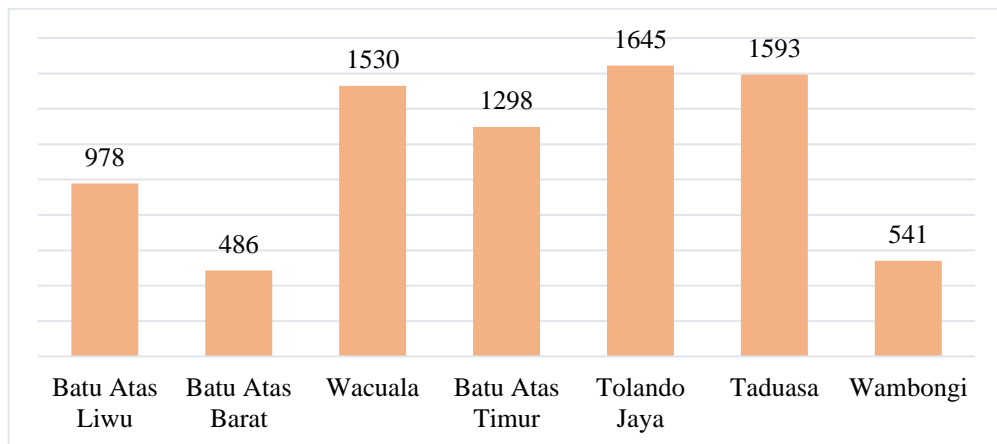
**Gambar 3.9. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Lapandewa Tahun 2023**

### d. Kecamatan Batu Atas

Di Kecamatan Batu Atas memiliki penduduk yang tergolong Desil 1-4 sebanyak 8.071 jiwa. Jumlah ini tersebar pada semua desa/kelurahan, dengan terbanyak (di atas seribu jiwa) berada di Tolando Jaya, disusul Taduasa, Wacuala,



dan Batu Atas Timur. Untuk terendah (di bawah enam ratus jiwa) terapat di Batu Atas Barat dan Wambongi. Informasi tersebut selengkapnya dilihat pada Gambar 3.10.

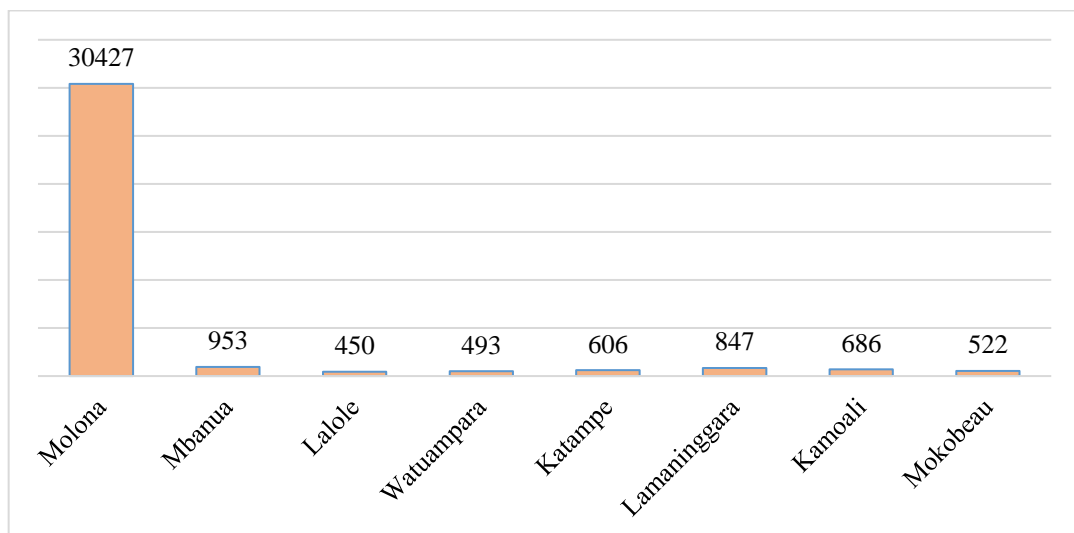


Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.10. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Batu Atas Tahun 2023**

#### e. Kecamatan Siompu Barat

Kecamatan Siompu Barat memiliki penduduk yang tergolong Desil 1-4 adalah yang tertinggi di Kabupaten Buton Selatan (34.984 jiwa). Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11, sekitar 87% penduduk dimaksud terkonsentrasi di Molona. Sisanya sekiyar 13% terdistribusi pada tujuh wilayah, dengan rata-rata sekiyar 1,86% setiap desa/kelurahan.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.11. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Siompu Barat Tahun 2023**

#### f. Kecamatan Siompu

Kecamatan Siompu memiliki penduduk yang tergolong Desil 1-4 sebanyak 4.401 jiwa yang terdistribusi pada setiap desa/kelurahan. Penduduk yang termasuk





kategori Desil 1-4 terbanyak (di atas enam ratus jiwa) berada di Wakinamboro dan Biwinapada. Sementara itu yang terendah penduduk sebagai Masyarakat belum Sejahtera berada di Lapara, disusul Karae dan Tongali. Data dan informasi tersebut selengkapnya tersaji pada Gambar 3.12.

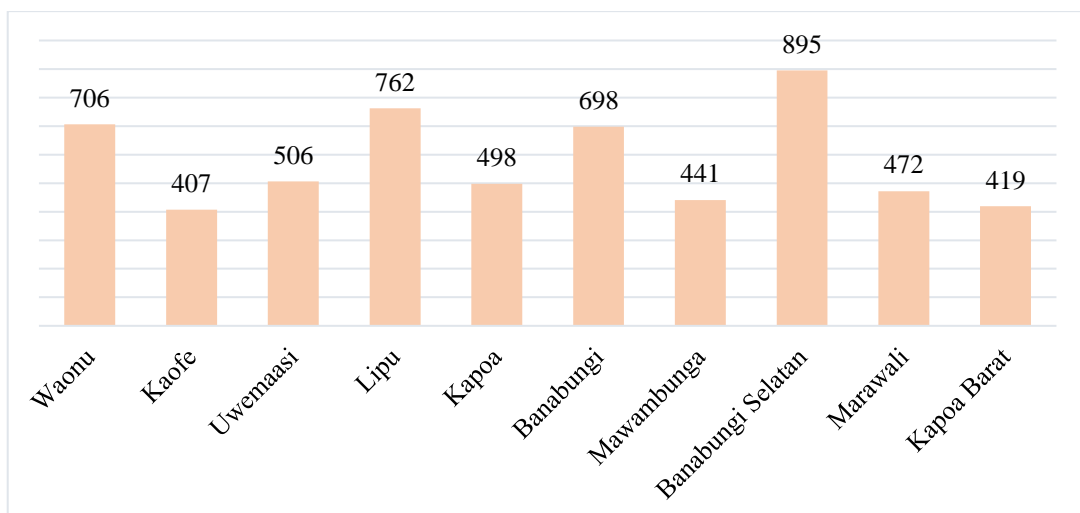


Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.12. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Siompu Tahun 2023**

#### g. Kecamatan Kadatua

Penduduk Kecamatan Kadatua yang masyarakatnya pada Desil 1-4 sebanyak 5.804 jiwa. Jumlah tersebut terdistribusi pada setiap desa/kelurahan, sebagaimana tersaji pada Gambar 3.13.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.13. Jumlah Penduduk Desil 1-4 Kecamatan Kadatua Tahun 2023**

Penduduk yang berada Desil 1-4 tertinggi berada di Banabungi Selatan, disusul Lipu, dan Waonu dengan rata-rata di atas 700 jiwa. Untuk penduduk belum



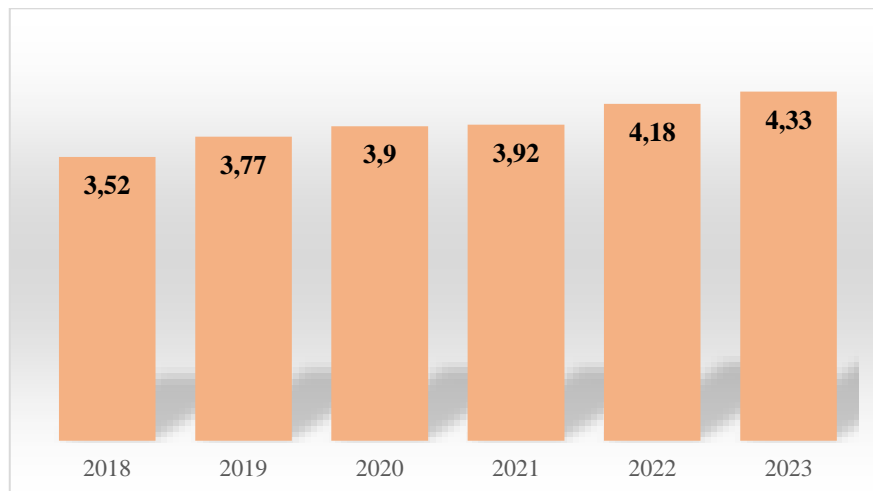


sejahtera terendah berada masing-masing di Kaofe, Kapao Barat, termasuk Mawambunga.

### 3.2.3. Ketenagakerjaan

Pengangguran terbuka sebagai salah satu aspek yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Dilihat dari tren tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buton Selatan antara tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.14, tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 3,53% menjadi 4,33% ditahun 2023. Artinya terjadi peningkatan pengangguran terbuka sebesar 0,81%. Dengan melihat trennya, maka sangat dimungkinkan mengalami peningkatan ditahun mendatang, selama tidak ada intervensi pembukaan lapangan kerja.

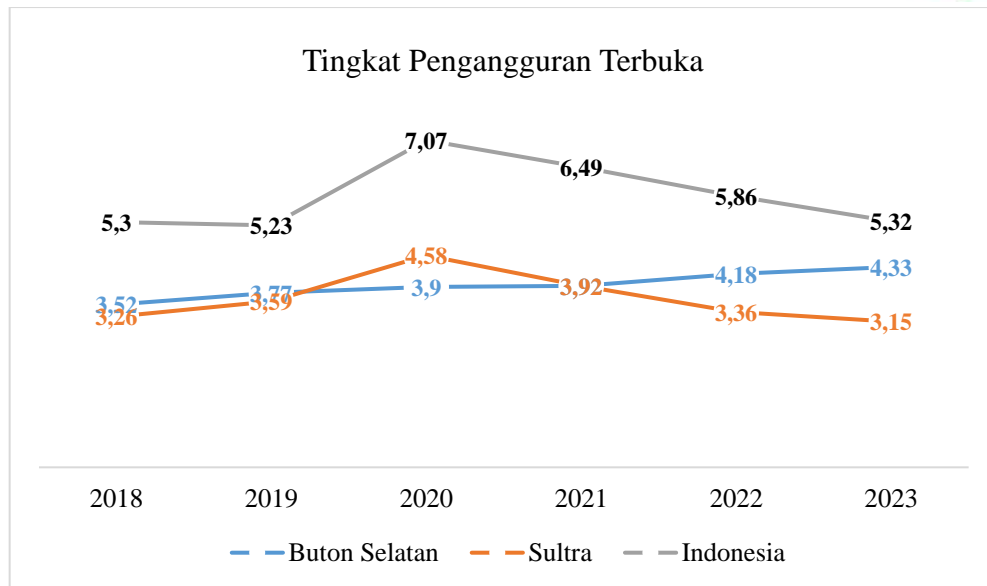


Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buton Selatan selain tahun 2020 lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.15 bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 adalah 4,18% dan provinsi diangka 3,36%. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2023. Meski begitu, angka pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan selama 2018-2023 lebih baik dari rata-rata nasional.

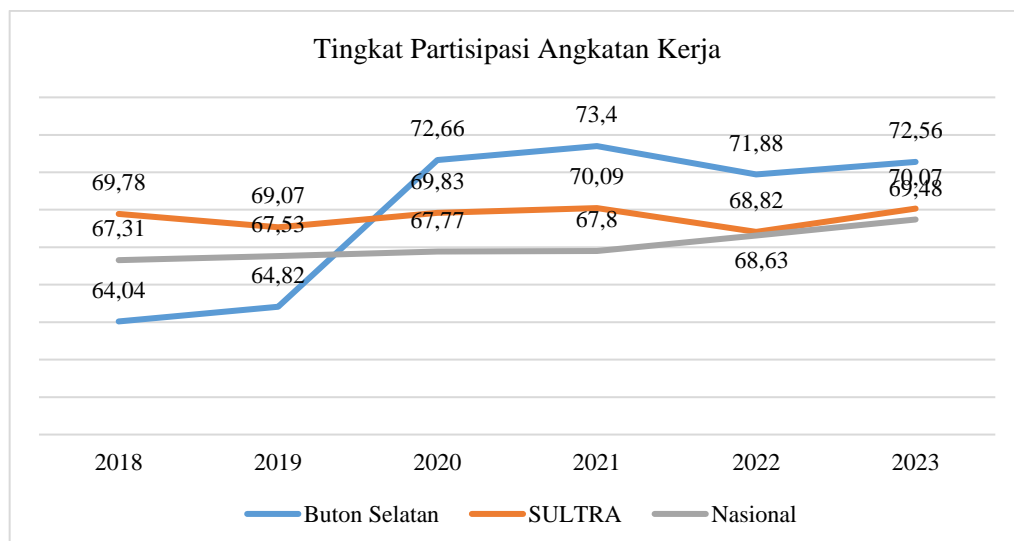




Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023**

Pengangguran terbuka salah satunya dipengaruhi oleh partisipasi angkatan kerja. Dilihat dari persentasenya, partisipasinya Angkatan kerja Kabupaten Buton Selatan antara 2018-2021 cukup baik dengan tren peningkatan, dari 64,04% menjadi 73,40%. Tetapi kemudian terjadi penurunan ditahun 2021, dan tahun 2023 masih dibawah capaian 2021.



Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023**

Meskipun demikian, angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2020-2023 terbilang baik, sebab angka capaiannya berada di atas rata-rata tingkat provinsi dan nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16,

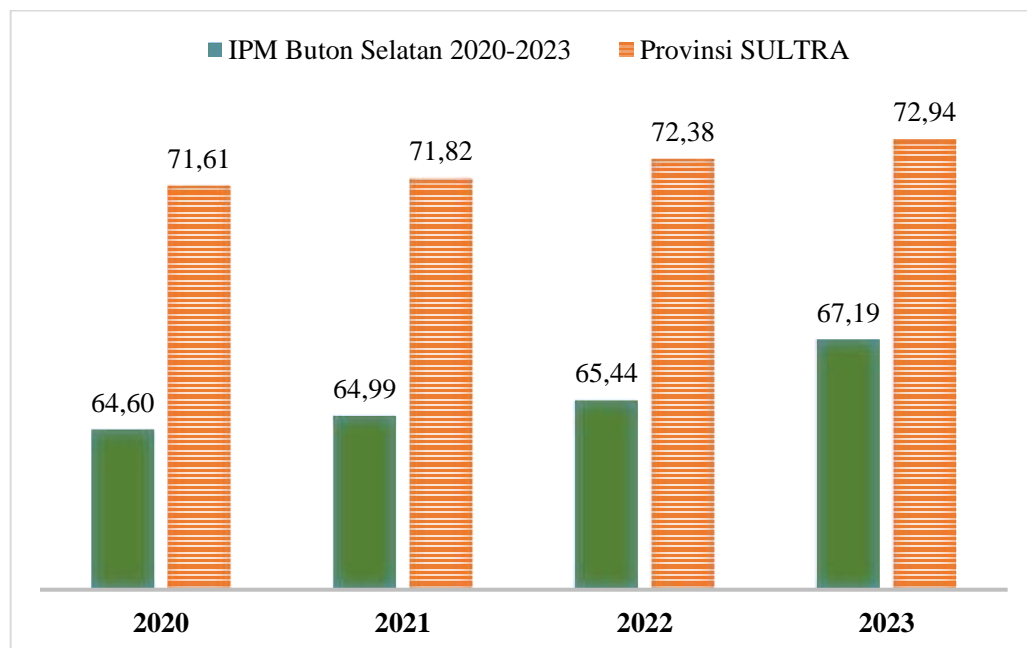




tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 3,53% menjadi 4,33% ditahun 2023.

### 3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam hal pembangunan manusia, IPM Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2020-2023 menunjukkan kinerja yang baik, karena ada tren peningkatan yang cukup signifikan. IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 adalah 64,60 naik menjadi 67,19 ditahun 2023 atau naik sekitar 2,59 atau 0,37 per tahun. Informasi tersebut disajikan pada Gambar 3.17.



Sumber: BPS, Kabupaten Buton Selatan, Diolah 2024

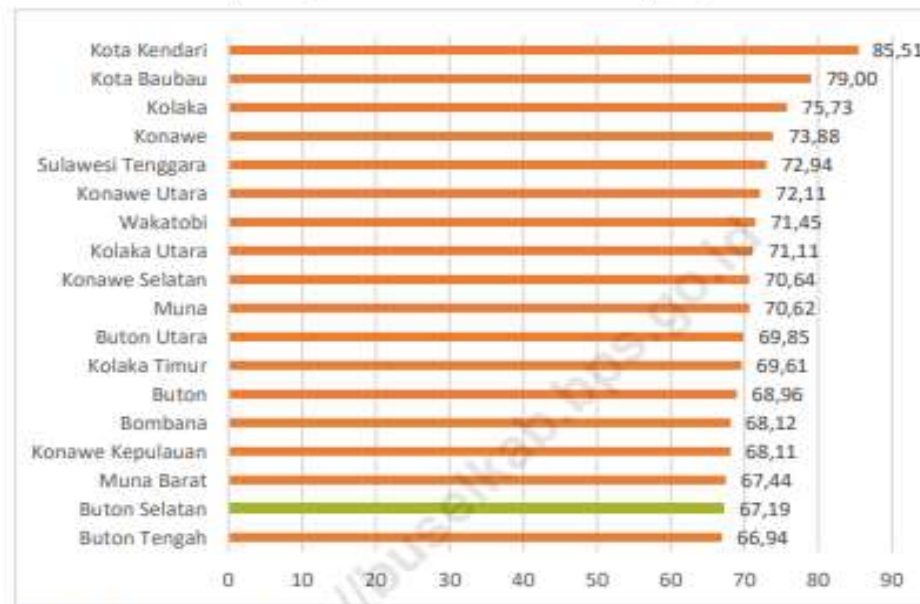
**Gambar 3.17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023**

Meskipun demikian, IPM Kabupaten Buton Selatan masih jauh lebih rendah dengan IPM rata-rata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan IPM Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu yang terendah. Informasi tersebut dilihat pada Gambar 3.18.





IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

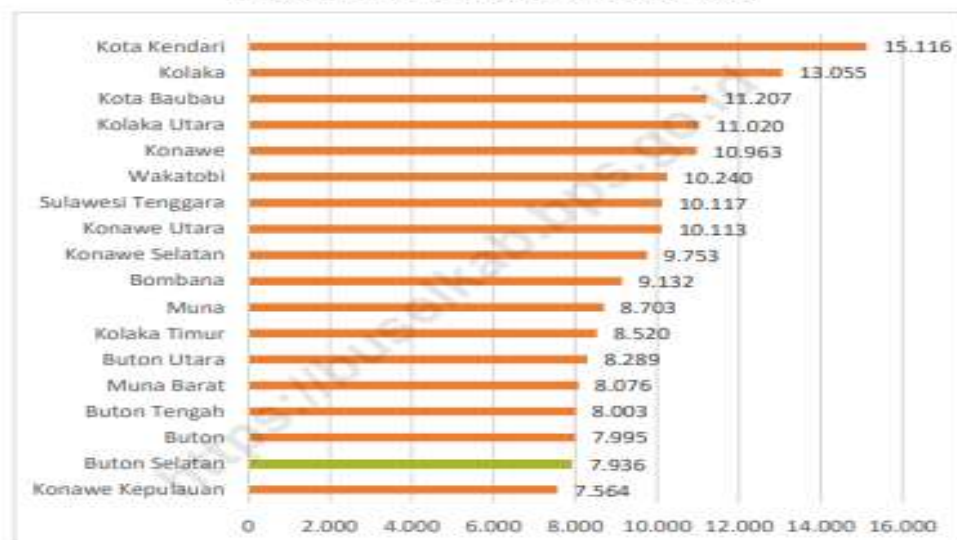
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

Gambar 3.18. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

### 3.2.5. Pengeluaran Rill (Per Kapita) Penduduk

Pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar Rp 7.476 ribu, kemudian meningkatkan ditahun 2023 menjadi Rp 7.936 ribu.

Pengeluaran Rill Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Ribu rupiah/orang/tahun), 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

Gambar 3.19. Pengeluaran Rill Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023



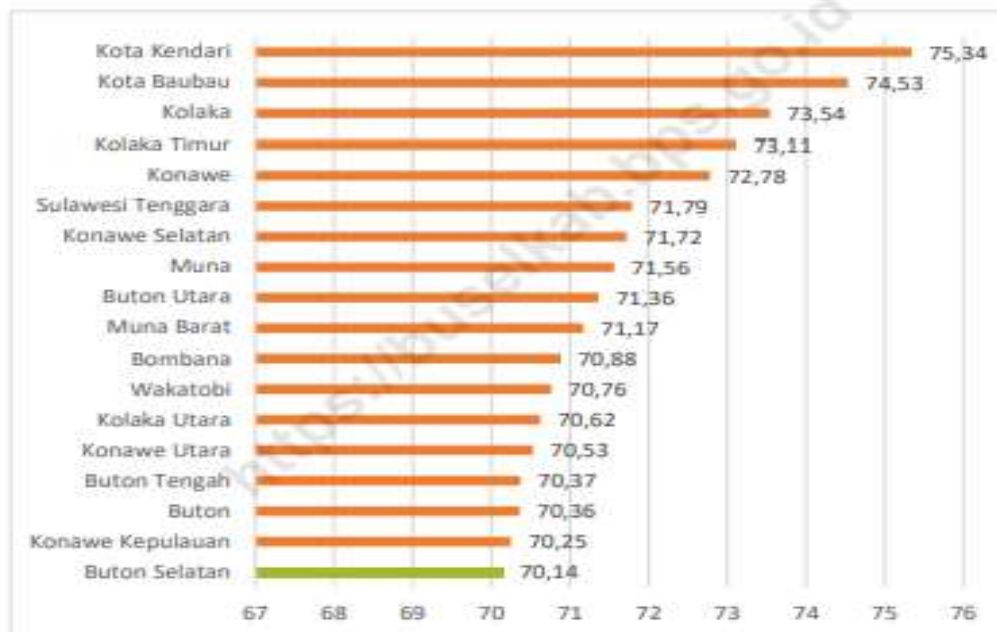


Hanya saja, angka tersebut masih jauh lebih rendah dari rata-rata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.19, penguaran per kapita penduduk yang disesuaikan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Rp 10.113 ribu.

### 3.2.6. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Angka harapan hidup di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 67,86 tahun, sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2022 diangka 67,76 tahun.

Umur Harapan Hidup Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tahun), 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

Gambar 3.20. AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

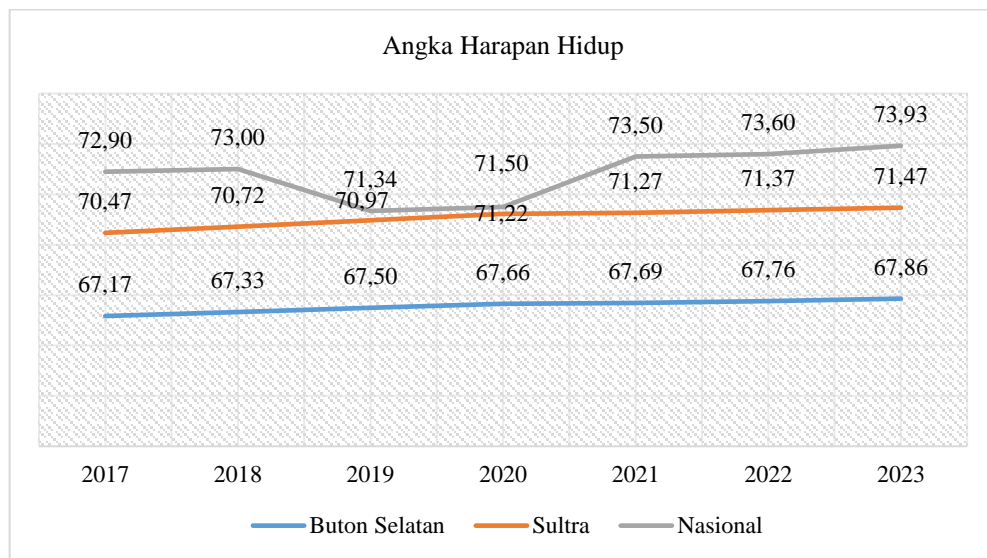
Pada Gambar 3.20 diketahui bahwa AHH Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 berada dibawah rata-rata provinsi. AHH Sulawesi Tenggara tahun 2023 adalah 71,79 tahun. Adapaun capaian AHH Kabupaten Buton Selatan tahun 2023, menempatkan daerah ini sebagai urutan terakhir dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

AHH Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2023 konsiten dibawah capaian provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan signifikan





pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia khusus dalam kesehatan. Adapun perbandingan AHH dimaksud ditunjukkan pada Gambar 3.21.



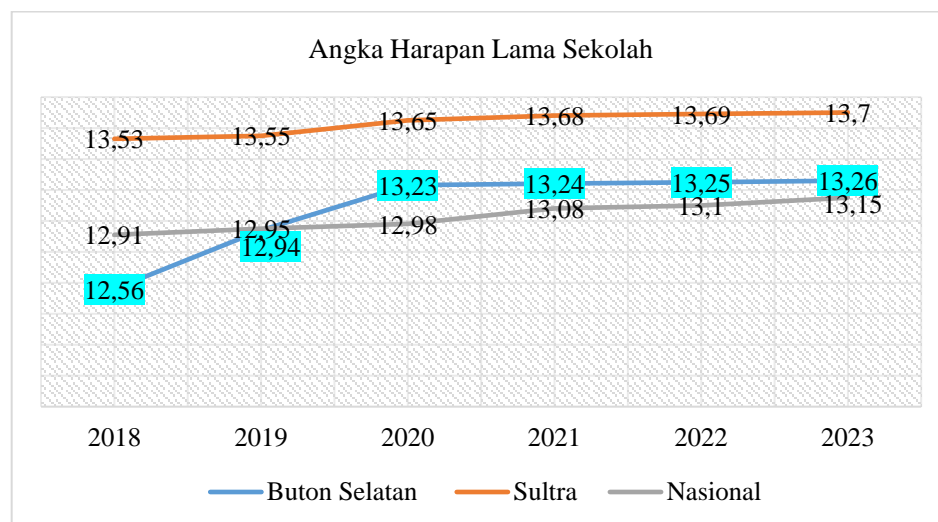
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.21. AHH Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023**

### 3.2.7. Pendidikan

#### a. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Aspek lain yang menggambarkan kemiskinan adalah dilihat dari kualitas pendidikan. Karakteristik kemiskinan melalui aspek pendidikan disajikan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).



**Gambar 3.22. Angka HLS Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023**

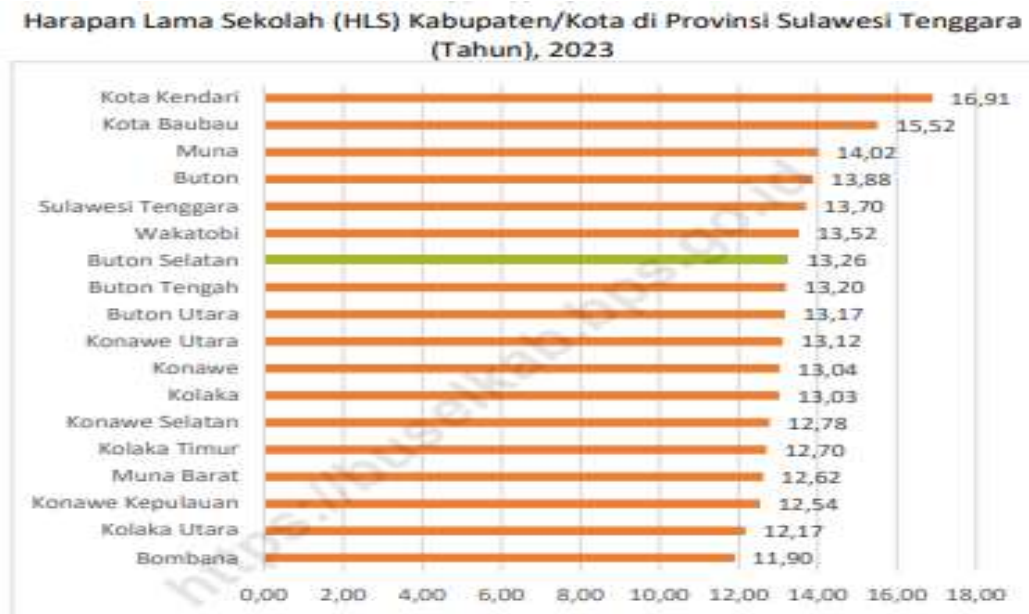
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 13,26 tahun. Dibanding dengan HLS tahun 2022, tidak menunjukkan





perubahan yang signifikan, dimana HLS adalah 13,25 tahun. Informasi tersebut selengkapnya dilihat pada Gambar 3.22.

Fakta lain adalah HLS tahun 2023 masih berada dibawah rata-rata provinsi yakni 13,26 tahun. Dengan fakta ini, maka agenda peningkatan HLS menjadi salah satu isu yang perlu ditingkatkan untuk tujuan pengentasan kemiskinan daerah. Data tersebut tersaji pada Gambar 3.23.



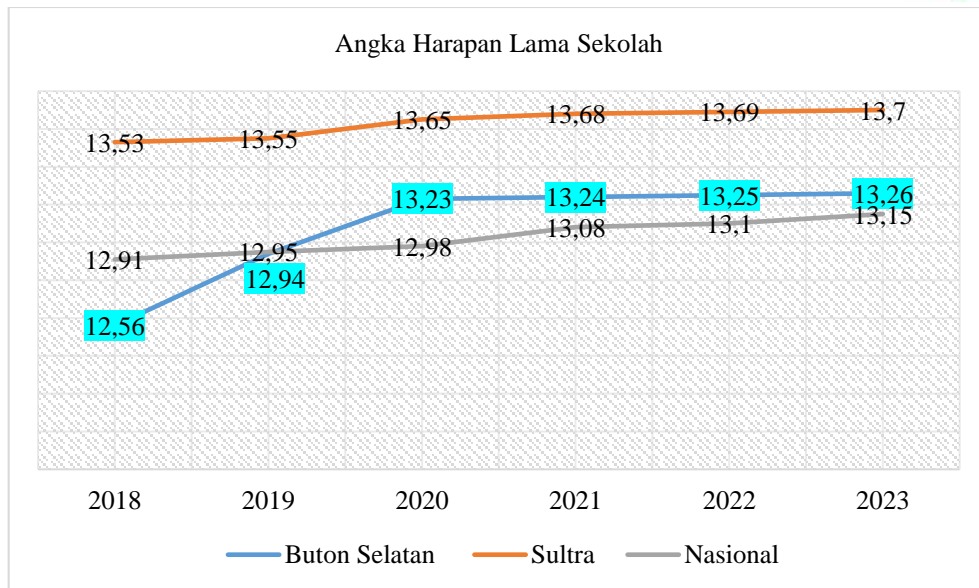
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.23. HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Buton Selatan terbaik kurang baik karena berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Memasuki tahun 2020-2023 kinerja mulai membaik, dimana capaian HLS Kabupaten Buton Selatan sudah lebih tinggi dari capaian provinsi, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Informasi selengkapnya disajikan pada Gambar 3.24.

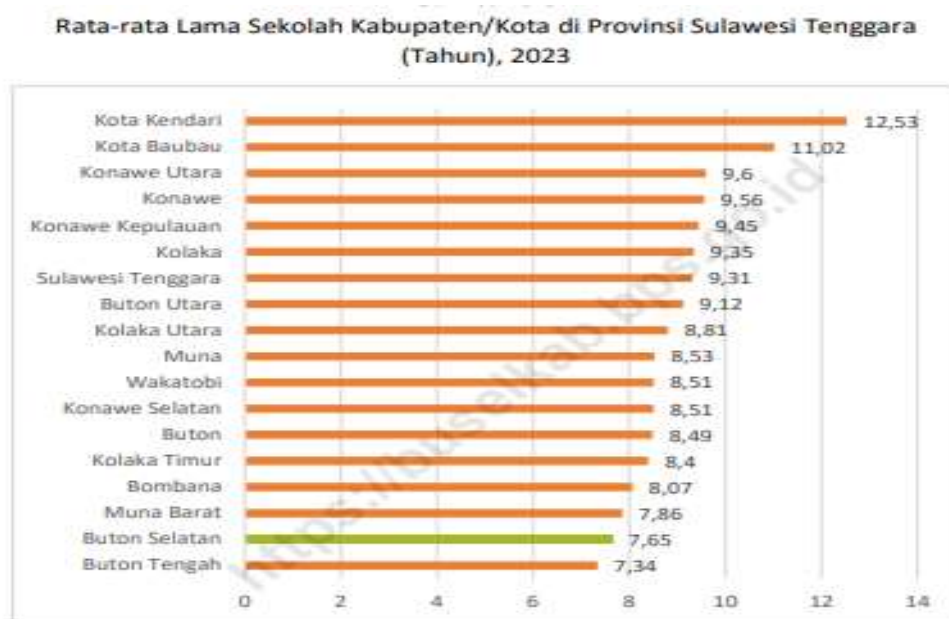




Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.24. HLS Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023**

Selanjutnya adalah capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dimana RLS Kabupaten Buton Selatan antara tahun 2022 ke 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. RLS di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 adalah 7,64 tahun, dan tahun 2023 7,65 tahun. Angka RLS Kabupaten Buton Selatan masih dibawah capaian provinsi, bahkan menempatkan sebagai salah satu yang terendah dari 17 kabupaten/kota. Informasi RLS tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.25.



Sumber : Badan Pusat Statistik

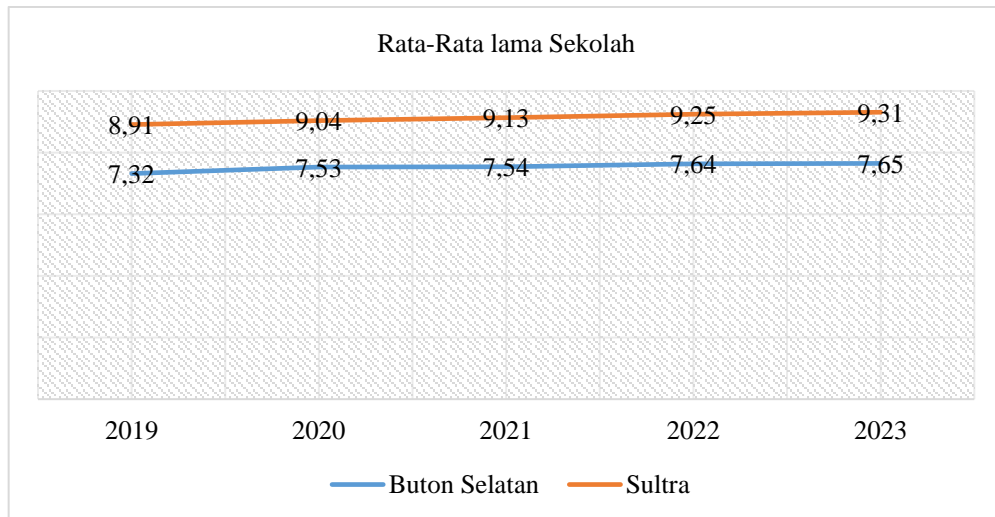
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.25. RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**





Fakta yang ditunjukkan pada Gambar 3.26 diketahui bahwa angka RLS di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2019-2023 nampak konsistensi lebih rendah dari tara-rata capaian pada tingkat provinsi. Fakta ini sekaligus memberi kontribusi RLS tingkat provinsi yang masih di bawah capaian nasional.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

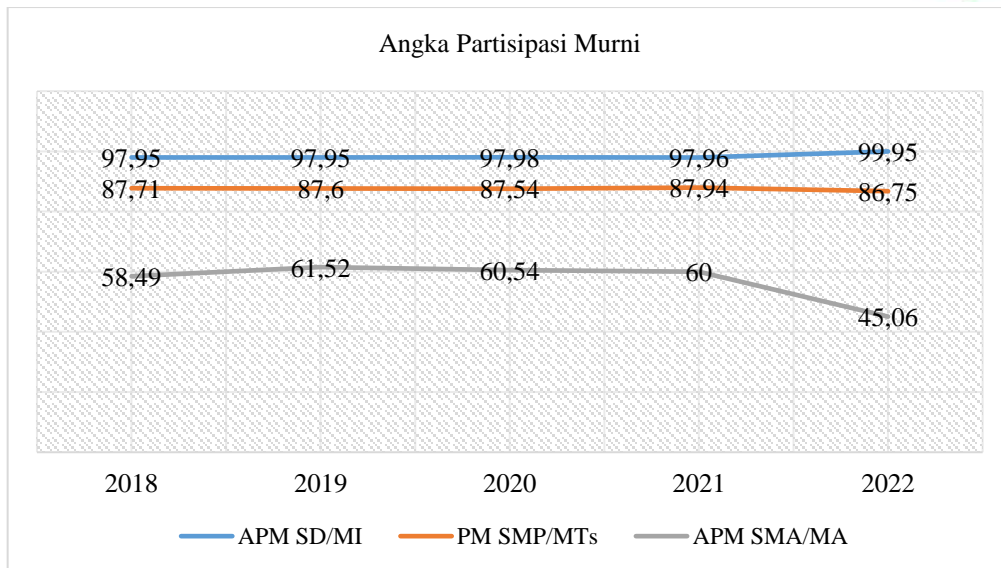
**Gambar 3.26. RLS Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi Tahun 2023**

#### **b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Selanjutnya adalah menggambarkan mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. APK merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. Standar yang digunakan adalah 100%, artinya semakin mendekati angka tersebut, maka APK semakin baik, begitupun sebaliknya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Standar yang digunakan adalah 100%. Adapun capaian APM Kabupaten Buton Selatan menurut satuan tingkat Pendidikan selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 3.27.

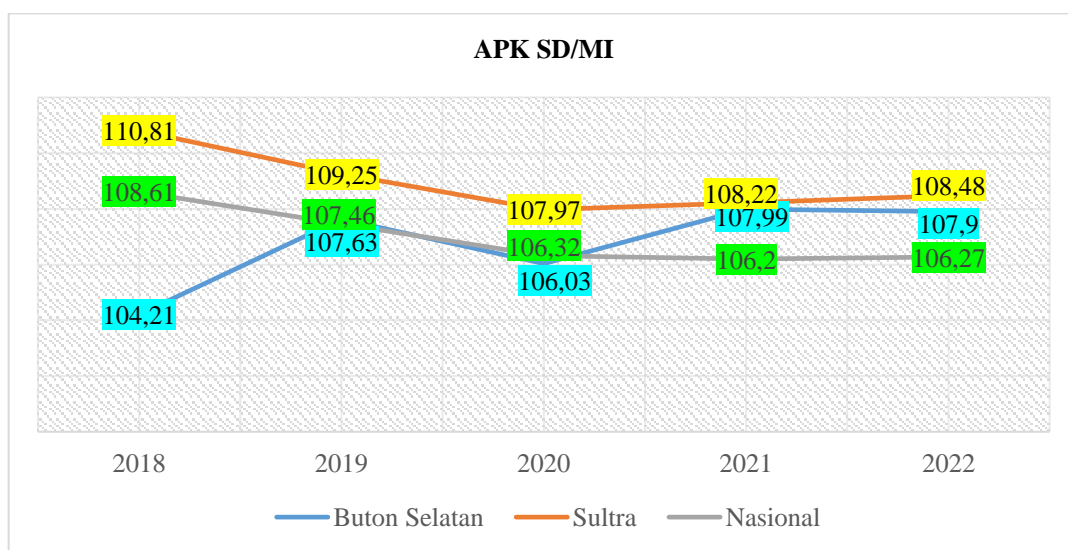




*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

**Gambar 3.27. APM di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022**

APK SD/MI/ sederajat Kabupaten Buton Selatan dari 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.28.

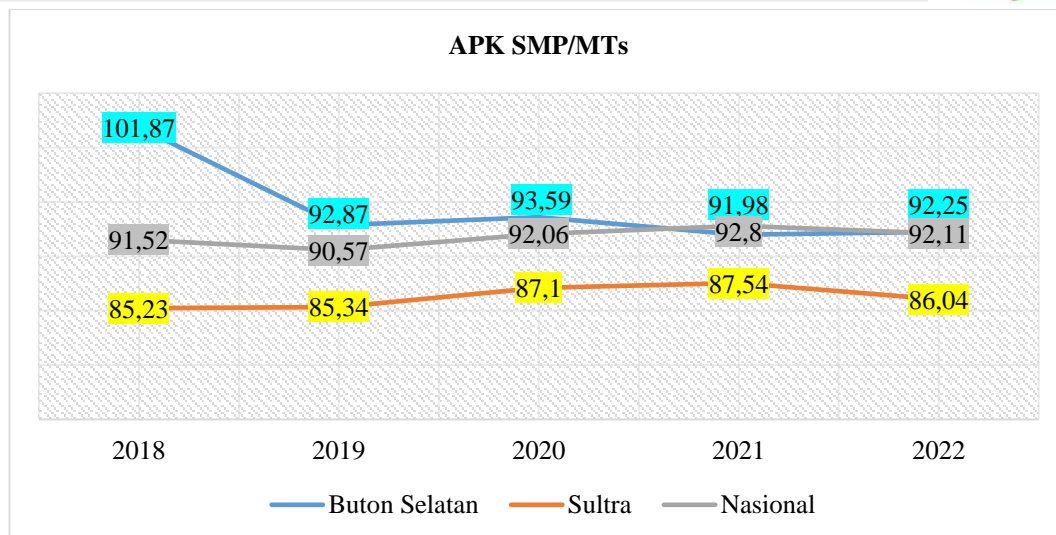


*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

**Gambar 3.28. APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022**

Meskipun terjadi peningkatan, angka tersebut masih berada dibawah APK rata-rata provinsi dan nasional. Karena itu, isu pengantasan kemiskinan melalui Pendidikan dengan APK pada tingkat Pendidikan SD/MI/ sederajat masih perlu ditingkatkan untuk menyampai rata-rata nasional.

APK tingkat Pendidikan SMP/MTs/ Sederajat di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.29.

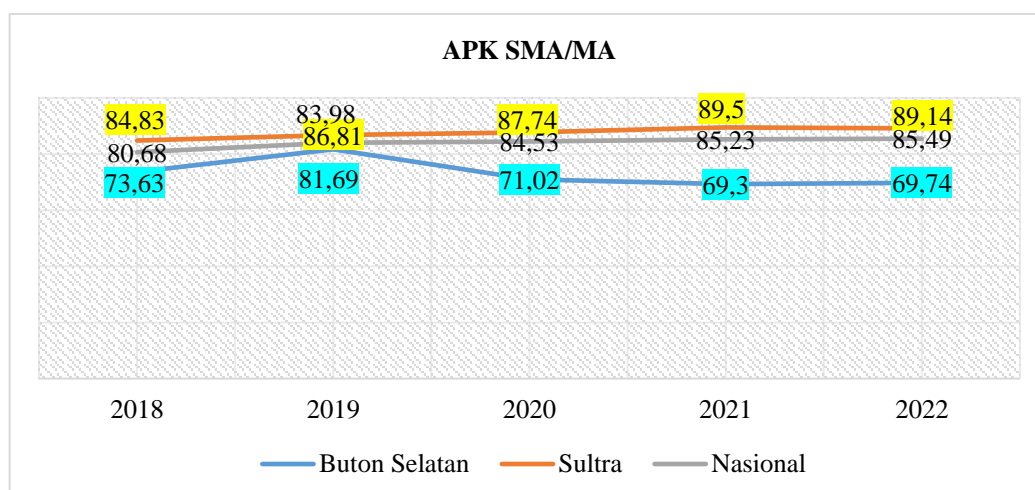


*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

**Gambar 3.29. APK SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022**

APK tingkat Pendidikan SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama 2019-2022 terbilang baik, karena berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian karena APK SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton menunjukkan trend penurunan.

Selanjutnya, pada Gambar 3.30 diketahui bahwa APK SMA/MA/sederajat Kabupaten Buton Selatan dari 2018-2022 menunjukkan penurunan, dari 73,63 menjadi 69,74%. Angka APK ini juga masih berada jauh dibawah angka rata-rata capaian provinsi dan nasional, bahkan capaian provinsi dan nasional justru menunjukkan peningkatan.



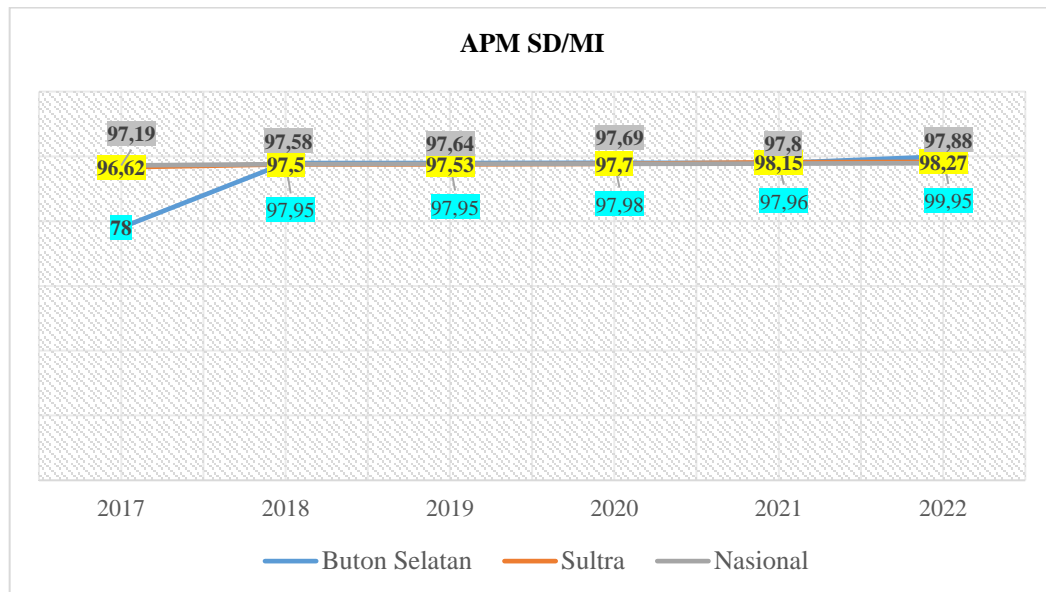
*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

**Gambar 3.30. APK SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2018-2022**

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.31, APM untuk SD/MI/sederajat selama tahun 2017-2022 cukup baik dengan adanya kencerungan peningkatan dari 78%



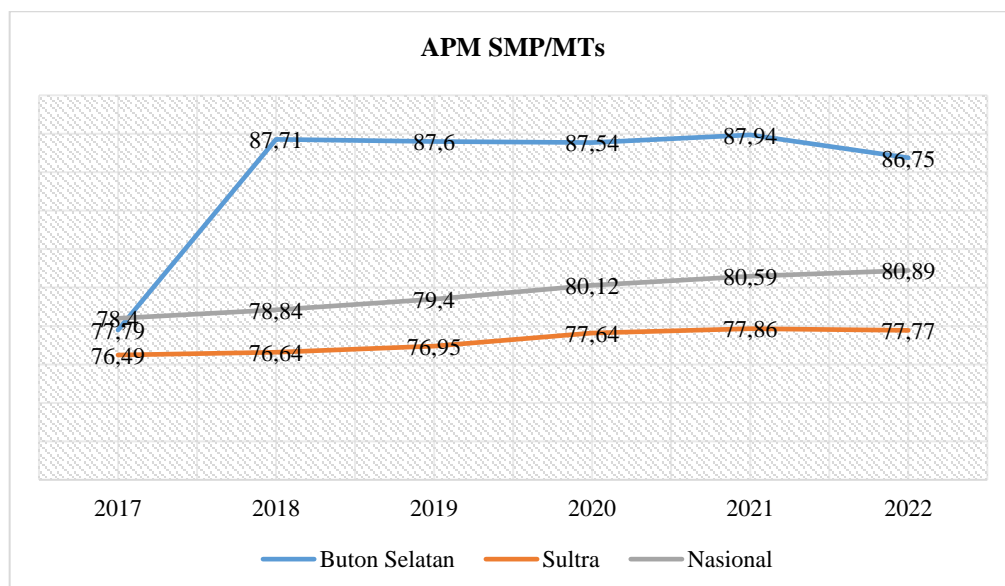
menjadi 99%. Bahkan sejak tahun 2018-2022 angkanya berada di atas capaian provinsi dan nasional.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

Gambar 3.31. APM SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022

Hal yang sama juga pada APM untuk SMP/MTs/ sederajat dimana antara tahun 2017-2022 capaian di Kabupaten Buton Selatan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Perkembangan APM untuk SMP/MTs/ sederajat tersaji pada Gambar 3.32.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

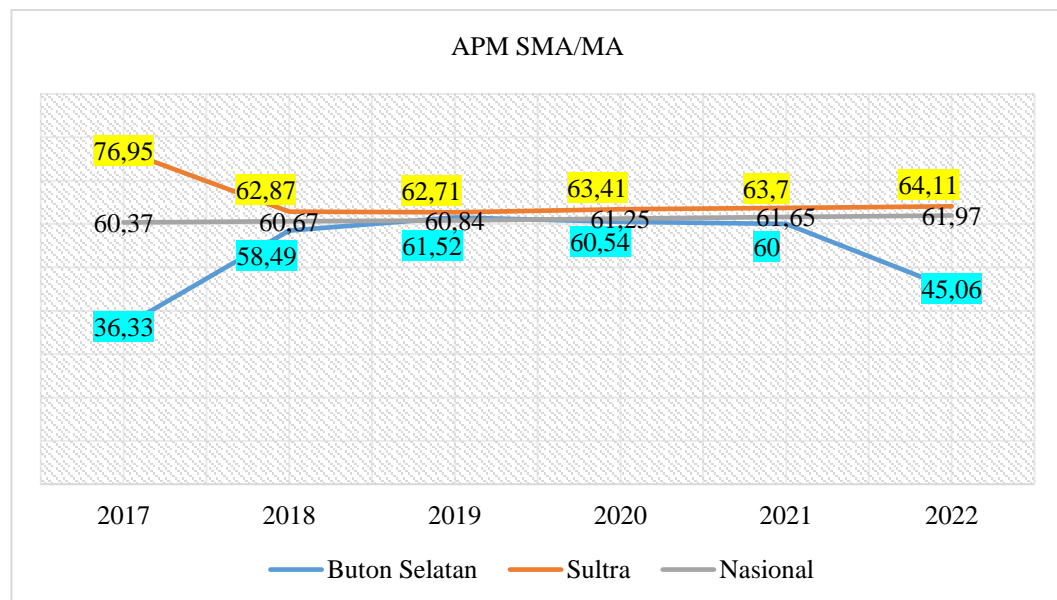
Gambar 3.32. APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022

Berbeda dengan APM untuk SMA/MA/ sederajat dimana antara tahun 2017-2022 capaian di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan penurunan dan berada di





bawah rata-rata capaian provinsi dan nasional. Capaian ini cukup menjadi perhatian, sebab APM untuk SMA/MA/ sederajat di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Informasi lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.33 berikut.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

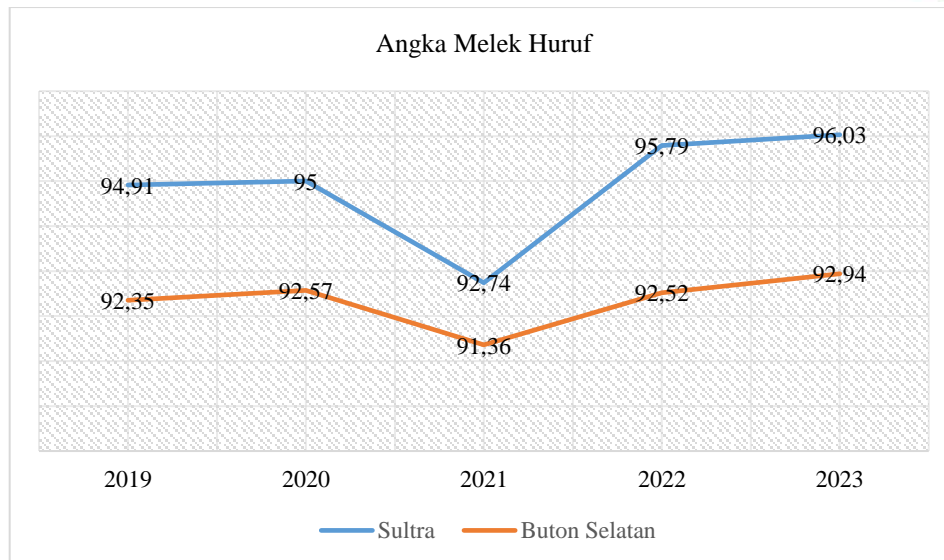
Gambar 3.33. APM SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan 2017-2022

### c. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, serta mengerti kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. AMH berkisar antara 0-100. Tingkat AMH yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan yang ada efektif. AMH juga merupakan tolak ukur penting untuk mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah.

AMH di Kabupaten Buton Selatan selama 2019-2023 terbilang baik karena menunjukkan peningkatan dan lebih baik dari capaian pada tingkat provinsi. AMH Buton Selatan tahun 2019 adalah 94,91 dan provinsi diangka 92,35. Begitupun tahun 2023, Kabupaten Buton Selatan diangka 96,03 dan provinsi 92,94. Informasi tersebut disajikan pada Gambar 3.34.





*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

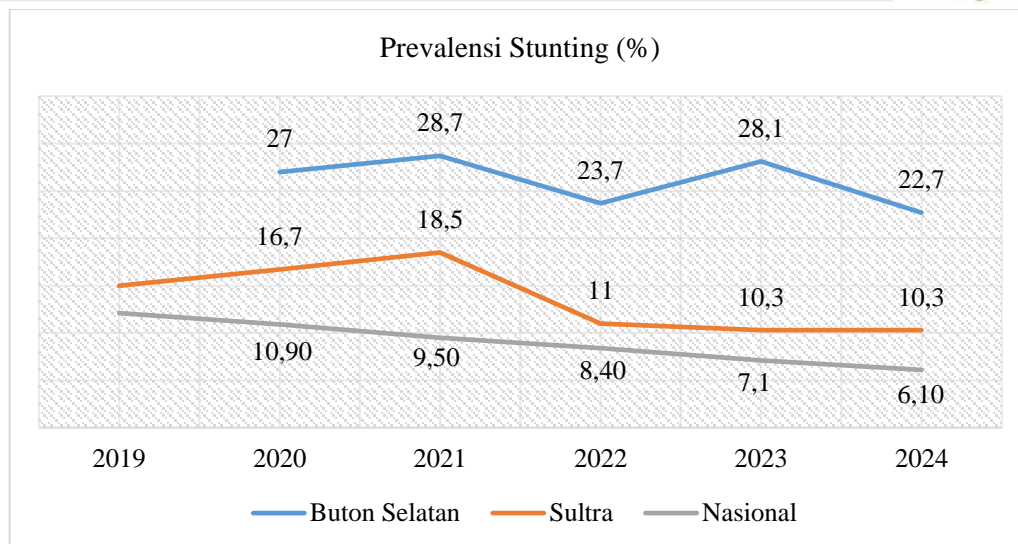
**Gambar 3.34. AMH Kabupaten Buton Selatan Terhadap Provinsi Tahun 2019-2023**

### 3.2.8. Prevalensi *Stunting*

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di bawah usia lima tahun yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. *Stunting* disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kekurangan gizi kronis sekaligus merepresentase dari kondisi kemiskinan keluarga.

Sementara itu, Prevalensi *Stunting* adalah persentase jumlah anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami *stunting* atau memiliki tinggi badan di bawah standar yang diharapkan untuk usia mereka. Prevalensi *stunting* digunakan untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Angka prevalensi diperoleh dari jumlah penderita lama dan baru dalam satu waktu ÷ jumlah penduduk x 100%. Dengan pendekatan tersebut, maka diperoleh angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.35.





*Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023*

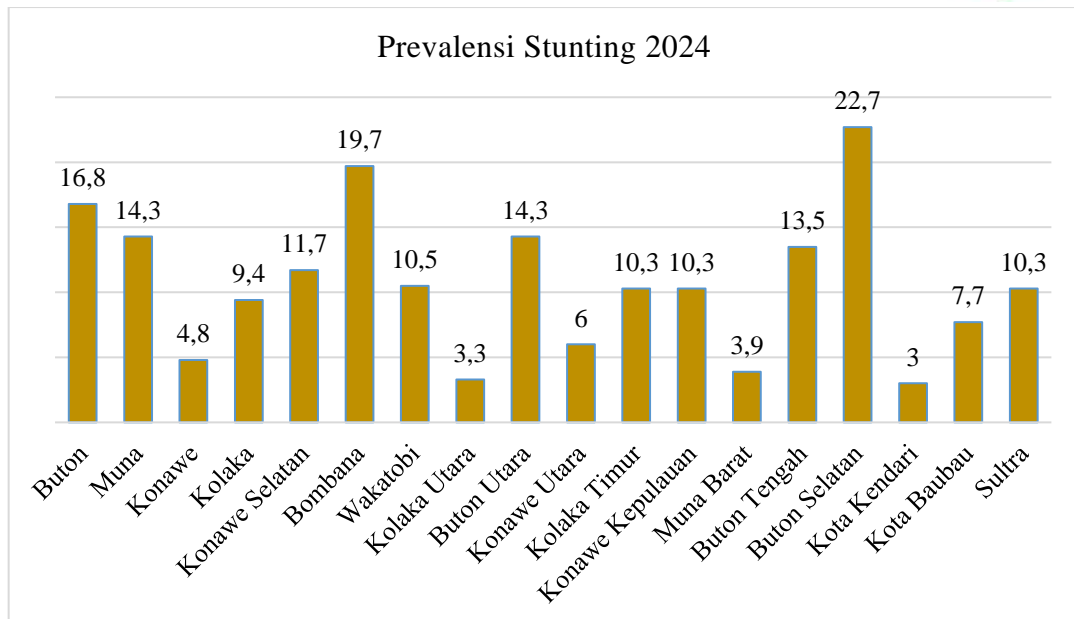
**Gambar 3.35. Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024**

Gambar di atas memperlihatkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif dan ada pola kecenderungan peningkatan. Misalkan prevalensi stunting tahun 2020 sekitar 27% naik menjadi 28% ditahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022.

Fakta lain dari Gambar 3.35, bahwa penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2020-2023 dapat dikatakan belum baik, sebab angka prevalensinya masih sangat tinggi, hampir dua kali lipat dari prevalensi tingkat provinsi, dan hampir 3 kali lipat dibanding angka prevalensi nasional.

Menjelang akhir tahun 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan tercatat diangka 22,70% dan ada potensi kenaikan hingga Desember 2024. Dari angka ini, menempatkan prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan sebagai yang tertinggi di Sulawesi Tenggara. Prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan bahkan lebih tinggi dibanding daerah otonom baru lain seperti Buton Tengah dan Muna Barat. Bahkan gap angka prevalensi sangat besar, dimana Muna Barat diangka 3,9% dan Buton Tengah 13,5%. Data tersebut selengkapnya disajikan pada Gambar 3.36.

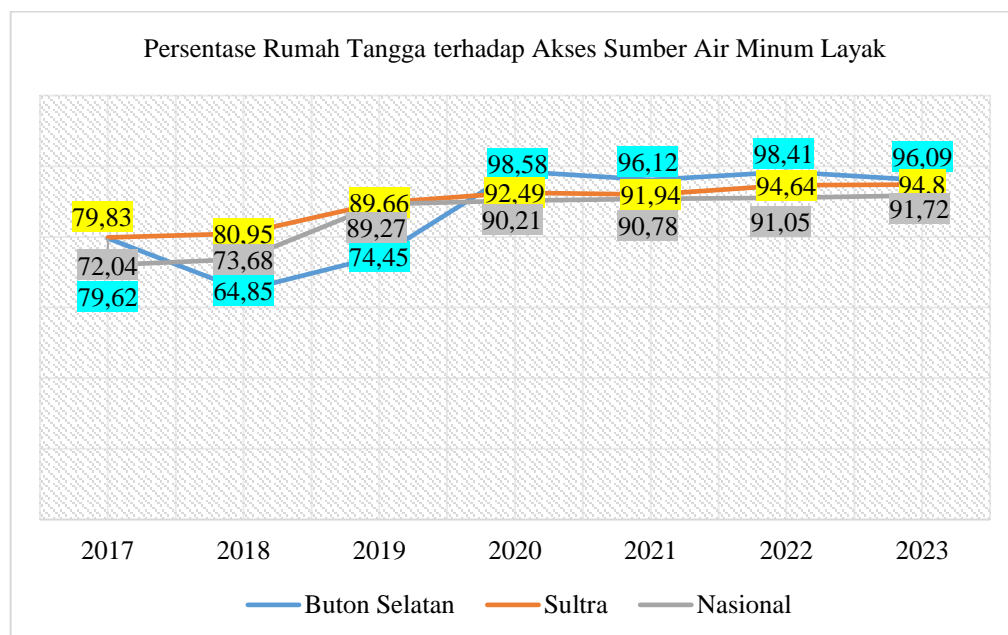




**Gambar 3.36. Prevalensi Stunting di Sulawesi Tenggara, Oktober 2024**

### 3.2.9. Akses Air Rumah Tangga Layak

Upaya pemenuhan air baku untuk rumah tangga di Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2023 terbilang cukup baik. Hal ini terjadi karena ada peningkatan persentase layanan rumah tangga atas akses untuk pemenuhan air minum dan kebutuhan rumah tangga lain yang sehat. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.37 bahwa rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang sehat selama tahun 2017-2018 diangka 72 dan 75%, kemudian mengalami peningkatan diangka 90% selama tahun 2020-2023.



Sumber: Data P3KE Kabupaten Buton Selatan, 2023

**Gambar 3.37. Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024**



Data pada Gambar 3.37 juga diketahui bahwa selama tahun 2020-2023 persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum lebih tinggi dari rata-rata capaian provinsi dan bahkan lebih tinggi dari capaian nasional. Artinya bahwa persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih dan air minum lebih baik dari kondisi pada tingkat provinsi dan nasional.

### **3.3. Analisis Karakteristik Kemiskinan**

#### **3.3.1. Karakteristik Kemiskinan Menurut Konsumsi**

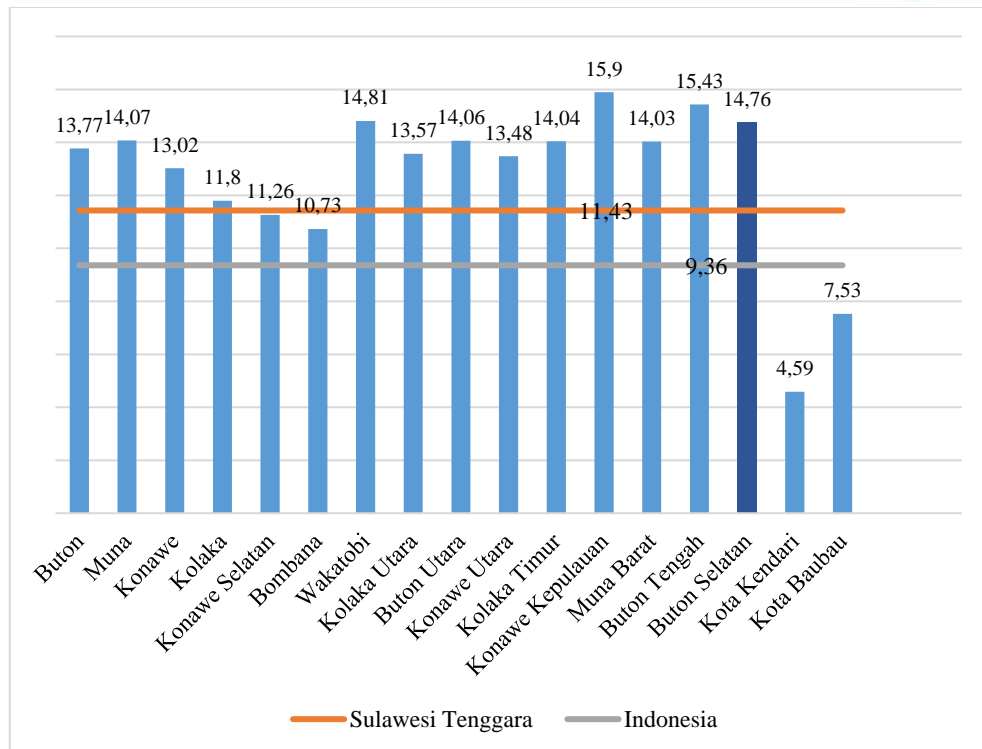
##### **3.3.1.1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin (P0)**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

##### **1) Posisi Relatif**

Berdasarkan data BPS yang disajikan pada Gambar 3.38, capaian Kabupaten Buton Selatan masih jauh berada di atas dari capaian nasional dan provinsi. Capaian Persentase Penduduk Miskin masih di atas capaian Nasional secara keseluruhan yaitu sebesar 14,75% di tahun 2023. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat 4 teratas. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,90%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Kendari dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,59%.



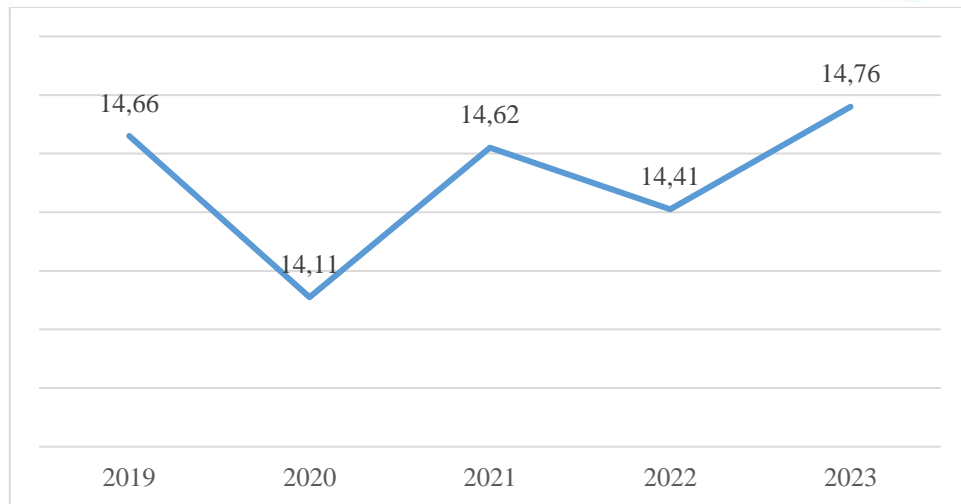


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.38. Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan *time series*/antar waktu persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Buton Selatan berada pada titik 14,66%. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan menjadi 14,11% atau mengalami penurunan sebanyak 0,55% dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali berada pada titik 14,62% atau meningkat 0,51% dibandingkan pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 14,41% atau turun sebesar 0,10%. Namun pada awal tahun 2023 tingkat kemiskinan menjadi sebesar 14,76% atau mengalami kenaikan sebesar 0,35% dibanding dengan tahun 2022. Informasi lengkap disajikan pada Gambar 3.39.

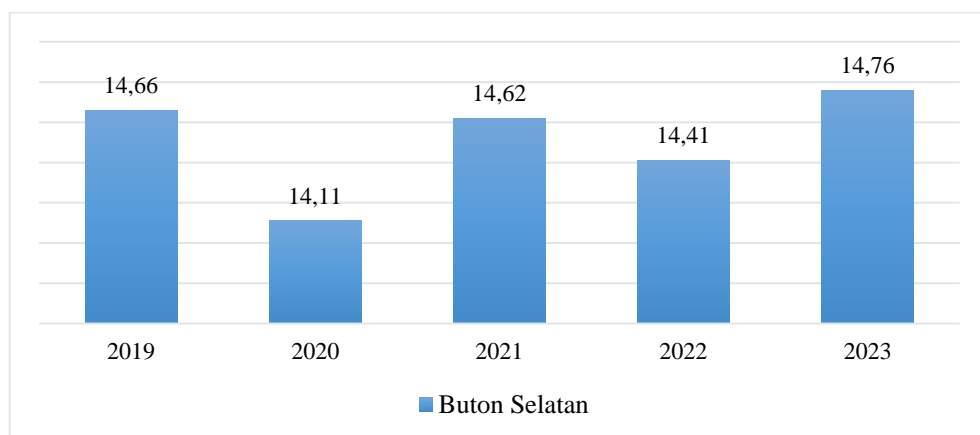


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.39. Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

### 3) Efektivitas

Gambar 3.40 menunjukkan tren persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 –2023 yang fluktuatif, awalnya turun hingga tahun 2020, kemudian beranjak naik pada tahun 2021 dan turun lagi pada tahun 2022 untuk kemudian naik kembali di tahun 2023.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.40. Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

Hal ini menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2023 belum cukup efektif menurunkan persentase penduduk miskin sehingga mengalami fluktuasi.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan



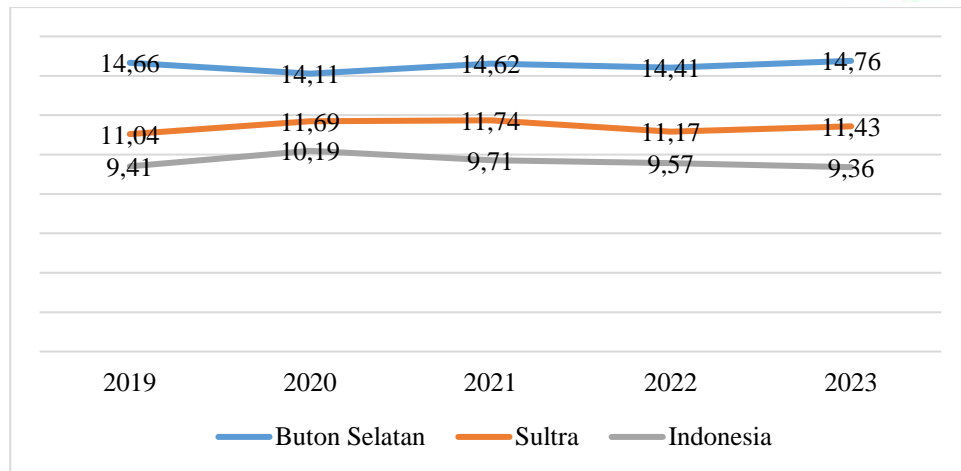
bahwa program penanggulangan kemiskinan belum berjalan efektif. Terlebih lagi secara umum, persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan masih berada di atas persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

#### **4) Relevansi**

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi, dimana kecenderungan meningkat hingga tahun 2023. Kecenderungan ini sedikit relevan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023, namun tidak relevan dengan capaian persentase penduduk miskin Nasional yang walaupun sempat meningkat di tahun 2020 akan tetapi perlahan berhasil menurunkannya hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi kemiskinan Kabupaten Buton Selatan berkontribusi positif bagi fluktuasi kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak berkontribusi positif bagi penurunan kemiskinan Nasional.

Kecenderungan capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan yang fluktuatif, baik kenaikan maupun penurunannya memiliki trend yang sama dengan pergerakan kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat dikatakan bahwa program pengentasan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan telah relevan dan berkontribusi positif terhadap capaian penurunan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun fluktuasi tersebut tidak relevan dengan trend nasional, dimana capaian persentase penduduk miskin nasional mengalami penurunan secara perlahan hingga tahun 2023. Berikut ini secara lebih jelas pada Gambar 3.41.





Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.41. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

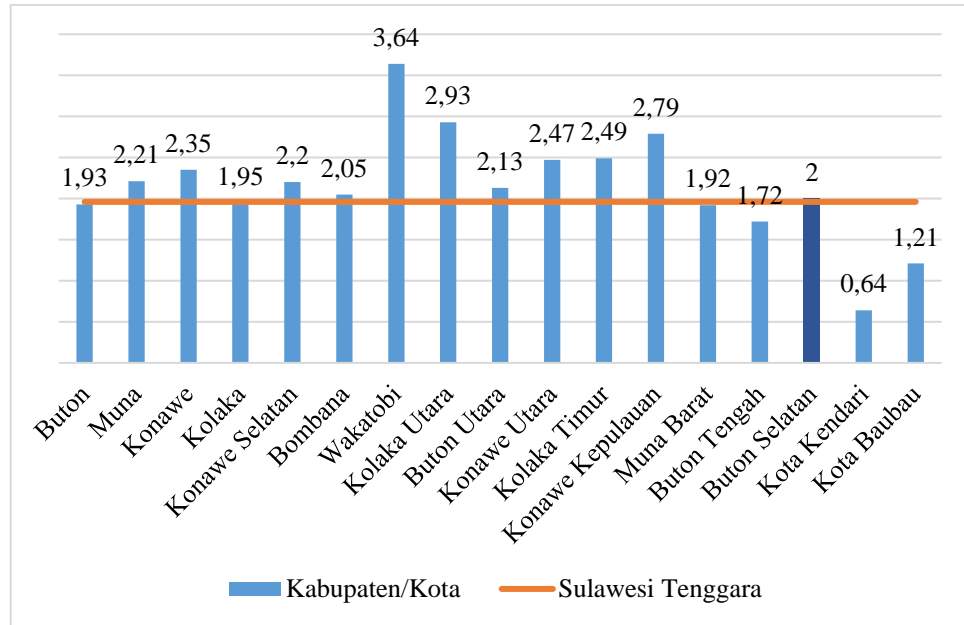
### 3.3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tingkat kedalaman kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

#### 1) Posisi Relatif

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 berdasarkan data BPS 2024 sebanyak 2 poin. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Buton Selatan ini termasuk rata-rata atau masuk urutan ke tujuh dari 14 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Buton Selatan berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara. Kota/Kabupaten dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) terbesar adalah Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan Kota/Kabupaten dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) terkecil adalah Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Tengah. Lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 3.42 berikut.

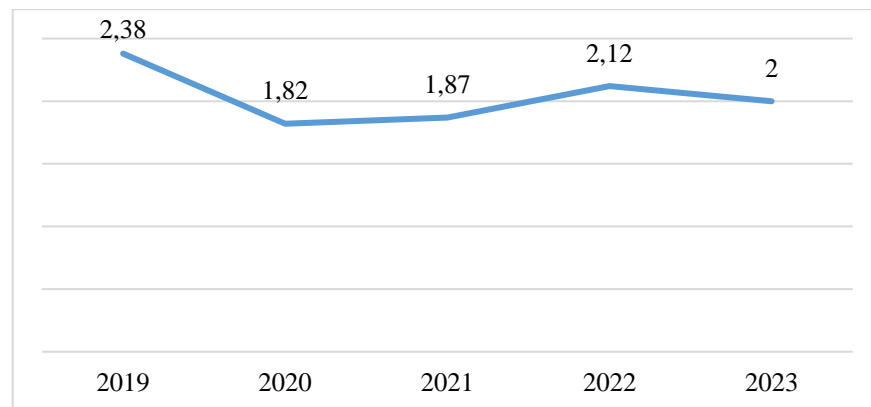




Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.42. Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, 2024

**Gambar 3.43. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

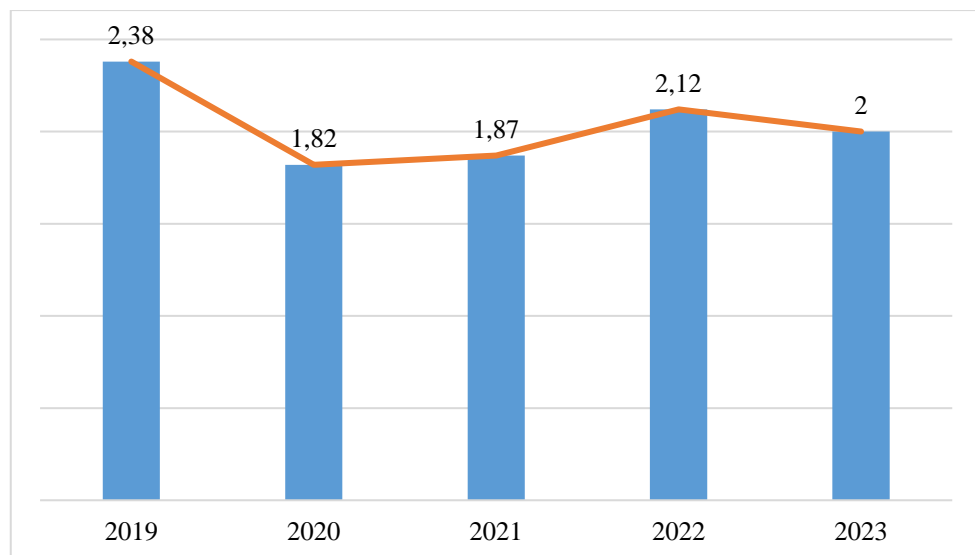
Berdasarkan data BPS, perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2019 – 2023 menunjukkan fluktuatif, pada tahun 2020, P1 Kabupaten Buton Selatan turun 0,56 poin menjadi 1,82 dibandingkan tahun 2019 dimana P1 Kabupaten Buton Selatan sebesar 2,38. Sedangkan pada tahun 2021 P1 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 1,87 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,25 poin menjadi 2,12 dan kembali turun cukup signifikan yaitu sebesar 0,12



poin menjadi 2,00 pada tahun 2023. Berikut ini perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Buton Selatan selama kurun waktu 2019-2023 (Gambar 3.43).

### 3) Efektifitas

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Buton Selatan periode 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan atau tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan, walaupun pada tahun 2022 ada peningkatan kembali (Gambar 3.44).



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.44. Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

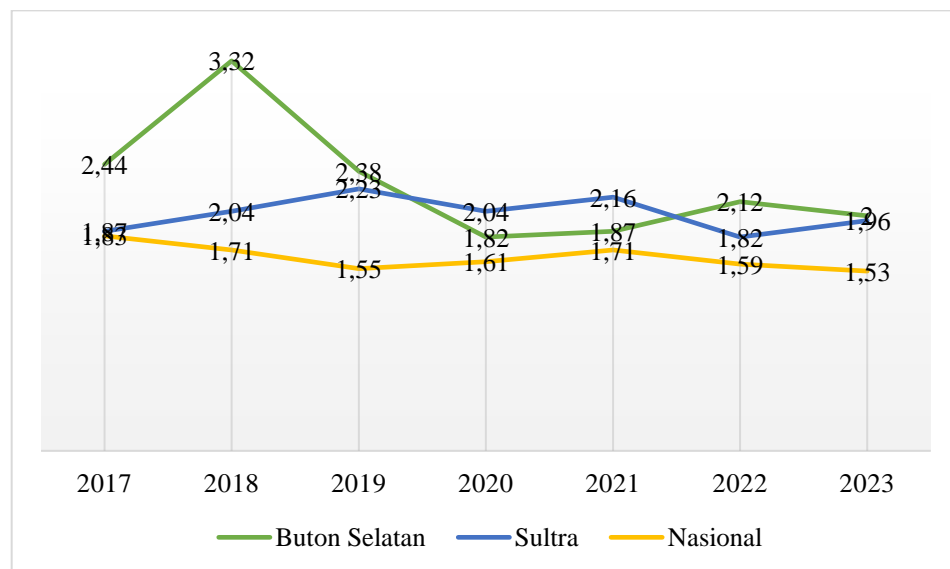
### 4) Relevansi

Berdasarkan Gambar 3.45 menunjukkan capaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Buton Selatan tahun 2017 – 2023 cukup relevan dengan capaian tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Nasional dan Provinsi. Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan yang jauh tinggi di atas provinsi dan nasional. Namun, kondisi yang berbeda mulai terjadi pada tahun 2019 yang mulai mendekati capaian Provinsi dan bahkan pada tahun 2020 dan 2021 telah mampu melampaui capaian provinsi. Tahun 2022 P1 Kabupaten Buton Selatan mengalami kenaikan sedangkan P1 provinsi dan nasional mengalami penurunan. Tahun 2023, P1 Kabupaten





Buton Selatan kembali mampu turun mendekati capaian provinsi yang mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi poin di Kabupaten Buton Selatan cukup mempengaruhi kondisi P1 nasional dan provinsi. Kondisi tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hal yang sebaliknya dengan capaian provinsi namun cukup relevan dan berkontribusi positif terhadap capaian nasional.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.45. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan menunjukkan penurunan yang sangat berarti pada tahun 2018 dari posisi 3,32 menjadi 1,82 di tahun 2020 dan mampu bertahan di 1,87 pada tahun 2021 walaupun sempat naik menjadi 2,12 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan Buton Selatan dapat kembali turun menjadi 2,00.

Dibandingkan dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian Kabupaten Buton Selatan telah cukup relevan dan berkontribusi positif dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara Nasional, meskipun capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan masih berada di atas capaian Nasional namun penurunannya telah cukup relevan dan berkontribusi positif untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional.





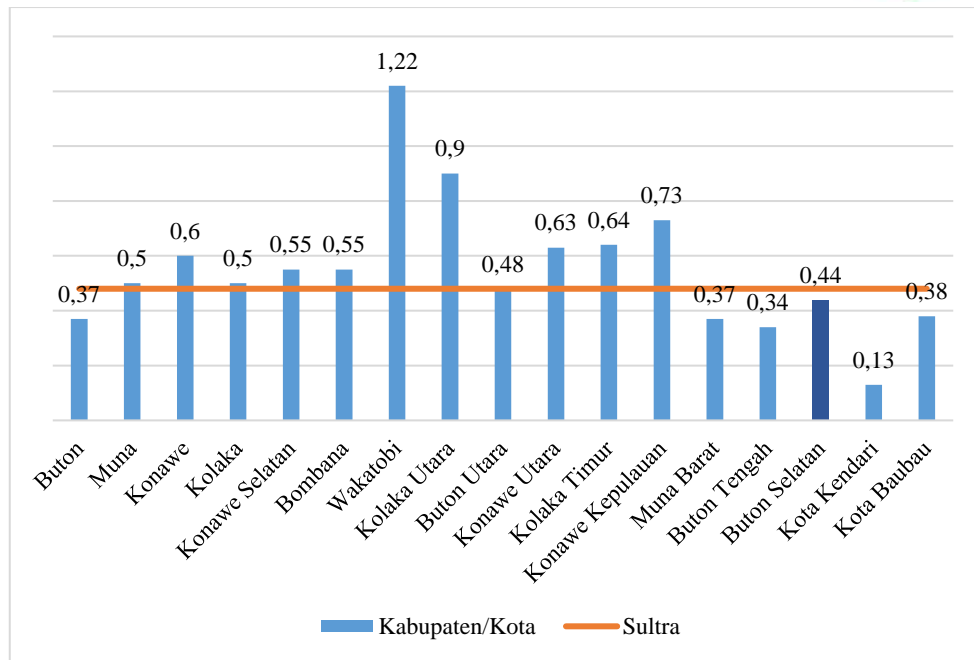
### 3.3.1.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun berikut ini dijabarkan kondisi tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan dalam posisi relatif terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dan dalam kurun waktu tertentu.

#### 1) Posisi Relatif

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan data BPS 2024, P2 Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,44. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi yang sebesar 0,48. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semakin kecil semakin baik, begitupun sebaliknya semakin besar maka semakin tidak baik karena ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar. Berdasarkan provinsi tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Buton Selatan berada pada peringkat ke-6 terbawah (nilai kecil). Kabupaten/kota dengan tingkat keparahan kemiskinan (P2) paling kecil adalah Kota Kendari, yaitu sebesar 0,13. Sedangkan kabupaten/kota dengan P2 tertinggi adalah Kabupaten Wakatobi, yaitu sebesar 1,22. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian P2 Kabupaten Buton Selatan termasuk rata-rata atas. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.46 berikut.



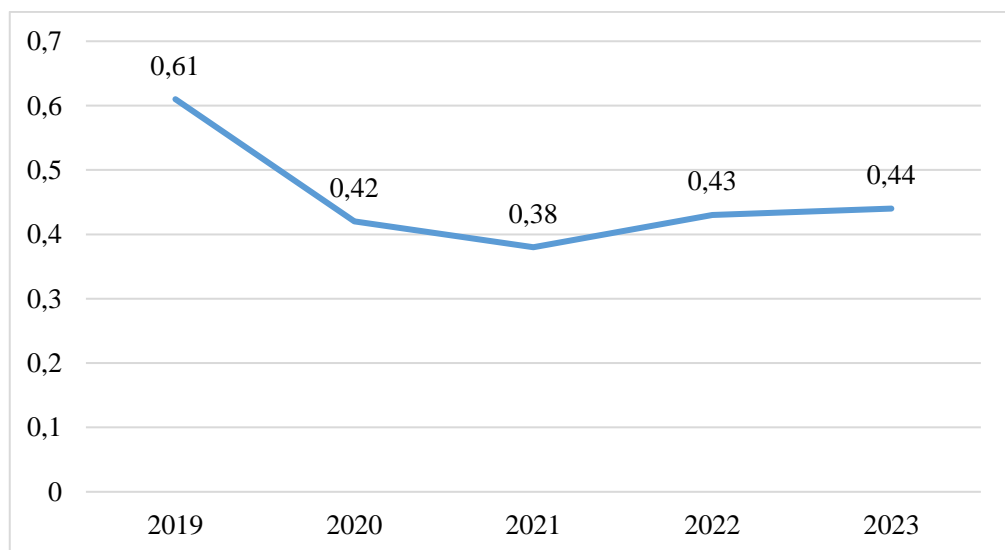


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.46. Analisis Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,42 atau mengalami penurunan 0,19 poin dibandingkan tahun 2019 dimana P2 sebesar 0,61. Penurunan terjadi hingga tahun 2021 namun kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.47.

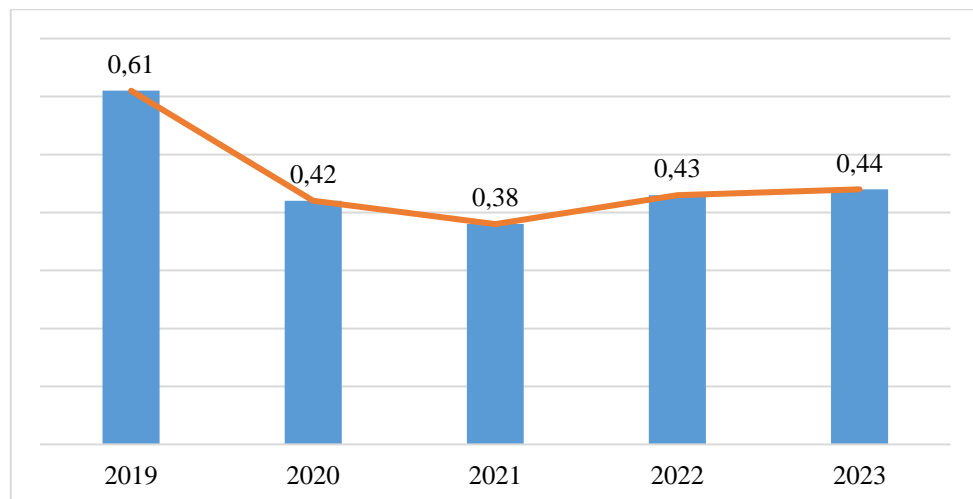


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.47. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

### 3) Efektivitas

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Buton Selatan periode 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat keparahan kemiskinan, walaupun pada tahun 2022 ada peningkatan kembali hingga tahun 2023. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.48.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.48. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

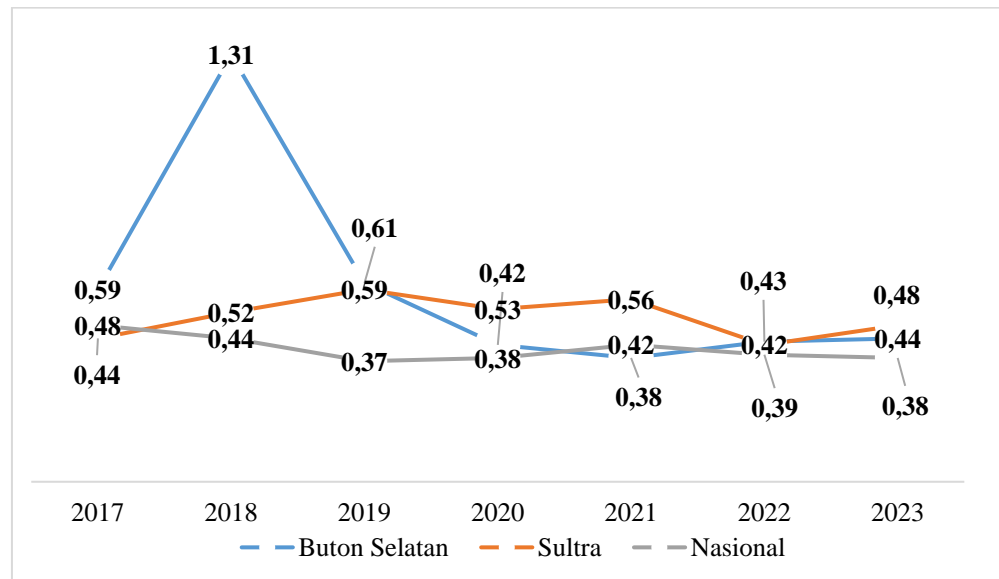
### 4) Relevansi

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan pada awal terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) mengalami peningkatan tajam dari 0,59 menjadi 1,31 pada tahun 2018. Namun dengan pelaksanaan program-program penanggulngan kemiskinannya, pada akhirnya tahun 2019 turun menjadi 0,61 dan secara konsisten terus menurun hingga melampaui capaian penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional pada tahun 2021. Capaian penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan telah sangat relevan dengan upaya penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Capaian ini berkontribusi positif dalam menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi maupun Nasional.

Gambar 3.49 menunjukkan bahwa penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan tahun 2018 hingga tahun 2023 telah mampu melampaui capaian penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan



Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan pada tahun 2021 telah melampaui penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan telah sangat efektif menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di wilayah Buton Selatan dimana sebelumnya pada tahun 2018 terjadi kesenjangan yang sangat tinggi kemudian menurun dengan cepat 1-2 tahun kemudian.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.49. Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

#### 3.3.1.4. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan per kapita per hari. Garis kemiskinan merupakan perangkat ekonomi yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan mempertimbangkan program untuk menanggulangi kemiskinan.

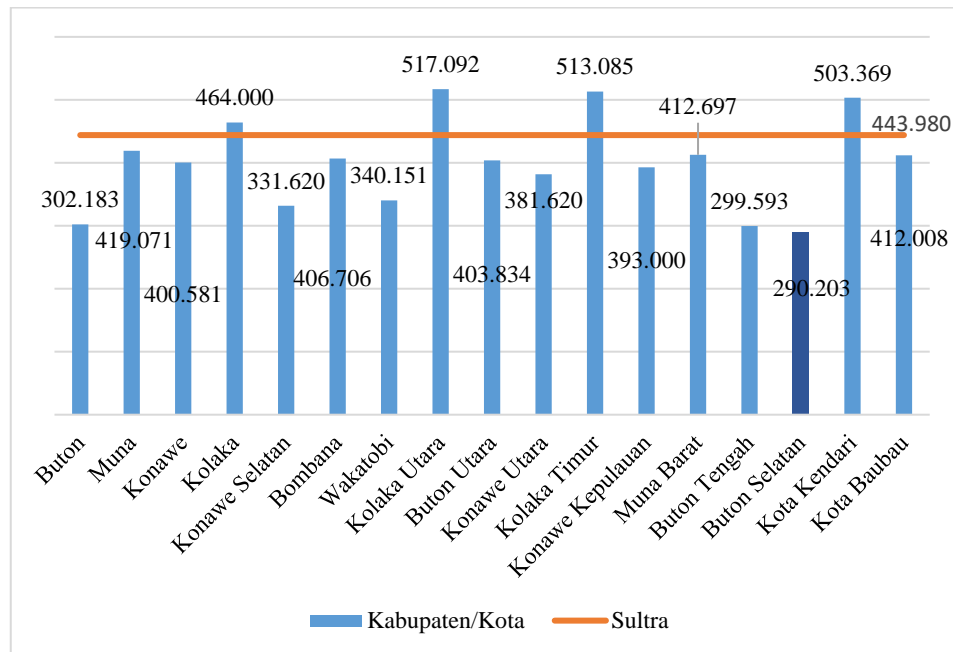
##### 1) Posisi Relatif

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.50, garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan berada di Rp 290.203,00 per kapita per bulan, masih jauh dibawah rata-rata provinsi di angka Rp 443.980,00 per kapita per bulan. Bahkan posisi garis kemiskinan Kabupaten Buton Selatan sebagai yang terendah di Sulawesi Tenggara. Dibanding dengan otonomi baru lain





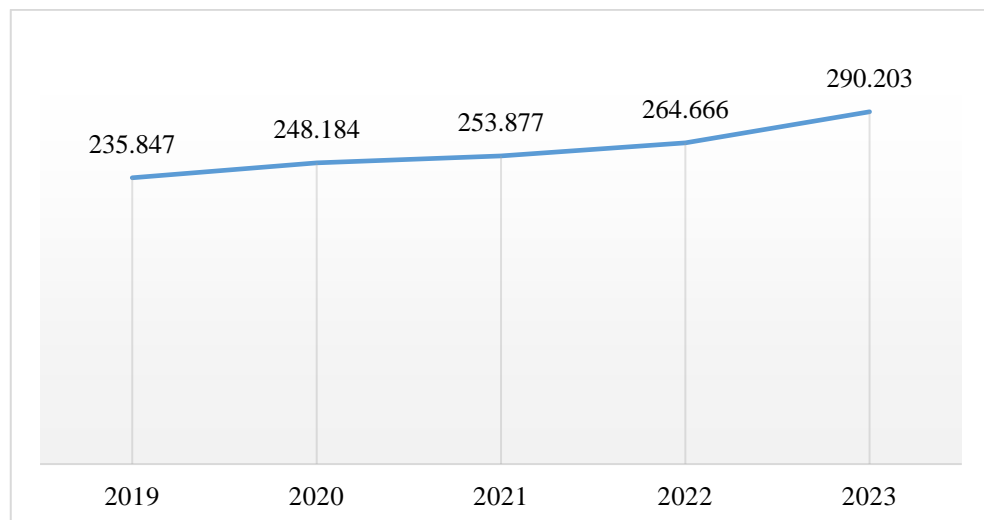
seperti Buton Tengah dan Muna Barat masih lebih baik, masing Rp 299.593,00 per kapita per bulan dan Rp 412.697,00 per kapita per bulan.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.50. Analisis Posisi Relatif Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.51. Analisis Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023**

Dalam periode lima tahun terakhir, kurva garis kemiskinan menunjukkan peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.51, garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 di angka Rp 235.847,00 per kapita per bulan dan tahun 2023 menjadi Rp 290.203,00 per kapita per



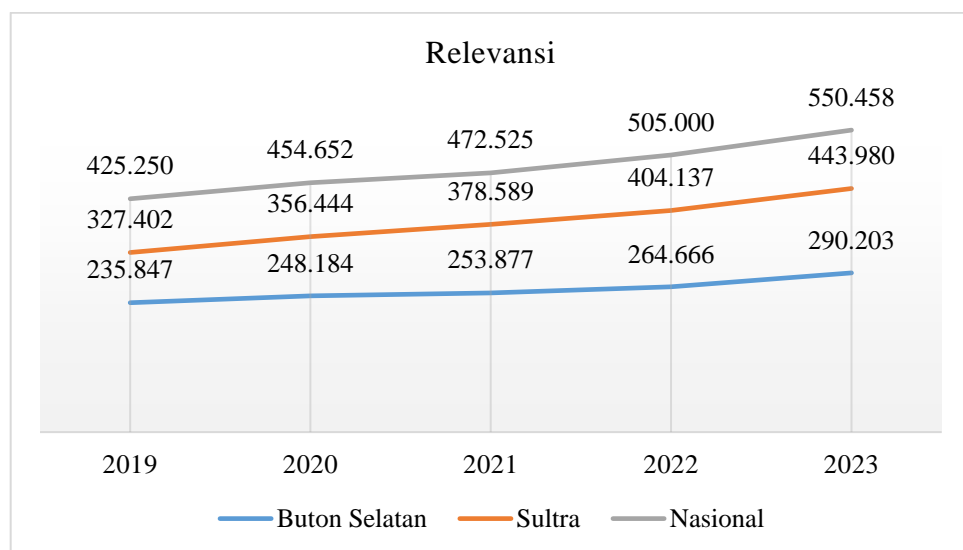


bulan. Artinya terjadi dalam lima tahun terjadi peningkatan sekitar Rp 54.356,00 atau Rp 10.871,20 per tahun.

### 3) Efektivitas

Dengan mendasarkan pada tren garis kemiskinan pada Gambar 3.51 dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan posisi garis kemiskinan terbilang efektif, meskipun belum berada pada garis kemiskinan nasional (Rp 486.168,00 per kapita per bulan). Tetapi dengan memperhatikan pola kecenderungan peningkatan, dengan mempertahankan upaya saat ini diharapkan terus mengalami peningkatan ditahun mendatang hingga mencapai garis kemiskinan nasional. Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, maka perlu ada intervensi lebih ditahun mendatang agar penduduk yang berada pada garis kemiskinan tersebut mampu keluar dari garis kemiskinan nasional.

### 4) Relevansi



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.52. Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

Memperhatikan kurva peningkatan garis kemiskinan pada Gambar 3.52 dapat dikatakan relevan dengan kecenderungan yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Bila mengasumsikan tingkat kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan selama 2019-2023 sebesar Rp 54.356,00 dengan mempertahankan upaya yang ada, diproyeksi akan





meningkat menjadi Rp 344.559,00 per kapita per bulan di tahun 2028. Angka ini belum sampai pada garis kemiskinan, sehingga diperlukan upaya lebih untuk membawa rata-rata penghasilan penduduk berada di atas garis kemiskinan nasional.

### 3.3.1.5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan garis kemiskinan Kabupaten Buton Selatan menunjukkan kondisi yang bervariasi. Kondisi tersebut menggambarkan posisi, perkembangan, efektivitas, dan relevansi program sebagaimana Tabel 3.3. yang menjabarkan analisis karakteristik kemiskinan dalam dimensi kemiskinan konsumsi sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Masalah Kemiskinan Konsumsi**

| No | Indikator Utama                   | Aspek Yang Dianalisis            |                    |                |           |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|    |                                   | Posisi Relatif                   | Perkembangan       | Efektivitas    | Relevansi |
| 1. | Persentase Jumlah Penduduk Miskin | Posisi nomor 4 (empat) tertinggi | Fluktuatif         | Kurang Efektif | Relevan   |
| 2. | Tingkat Kedalaman Kemiskinan      | Rata-Rata (Menengah)             | Fluktuatif         | Efektif        | Relevan   |
| 3. | Tingkat Keparahan Kemiskinan      | Rata-Rata (Menengah)             | Fluktuatif         | Efektif        | Relevan   |
| 4. | Garis Kemiskinan                  | Terendah                         | Meningkat Perlahan | Efektif        | Relevan   |

### 3.3.2. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan

#### 3.3.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

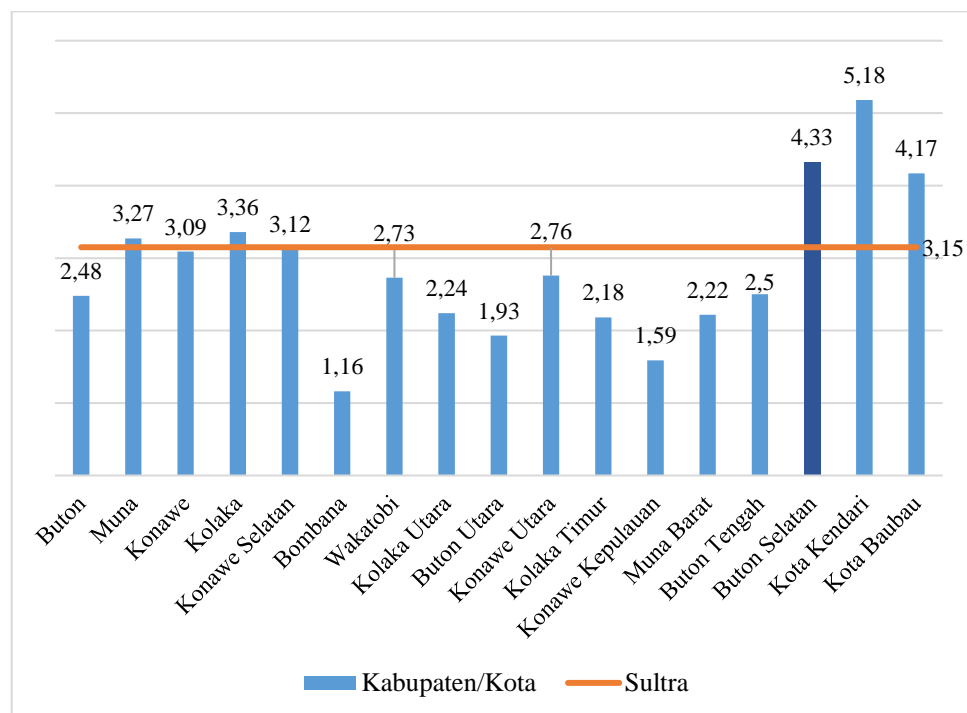




## 1) Posisi Relatif

Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.53, angka pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan sebagai yang tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara, setelah Kota Kendari. Angka tersebut juga hampir sama dengan angka pengangguran terbuka di Kota Baubau yang secara administratif berbatasan langsung. Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Kendari dan Kota Baubau tidak lepas dari fungsi layanan perkotaan yang secara umum dipersepsikan sebagai “magnet” pencari kerja, sehingga akan sangat berbeda perbandingan posisinya dengan Buton Selatan sebagai daerah ciri pedesaan.

Posisi angka kemiskinan Buton Selatan diangka 4,33% sekaligus menempatkannya lebih tinggi dari rata-rata pada tingkat provinsi di angka 3,15%. Fakta ini dapat diartikan bahwa pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.53. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

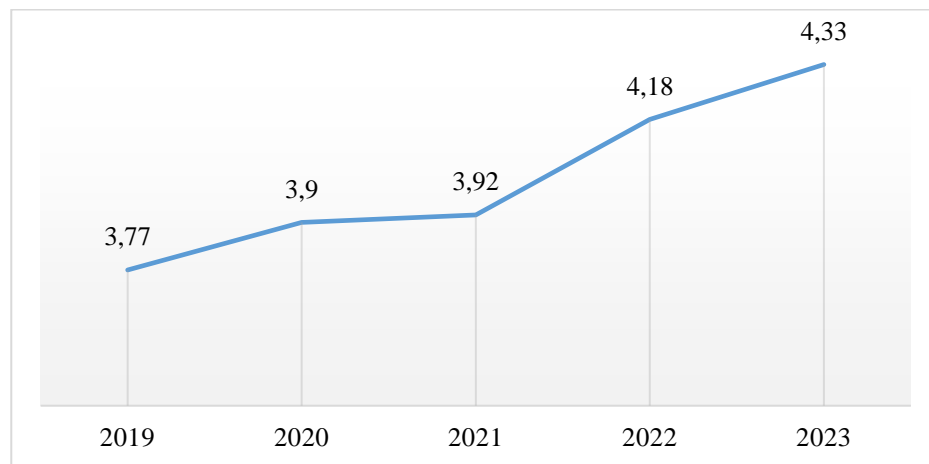
## 2) Perkembangan Antar Waktu

Angka pengangguran terbuka dalam periode 2019-2023 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar





3.54, bahwa pengangguran terbuka mengalami peningkatan sekitar 0,56% dengan peningkatan tertinggi terjadi ditahun 2022 sekitar 0,26%.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.54. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

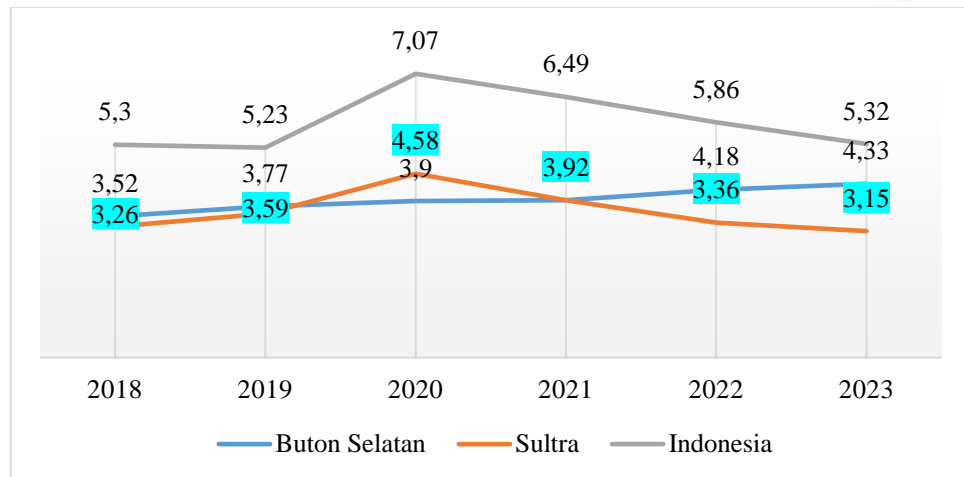
### 3) Efektivitas

Mendasarkan pada tren pengangguran terbuka Gambar 3.54 dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal mengurangi angka pengangguran terbuka terbilang tidak efektif. Bahkan pendekatan penanganan pengangguran terbuka 2021 hingga 2023 terbilang tidak efektif karena lebih tinggi dari tingkat peningkatan kemiskinan antara tahun 2019-2021 yang masa saat itu terjadi Pandemi Covid-19. Dimana peningkatan pengangguran terbuka tahun 2019 ke 2020 hanya 0,33% dan 2022 ke 2021 diangka 0,02%.

### 4) Relevansi

Dilihat dari model kurva pada Gambar 5.55, tren angka pengangguran terbuka terbilang kurang relevan dengan fakta yang terjadi pada tingkat provinsi dan secara nasional. Pengangguran terbuka pada tingkat provinsi dan nasional sama-sama terjadi peningkatan antara tahun 2018-2022, tetapi kemudian menunjukkan penurunan antara tahun 2021-2023. Fakta yang berbeda dengan Kabupaten Buton Selatan yang secara konsisten angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan.





Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.55. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

Sebagai catatan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mengendalikan angka pengangguran terbuka, bahwa pengangguran terbuka secara konseptual dapat disebabkan oleh berbagai hal sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat. Untuk itu, perlu memperhatikan hal-hal berikut untuk mengendalikan angka pengangguran terbuka: a) Minimnya pengalaman: Pencari kerja tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup, terutama bagi lulusan baru; b) Isu diskriminasi: Perusahaan hanya merekrut karyawan dari golongan tertentu, seperti agama, etnis, atau jenis kelamin; c) Rendahnya permintaan: Permintaan industri terhadap jenis pekerjaan tertentu rendah; d) Kondisi ekonomi: Perubahan kondisi ekonomi, terutama pada masa krisis ekonomi, dapat menyebabkan pengangguran terbuka; e) Perubahan dalam industri: Perubahan konstan dalam sebuah industri tertentu dapat menyebabkan pengangguran terbuka; f) Tidak tersedianya lapangan kerja: Tidak adanya lapangan pekerjaan di negara tersebut atau tidak adanya kerja sama dengan negara asing untuk mengirimkan tenaga kerja; g) Ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang Pendidikan; dan h) Tidak memiliki keinginan untuk bekerja.

### 3.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

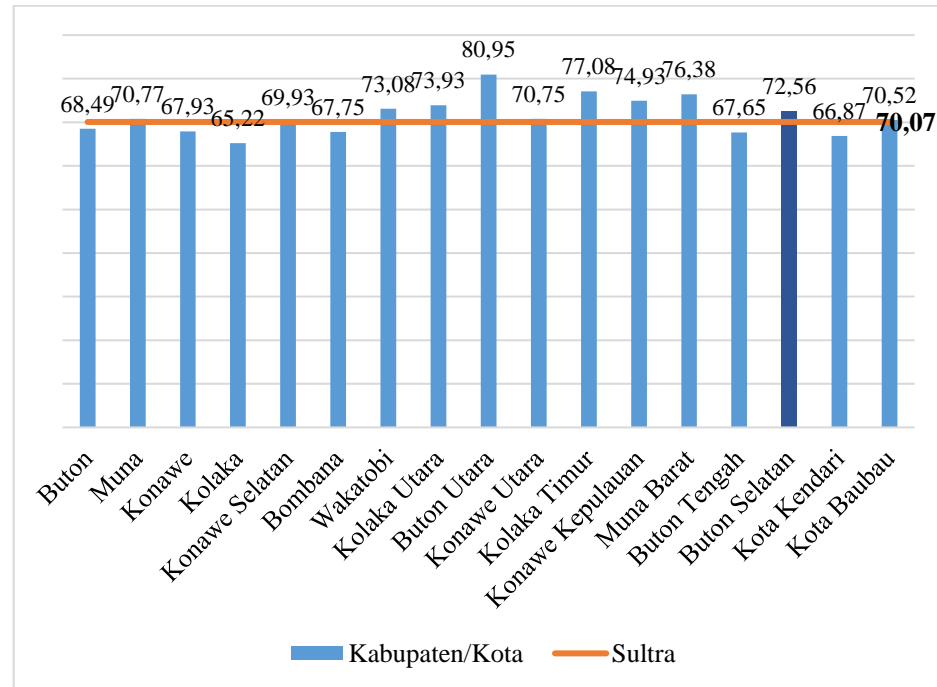
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah. TPAK dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.





## 1) Posisi Relatif

TPAK di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 diangka 72,56%. Posisinya terhadap provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 3.56.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

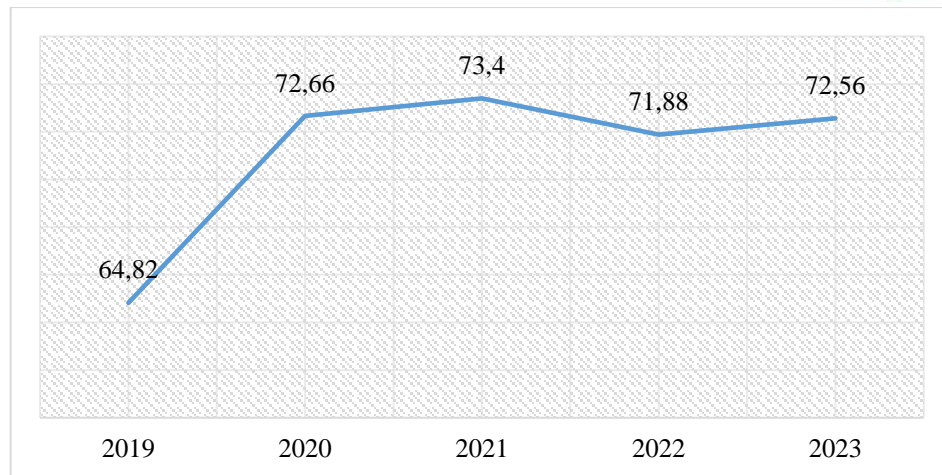
**Gambar 3.56. Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

Angka ini lebih baik dari rata-rata tingkat provinsi di angka 70,07%. Angka TPAK Kabupaten Buton Selatan posisinya cukup baik, menempati urutan keenam tertinggi di Sulawesi Tenggara.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.57, angka TPAK di Kabupaten Buton Selatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 72,66%. Terjadi tekanan pada tahun 2022 yang ditandai dengan penurunan TPAK menjadi 71,88%. Tahun 2023 kembali membaik, yang harapan juga terjadi pola yang sama di tahun mendatang.





Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.57. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023**

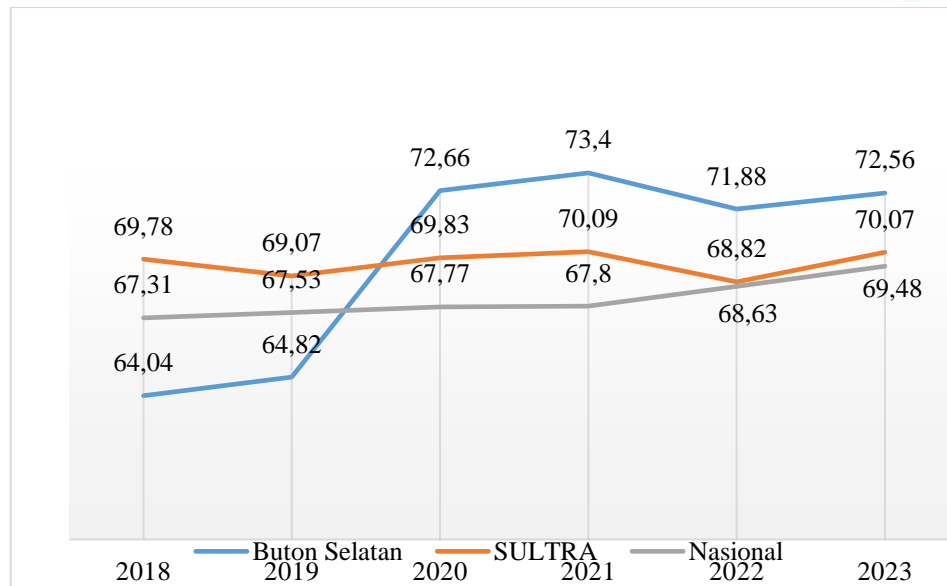
### 3) Efektivitas

Memperhatikan data perkembang antar waktu (*time series*), TPAK di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan efektif, meskipun ada catatan khusus yang terjadi pada tahun 2022. Namun demikian, dikaitkan dengan fakta angka pengangguran terbuka dalam periode tersebut justru menunjukkan peningkatan. Artinya ada kurva yang tidak linear antara TPAK dengan partisipasi angkatan kerja. Pada posisi ini, maka TPAK belum berkontribusi nyata pada penurunan pengangguran terbuka.

### 4) Relevansi

Memperhatikan data perkembangnya TPAK di Kabupaten Buton Selatan terhadap provinsi dan nasional sebagaimana tersaji pada Gambar 5.58 nampak memperlihatkan kurva yang relevan khususnya yang terjadi pada 2020-2023. Bahkan di periode ini, TPAK di Kabupaten Buton Selatan lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.

Berangkat dari fakta ini, maka Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat memperhatikan hal ini untuk kepentingan pengentasan kemiskinan. Manfaat dari pemetaan TPAK ini setidaknya untuk: a) menunjukkan seberapa besar potensi penduduk untuk bekerja; b) menunjukkan seberapa besar kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja; dan c) mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah pasokan tenaga kerja.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.58. Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023**

### 3.3.2.3. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan merupakan salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan, tetapi disisi lain juga merupakan salah satu penghambat pembangunan yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Adanya permasalahan seperti pengangguran, menjadi bentuk pendorong peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan.

Adapun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019-2023 yang terus mengalami kenaikan, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung meningkat, menunjukkan kondisi bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga tinggi. Berikut ini secara lebih jelas masalah dan kondisi Kabupaten Buton Selatan terhadap masing-masing aspek (Tabel 3.4).



**Tabel 3.4. Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan**

| No | Indikator Utama                           | Aspek Yang Dianalisis                    |                |                |                |
|----|---|--|----------------|----------------|----------------|
|    |   | Posisi Relatif                           | Perkembangan   | Efektivitas    | Relevansi      |
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | Nomor 2 tertinggi                        | Cenderung Naik | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Nomor 7 tertinggi (rata-rata / menengah) | Cenderung Naik | Efektif        | Relevan        |

### 3.3.3. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

#### 3.3.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

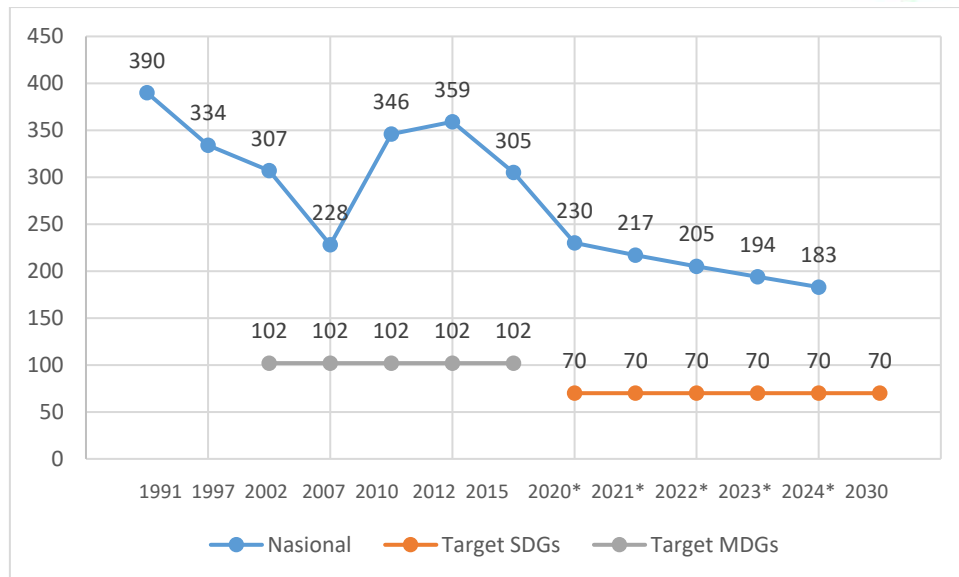
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang terjadi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan. AKI dihitung berdasarkan: a) Jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan); dan b) Kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental. AKI merupakan salah satu indikator derajat kesehatan negara bersama dengan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan.

#### 1) Posisi Relatif

Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 230 atau turun 1,80% per tahun. Meski mengalami penurunan, namun AKI masih belum mencapai target *Sustainable Development Goals* tahun 2030 yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 3.59).





Sumber: [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id)

**Gambar 3.59. Perkembangan AKI (per 100.000 kelahiran hidup) Tingkat Nasional**

Adapun di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (per 100.000) yaitu sebesar 214 per 100.000 (Gambar 3.42). Artinya angka kematian Ibu masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* tahun 2030 yaitu kurang dari 70, namun angka tersebut berhasil dicapai pada tahun 2023 dimana Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar 52 per 100.000 kelahiran hidup.

AKI di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sebesar 284 per 100.000 Kelahiran Hidup. Kemudian mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 52 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sementara itu, AKI di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 sebesar 67 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 74 per 100.000 Kelahiran Hidup.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

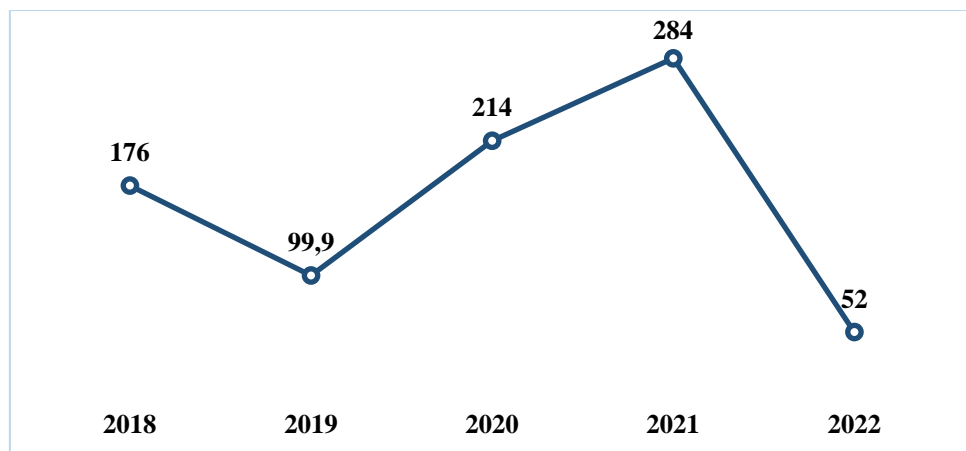
AKI selama periode tahun 2018-2022 fluktuatif. Sempat mengalami penurunan di tahun 2019 mencatatkan sebesar 99 per 100.000 Kelahiran Hidup, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Memasuki tahun 2022 kembali menurun, sekaligus yang terendah sepanjang 2018-2022 yakni 52 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan pada periode waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun.





Dimana pada tahun 2018, angka kematian ibu memiliki nilai sebesar 176 (per 100.000 kelahiran hidup). Adapun pada tahun 2019, angka kematian ibu menurun hingga mencapai 99,9 (per 100.000 kelahiran hidup). Namun kecenderungan kembali meningkat pada tahun 2020-2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2021 dengan nilai sebesar 284 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 52. Angka kematian ibu yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan kebijakan dan program terkait angka kematian ibu telah tercapai. Informasi tersebut disajikan pada Gambar 5.60.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.60. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3) Efektivitas

Analisis efektivitas Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan pada periode tahun 2018-2022 memiliki kecenderungan menurun di tahun 2017-2019 dan meningkat pada tahun 2019-2021 dan kembali menurun signifikan di tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas karena capaian indikator kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan di tahun 2022 tercapai pada kinerja AKI sebesar 52 kasus per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 3.60).

### 4) Relevansi

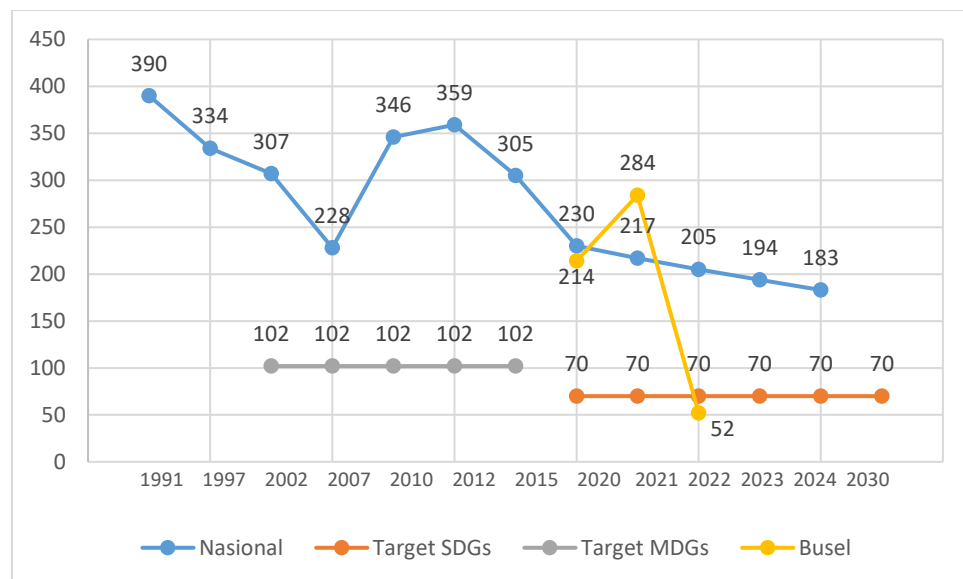
Berdasarkan Gambar 3.61 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Buton Selatan sangat fluktuatif namun relevan dengan AKI Nasional. Hal ini dikarenakan angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 telah naik meningkat 70 poin dibandingkan angka kematian ibu tahun 2020, namun kemudian turun 232 poin sangat signifikan di tahun 2022.





Fluktuasi ini mengandung arti bahwa Kabupaten Buton Selatan memberikan kontribusi positif pada penurunan Angka Kematian Ibu Nasional. Relevansi angka kematian ibu dapat dilihat pada Gambar 3.61.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2021 adalah 217 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu tahun 2022 sebesar 205 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kasus di Kabupaten Buton Selatan juga menunjukkan penurunan, dari 284 di tahun 2021 menjadi 52 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Artinya cukup relevan dengan kejadian pada tingkat nasional.



Sumber: [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id) dan Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024  
**Gambar 3.61. Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3.3.3.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kematian bayi dapat dikelompokkan menjadi bayi lahir mati, kematian 0-7 hari (Perinatal), kematian 8-28 hari (Neonatal) dan kematian 1-12 bulan.

#### 1) Posisi Relatif

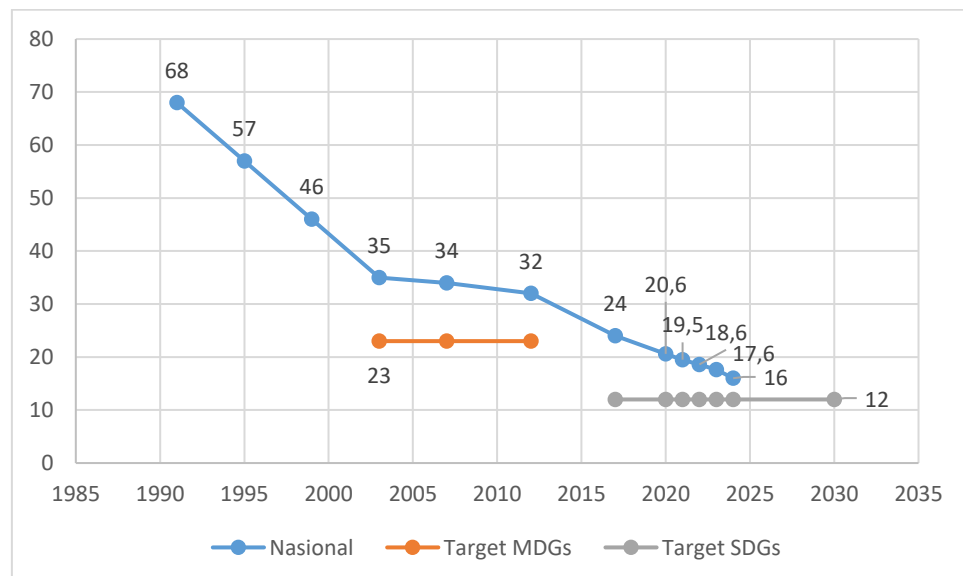
Berdasarkan hasil *Long Form SP2020*, Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sekitar 23 bayi meninggal sebelum berusia 1 tahun di antara 1.000 bayi yang lahir hidup. AKB tertinggi di





Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Kabupaten Buton Selatan, yaitu 9,9 per 1.000 kelahiran hidup, dan terendah berada di Kota Kendari.

Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator AKB di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 23. Angka tersebut belum mencapai target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 yaitu 12. Adapun di tengah situasi Covid-19, angka kematian bayi melonjak pada tahun 2019 yaitu sekitar 26.000 kasus meningkat hampir 40% menjadi 44.000 kasus pada tahun 2020. Adapun di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2020 menunjukkan AKB yaitu 9,9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Buton Selatan telah melampaui target *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 yaitu 12 (Gambar 3.62).



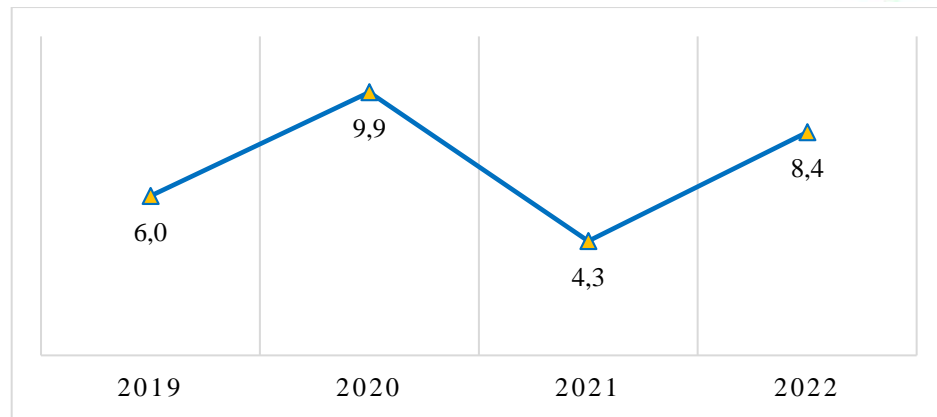
Sumber: [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id)

**Gambar 3.62. Perkembangan AKB (per 1.000 kelahiran hidup) di Tingkat Nasional**

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Sementara itu, AKB selama periode tahun 2019-2022 juga fluktuatif. Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.60, AKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 9,9 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sempat mengalami penurunan di tahun 2021 mencatatkan diangka 4,3 per 100.000 kelahiran Hidup, dan kemudian tahun 2022 kembali naik memburuk yang ditandai dengan peningkatan menjadi 8,4 per 100.000 Kelahiran Hidup.





Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.63. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3) Efektivitas

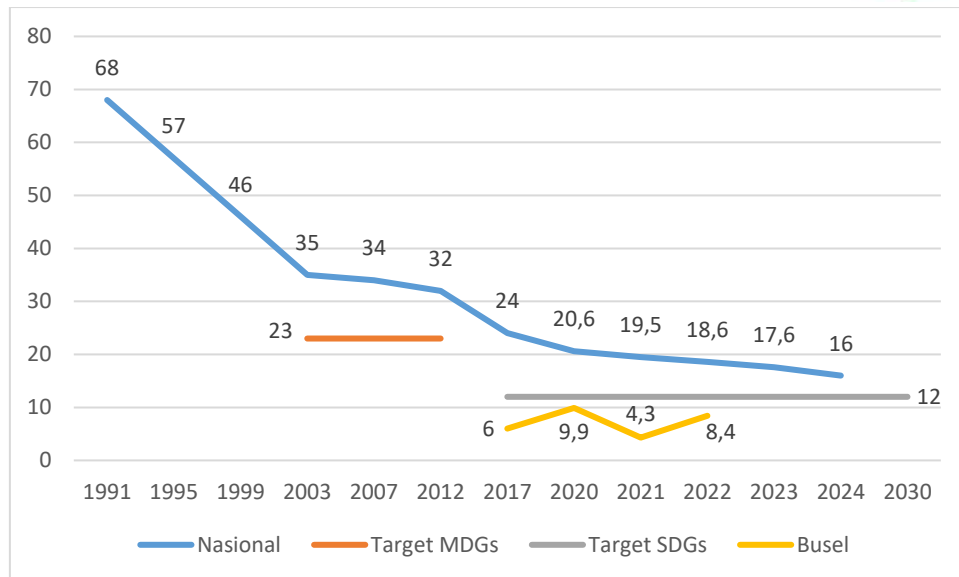
Berdasarkan data perkembangannya (*time series*), AKB di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2019-2022 memiliki kecenderungan yang belum konsisten. Fluktuasi Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022 seluruhnya berada di bawah target angka kematian bayi dalam *Sustainable Development Goals* Tahun 2030 yaitu 12. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan, serta program yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Buton Selatan telah efektif.

### 4) Relevansi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia pada tahun 2022 adalah 18,6 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 19,5 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, di Kabupaten Buton Selatan masih jauh berada di bawah dari angka tersebut bahkan di bawah target SDGs.

Gambar 3.64 menjabarkan posisi analisis relevansi Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sampai dengan 2022 Kabupaten Buton Selatan dengan nasional yang menunjukkan kondisi yang relevan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik AKB Kabupaten Buton Selatan (Busel) yang berada di bawah grafik nasional. Tren yang fluktuatif di kabupaten Buton Selatan tidak menjadi permasalahan besar dikarenakan posisinya masih jauh di bawah angka kematian bayi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB sudah relevan.





Sumber: berkas.dpr.go.id dan Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan  
**Gambar 3.64. Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3.3.3.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Berikut ini menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu tertentu.

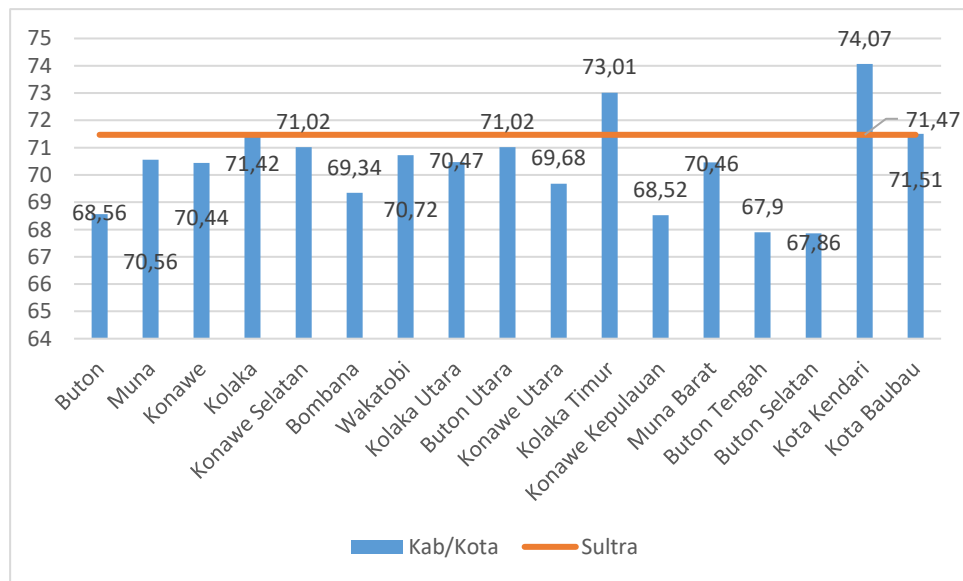
#### 1) Posisi Relatif

Tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2023 sebesar 67,86. Capaian ini menunjukkan rata-rata lamanya hidup secara sehat penduduk Kabupaten Buton Selatan adalah selama 67-68 tahun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian AHH Sulawesi Tenggara, yang berada pada tingkat 71,47. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat terendah, sedangkan AHH tertinggi terdapat di Kota Kendari dengan angka harapan hidup sebesar 74,07. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan pada tahun





2023 tergolong masih rendah. Berikut ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.65.



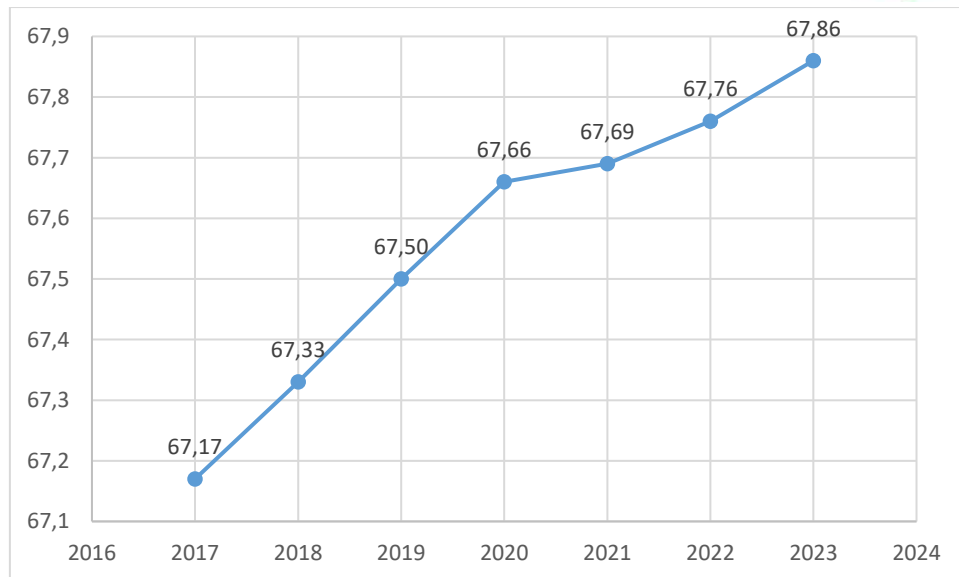
Sumber: BPS, Prov. Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.65. Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan Gambar 3.66, perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan pada kurun waktu 2017-2023 mengalami kondisi yang cenderung naik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, AHH tahun 2020 mengalami kenaikan 0,16 poin dibanding tahun 2019 dari 67,50 menjadi 67,66. Selanjutnya di tahun 2021-2023 terjadi peningkatan terus menerus meskipun hanya kecil sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.66. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kerja di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Buton Selatan.





Sumber: BPS, Prov. Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.66. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**

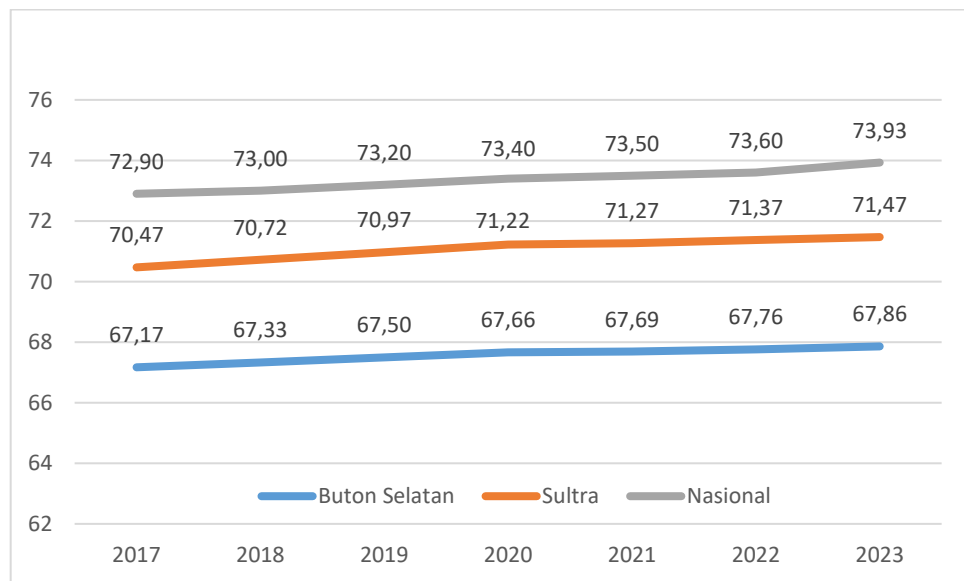
### 3) Efektivitas

Dari Gambar 3.66 di atas tentang Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017–2023, menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan sudah cukup efektif untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup.

### 4) Relevansi

Gambar 3.67 menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian AHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Sedangkan capaian AHH nasional meskipun berfluktuasi namun masih di atas AHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan tren grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan relevan dengan Angka Harapan Hidup tingkat nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional cukup relevan dalam meningkatkan AHH.





Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024

**Gambar 3.67. Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023**

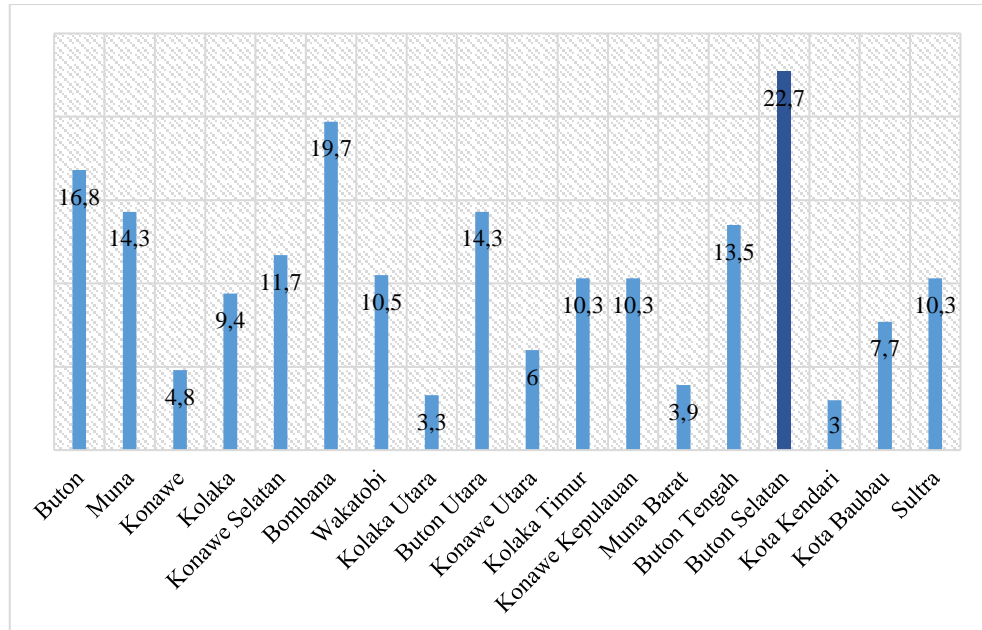
#### 3.3.3.4. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

##### 1) Posisi Relatif

Berdasarkan *Dashboard* Sebaran Data Stunting yang dimuat dalam Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 mencatatkan 22,7% sekaligus yang tertinggi yang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Urutan kedua tertinggi ditempati Bombana dingka 19,7% dan terendah oleh Kota Kendari dingka 3%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rerata pada tingkat provinsi dingka 10,3%. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.68.



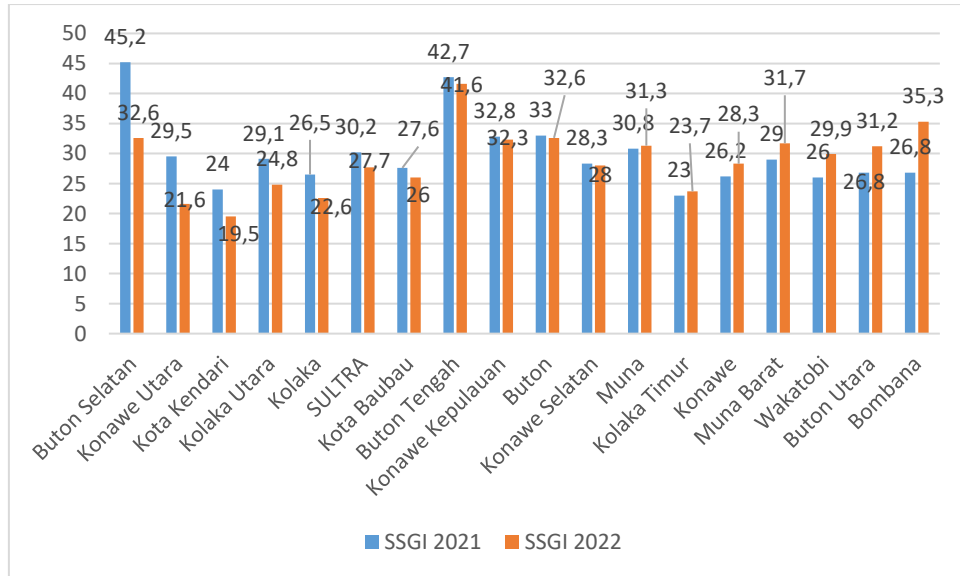


Sumber: (<https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1>), Diolah 2024

**Gambar 3.68. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024**

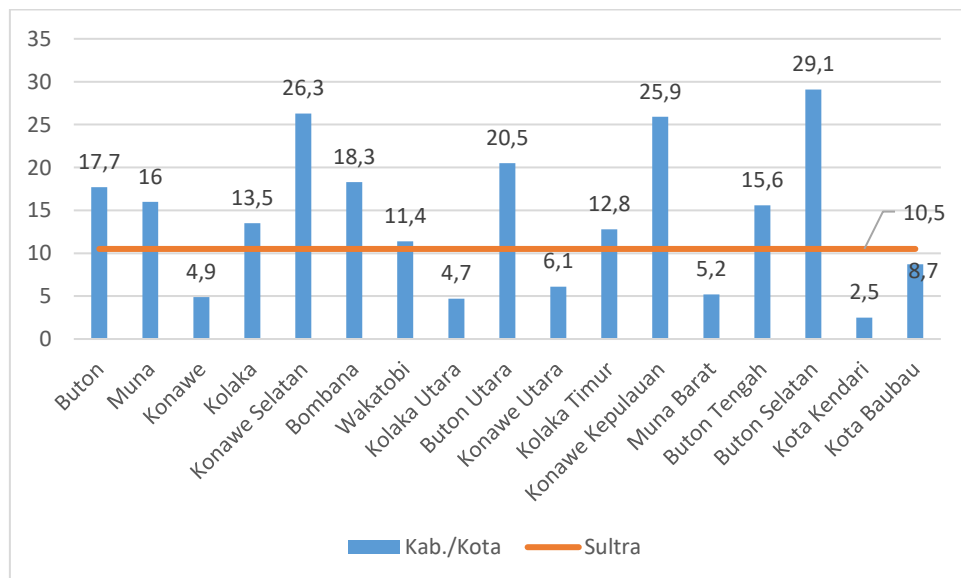
Sedangkan Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 hingga tahun 2022, Sulawesi Tenggara telah berhasil menurunkan prevalensi Stunting dari 30,2 % di tahun 2021 menjadi 27,7% pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 terdapat 10 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi Stunting yaitu Konawe Utara, Kota Kendari, Kolaka Utara, Kolaka, Kota Baubau, Buton Tengah dan Buton Selatan. Penurunan prevalensi Stunting tertinggi terdapat di Buton Selatan sebesar 12,6 %, dari 45,2% di tahun 2021 menjadi 32,6 % tahun 2022. Peningkatan angka prevalensi Stunting terjadi di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Muna sebesar 0,5 %, Kolaka Timur sebesar 0,7 %, Konawe sebesar 2,1%, Muna Barat sebesar 2,7%, Wakatobi sebesar 3,9% , Buton Utara 4,4% dan peningkatan tertinggi di Bombana sebesar 8,5%. Data SSGI tahun 2022 menunjukkan Kabupaten Buton Selatan berada pada posisi ke-4 angka prevalensi stunting dengan angka sebesar 32,6%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah yakni sebesar 41,6% dan posisi angka stunting terendah dimiliki oleh Kota Kendari dengan angka stunting 19,5%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:





Sumber :Prevalensi Stunting SSGI Tahun 2021- SSGI Tahun 2022  
**Gambar 3.69. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024**

Sementara berdasarkan data aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) prevalensi Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perbedaan yang cukup besar, pada tahun 2021 sebesar 16,2%, turun menjadi 11,3% tahun 2022, untuk tahun 2023 per bulan November sebesar 10,5% .



Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sultra (e-PPBGM)  
**Gambar 3.70. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024**

Prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data e-PPBGM menempati urutan tertinggi yaitu 29,1%, jauh di atas angka provinsi.



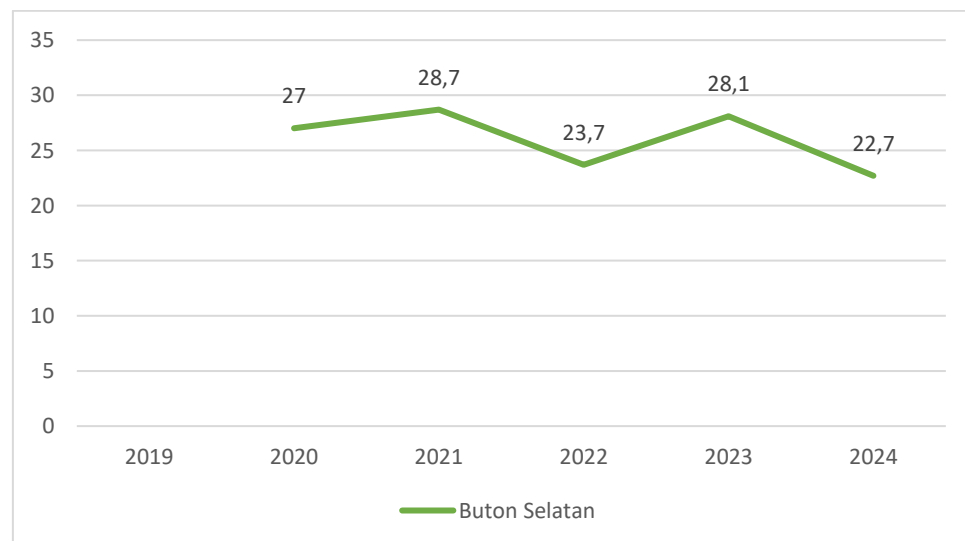


Sedangkan Kabupaten/Kota dengan prevalensi stunting terendah diperoleh Kota Kendari, dengan angka 2,5%.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan meskipun fluktuatif, tetapi ada kenderungan penurunan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.63, sempat terjadi kenaikan selama tahun 2021, dan 2023, tetapi selama 2020 hingga 2024 terjadi penurunan dari 27% menjadi 22,7% sekaligus yang terendah.

Data Kemendagri menunjukkan perkembangan stunting Kabupaten Buton Selatan tahun 2020-2024 yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Tahun 2021, kondisi stunting Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 1,7 dari 27 menjadi 28,7. Tahun 2022, prevalensi stunting berhasil diturunkan sebesar 5,0 dari 28,7 menjadi 23,7. Tahun 2023 prevalensi stunting kembali mengalami kenaikan sebesar 4,4 dari 23,7 menjadi 28,1. Adapun kondisi prevalensi stunting pada pertengahan tahun 2024 telah berhasil kembali ditekan menjadi sebesar 22,7 (Gambar 3.71).



Sumber: (<https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1>)

**Gambar 3.71. Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024**

## 3) Efektivitas

Dengan memperhatikan fakta pada Gambar 3.71, maka kinerja penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berdasarkan dari tren penurunan antara periode 2019-

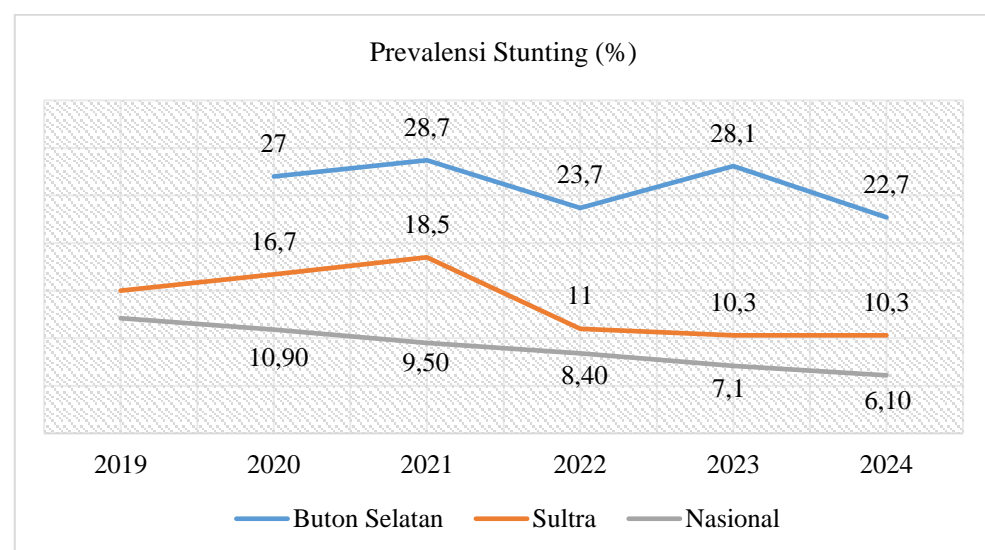




2024, meskipun sempat terjadi kenaikan. Gambar 3.71 menunjukkan grafik yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2021 dan 2023 dengan total sebesar 6,1 sedangkan penurunan terjadi di tahun 2022 dan 2024 sebesar total sebesar 10,4 sehingga total penurunan lebih besar terjadi dibanding total kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah berupa program upaya kesehatan masyarakat cukup efektif untuk menurunkan persentase atau prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan.

#### 4) Relevansi

Bila dilihat dari rerata prevalensi Kabupaten Buton Selatan selama 2020-2023 sebagaimana tersaji pada Gambar 3.72 ada relevansi dengan rerata pada tingkat provinsi dan nasional. Pada tingkat provinsi terjadi penurunan, tahun 2020 dari angka 16,7% menjadi 10,3% di tahun 2024. Tingkat nasional, dari 10,90% tahun 2020 menjadi 6,10% tahun 2024.



Sumber: (<https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1>)

**Gambar 3.72. Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023**

#### 3.3.3.5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

Menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat sehingga upaya pencegahan terhadap suatu penyakit harus dimiliki oleh setiap individu. Walaupun merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, namun hal itu harus mendapat dukungan dari pemerintah yang berwenang. Pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.





Pemerintah mendukung masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri dan mendapat dukungan program-program yang berasal dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Dinas Kesehatan. Adapun permasalahan kemiskinan dalam dimensi kesehatan dilihat dari masing-masing aspek yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Kesehatan**

| No | Indikator Utama                     | Aspek Yang Dianalisis          |                              |               |               |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                     | Posisi Relatif                 | Perkembangan                 | Efektivitas   | Relevansi     |
| 1. | Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) | Di bawah Nasional              | Berfluktuasi Cenderung turun | Efektif       | Relevan       |
| 2. | Angka Kematian Bayi (AKB)           | Di bawah Provinsi dan Nasional | Berfluktuasi Cenderung turun | Efektif       | Relevan       |
| 3. | Angka Harapan Hidup (AHH)           | Posisi terendah                | Meningkat/naik               | Cukup Efektif | Cukup Relevan |
| 4. | Stunting                            | Tertinggi                      | Berfluktuasi cenderung turun | Efektif       | Cukup relevan |

### 3.3.4. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan

#### 3.3.4.1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat

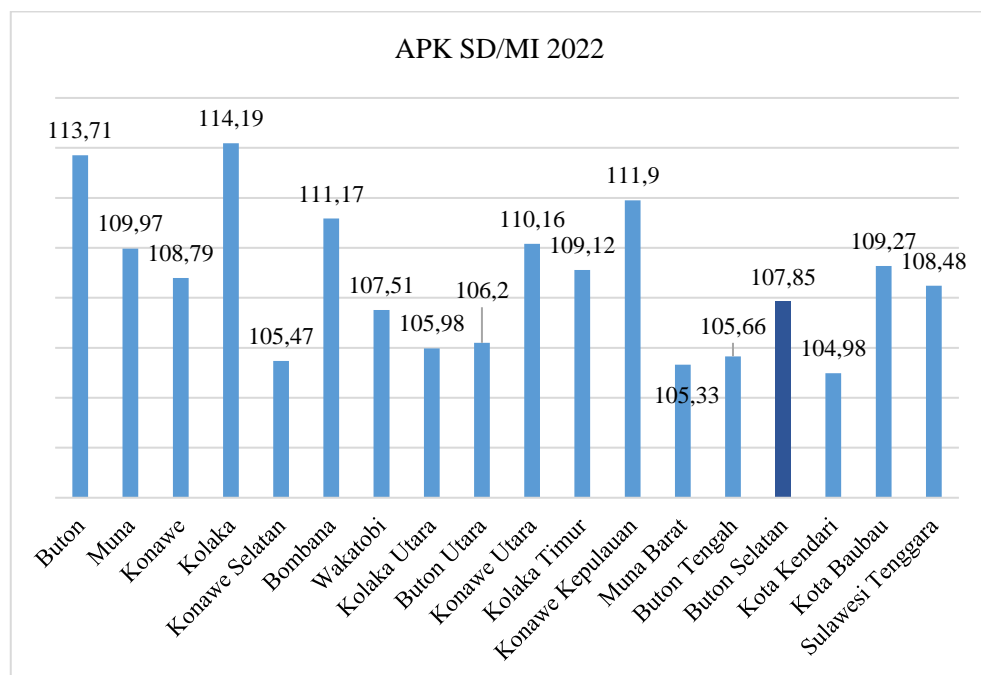
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan mengidentifikasi APK maka dapat mengukur daya serap penduduk usia



sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Lebih detail APK tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini:

### 1) Posisi Relatif

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 diangka 107,9%. Angka ini masih lebih rendah dari rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 108,48%. APK terendah terjadi di Kabupaten Muna Barat yakni 105,33% dan Kota Kendari diangka 104,98%. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.73.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

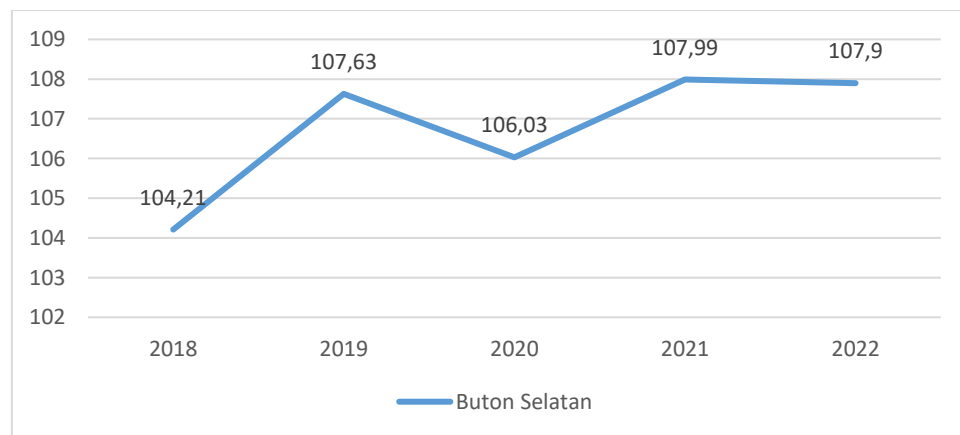
**Gambar 3.73. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

### 2) Perkembangan Antar Waktu

APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2018-2022 cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan tahun 2022 diangka 106,03%, dan setelah kembali membaik, hingga 2023 menjadi 107,9%. Gambar 3.74. menjelaskan perkembangan APK SD/MI dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Buton Selatan yang berfluktuasi. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SD/MI pada tahun 2018 sebesar 104,21. Angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode waktu yang lainnya. Namun, pada tahun 2020, angka partisipasi kasar SD/MI menurun hingga 1,6% dari



107,63 di tahun 2019 menjadi 106,03 paa tahun 2020 dan berangsur-angsur kembali meningkat pada tahun 2021. Meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 APK SD/MI kembali mengalami penurunan sebesar 0,09%, yang semula 107,99% menjadi 107,90% di tahun 2022. Adapun persentase APK SD/MI di Kabupaten Buton Selatan tetap berada di atas capaian nasional meskipun masih di bawaah capaian Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Selatan masih berjalan dengan baik.



*Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024*

**Gambar 3.74. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3) Efektivitas

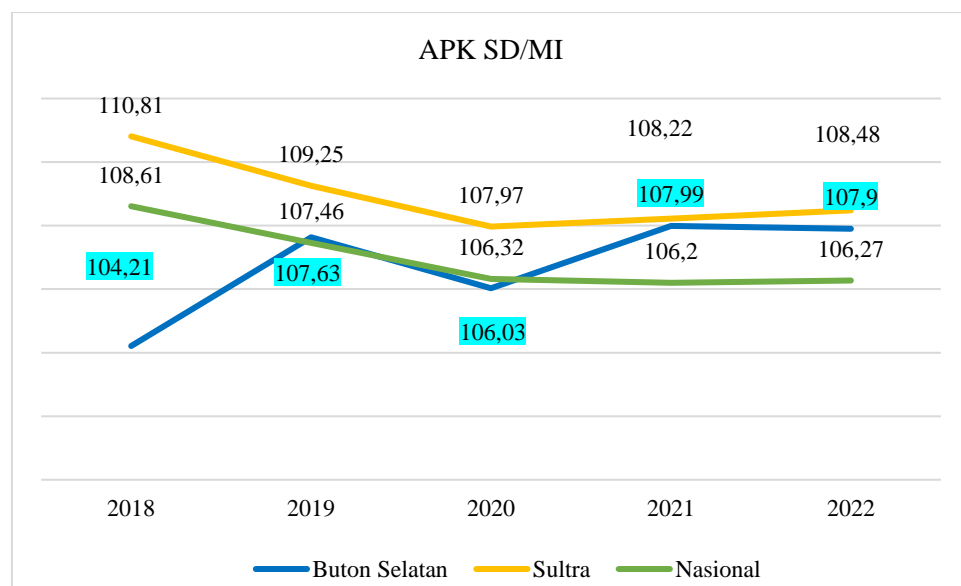
Dengan meperhatikan fakta pada Gambar 3.74, maka kinerja APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berdasarkan dari tren peningkatan antara periode 2018-2022, yakni 104,21% menjadi 107,9%. Meskipun beberapa kali mengalami penurunan hingga berada di bawah capaian nasional dan provinsi pada tahun 2020, namun Kabupaten Buton Selatan berhasil bangkit dan metingkatkan kembali capaian APK SD/MInya hingga di atas capaian nasional melalui perbaikan program dan kegiatan dengan tetap menargetkan Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/SDLB/Paket A tetap berada di atas 100. Meskipun belum dapat melampaui capaian provinsi dan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, peningkatan APK ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan telah cukup efektif berjalan.





#### 4) Relevansi

Gambar 3.75 menunjukkan tren APK SD/MI Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022 yang cenderung mengalami penurunan, sementara capaian APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 capaian APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian APK SD/MI Provinsi maupun nasional yaitu berada pada angka 104,21 sementara provinsi berada pada angka 110,81 dan nasional berada pada angka 108,61. Pada tahun 2019 capaian APK SD/MI Nasional dan Provinsi cenderung mengalami penurunan, sementara APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan meningkat dengan pesat hingga mampu melampaui APK SD/MI Nasional. Sementara itu di tahun 2020, dengan adanya pandemic covid-19 APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan kembali turun di bawah capaian nasional dan provinsi. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Buton Selatan membuktikan komitmennya untuk meningkatkan capaian APK SD/MI sehingga mampu bangkit dan kembali melampaui capaian nasional walaupun belum dapat melampaui capaian provinsi yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan relevan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tenggara.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.75. Analisis Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022**



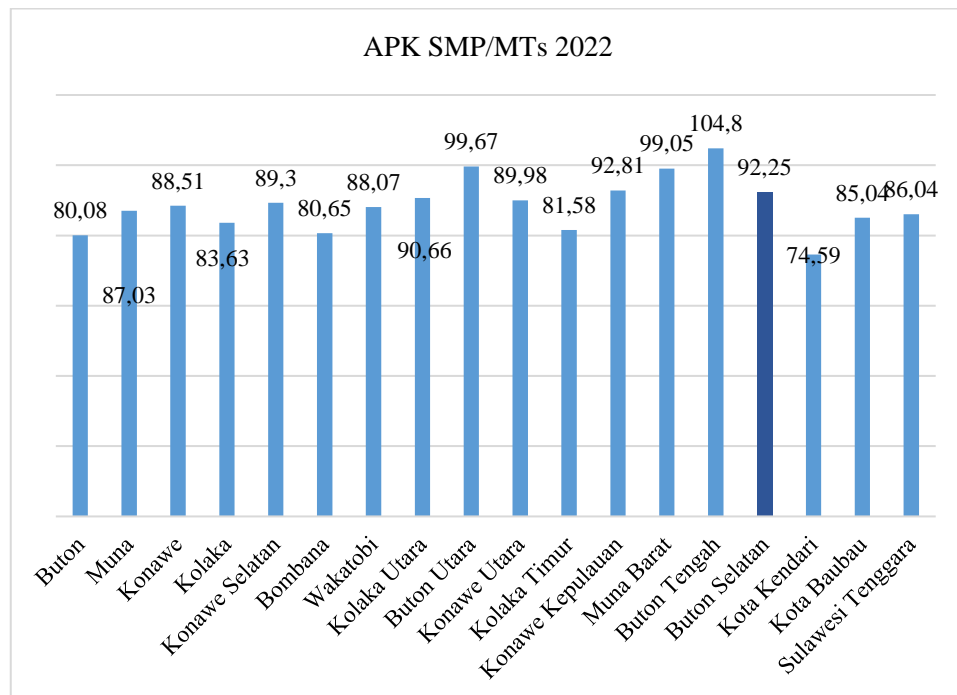


### 3.3.4.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun

#### 1) Posisi Relatif

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 92,25%, masih lebih baik dari rerata capaian provinsi hanya diangka 86,04%. Sementara itu, untuk yang terendah terjadi di Kota Kota Kendari diangka 74,59%. Informasi lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.76 berikut:



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.76. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

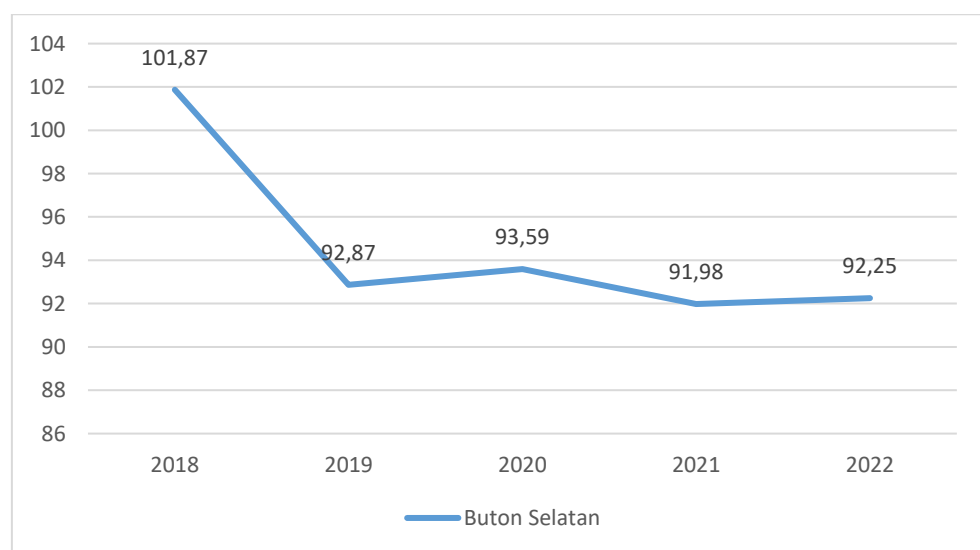
#### 2) Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan pada periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 APK SMP/MTs menunjukkan angka 101,87% dan turun menjadi 92,87% pada tahun 2019. Penurunan angka ini menunjukkan penurunan partisipasi penduduk yang sedang bersekolah di jenjang SMP. Keteringgalan partisipasi





penduduk tersebut dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 93,59%. Upaya peningkatan program pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buton Selatan memperoleh tantangan yang sangat besar yang ditunjukkan dengan naik turunnya APK SMP/MTs pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2021 angka APK SMP/MTs kembali turun dengan penurunan yang lebih besar dibandingkan capaian kenaikan APK SMP/MTs pada tahun 2022. Berita baiknya adalah meskipun terjadi penurunan namun angka capaian APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 masih di atas capaian provinsi dan nasional. Informasi lengkapnya dilihat pada Gambar 3.77.



Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024

**Gambar 3.77. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3) Efektivitas

Analisis efektivitas dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 (Gambar 3.77) menunjukkan grafik yang cenderung menurun. Penurunan angka partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SMP pada tahun 2019 menunjukkan masih adanya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat. Kecenderungan penurunan capaian APK SMP/MTs menandakan kinerja

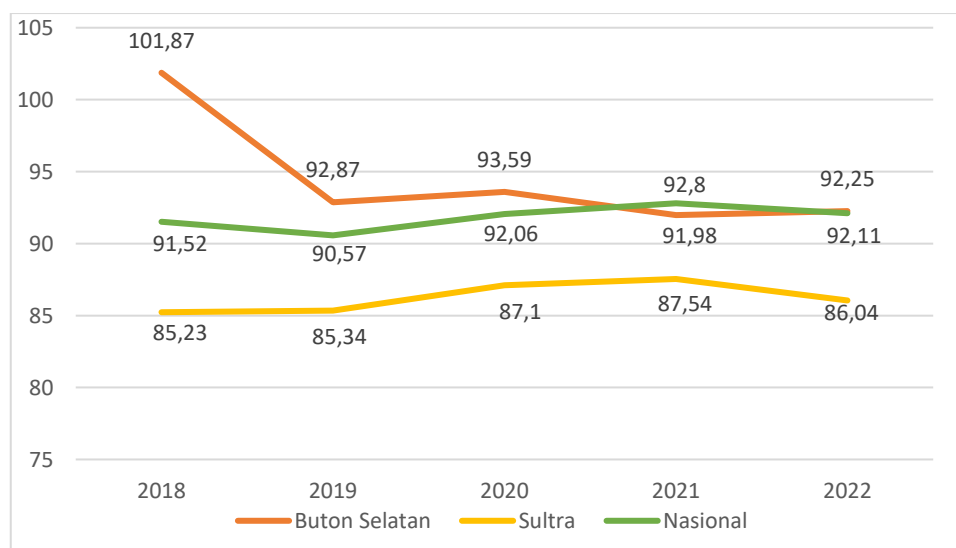




Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih perlu diperbaiki, sehingga dapat meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan pendidikan tahun 2019-2022 dapat dikatakan kurang efektif meningkatkan capaian APK SMP/MTs di Kabupaten Buton Selatan.

#### 4) Relevansi

Berbeda dengan APK SD/MI, persentase APK SMP/MTs di Kabupaten Buton Selatan dari Tahun 2018-2022 cenderung berada di atas garis capaian Provinsi dan Nasional. Pada Gambar 3.78 menunjukkan tren persentase penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP di Kabupaten Buton Selatan dari tahun ke tahun lebih tinggi dibandingkan capaian APK di Provinsi dan Nasional. Kecuali pada tahun 2021, nilai APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan berada di bawah nilai capaian nasional namun masih di atas nilai capaian provinsi. Adapun di tahun berikutnya perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan kembali naik hingga di atas capaian provinsi dan nasional kembali. Upaya Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan peningkatan APK SMP/MTs dikatakan telah relevan dan memberikan kontribusi positif pada peningkatan capaian APK SMP/MTs provinsi dan nasional. Gambar 3.78 menunjukkan analisis relevansi APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan dengan provinsi dan nasional.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.78. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022**



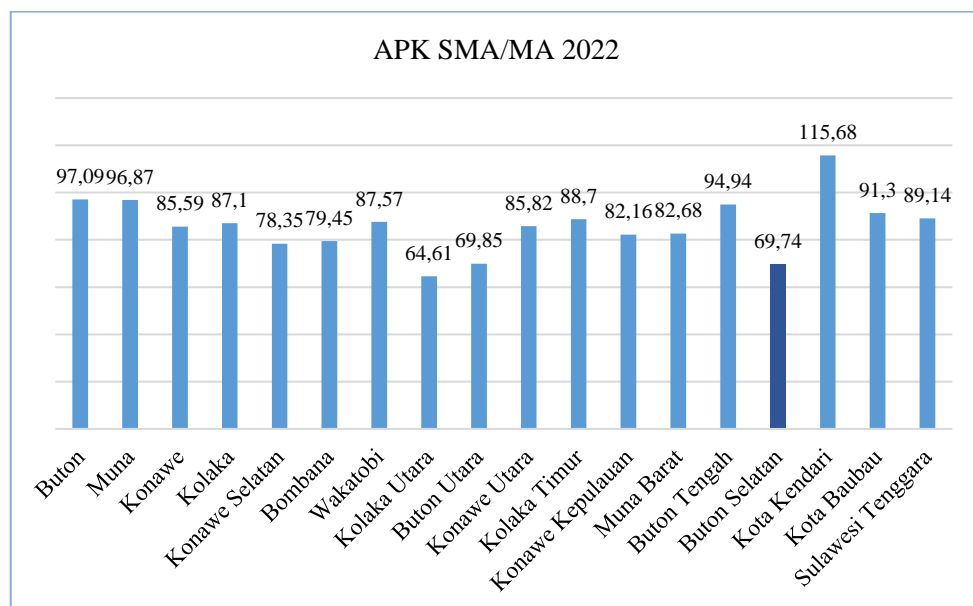


### 3.3.4.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Sederajat

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA yaitu perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

#### 1) Posisi Relatif

Gambar 3.79 menunjukkan posisi relatif APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2022, APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan sebesar 69,74%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian provinsi yang sebesar 89,14%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menempati urutan nomor dua terendah capaian APK SMA/MA setelah Kabupaten Kolaka Utara dengan selisih nilai sekitar 5,13%. Adapun secara inter-regional, Kota Kendari memiliki capaian APK SMA/MA tertinggi, yakni 115,68%, yang jauh berada di atas capaian provinsi.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.79. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

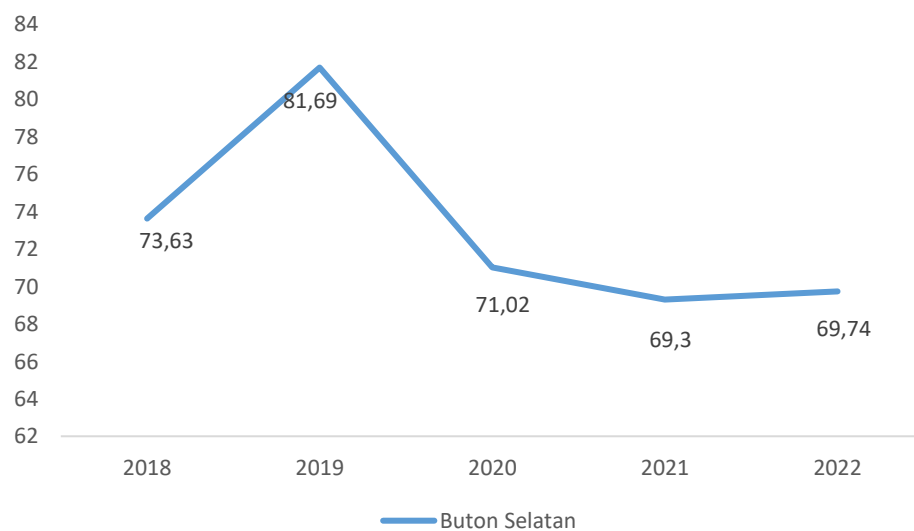
Capaian ini masih berada dibawah rata-rata capaian provinsi diangka 89,14%. Sementara itu yang terendah terjadi di Kabupaten Kolaka Utara yakni 64,61%.





## 2) Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.80 menunjukkan perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2019, APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan sebesar 8,06% dari angka 73,63% menjadi 81,69%. Namun tahun berikutnya, mengalami penurunan sebesar 10,67% menjadi 71,02% di tahun 2020. APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya, menjadi 69,3% di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 dapat meningkatkan capaiannya sebesar 0,44% menjadi 69,74%. Meskipun selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, namun total penurunannya lebih besar daripada total kenaikannya. Persentase capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan cenderung rendah, hal ini mengandung arti bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Buton Selatan banyak yang belum bersekolah di jenjang pendidikan SLTA.



*Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024*

**Gambar 3.80. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

## 3) Efektivitas

Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 cenderung menurun berfluktuasi (Gambar 3.80). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada periode tahun 2018-2022 kurang efektif dalam meningkatkan APK SMA/MA. Apalagi capaian selama 5 tahun terakhir masih berada di

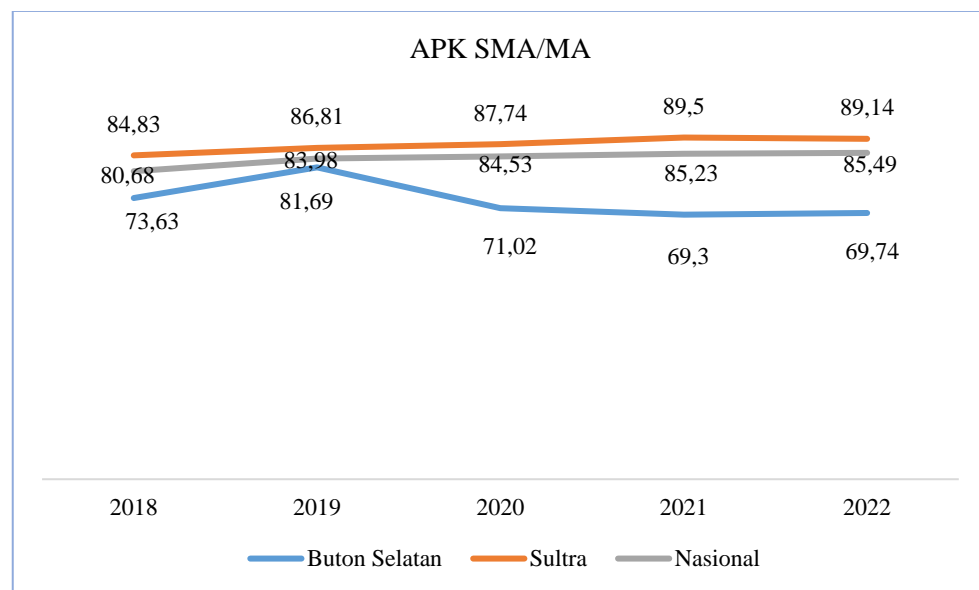




bawah capaian provinsi dan nasional. Tentunya, kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan perlu diperbaiki kembali agar tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan capaian APK SMA/MA.

#### 4) Relevansi

Gambar 3.81 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan belum relevan dengan capaian APK SMA/MA tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terlihat pada gambar 3.70 di atas, selama periode waktu 5 tahun Kabupaten Buton Selatan memiliki capaian APK SMA/MA di bawah capaian nasional dan capaian provinsi dengan tren berfluktuasi cenderung menurun sedangkan capaian nasional dan provinsi cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan memiliki kontribusi negatif pada capaian APK Nasional dan provinsi. Kebijakan pendidikan Kabupaten Buton Selatan dalam upaya meningkatkan APK SMA/MA belum sinkron dengan kebijakan pendidikan nasional.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.81. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022**

#### 3.3.4.4. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat

Angka partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah

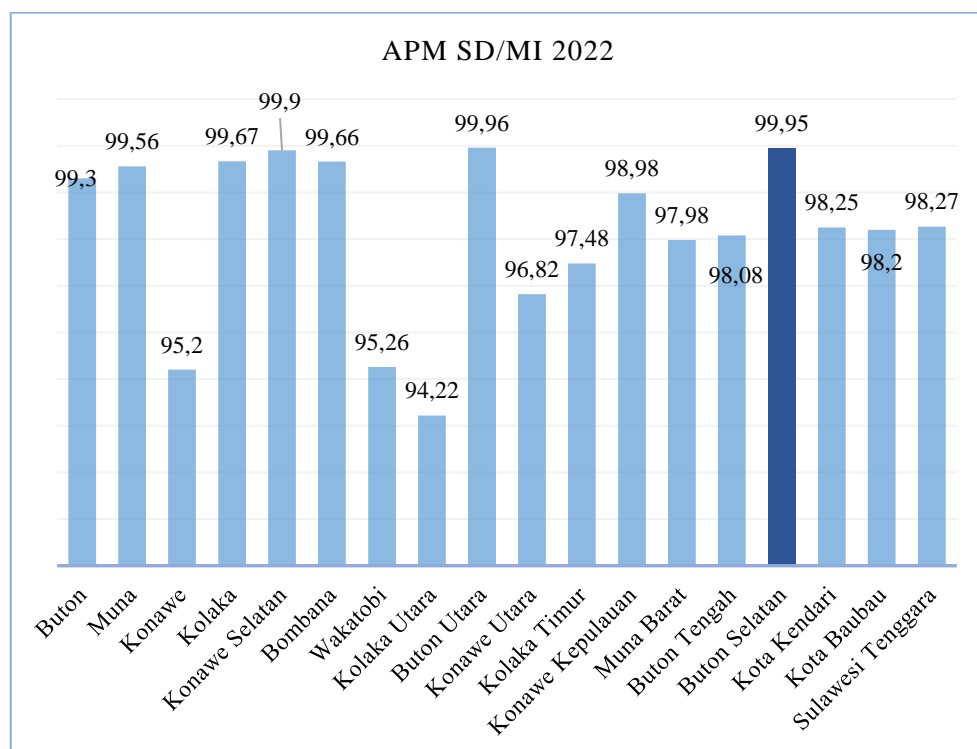




seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pengukuran APM dimanfaatkan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Lebih detail APM tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini:

### 1) Posisi Relatif

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 99,95%. Angka ini lebih baik dari rerata tingkat provinsi diangka 98,27%. APM Kabupaten Buton Selatan sekaligus mencatatkan tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara, setelah Buton Utara diangka 99,99%. Informasi lengkapnya dilihat pada Gambar 3.82.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.82. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

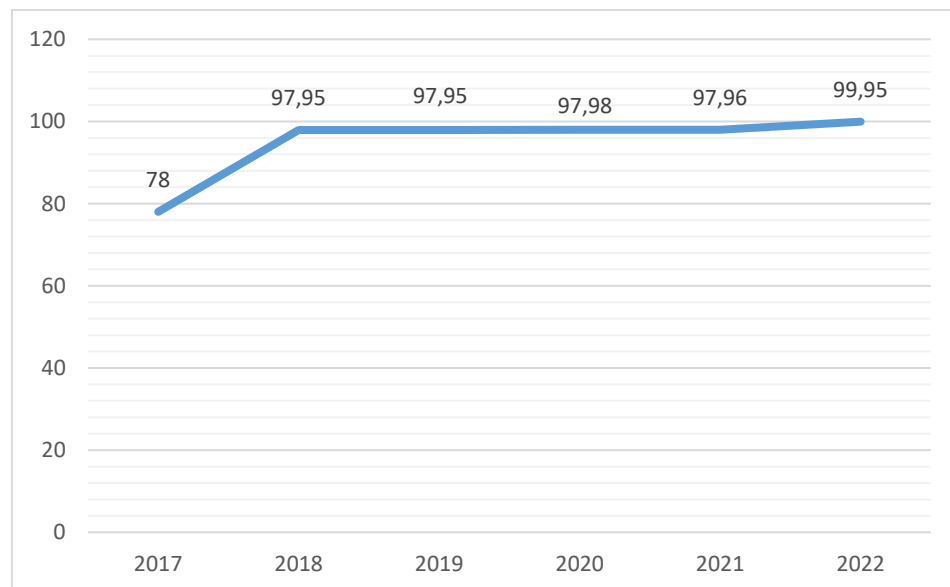
### 2) Perkembangan Antar Waktu

APM SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2022 terbilang baik karena menunjukkan angka peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.83, APM SD/MI/Sederajat tahun 2017 adalah 78% menjadi 99,95% ditahun 2022. Peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 berkontribusi positif meningkatkan APM SD/MI. Perkembangan APM SD/MI selama kurun waktu 6 tahun terakhir menjadi pijakan dalam membuat kebijakan ke depan dan dengan adanya peningkatan





persentase APM SD/MI tahun 2022 menjadi langkah awal untuk pemerintah kembali meningkatkan jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang sekolah dasar hingga mencapai 100%. Berikut ini merupakan perkembangan APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.83).



Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024

**Gambar 3.83. Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022**

### 3) Efektivitas

Berdasarkan Gambar 3.83, tren positif capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program bidang pendidikan seperti program pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pemberian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional penyelenggaraan sekolah pada jenjang sekolah dasar cukup efektif. Selain itu program peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dasar serta peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk memperbaiki indikator ketercapaian APM SD/MI agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terukur.

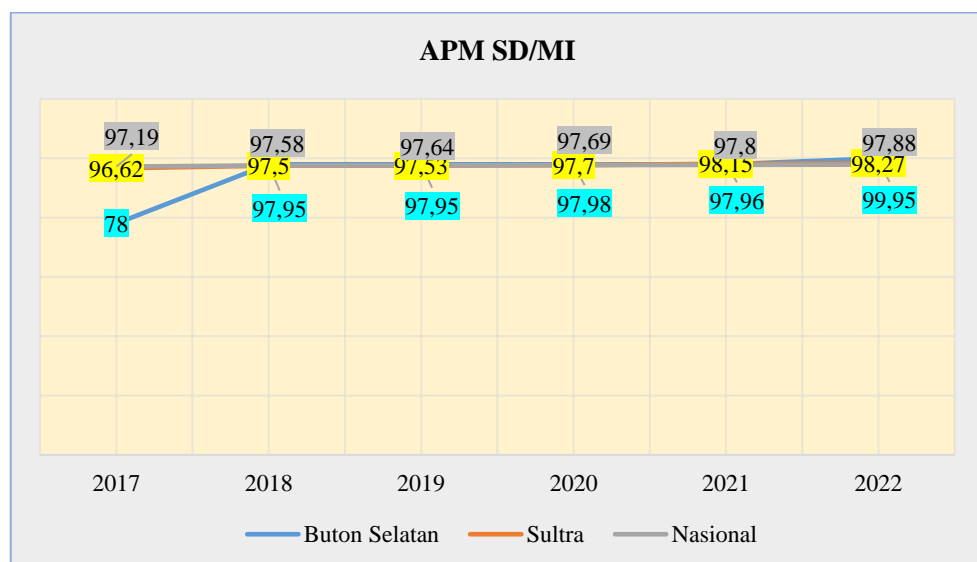
### 4) Relevansi

Pada periode tahun 2017-2022 APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan meningkat perlahan dan menyamai capaian APM SD/MI tingkat nasional dan provinsi yang cenderung stabil dalam kurun waktu 6 tahun. Bahkan capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 telah mampu





melampaui capaian nasional dan provinsi, artinya kenaikan capaian Kabupaten Buton Selatan berkontribusi positif pada capaian di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah sesuai dengan harapan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan telah relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Di bawah ini secara detail analisis relevansi APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.84).



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.84. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022**

### 3.3.4.5. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat

Angka partisipasi murni SMP/MTs adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan dengan usia 13-15 tahun di SLTP, dengan jumlah penduduk usia untuk SLTP

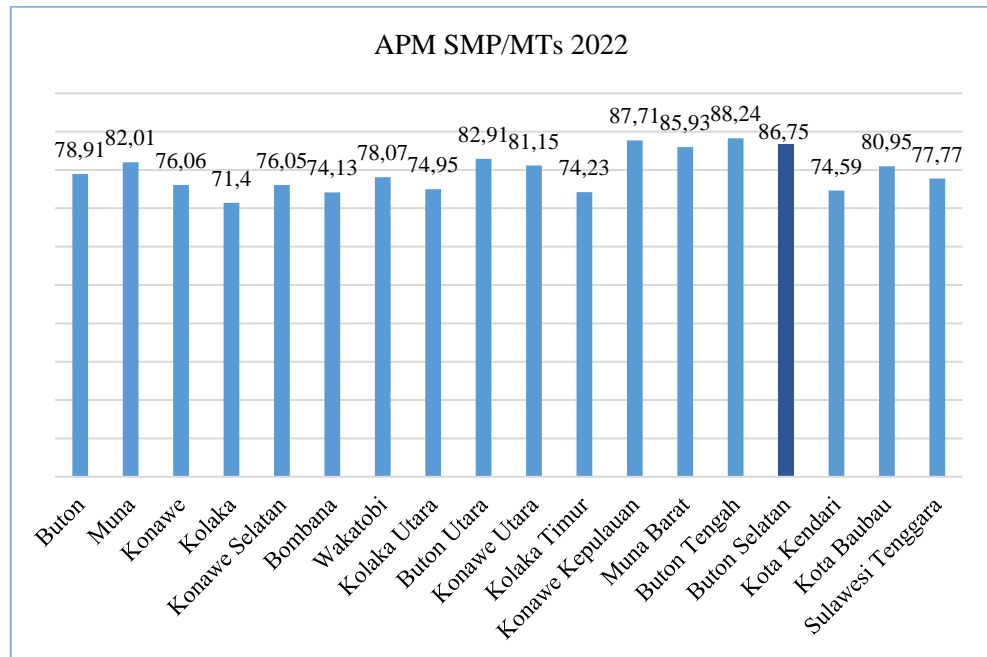
#### 1) Posisi Relatif

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 86,75%. Angka ini lebih baik dari rerata tingkat provinsi diangka 77,77%. Angka tersebut menempatkan





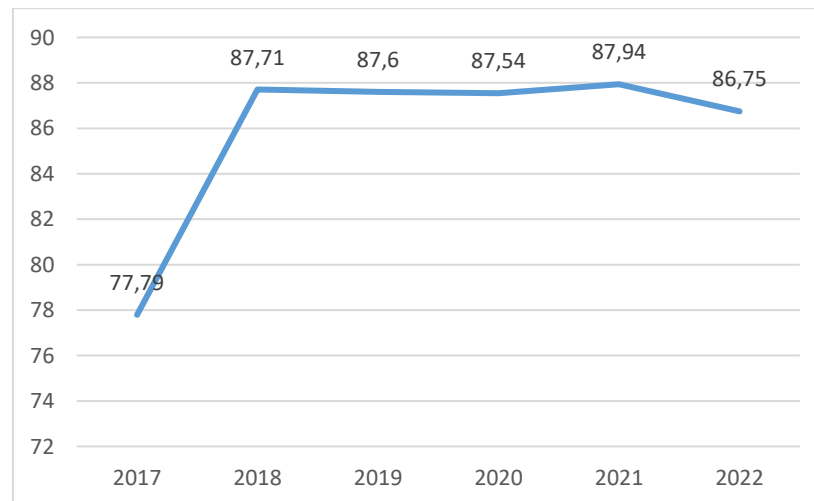
Kabupaten Buton Selatan sebagai yang tertinggi ketiga setelah Buton Tengah dan Konawe Kepulauan. Untuk yang terendah adalah di Konawe yakni 71,40%. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.85.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.85. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

## 2) Perkembangan Antar Waktu



Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024

**Gambar 3.86. Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022**

Gambar 3.86 menunjukkan bahwa APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama 2017 hingga 2022 terbilang baik karena menunjukkan angka peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun



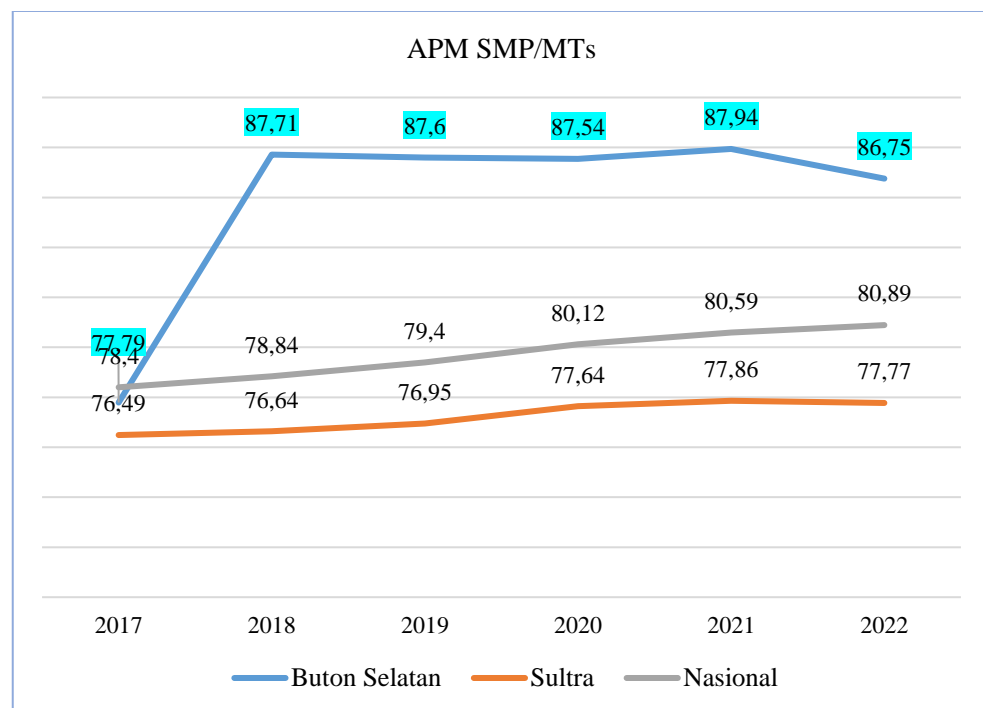


2018 yakni 87,71% yang sebelumnya 77,79% di tahun 2017. Hanya saja, tahun 2022 kembali memburuk yang ditandai dengan penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi 86,75%.

### 3) Efektivitas

Memperhatikan fakta pada Gambar 3.86, Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan menunjukkan adanya peningkatan, terlihat jelas pada tahun 2018 capaian APM SMP/MTs meningkat cukup drastis dibanding tahun 2017 dan diikuti capaian yang cukup stabil di tahun-tahun selanjutnya kecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan. Kabupaten Buton Selatan telah mengalami kondisi yang membaik mulai tahun 2018 dengan peningkatan persentase capaian APM SMP/MTs. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka kegiatan terkait pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan program wajib belajar 12 tahun telah cukup efektif meningkatkan capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2022.

### 4) Relevansi



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.87. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022**



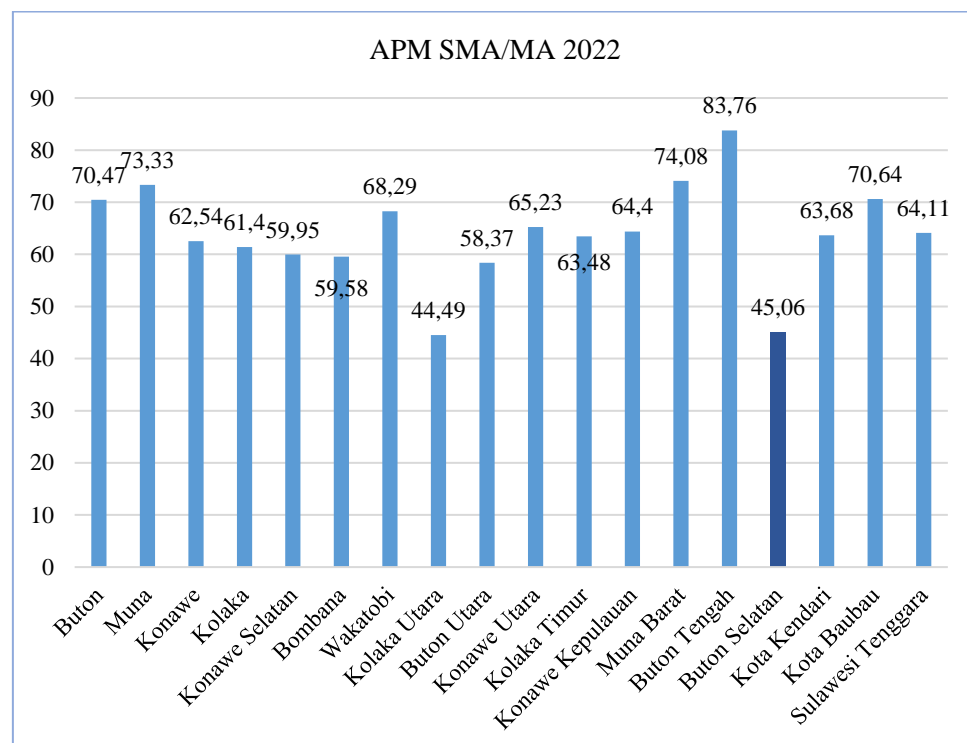


Pada Gambar 3.87 terlihat bahwa periode tahun 2017-2022 perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan berada di atas garis capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian APM SMP/MTs tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun, demikian juga capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan. Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan relevan dan berkontribusi positif pada peningkatan APM SMP/MTs provinsi dan nasional. Di bawah ini menunjukkan analisis relevansi APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan.

### 3.3.4.6. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA merupakan perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia 16-18 tahun di SLTA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun untuk SLTA.

#### 1) Posisi Relatif



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.88. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

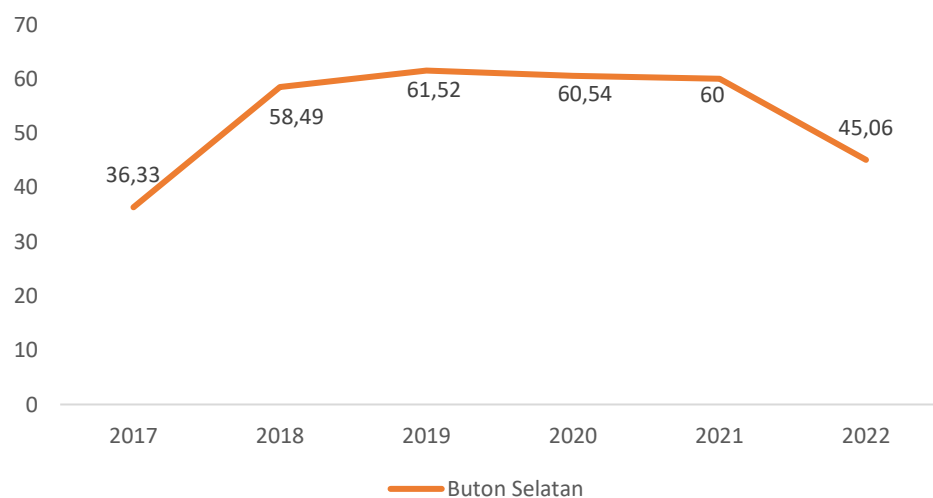




Gambar 3.88 memberikan informasi APM untuk SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 45,06%. Angka ini berada dibawah dari capaian pada tingkat provinsi diangka 64.11%. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Buton Selatan terendah kedua setelah Kolaka Utara di angka 44,49%.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.89 menunjukkan perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2017-2022 menunjukkan performa yang melengkung ke atas, dimana awalnya meningkat dan setelah mencapai puncak kemudian menurun kembali. Tahun 2019 merupakan puncak capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, yakni sebesar 61,52%. Tren tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (usia 16-18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah tersebut mengalami peningkatan pada tiga tahun awal dan kemudian mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir, sebagaimana Gambar 3.89 berikut.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.89. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022**

## 3) Efektivitas

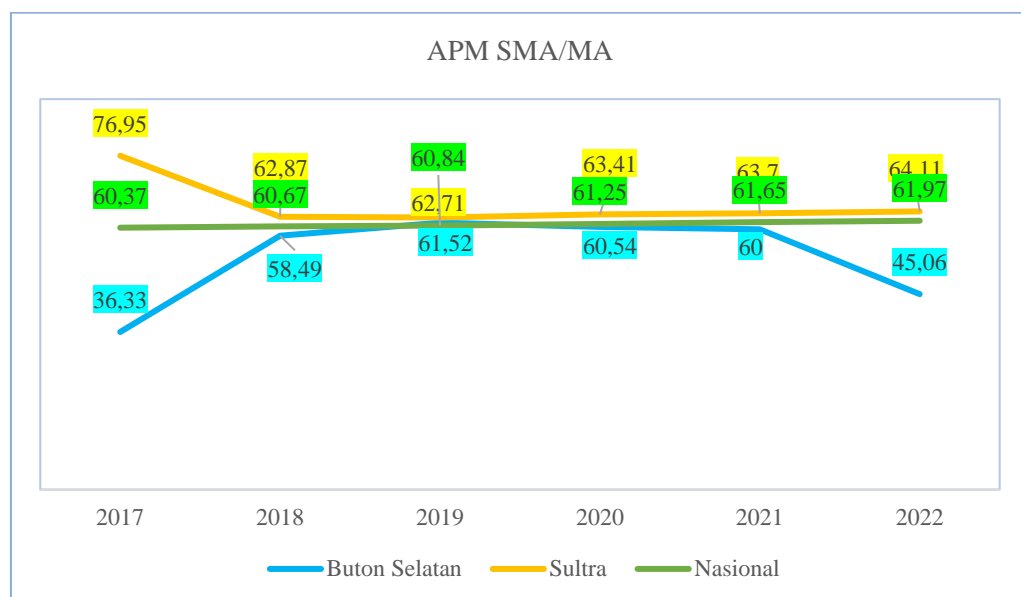
Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan cenderung mengalami tren melengkung/parabola ke atas dari tahun 2017-2022 dengan capaian puncak pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai





program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya peningkatan APM SMA/MA kurang efektif. Oleh karena itu, mutu pendidikan SMA perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan jenjang SMA. Adapun upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Buton Selatan harus tetap ditingkatkan agar dapat berkontribusi positif dalam peningkatan capaian APM SMA/MA.

#### 4) Relevansi



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.90. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022**

Gambar 3.90 menunjukkan capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan kurang relevan dengan capaian APM SMA/MA provinsi maupun Nasional pada periode tahun 2017-2022. Meskipun di tahun 2019 capaian APM Kabupaten Buton Selatan telah mampu melampaui capaian nasional, namun tahun-tahun yang lainnya masih berada di bawah capaian nasional dan provinsi. Bahkan pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan yang cukup besar sehingga jauh berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Artinya berbagai program/kegiatan pendidikan seperti beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan belum mampu meningkatkan capaian APM



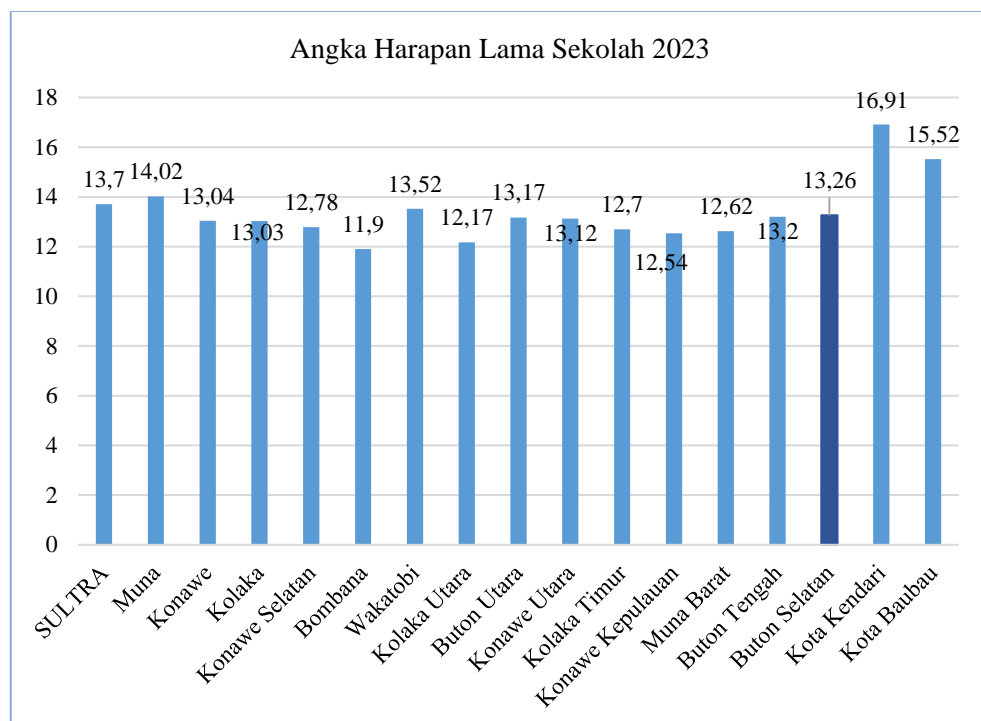


SMA/MA. Perlu digali kembali program dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat mendorong peningkatan capaian APM SMA/MA di Kabupaten Buton Selatan

### 3.3.4.7. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *United Nations Development Programme* (UNDP). Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Berikut ini kondisi angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton Selatan terhadap posisi relatif Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

#### 1) Posisi Relatif



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.91. Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

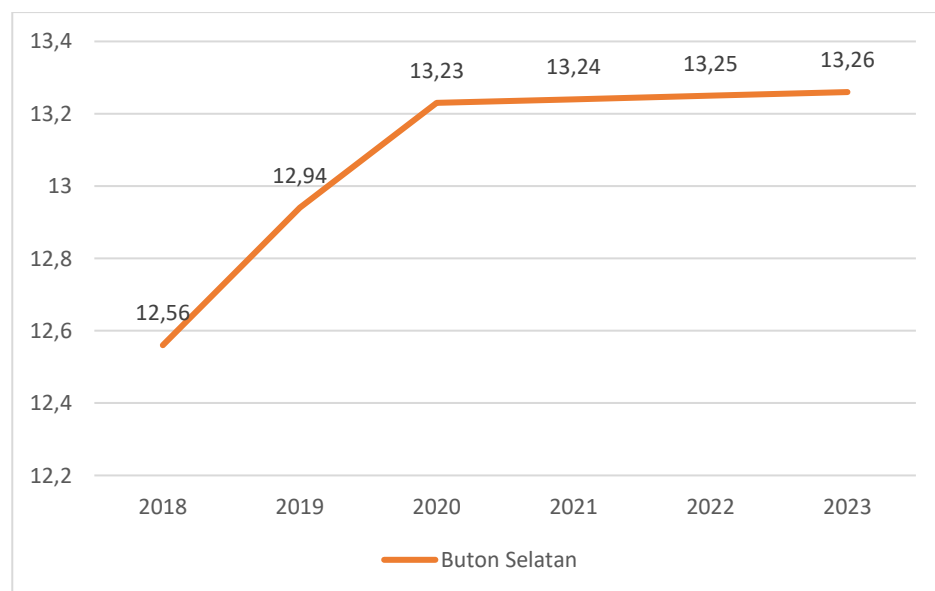




Gambar 3.91 memberikan informasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 sebesar 13,26 tahun. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni 13,70 tahun. Adapun HLS tertinggi di Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari yakni 16,91 tahun, sedangkan terendah adalah Bombana yakni 11,90 tahun.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Angka HLS di Kabupaten Buton Selatan antara 2018-2023 terbilang baik, karena menunjukkan angka peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.92, HLS tahun 2018 mencatatkan angka 12,56 tahun naik menjadi 13,15 tahun di tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2019 dan 2020.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.92. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023**

## 3) Efektivitas

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018-2023 pada Gambar 3.92 menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berjalan efektif di dalam peningkatan harapan lama sekolah Kabupaten Buton Selatan. Adapun hal ini berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan mengenai efektivitas kegiatan dan program pengelolaan pendidikan serta program

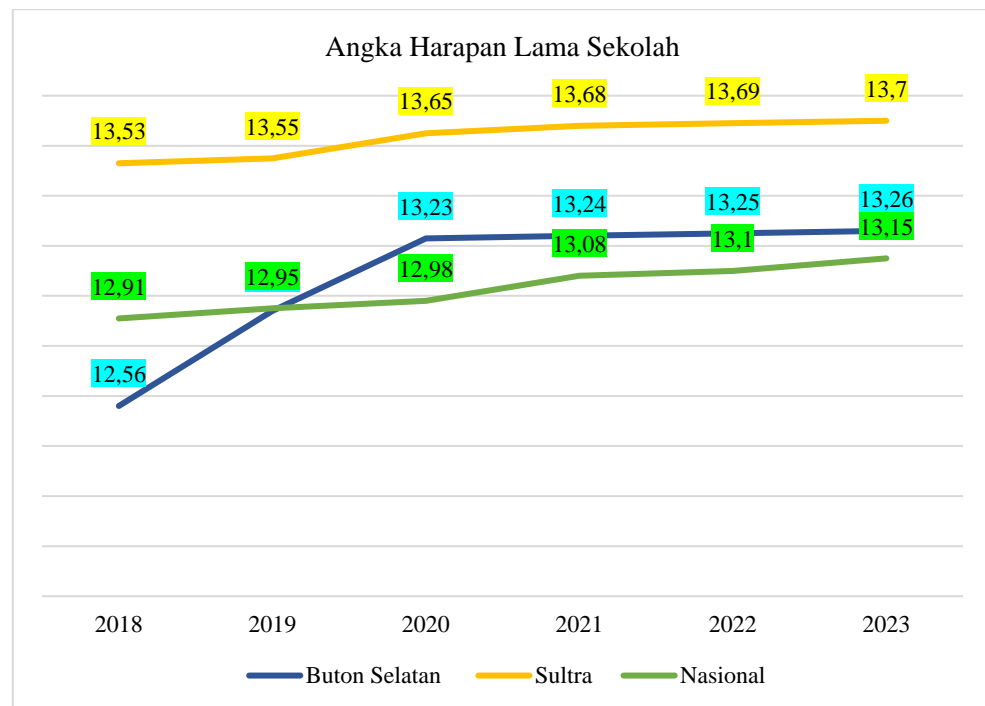




pengembangan kurikulum di jenjang PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C.

#### 4) Relevansi

Capaian HLS di Kabupaten Buton Selatan nampak relevan dengan pola yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Baik pada tingkat provinsi dan nasional keduanya menunjukkan pola peningkatan yang konsisten selama periode 2018-2023. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.93.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.93. Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023**

#### 3.3.4.8. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi pendidikan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang pendidikan yang memuat indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tiap jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang pendidikan dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tabel 3.6). Sebagian besar indikator bidang pendidikan yang belum tercapai yaitu pada kategori APK dan APM SMA/MA/Paket C, hal ini dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun, partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SMA dan persentase anak pada kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan angka





rendah. Maka dari itu, program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Buton Selatan perlu ditingkatkan mengingat porsi anak yang bersekolah di jenjang SMA menunjukkan angka tidak tepat waktu, disamping harapan lama sekolah Kabupaten Buton Selatan telah mencapai kondisi sangat baik dengan capaian positif.

**Tabel 3.6 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Pendidikan**

| No | Indikator Utama                  | Aspek Yang Dianalisis   |                                  |                |                |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                  | Posisi Relatif  | Perkembangan                     | Efektivitas    | Relevansi      |
| 1. | APK SD/MI                        | Posisi terendah keempat dan di bawah capaian provinsi             | Berfluktuasi Cenderung meningkat | Cukup Efektif  | Relevan        |
| 2. | APK SMP/MTs                      | Posisi kelima tertinggi dan di atas capaian provinsi dan nasional | Cenderung turun                  | Kurang Efektif | Relevan        |
| 3. | APK SMA/MA                       | Posisi terendah kedua   | Berfluktuasi Cenderung menurun   | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 4. | APM SD/MI                        | Tertinggi kedua dan di atas capaian provinsi                      | Cenderung meningkat              | Efektif        | Relevan        |
| 5. | APM SMP/MTs                      | Posisi tertinggi ketiga dan di atas capaian nasional dan provinsi | Cenderung meningkat              | Efektif        | Relevan        |
| 6. | APM SMA/MA                       | Posisi terendah kedua dan di bawah capaian provinsi               | Meningkat kemudian Menurun       | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 7. | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Posisi tertinggi keenam dan di atas capaian nasional              | Cenderung meningkat              | Efektif        | Relevan        |



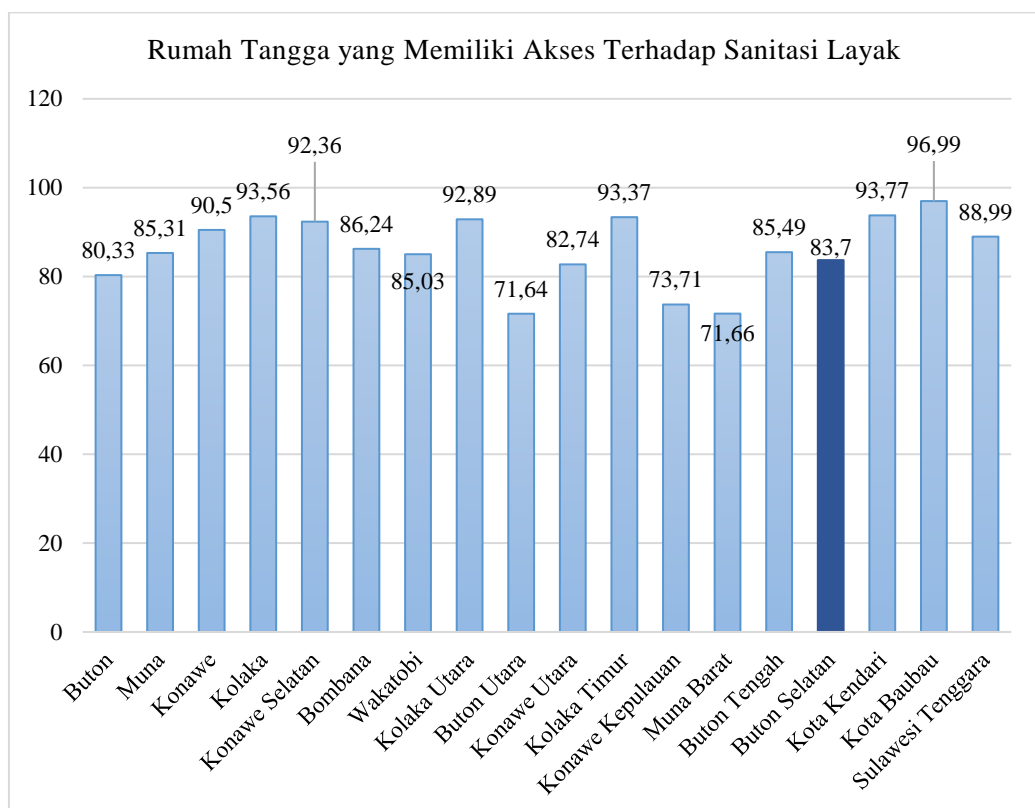


### 3.3.5. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

#### 3.3.5.1. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi masih menjadi permasalahan, terutama di permukiman padat yang belum memiliki sanitasi tidak layak dan masih terdapatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang belum terselesaikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berikut ini dijelaskan posisi relatif, perkembangan time series, efektivitas dan relevansi Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi dan Nasional.

##### 1) Posisi Relatif



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.94. Analisis Posisi Relatif Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

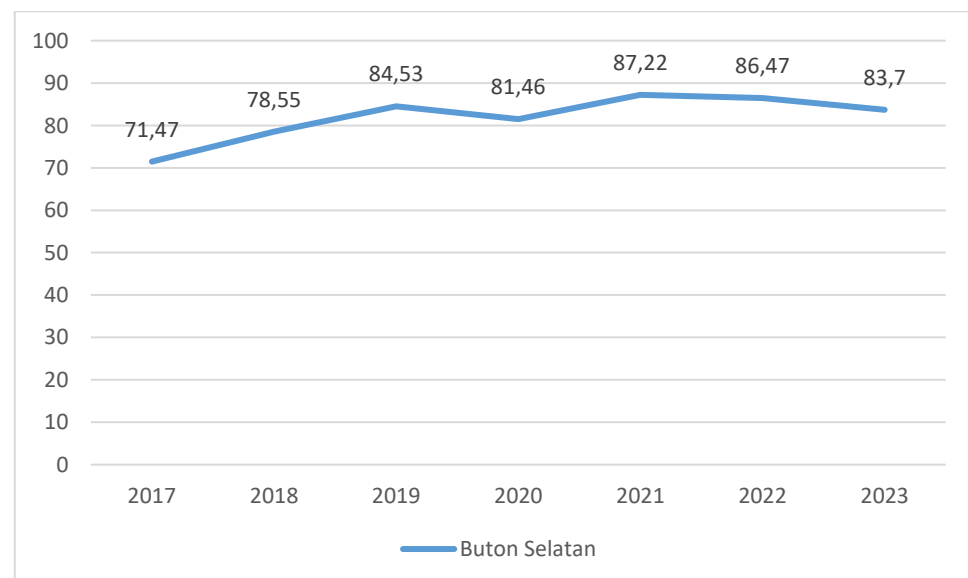




Jumlah penduduk yang memiliki dan/atau dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 83,70%. Angka ini masih lebih rendah dsbanding angka rata-rata pada tingkat provinsi yakni 88,99%. Adapun yang tertinggi adalah di Baubau sebesar 96,99%, sedangkan yang terendah di Buton Utara yakni 71,64%. Data tersebut selengkapnya dilihat pada Gambar 3.94.

## 2) Perkembangan Antar Waktu

Jumlah (persentase) rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan antara 2018 ke 2021 menunjukkan peningkatan, dari 71,06% menjadi 87,22%. Tetapi kemudian persentasenya ditahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, masing-masing menjadi 86,47% dan 83,70%. Informasi lengkapnya tersaji pada Gambar 3.95.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.95. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023**

## 3) Efektivitas

Berdasarkan perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan pada kurun waktu 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki tren berfluktuasi yang cenderung menurun pada dua tahun terakhir (Gambar 3.95). Oleh karena itu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum efektif untuk meningkatkan capaian akses terhadap sanitasi layak sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi

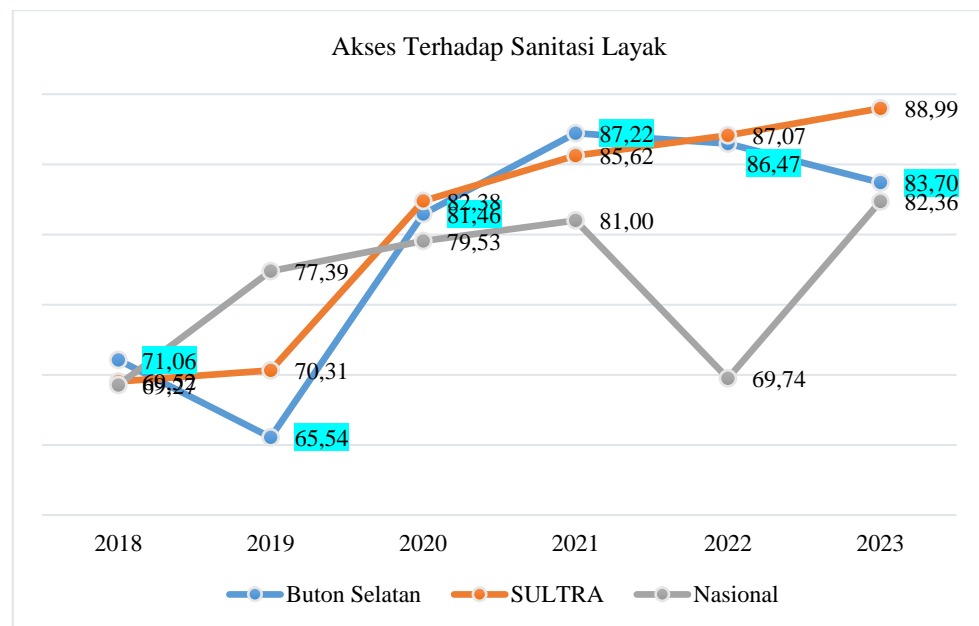




kepada semua pihak pemangku kebijakan dalam meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Program urusan pekerjaan umum di tingkat Kabupaten Buton Selatan harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan dan permukiman penduduk.

#### 4) Relevansi

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan nampak relevan dengan pola yang terjadi pada tingkat provinsi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.96, ada peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2018-2020, dan setelah perlahan meningkat hingga 2023. Sementara itu pada tingkat nasional reval pada persentase antara tahun 2018-2021 yang mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2022 persentase tingkat nasional sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.96.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.96. Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023**

#### 3.3.5.2. Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu pada konsep terbaru tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun konsep sumber air minum layak jika sumber air

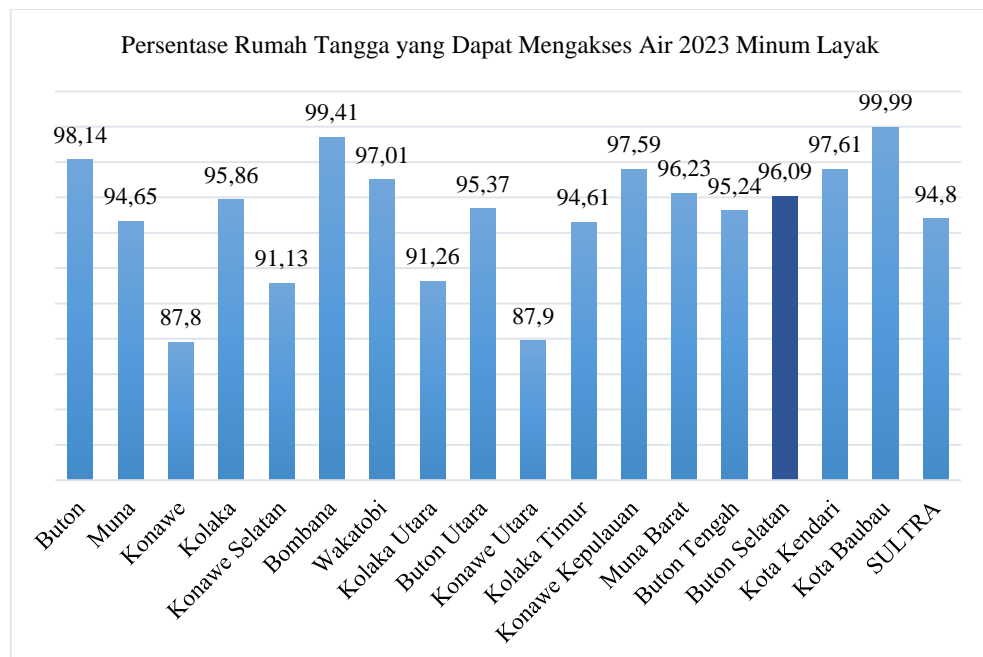




minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019. Berikut ini kondisi Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Rumah Tangga dengan sumber air minum layak

### 1) Posisi Relatif

Jumlah penduduk (%) yang dapat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 96,09%, lebih baik dari rerata pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di angka 94,80%. Data lengkapnya disajikan pada Gambar 3.97.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.97. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

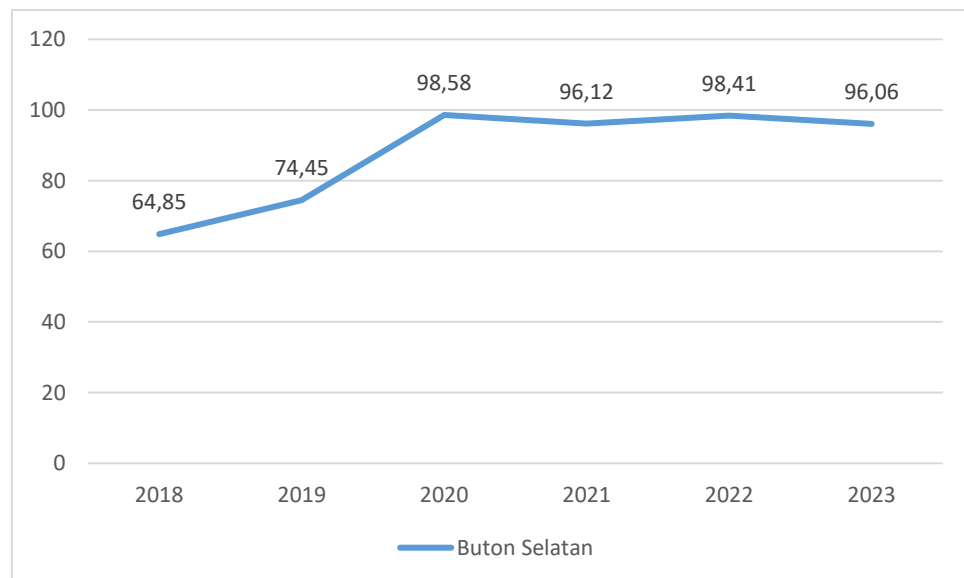
### 2) Perkembangan Antar Waktu

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan antara 2017 ke 2019 terjadi penurunan, dari





79,62% menjadu 74,45%. Tahun 2020 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 98,58% sekaligus yang tertinggi selama tahun 2017-2023. Tahun 2023, persentase masyarakat yang dapat mengakses air minum yang layak adalah 96,09%. Data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.98.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.98. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023**

### 3) Efektivitas

Informasi yang tersaji pada Gambar 3.98 di atas memperlihatkan tren perkembangan jumlah penduduk (rumah tangga) yang dapat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2023 yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Meskipun mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, namun capaian Kabupaten Buton Selatan masih berada pada kondisi baik. Program kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Oleh karena itu, program tersebut telah berjalan efektif dalam meningkatkan kembali persentase capaian rumah tangga dengan air minum layak.

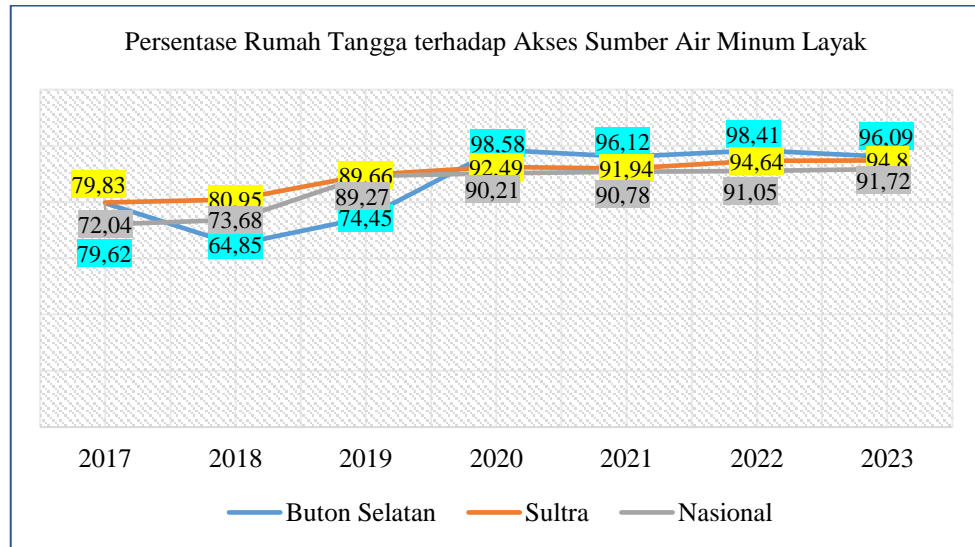
### 4) Relevansi

Perkembangan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak nampak berkesesuaian (relevan) dengan capaian yang terjadi pada





tingkat provinsi dan nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.99, polanya juga sama yakni terjadi penurunan pada tahun 2021.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.99. Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023**

### 3.3.5.3. Akses Terhadap Penerangan Listrik PLN

Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital dari perumahan. Bahkan akses sumber penerangan berupa indikator elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Sumber penerangan yang berkelanjutan memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup penduduk. Adanya fungsi sumber penerangan tidak hanya berfungsi untuk penerangan atau pencahayaan saja, namun berkaitan dengan produktivitas perekonomian rumah tangga. Adapun berikut ini kondisi Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional terkait Rumah Tangga dengan sumber penerangan dari listrik, baik listrik PLN maupun non PLN.

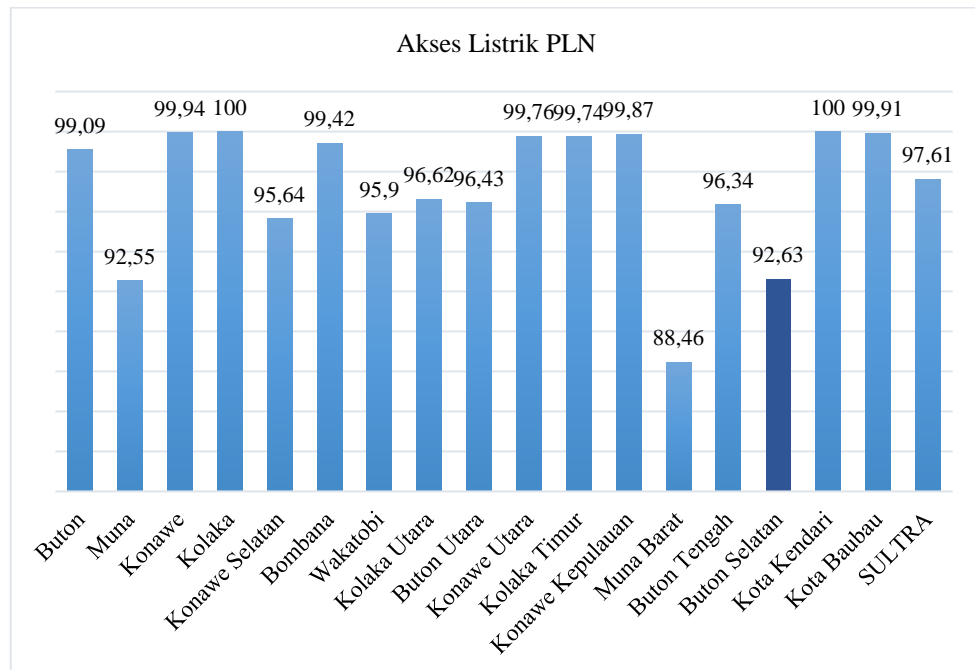
#### 1) Posisi Relatif

Rumah tangga yang telah memiliki penerangan listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 92,63%. Angka ini masih berada di bawah rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 97,61%. Angka tersebut sekaligus menempatkan Kabupaten Buton Selatan sebagai terendah ketiga setelah Muna Barat (88,46%) dan Muna (92,55%). Data





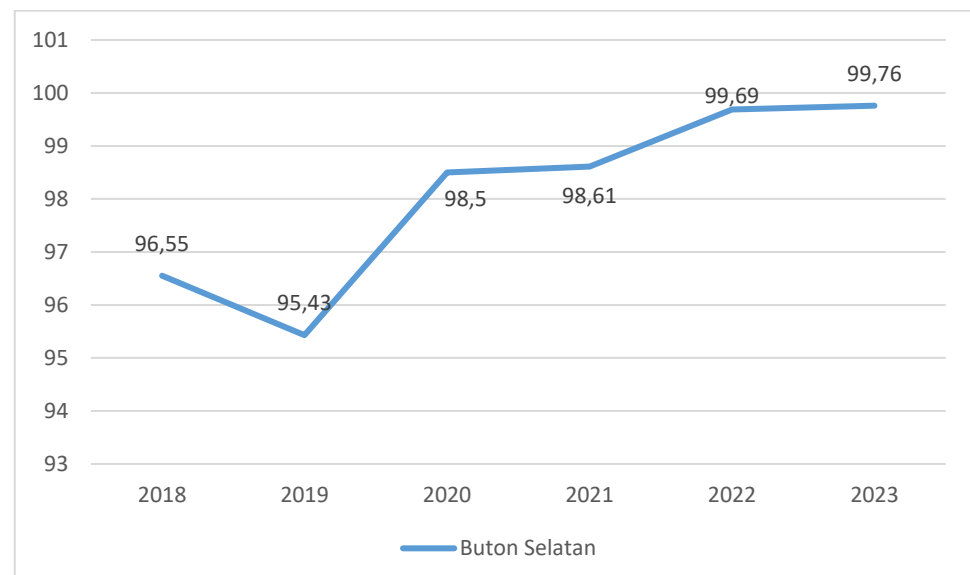
mengenai rumah tangga yang terlayani akses Listrik PLN di Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 3.100 berikut:



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.100. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

## 2) Perkembangan Antar Waktu



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.101. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023**





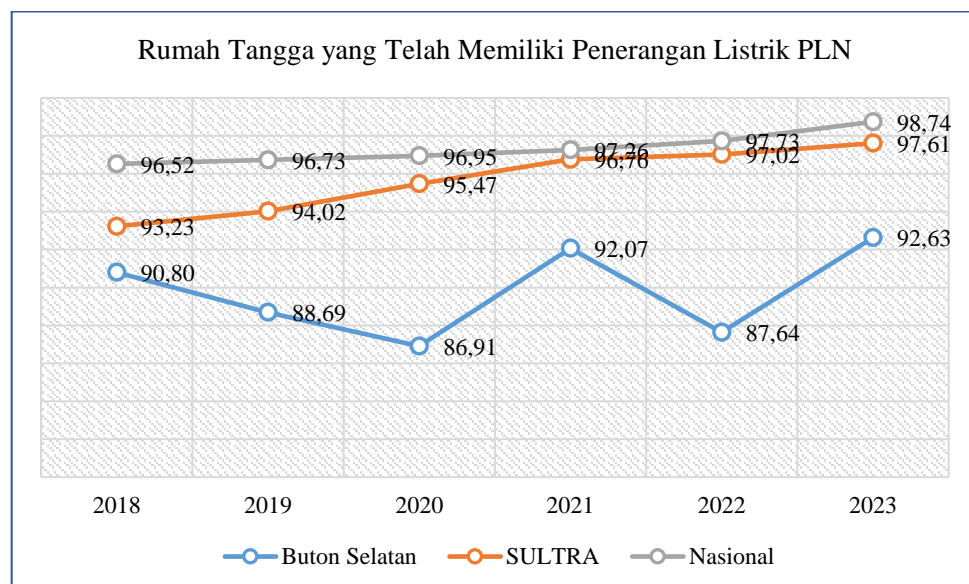
Gambar 3.101 menunjukkan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses penerangan Listrik di Kabupaten Buton Selatan selama 2018-2023 yang mengalami fluktuatif, dimana tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan, dan kembali membaik capaiannya di tahun 2023. Meski demikian, terjadi peningkatan rumah tangga yang mendapatkan penerangan listrik PLN antara 2018 ke 2023, dari 90,80% menjadi 92,63%.

### 3) Efektivitas

Dengan melihat pola elektrifikasi antara 2018-2023 di Kabupaten Buton Selatan pada Gambar 3.101 dapat dikatakan belum efektif. Dinamika yang terjadi, seperti penuurunan yang konsisten antara 2018-2020, dan 2022 akan mempengaruhi persentase elektrifikasi dimasa mendatang.

### 4) Relevansi

Perkembangan elektrifikasi dari rumah tangga yang dapat mengakses layanan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan nampak tidak berkesesuaian dengan elektrifikasi pada tingkat provinsi dan nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.102, persentase pada tingkat Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2023 masih berada di bawah provinsi dan nasional. Selanjutnya, elektrifikasi pada tingkat provinsi dan nasional nampak konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.102. Analisis Relevansi Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023**





### 3.3.5.4. Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita (*sufficient living space*), (2) memiliki akses terhadap air minum layak, (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan (4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinyl/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah. Berikut ini lebih jelas persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan.

#### 1) Posisi Relatif

Rumah tangga yang telah memiliki akses atau rumah tangga miskin yang telah mendapatkan bantuan rumah layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 adalah 54,54% dari total penduduk miskin. Angka ini masih jauh dibawah rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara diangka 72,80%. Untuk yang tertinggi berada di Kabupaten Kolaka Timur (84%), dan terendah di Buton Utara (48,06%). Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.103.



**Gambar 3.103. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022**

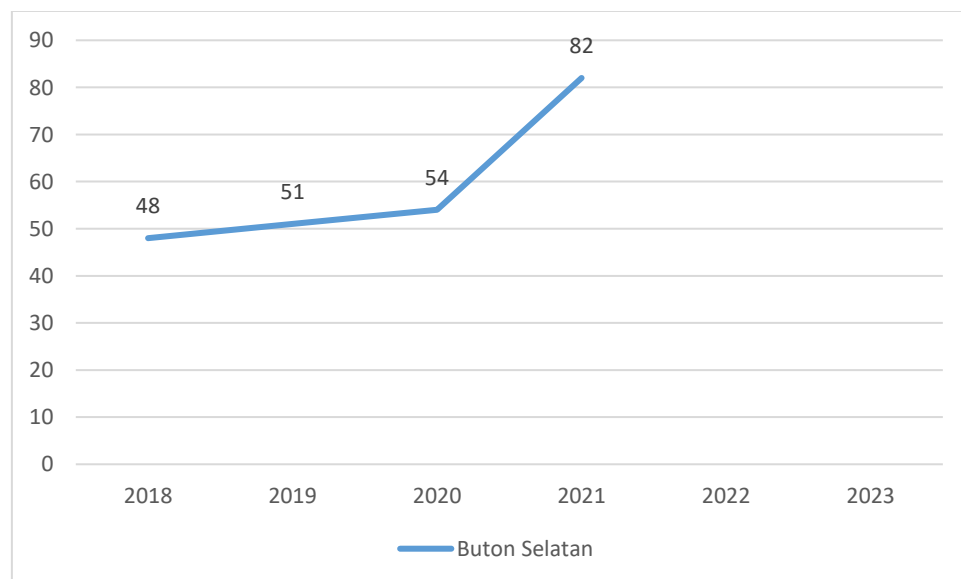




## 2) Perkembangan Antar Waktu

Bersumber dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, Jumlah rumah layak huni Kabupaten Buton Selatan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan capaian 13.869 rumah dari 8.137 rumah pada tahun 2018, selanjutnya rumah tidak layak huni terus menurun hingga tahun 2021 dengan capaian 3.092 rumah dari jumlah seluruh rumah sebanyak 16.989 rumah dengan rasio 82%. Selanjutnya Kabupaten Buton Selatan masih memiliki *backlog* rumah hingga tahun 2021 sebanyak 20.244 Kepala Keluarga.

Berdasarkan data di atas, grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan, namun sayangnya tidak terdapat data untuk periode tahun 2022-2023. Informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.104.



*Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, Diolah 2024*

**Gambar 3.104. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021**

## 3) Efektivitas

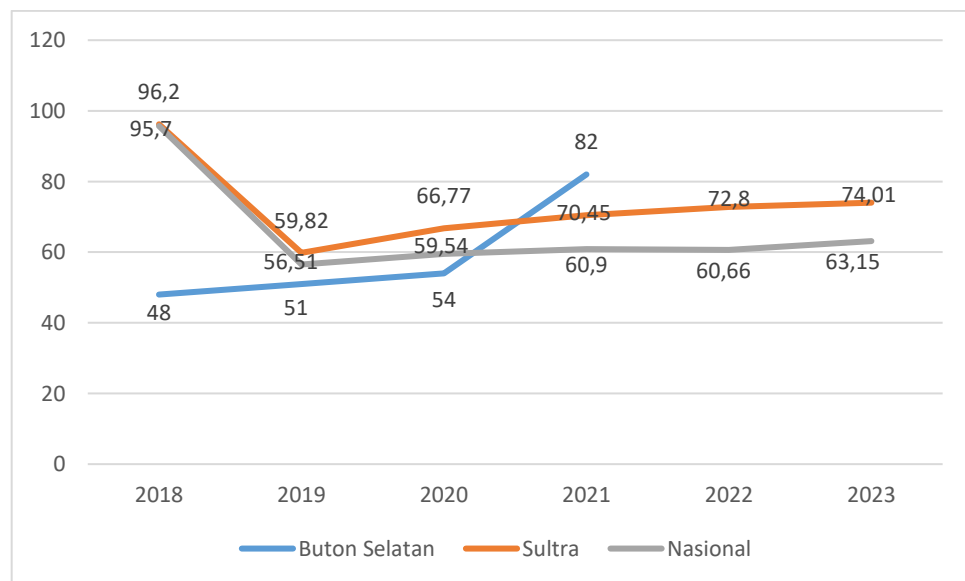
Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa pada





periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan. Tahun 2021 persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 28% dari 54% menjadi 82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan sudah sangat efektif.

#### 4) Relevansi



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024

**Gambar 3.105. Analisis Relevansi Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2023**

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara, dan nasional tahun 2017-2023 menunjukkan kecenderungan yang relevan. Gambar 3.102. menunjukkan bahwa capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kabupaten Buton Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga capaian nasional dan provinsi setelah tahun 2019 semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh Kabupaten Buton Selatan bidang infrastruktur dasar khususnya rumah tangga yang memiliki akses





terhadap hunian yang layak dan terjangkau sudah relevan/sejalan dan sinergi dengan capaian nasional dan provinsi serta turut mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

### 3.3.5.5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi infrastruktur dasar, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan non konsumsi bidang infrastruktur dasar yang memuat indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, air minum layak, sumber penerangan listrik, dan hunian layak (Tabel 3.8). Sebagian besar indikator bidang infrastruktur dasar telah relatif baik dilihat dari perkembangan antar waktu, efektivitas program, dan relevansinya. Namun, dari indikator tersebut, posisi relatif Kabupaten Buton Selatan masih berada di bawah kabupaten/kota lainnya. Disamping itu, indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak memiliki perkembangan waktu yang fluktuatif cenderung menurun atau ada ketidakstabilan persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi layak dan cenderung mengalami penurunan capaian kinerja. Untuk tetap mempertahankan kestabilan capaian indikator bidang infrastruktur dasar, pemerintah Kabupaten Buton Selatan perlu tetap meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.

**Tabel 3.7 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Infrastruktur Dasar**

| No | Indikator Utama  | Aspek Yang Dianalisis  |                                     |                |                |
|----|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
|    |  | Posisi Relatif   | Perkembangan                        | Efektivitas    | Relevansi      |
| 1. | Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) | Posisi terendah keenam terletak di bawah capaian provinsi dan di atas nasional | Berfluktuasi Cenderung Menurun      | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 2. | Persentase Rumah Tangga  | Posisi kedelapan atau rata-rata  | Berfluktuasi Cenderung Meningkatkan | Efektif        | Relevan        |





|    |   |  |           |         |         |
|----|---|--|-----------|---------|---------|
|    | Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%)                                     | tengah dan di atas capaian provinsi dan nasional                           |           |         |         |
| 3. | Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%)               | Posisi terendah kelima dan terletak di bawah capaian nasional dan provinsi | Meningkat | Efektif | Relevan |
| 4. | Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) | Tertinggi ketiga dan di atas capaian nasional dan provinsi                 | Meningkat | Efektif | Relevan |

### 3.3.6. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan

Salah satu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalnya status gizi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Status gizi dapat dipengaruhi beberapa aspek seperti produksi pangan, distribusi, dan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017, terdapat 5 pilar utama perbaikan gizi masyarakat, yaitu: (1) Perbaikan gizi masyarakat, (2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, (3) Mutu dan keamanan pangan, (4) Perilaku hidup bersih dan sehat, dan (5) Koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

#### 3.3.6.1. Konsumsi Beras

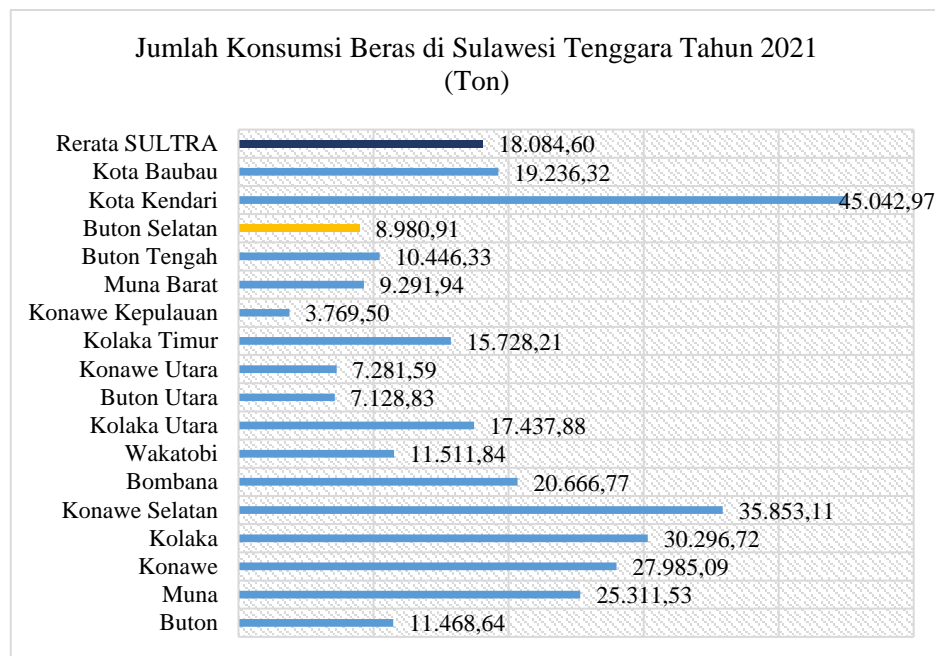
##### 1) Posisi Relatif

Rata-rata konsumsi beras per tahun di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sebesar 8.890,91 ton/tahun/orang. Bila jumlah penduduk tahun tersebut sebanyak 99.173 jiwa, maka rata-rata setiap penduduk mengkonsumsi beras sekitar 89,65 kg/orang/tahun atau sekitar 255,45 gram/orang/hari.





Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.106, rerata konsumsi beras di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 masih berada di bawah rerata konsumsi Provinsi Sulawesi Tenggara (18.084,60 kg/tahun/orang). Adapun konsumsi tertinggi berada di Kota Kendari yakni 45.042,97 kg/tahun/orang.



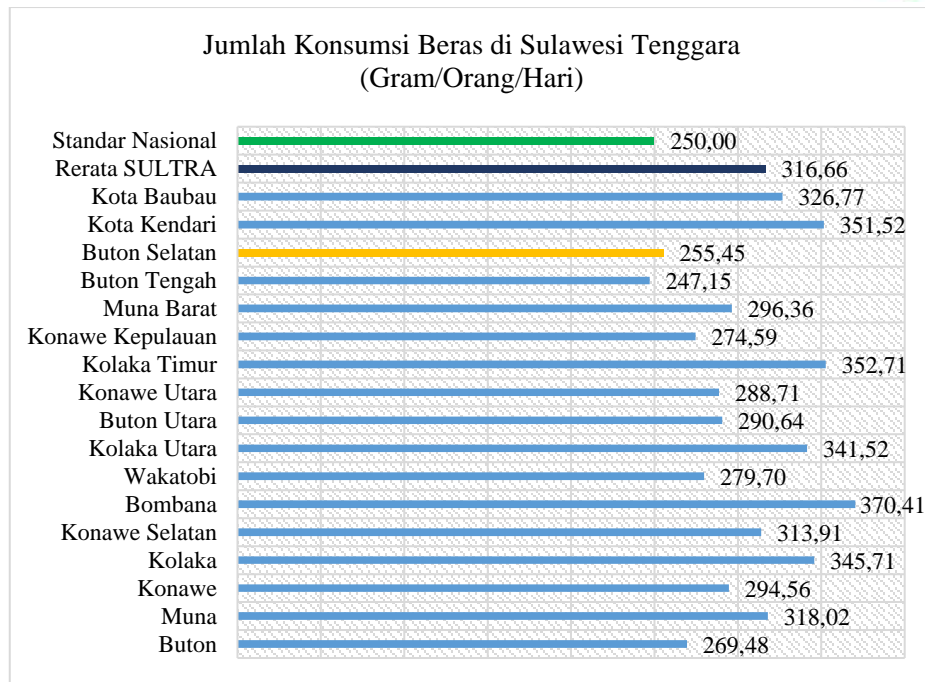
*Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022*

**Gambar 3.106. Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Ton/Tahun)**

Berdasarkan data konsumsi beras tersebut, maka dapat diketahui jumlah konsumsi beras penduduk Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 adalah 8.980,91 ton sebagaimana tersaji pada Gambar 3.106. Jumlah ini merupakan jumlah terendah keempat di Sulawesi Tenggara, sedikit di atas konsumsi beras Kabupaten Konawe Utara, Buton Utara, dan Konawe Kepulauan. Jumlah konsumsi beras tertinggi adalah Kota Kendari, disusul Kabupaten Konawe Selatan.

Gambar 3.107 memberikan informasi tingkat konsumsi beras setiap penduduk di Buton Selatan tahun 2021 adalah 255,45 gram/hari. Angka ini masih berada di bawah rerata provinsi diangka 316,66 gram/hari. Meski demikian, angka tersebut terbilang baik karena berada di atas standar nasional konsumsi beras per hari per orang adalah 250 gram/orang/hari.

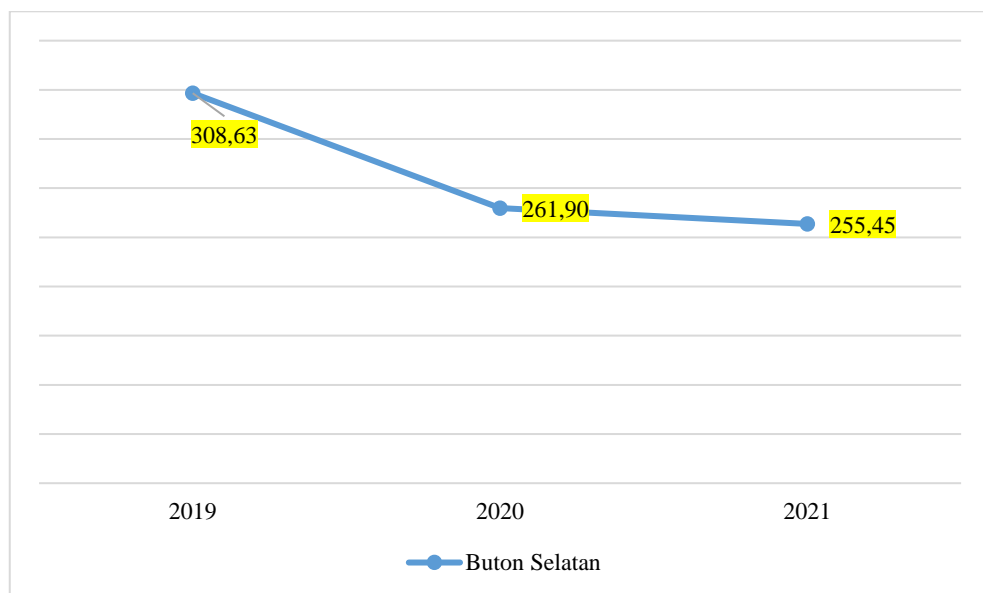




*Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022*

**Gambar 3.107. Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras Setiap Penduduk di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Gram/Orang/Hari)**

## 2) Perkembangan Antar Waktu



*Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022*

**Gambar 3.108. Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Rata-Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021**

Rerata konsumsi beras di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan kurang baik, sebab terjadi penurunan besaran rerata konsumsi beras setiap





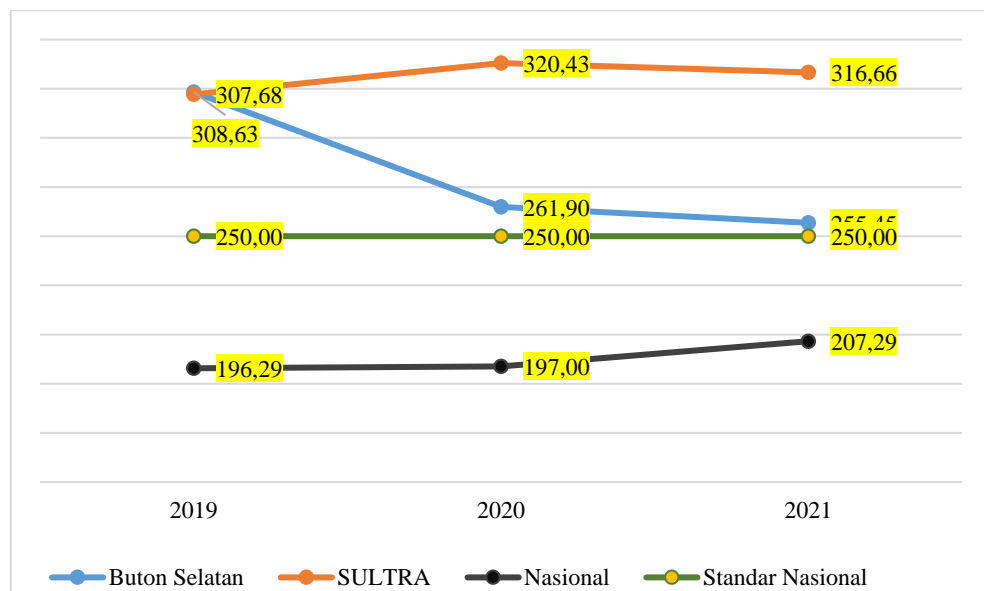
orang dalam setahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.108, konsumsi beras tahun 2019 sekitar 308,63 gram/orang/hari, tahun 2020 turun menjadi 261,90 gram/orang/hari, dan tahun 2021 menjadi 255,45 gram/orang/hari.

### 3) Efektivitas

Gambar 3.108 memberikan informasi penurunan jumlah konsumsi beras per orang dalam setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa pola konsumsi pangan melalui jumlah konsumsi beras setiap tahunnya dapat dikatakan kurang efektif. Sebab, rerata konsumsi pangan sebagai salah satu variabel penting dalam menjelaskan derajat kemiskinan seseorang.

### 4) Relevansi

Gambar 3.109 jelas memperlihatkan bahwa pola konsumsi beras pada setiap orang per tahun menunjukkan kurva yang berlawanan dengan fakta yang terjadi pada tingkat provinsi, bahkan pada tingkat nasional. Rerata konsumsi beras per orang di Sulawesi Tenggara antara 2019-2020 menunjukkan peningkatan, dan sedikit menurun ditahun 2021. Sementara itu, pada tingkat nasional, konsisten menunjukkan kurva peningkatan.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022

**Gambar 3.109. Analisis Relevansi Jumlah Rata-Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021**



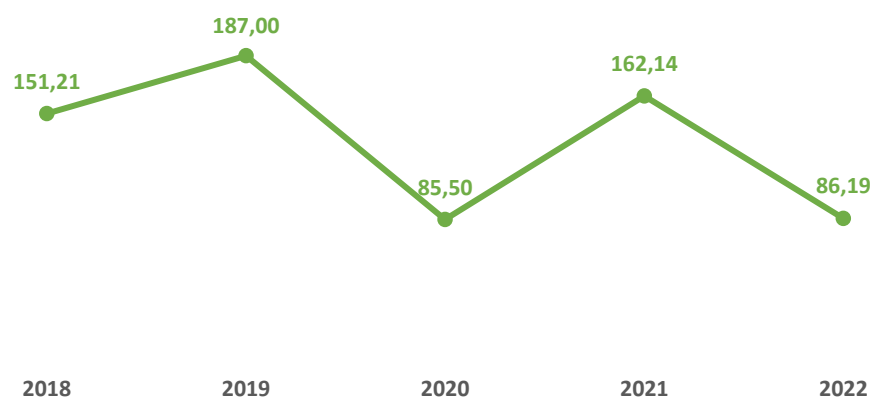


### 3.3.6.2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk.

#### 1) Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu 5 tahun capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buton Selatan cenderung fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2018 yaitu 151,21 Kg/Kapita/Tahun hingga tahun 2022 hingga mencapai 86,19 Kg/Kapita/Tahun (Gambar 3.110).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.110. Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

#### 2) Efektivitas

Berdasarkan capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 pada Gambar 3.110, terlihat bahwa capaian ketersediaan pangan pada tahun 2022 mengalami penurunan hampir separuh dari hasil capaian tahun 2021. Penurunan capaian ketersediaan pangan pada tahun 2020 juga lebih dari separuh capaian tahun sebelumnya. Besarnya penurunan ketersediaan pangan utama ini akan mempengaruhi kecukupan pangan penduduk Kabupaten Buton Selatan. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya belum berjalan efektif.



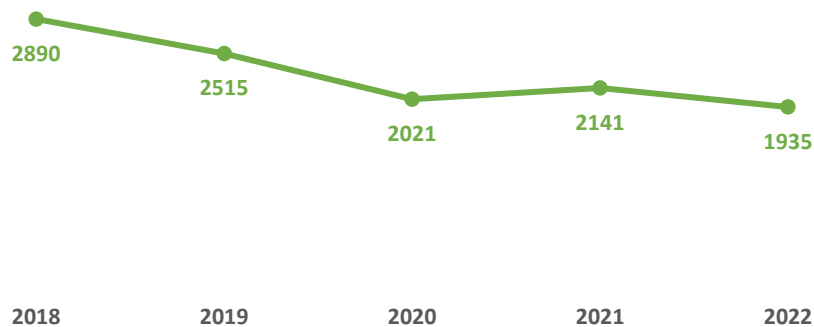


### 3.3.6.3. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan tersedia di pasar yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kkal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari, serta lemak per g/kapita/hari. Angka ketersediaan ini menggambarkan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat.

#### 1) Perkembangan Antar Waktu

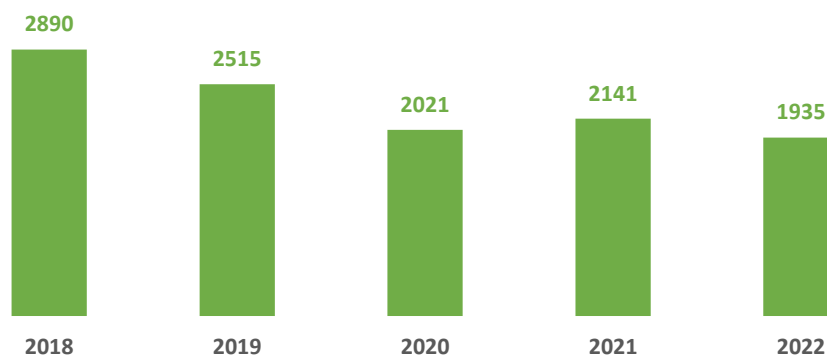
Dalam beberapa tahun terakhir ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang semula 2.890 Kkal/kapita/hari di tahun 2018 menjadi 1.935 Kkal/kapita/hari pada tahun 2022 (Gambar 3.111).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.111. Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

#### 2) Efektivitas dan Relevansi



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.112. Analisis Efektivitas Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**





Gambar 3.112 menunjukkan perkembangan angka ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Buton Selatan yang cenderung menurun dari tahun 2018 yaitu 2890 Kkal/Kapita/Tahun hingga tahun 2022 yaitu 1935 Kkal/Kapita/Tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam aksesibilitas dan distribusi pangan, yang dapat berdampak pada status gizi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 kurang berjalan efektif dan perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks upaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Selain itu, menurunnya ketersediaan energi juga dapat mengindikasikan perlunya diversifikasi sumber pangan dan peningkatan produksi pangan lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tindakan korektif yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap kesehatan dan kesejahteraan penduduk setempat.

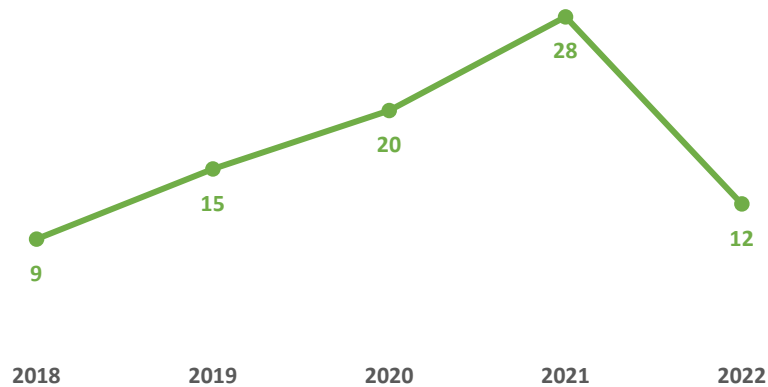
#### **3.3.6.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal yang dapat mengganggu, merugikan, membawa dampak negatif bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat.

##### **1) Perkembangan Antar Waktu**

Selama 5 tahun terakhir pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan capaian yang mengalami penurunan setelah empat tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Jumlah sampel yang diambil dari tahun 2018 meningkat dari 9 sampel hingga menjadi 28 sampel pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 pengambilan sampel hanya dilakukan pada 12 sampel saja. Telah terjadi penurunan pada akhir tahun 2022 (Gambar 3.113).





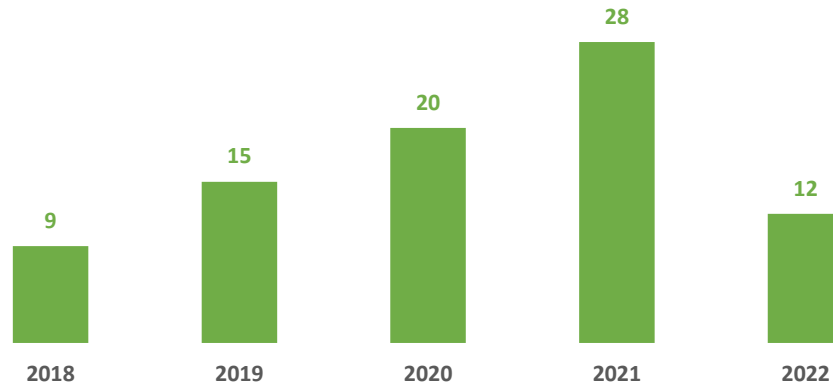
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.113. Analisis Perkembangan Antar Waktu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

## 2) Efektivitas

Gambar 3.114 menunjukkan menunjukkan tren pengambilan sampel untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Buton Selatan yang awalnya meningkat hingga mencapai 28 jenis sampel pada tahun 2021 sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk menyediakan jaminan keamanan pangan bagi penduduknya. Namun pada tahun 2022 upaya pemerintah mengalami kemunduran hingga pengambilan sampel pengawasan keamanan pangannya menurun lebih dari separuh capaian tahun 2021. Ada berbagai faktor penyebab yang membuat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah bidang ketahanan pangan pada tahun 2022 kurang efektif, namun pemerintah menyadari bahwa dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu, merugikan, dan membawa dampak negatif bagi kesehatan, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat.



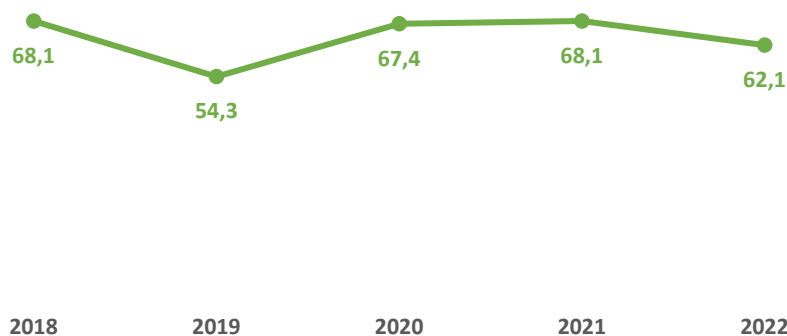


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan  
**Gambar 3.114. Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3.3.6.5. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan.

#### 1) Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan  
**Gambar 3.115. Analisis Perkembangan Antar Waktu Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

Gambar 3.115 memperlihatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan selama 5 tahun terakhir yang cenderung fluktuatif dimana tahun 2019 menurun hingga 54,3% dari tahun 2018 yang di angka

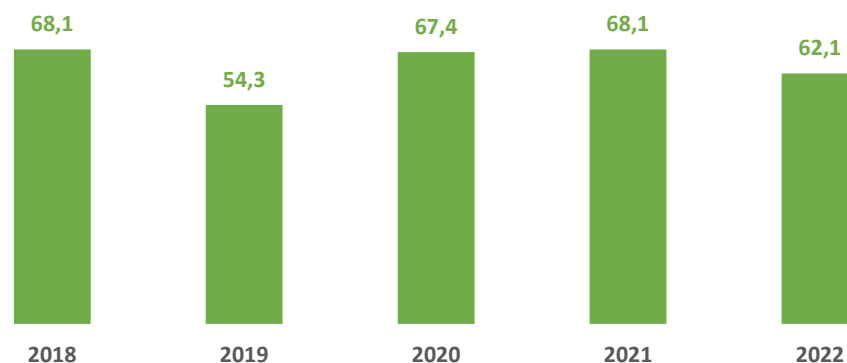




68,1% selanjutnya meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 87,4% dan menurun kembali hingga 62,1% pada tahun 2022.

## 2) Efektivitas

Fluktuasi capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.116) menunjukkan bahwa susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan di Kabupaten Buton Selatan selama periode tahun 2018-2022 kurang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan hingga tahun 2022 tidak stabil dan bahkan situasinya lebih buruk dari situasi pada tahun 2018. Ketidakstabilan dan memburuknya capaian skor PPH menunjukkan bahwa program pemerintah bidang ketahanan pangan belum efektif meningkatkan situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan upaya lebih keras lagi dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan bagi Kabupaten Buton Selatan ke depannya agar terjamin situasi konsumsi dan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk Buton Selatan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.116. Analisis Efektivitas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022**

### 3.3.6.6. Produksi kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan

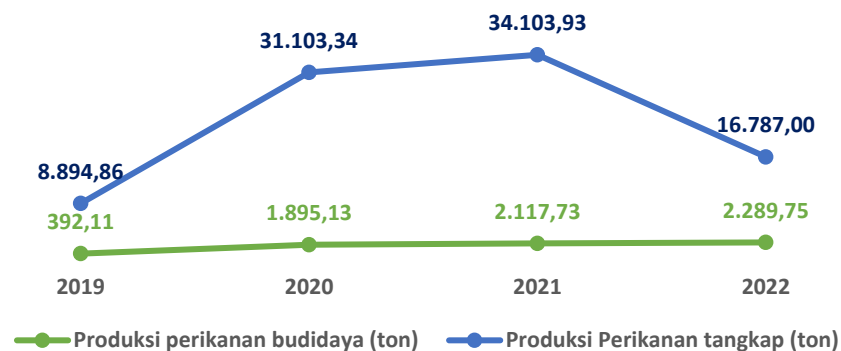




budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian.

### 1) Perkembangan Antar Waktu

Produksi perikanan Kabupaten Buton Selatan dibagi menjadi dua yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan budidaya Kabupaten Buton Selatan terus meningkat hingga tahun 2022 yaitu dari sebesar 392,11 ton pada tahun 2019 menjadi sebesar 2.289,75 ton pada tahun 2022, sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari sebesar 34.103,93 ton di tahun 2021 menjadi sebesar 16.787 ton pada tahun 2022 (Gambar 3.117).



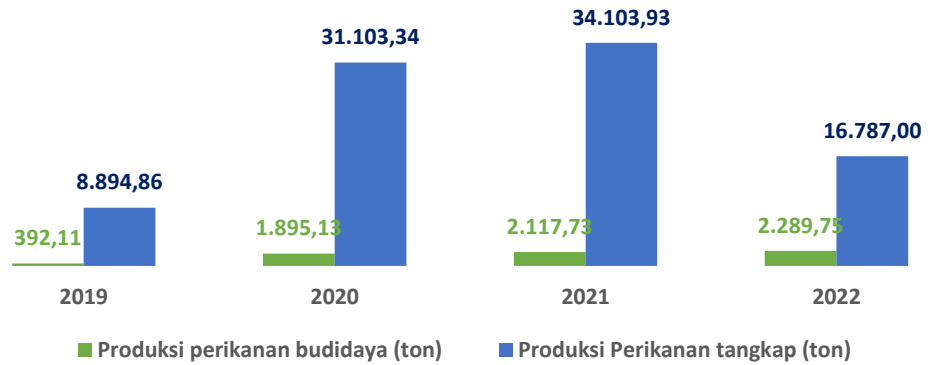
Sumber: BPS Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.117. Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022**

### 2) Efektivitas

Berdasarkan perkembangan grafik capaian produk kelautan dan perikanan Kabupaten Buton Selatan pada Gambar 3.118 tampak produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup besar. Permasalahan utama dari produksi perikanan tersebut adalah pemasaran yang belum jelas terhadap hasil tangkapan ikan, daya tampung *cool storage* dengan kapasitas 30 ton belum mampu menampung hasil produksi ikan serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa program pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum efektif meningkatkan capaian produksi kelautan dan perikanan.





Sumber: BPS Kab. Buton Selatan

**Gambar 3.118. Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022**

### 3.3.6.7. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan konektivitas melalui jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik, menjadi fokus utama. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan pangan dan akses yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah. Secara ringkas hasil analisis terkait ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 3.8. berikut.

**Tabel 3.8. Masalah Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan**

| No | Indikator Utama                 | Aspek Yang Dianalisis  |                                |                |                |
|----|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|
|    |                                 | Posisi Relatif   | Perkembangan                   | Efektivitas    | Relevansi      |
| 1. | Konsumsi Beras                  | Dari sisi jumlah terendah keempat dan dari sisi konsumsi harian terendah kedua | Menurun                        | Kurang efektif | Kurang relevan |
| 2. | Ketersediaan Pangan Utama       | -  | Berfluktuasi Cenderung Menurun | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 3. | Ketersediaan Energi dan Protein | -  | Cenderung Menurun              | Kurang Efektif | Kurang Relevan |





|    |  |   |   |                |                |
|----|--|---|---|----------------|----------------|
| 4. | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | - | Cenderung Menurun   | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 5. | Skor Pola Pangan Harapan                 | - | Cenderung Menurun   | Kurang Efektif | Kurang Relevan |
| 6. | Produksi Kelautan dan Perikanan          | - | Perikanan Budidaya Meningkatkan namun perikanan tangkap menurun tajam | Kurang Efektif | Kurang Relevan |





## BAB IV. PRIORITAS PROGRAM

### 4.1. Analisis Program Prioritas Kemiskinan

Analisis *Theory of Change* (TOC) sangat penting dalam merancang dan mengevaluasi strategi untuk pengurangan kemiskinan secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam program penanggulangan kemiskinan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan kolaborasi yang efektif antar sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks ini, berbagai sektor OPD di Kabupaten Buton selatan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan besar pengurangan kemiskinan. Melalui penggunaan analisis TOC, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program-program yang ada, menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, dan memantau kemajuan dengan lebih efektif. Ini memungkinkan tercapainya hasil jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Buton Selatan secara signifikan. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis bukti, TOC memastikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi sebuah proses transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 4.1.1. Prioritas Intervensi Bidang Sosial

##### a. Analisis TOC

Hasil analisis TOC sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1 diperoleh bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dan kecil.





**Gambar 4.1. Theory of Change (TOC) Bidang Sosial**

#### **b. Analisis Intervensi**

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah sosial. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi yaitu:

- 1) Masih adanya kepala keluarga fakir miskin yang belum mendapat pelayanan/bantuan sosial;
- 2) Tidak tersedianya data base masyarakat pesisir yang ada di Kab.Buton Selatan;
- 3) Komunikasi dan transportasi belum memadai; dan
- 4) Masih banyaknya penyandang masalah disabilitas, lanjut usia, perempuan kepala keluarga.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1, upaya dalam pencapaian sasaran program yakni menurunkan kemiskinan dengan fokus pada prioritas intervensi sebagai penggambaran dari akar permasalahan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Prioritas intervensi demikian dilakukan berdasarkan masalah ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya. Adapun beberapa program yang disiapkan dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;





- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan
- 4) Program Penanganan Bencana.

#### 4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### a. Analisis TOC

Hasil analisis TOC pada Gambar 4.2 diperoleh bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah pada tiga aspek, yakni: a) meningkatnya presentase desa yang maju; b) peningkatan fasilitas pembangunan dikawasan perdesaan; serta c) meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Adapun prioritas utama intervensi dalam upaya menanggulangi atau mengurangi kemiskinan perdesaan.



Gambar 4.2. *Theory of Change (TOC)* Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### b. Analisis Intervensi

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya menanggulangi atau mengurangi kemiskinan perdesaan adalah masih kurangnya kerja sama antar desa dalam pembangunan. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi yaitu:

- 1) Masih belum optimalnya kelembagaan desa dan kelurahan;
- 2) Belum meratanya pemanfaatan pengembangan teknologi tepat guna;
- 3) Belum optimalnya pengembangan adat dan budaya lokal;





- 4) Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi di desa; dan
- 5) Masih kurangnya kerja sama antar desa dalam pembangunan.

Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya menanggulangi atau mengurangi kemiskinan perdesaan adalah dengan mengatasi masalah masih kurangnya kerja sama antar desa dalam pembangunan dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya. Adapun beberapa program yang disiapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan;
- 2) desa dan lembaga adat tingkat daerah yang didukung dengan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Fasilitasi kerja sama antardesa yang menjadi kewenangan daerah; dan
- 4) Penataan desa melalui; fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penatausahaan dan penetapan susunan kelembagaan desa.

#### **4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **a. Analisis TOC**

Hasil analisis TOC pada Gambar 4.3 diperoleh bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut ada dua yakni terlaksananya data masyarakat miksin sebagai syarat mendapatkan bantuan, serta tersajinya kepemilikan dokumen kependudukan. Dua sasaran ini adalah mencapain prioritas utama intervensi yakni tersedipendaftaran penduduk, pencatatan sipil sistem informasi kependudukan dan profil perkembangan kependudukan





**Gambar 4.3. Theory of Change (TOC) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **b. Analisis Intervensi**

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya tersedianya data kependudukan, pencatatan sipil, sistem informasi kependudukan serta profil data perkembangan kependudukan adalah masih rendahnya cakupan data kepemilikan kependudukan. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas yaitu:

- 1) Masih rendahnya cakupan kepemilikan KTP elektronik;
- 2) Masih tingginya jumlah penduduk pendatang dari luar daerah maupun asing yang belum mempunyai dokumen kependudukan;
- 3) Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- 4) Data kependudukan belum dilakukan pembaruan pada setiap tahunnya.

Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya tersedianya profil data perkembangan kependudukan adalah dengan mengatasi masalah k masih rendahnya cakupan data kepemilikan kependudukan dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya. Adapun beberapa program yang disiapkan adalah

- 1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil;
- 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk;
- 3) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan; dan



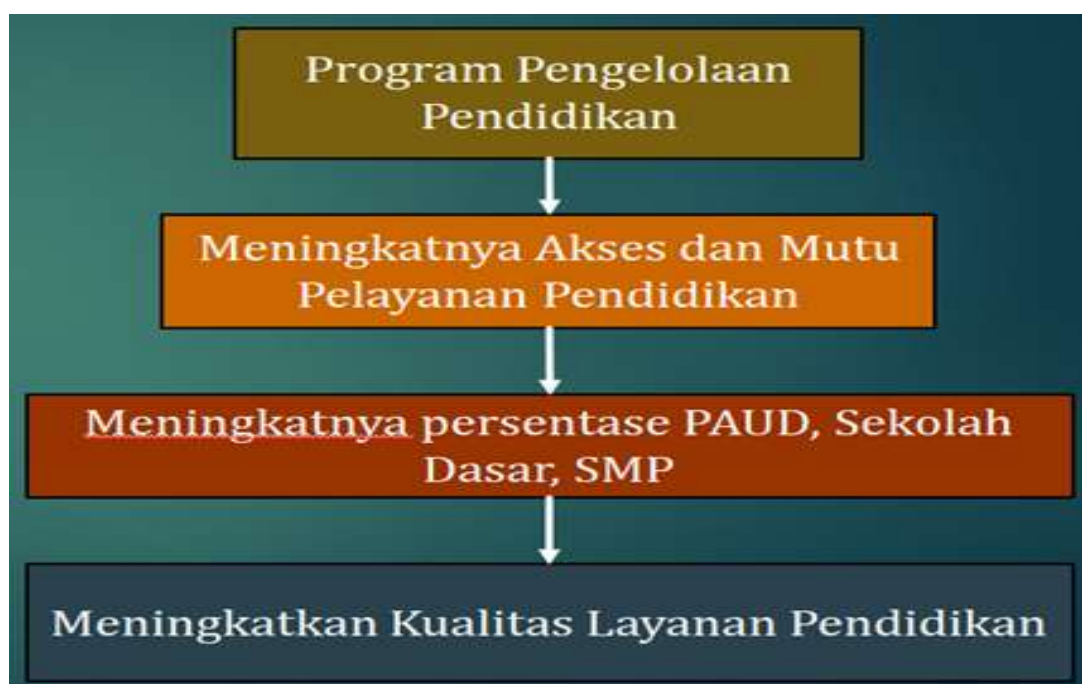


4) Pencatatan sipil.

#### 4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

##### a. Analisis TOC

Hasil analisis TOC diperoleh bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, serta meningkatnya persentase PAUD, SD dan SMP. Adapun prioritas intervensi dalam hal meningkatnya kualitas layanan pendidikan.



Gambar 4.4. *Theory of Change (TOC)* Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

##### b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah masih kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan pendidikan yang kurang transparan. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan sangat krusial dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah dengan mengatasi masalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang pendidikan dan kebudayaan pada Tabel 4.1.





**Tabel 4.1. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan</li><li>▪ Belum meratanya distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus</li><li>▪ Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus</li><li>▪ Manajemen pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan yang masih kurang transparan dan akuntabel</li><li>▪ Masih banyaknya infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan revitalisasi</li><li>▪ Unsur kebudayaan masih sangat minim di dalam kegiatan pendidikan</li></ul> |
| <b>Sasaran</b>                       | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan  |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, serta</li><li>▪ Meningkatkan persentase PAUD, SD dan SMP</li></ul>  |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penambahan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas</li><li>▪ Program Pelatihan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>▪ Peningkatan jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi</li><li>▪ Rehabilitasi Bangunan Sekolah Yang Rusak</li><li>▪ Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan</li><li>▪ Pengembangan kesenian tradisional</li><li>▪ Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah</li><li>▪ Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</li></ul>  |

#### 4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah (1) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan (2) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit.





Gambar 4.5. *Theory of Change (TOC)* Bidang Kesehatan

## b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan adalah masih kurangnya pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama yang perlu diintervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan adalah dengan mengatasi masalah masih kurangnya pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang kesehatan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. **Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Kesehatan**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih tingginya Angka Kematian Ibu, neonatal, bayi dan balita</li><li>▪ Masih tingginya angka prevalensi gizi kurang “<i>Stunting</i>”</li><li>▪ Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan</li><li>▪ Masih tingginya jumlah akibat penyakit menular</li><li>▪ Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.</li></ul> |
|--------------------------------------|---|





|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Sasaran</b>    | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan   |
| <b>Prioritas</b>  | ▪ Meningkatkan Kesehatan Masyarakat   |
| <b>Intervensi</b> | ▪ Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit.  |
| <b>Program</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li><li>▪ Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin</li><li>▪ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten</li><li>▪ Pengelolaan layanan kesehatan bagi semua level usia bayi, balita, usia proaktif dan usia lanjut</li><li>▪ Peningkatan dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan</li><li>▪ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li><li>▪ Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li><li>▪ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.</li></ul> |

#### 4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah UMKM yang memiliki anggota koperasi yang termasuk kategori miskin serta pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin.





**Gambar 4.6. Theory of Change (TOC) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **b. Analisis Intervensi**

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya mewujudkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta mewujudkan pemberdayaan bagi UMKM miskin adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan serta rendahnya kualitas SDM UMKM. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 1.380 unit. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi yang mesti diselesaikan. Sarana adalah ada prioritas intervensi menurut permasalahan dalam upaya mewujudkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta mewujudkan pemberdayaan bagi UMKM miskin adalah dengan mengatasi masalah kurangnya pendidikan dan pelatihan serta rendahnya kualitas SDM UMKM dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tabel 4.3.





**Tabel 4.3. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional</li><li>▪ Rendahnya Kualitas SDM UMKM</li><li>▪ Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern</li><li>▪ Kemampuan pemasaran yang terbatas</li><li>▪ Akses informasi yang rendah</li><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM</li><li>▪ Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak terhadap kurangnya daya saing.</li><li>▪ Kurangnya inovasi pada pelaku UMKM</li></ul>   |
| <b>Sasaran</b>                       | Terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM kategori miskin  |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ UMKM yang memiliki anggota koperasi yang termasuk kategori miskin</li><li>▪ Pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin</li></ul>  |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah</li><li>▪ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</li><li>▪ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM</li><li>▪ Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</li><li>▪ Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta design dan teknologi</li></ul> |

#### 4.1.7. Prioritas Intervensi Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah *Pertama*, Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi. Diarahkan pada tersedianya data persentase calon transmigrasi yang berhasil dan mampu hidup. *Kedua*, Meningkatnya kualitas produksi dan kompetensi tenaga kerja. Diarahkan pada tersedianya informasi tenaga kerja berbasis data





kesejahteraan sosial dan BPJS. *Ketiga*, Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja, diarahkan pada persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Keempat adalah jumlah tenaga kerja terdaftar, untuk perluasan kesempatan kerja.



**Gambar 4.7. Theory of Change (TOC) Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

**b. Analisis Intervensi**

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka adalah masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka adalah dengan mengatasi masalah masih rendahnya kompetensi tenaga kerja dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Permasalahan untuk Intervensi</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daya saing dan produktivitas tenaga kerja dan angkatan kerja masih rendah</li> <li>▪ Angka pengangguran terbuka angkatan kerja muda masih cukup tinggi</li> <li>▪ Belum optimalnya kondisi hubungan industrial yang harmonif dan kondusif dan bermartabat</li> <li>▪ Penerapan peraturan perundangan, norma ketenagakerjaan, dan norma K3 di perusahaan belum optimal</li> </ul> |
|---|---|





|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembangan wilayah berbasis kawasan termasuk pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga belum optimal</li><li>▪ Pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembangunan satuan permukiman baru (SP-Baru), satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) dan SP- Tempatan membutuhkan SDM</li><li>▪ Peningkatan kesejahteraan transmigran melalui tahapan penyesuaian, pemantapan dan kemandirian belum optimal</li></ul>   |
| <b>Sasaran</b>              | Menurunkan angka pengangguran terbuka  |
| <b>Prioritas Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi. Diarahkan pada tersedianya data persentase calon transmigrasi yang berhasil dan mampu hidup</li><li>▪ Meningkatnya kualitas produksi dan kompetensi tenaga kerja. Diarahkan pada tersedianya informasi tenaga kerja berbasis data kesejahteraan sosial dan BPJS</li><li>▪ Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja, diarahkan pada persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</li><li>▪ Jumlah tenaga kerja terdaftar, untuk perluasan kesempatan kerja</li></ul>   |
| <b>Program</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana UPTD BLITPTK Sonai</li><li>▪ Koordinasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi</li><li>▪ Pelatihan transmigrasi lokal</li><li>▪ Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat transmigrasi</li><li>▪ Sinkronisasi Rencana Kawasan Transmigrasi</li><li>▪ Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi</li><li>▪ Fasilitasi Pencadangan Tanah di Kawasan Transmigrasi</li><li>▪ Fasilitasi Pengerahan, Perpindahan &amp; Penempatan Transmigrasi</li><li>▪ Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Satuan Permukiman Baru di Kawasan Transmigrasi</li><li>▪ Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li><li>▪ Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</li><li>▪ Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak</li><li>▪ Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li></ul> |





|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penentuan Upah Minimum Daerah/Upah Minimum Sektoral Daerah</li><li>▪ Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing</li><li>▪ Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</li><li>▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivita</li><li>▪ Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan luar Negeri</li></ul> |
|--|---|

#### 4.1.8. Prioritas Intervensi Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah (1) Tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin dan Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten dan (2) Tertatanya Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten Buton Selatan.



Gambar 4.8. *Theory of Change (TOC)* Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian





## b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya mewujudkan rasa aman pada berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik adalah masih kurangnya rasa aman akibat permukiman dan perumahan yang kurang layak. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya mewujudkan rasa aman pada berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik adalah dengan mengatasi masalah masih kurangnya rasa aman akibat permukiman dan perumahan yang kurang layak dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanian pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanian**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar hirarki pemerintahan</li><li>▪ Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum optimal</li><li>▪ Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni</li><li>▪ Masih tingginya <i>backlog</i> rumah dan masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau</li><li>▪ Program perbaikan rumah tidak layak huni yang masih sedikit dan belum merata.</li></ul> |
| <b>Sasaran</b>                       | Meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat yang baik, aman dan layak  |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin dan Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten</li><li>▪ Tertatanya Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten Buton Selatan.</li></ul>  |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</li><li>▪ Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</li><li>▪ Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</li><li>▪ Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah</li></ul>   |





|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penataan Kawasan Permukiman Kumuh</li><li>▪ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh</li><li>▪ Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</li><li>▪ Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman</li><li>▪ Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman</li><li>▪ Peningkatan dan pemerataan jumlah program perbaikan rumah tidak layak huni</li><li>▪ Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh.</li></ul> |
|--|

#### 4.1.9. Prioritas Intervensi Bidang PU dan Tata Ruang

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah mewujudkan rasa aman, pada berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik.



Gambar 4.9. *Theory of Change* (TOC) Bidang Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang

##### b. Analisis Intervensi

Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pembangunan terhadap kehidupan yang





layak adalah belum optimalnya pengelolaan bidang sanitasi untuk kehidupan masyarakat yang layak. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pembangunan terhadap kehidupan yang layak adalah dengan mengatasi masalah belum optimalnya pengelolaan bidang sanitasi untuk kehidupan masyarakat yang layak dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang PU dan tata ruang pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang PU dan Tata Ruang**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum semua masyarakat mengelola dengan benar air limbah, sanitasi dan jaringan air bersih</li><li>▪ Belum semua masyarakat mengelola dengan benar air limbah dan sanitasi</li><li>▪ Belum semua masyarakat mengelola dengan benar sarana dan prasarana drainase</li><li>▪ Belum semua masyarakat mengelola dengan benar sarana dan prasarana perumahan dan permukiman</li><li>▪ Kualitas jalan umum kabupaten yang belum baik.</li></ul>   |
| <b>Sasaran</b>                       | Meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pembangunan pada kehidupan yang layak  |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | Mewujudkan rasa aman pada berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik   |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li><li>▪ Pembangunan/penyediaan sistem jaringan drainase perkotaan dan wilayah strategis</li><li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sanitasi kawasan strategis</li><li>▪ Pembangunan/penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman dan wilayah strategis</li><li>▪ Peningkatan kualitas jalan umum Kabupaten dan jalan lingkungan.</li></ul> |





#### 4.1.10. Prioritas Intervensi Bidang Pertanian

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah (1) Meningkatnya produksi tanaman pangan; (2) Meningkatnya populasi ternak; dan (3) Meningkatnya Produksi Daging dan Telur.



Gambar 4.10. Theory of Change (TOC) Bidang Pertanian

##### b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah di bidang tanaman pangan dan peternakan adalah masih kurangnya produktivitas bidang pertanian. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah di bidang tanaman pangan dan peternakan adalah dengan mengatasi masalah masih kurangnya produktivitas bidang tanaman pangan dan peternakan dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang pertanian pada Tabel 4.7.





**Tabel 4.7. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Pertanian**

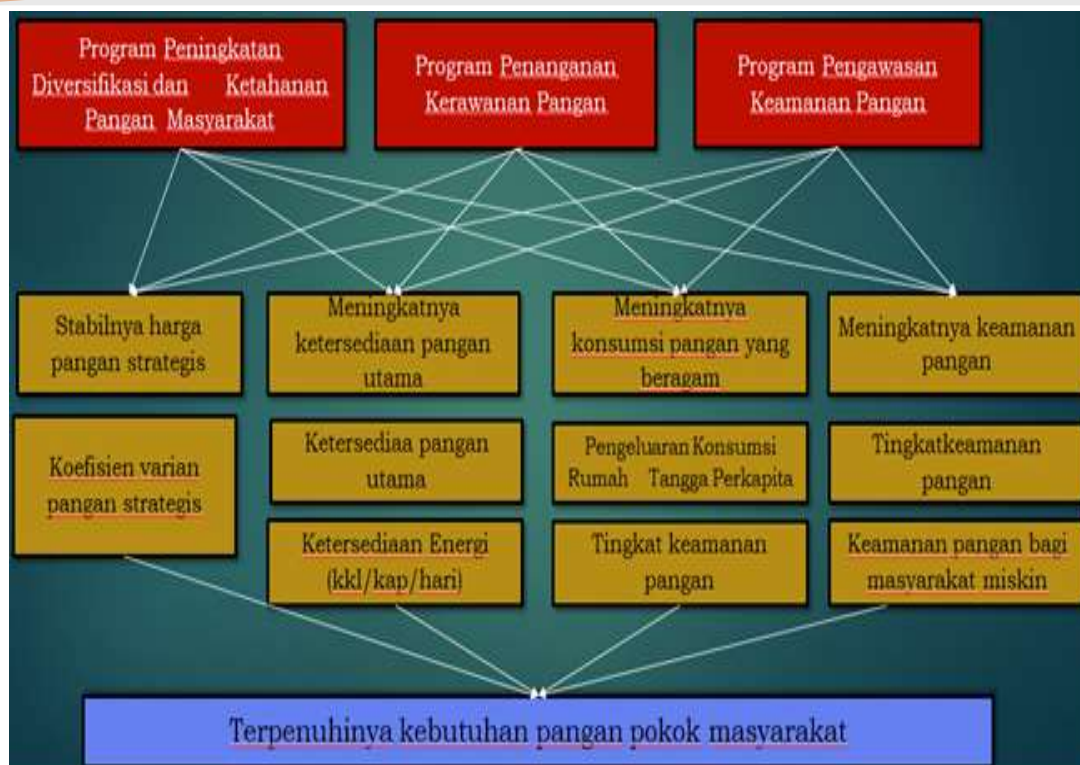
|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya ketersediaan air irigasi lahan pertanian</li><li>▪ Rendahnya sarana dan prasarana produksi tanaman pangan</li><li>▪ Fluktuasi harga produk pertanian masih tinggi</li><li>▪ Kelembagaan petani masih belum optimal</li><li>▪ Sistem penyuluhan yang belum optimal</li><li>▪ Masih rendahnya sumber-sumber bibit ternak</li><li>▪ Masih kurangnya penanganan penyakit pada ternak</li><li>▪ Masih kurangnya pakan yang bermutu/berkualitas</li></ul>  |
| <b>Sasaran</b>                       | Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah bidang tanaman pangan dan peternakan   |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatnya produksi tanaman pangan</li><li>▪ Meningkatnya populasi ternak</li><li>▪ Meningkatnya Produksi Daging dan Telur</li></ul>   |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengawasan peredaran sarana pertanian</li><li>▪ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan</li><li>▪ Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan kabupaten</li><li>▪ Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten lain</li><li>▪ Pengembangan Prasarana Pertanian</li><li>▪ Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>▪ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten</li><li>▪ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</li><li>▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.</li></ul> |

#### 4.1.11. Prioritas Intervensi Ketahanan Pangan

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah (1) Stabilitasnya harga pangan strategis; (2) Meningkatnya ketersediaan pangan utama; (3) Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam; dan (4) Meningkatnya keamanan pangan segar.





**Gambar 4.11. Theory of Change (TOC) Bidang Ketahanan Pangan**

### b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat adalah masih rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat adalah dengan mengatasi masalah masih rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang ketahanan pangan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Permasalahan untuk Intervensi</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata</li> <li>▪ Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan</li> </ul> |
|---|---|



|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan</li><li>▪ Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan</li><li>▪ Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkomsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal</li><li>▪ Masih banyaknya peredaran pangan segar asal tumbuhan yang terkontaminasi pestisida</li><li>▪ Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghemat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.</li></ul>   |
| <b>Sasaran</b>              | Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat   |
| <b>Prioritas Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stabilitasnya harga pangan strategis;</li><li>▪ Meningkatnya ketersediaan pangan utama;</li><li>▪ Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam; dan</li><li>▪ Meningkatnya keamanan pangan segar.</li></ul>   |
| <b>Program</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan cadangan pangan</li><li>▪ Pengembangan lumbung pangan masyarakat</li><li>▪ Pemantauan pasokan, harga dan stabilisasi pangan strategis</li><li>▪ Pengembangan jaringan distribusi pangan</li><li>▪ Pengembangan usaha pangan masyarakat</li><li>▪ Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat</li><li>▪ Pemberdayaan Masyarakat miskin</li><li>▪ Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat</li><li>▪ Pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal</li><li>▪ Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan</li><li>▪ Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga</li><li>▪ Penyuluhan sumber pangan alternatif</li><li>▪ Pembinaan kelembagaan keamanan pangan</li><li>▪ Peningkatan kapasitas/kapabilitas pengawas keamanan pangan</li><li>▪ Surveilen pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan</li><li>▪ Pembinaan kelembagaan sistem manajemen mutu</li><li>▪ Pengawasan mutu beras</li><li>▪ Peningkatan kompetensi petugas penjamin mutu pangan</li></ul> |





#### 4.1.12. Prioritas Intervensi Bidang Kelautan dan Perikanan

##### a. Analisis TOC

Hasil analisis pada Gambar TOC pada Gambar 4.12 diketahui bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah: meningkatnya produksi perikanan; terlaksananya usaha-usaha perikanan secara legal, transparan dan akuntabel; meningkatnya jumlah sumber daya perikanan yang terawasi; serta meningkatnya pelaku usaha skala mikro dan kecil bidang kelautan dan perikanan.



Gambar 4.12. *Theory of Change* (TOC) Bidang Kelautan dan Perikanan

##### b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor perikanan adalah masih rendahnya dan belum optimalnya produksi dan pemasahan hasil perikanan. Produksi ikan di Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh perikanan tangkap laut, dengan jumlah sebesar 8.182 ton di tahun 2019 yang didominasi oleh hasil tangkapan laut. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor perikanan adalah dengan mengatasi masalah masih rendahnya dan belum optimalnya produksi dan pemasahan hasil perikanan dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.





Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang kelautan dan perikanan pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Permasalahan untuk Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap</li><li>▪ Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya</li><li>▪ Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan</li><li>▪ Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan daerah.</li><li>▪ Masih tingginya <i>illegal, unreported and unregulated fishing</i></li><li>▪ Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan</li></ul>  |
| <b>Sasaran</b>                       | Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat   |
| <b>Prioritas Intervensi</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatnya produksi perikanan;</li><li>▪ Terlaksananya usaha-usaha perikanan secara legal, transparan dan akuntabel;</li><li>▪ Meningkatnya jumlah sumber daya perikanan yang terawasi;</li><li>▪ Meningkatnya pelaku usaha skala mikro dan kecil</li></ul>  |
| <b>Program</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program pengelolaan perikanan tangkap</li><li>▪ Program pengelolaan perikanan budidaya</li><li>▪ Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li><li>▪ Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>▪ Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li><li>▪ Pengolahan hasil perikanan bagi usaha mikro dan kecil</li><li>▪ Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</li><li>▪ Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.</li></ul> |

#### 4.1.13. Prioritas Intervensi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

##### a. Analisis TOC

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai program tersebut adalah (1) Meningkatnya Nilai Perdagangan Daerah dan (2) Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM (3) Meningkatkan sarana dan prasarana, dan (4) Peningkatan jumlah industri pengolah SDA.





**Gambar 4.13. Theory of Change (TOC) Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

### b. Analisis Intervensi

Akar Masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan adalah masih kurangnya investasi bidang perdagangan dan perindustrian. Ada beberapa penyebab akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi. Prioritas intervensi atau akar permasalahan dalam upaya memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan adalah dengan mengatasi masalah masih kurangnya investasi bidang perdagangan dan perindustrian dengan mencari solusi alternatif berdasarkan faktor penyebabnya.

Berikut ini disajikan matriks intervensi dan program berdasarkan permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10. Intervensi dan Program Berdasarkan Permasalahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Permasalahan untuk Intervensi</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah jenis industri kelompok industri yang jumlah belum berimbang</li> <li>▪ Komoditas unggulan yang sudah dikembangkan saat ini belum secara optimal</li> <li>▪ Sumberdaya manusia yang terlibat sebagai pelaku usaha industri pengolahan memiliki keterbatasan akses inovasi teknologi dan informasi pasar</li> </ul> |
|---|--|



|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nilai tambah produk industri pengolahan yang dihasilkan saat ini masih rendah</li><li>▪ Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut</li><li>▪ Kesempatan kerja di daerah masih rendah.</li></ul>  |
| <b>Sasaran</b>              | Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan  |
| <b>Prioritas Intervensi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatnya Nilai Perdagangan Daerah</li><li>▪ Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM</li><li>▪ Meningkatkan sarana dan prasarana, dan</li><li>▪ Peningkatan jumlah industri pengolah SDA.</li></ul>   |
| <b>Program</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi daerah serta pasar lelang komoditas;</li><li>▪ Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;</li><li>▪ Kegiatan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;</li><li>▪ Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;</li><li>▪ Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk daerah diberbagai media masa</li><li>▪ Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</li><li>▪ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk daerah</li><li>▪ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri daerah</li></ul> |

## 4.2. Analisis Fiskal

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,





penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Buton Selatan sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

APBD menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai penekanan bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) dimaksud bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;





- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dankepatutan; dan
- f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Fungsi alokasi APBD mengarahkan Belanja daerah supaya mendorong pertumbuhan eksklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur di wilayah - wilayah tertinggal serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya upaya strategis untuk meningkatkan efektifitas program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan antara lain : (1) ketetapan sasaran. (2) mekanisme program dan kualitas implementasi.

Untuk menganalisis APBD Kabupaten Buton Selatan terkait penanggulangan kemiskinan daerah dari tahun 2019 hingga 2022, kita dapat melihat data pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam APBD tersebut untuk menilai seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Adapun besaran APBD Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4.11. APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022**

| No | APBD              | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Pendapatan Daerah | 603.363.049.504 | 615.340.608.008 | 641.738.760.348 | 616.658.891.992 |
| 2  | Belanja Daerah    | 602.717.238.534 | 619.581.538.080 | 671.242.786.048 | 534.074.954.169 |
| 3  | Pembiayaan Daerah | 50.581.517.029  | 50.067.855.454  | 122.438.858.298 | 83.962.324.568  |

Sumber : BPKAD Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2023

Pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi, dengan sedikit penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, secara keseluruhan, pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2021, meskipun pada 2022 sedikit menurun. Kenaikan pendapatan daerah dari 2019 ke 2021 menunjukkan adanya potensi lebih banyak anggaran yang dapat dialokasikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Walaupun pendapatan daerah menunjukkan sedikit penurunan pada 2022, angka pendapatan yang terus meningkat hingga 2021 memberi





peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja pada sektor-sektor penting, termasuk penanggulangan kemiskinan.

Belanja daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2021, dengan lonjakan terbesar pada tahun 2021 (peningkatan hampir 52 miliar dibandingkan dengan 2020). Namun, pada tahun 2022, belanja daerah mengalami penurunan yang cukup tajam, dengan pengurangan sekitar 137 miliar dibandingkan dengan 2021. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Walaupun ada penurunan pada 2022, belanja daerah masih cukup besar dan memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor penanggulangan kemiskinan. Belanja daerah yang terus meningkat hingga 2021 menunjukkan adanya komitmen untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Meskipun ada penurunan pada 2022, belanja tetap cukup besar dan dapat dialokasikan untuk berbagai program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin.

Pembiayaan daerah menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2021, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Pembiayaan daerah yang lebih besar ini bisa menunjukkan adanya sumber pembiayaan tambahan, misalnya melalui pinjaman atau penerimaan pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Pada 2022, pembiayaan daerah sedikit menurun, namun tetap cukup besar dan memberikan fleksibilitas anggaran untuk mendukung program yang telah direncanakan. Peningkatan pembiayaan daerah pada 2021 menunjukkan adanya fleksibilitas untuk mendanai proyek-proyek besar, yang bisa jadi termasuk program kemiskinan dan pengentasan ekstrem. Pembiayaan ini bisa berasal dari pinjaman atau hibah yang mendukung berbagai program sosial.

#### **4.2.1. Kemandirian Fiskal**

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya agar desentralisasi dapat diaplikasikan diseluruh daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom





berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga kedepannya diharapkan daerah dapat mengelola, mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam menjalankan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, maka perlu sebuah indikator yang mengukur kemandirian tiap-tiap daerah. Fungsinya adalah melihat perkembangan, memetakan, dan sebagai potret akan kemandirian daerah disuatu wilayah. Semakin tinggi angka dari rasio yang diperoleh suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut. Menurut Halim (2002), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kemandirian fiskal merujuk pada sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan dan kebijakan pemerintahannya, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan menggunakan sumber pendapatan lokal (seperti Pendapatan Asli Daerah atau PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau pihak luar. Dalam konteks ini, kita akan menganalisis data yang disediakan terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 dan 2023 untuk menggambarkan kemandirian fiskal daerah serta implikasinya terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berikut disampaikan komposisi PAD Kabupaten Buton Selatan.

**Tabel 4.12. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022**

| No | APBD   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Pajak Daerah                                     | 1.595.160.251  | 1.983.183.773  | 2.293.960.037  | 2.455.819.314  |
| 2  | Retribusi Daerah                                 | 1.621.165.930  | 2.615.848.863  | 3.584.189.665  | 2.648.072.978  |
| 3  | Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 781.281.736    | 2.016.724.908  | 2.488.260.411  | 2.542.862.222  |
| 4  | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah        | 11.968.987.097 | 10.774.360.984 | 13.204.841.426 | 18.476.024.473 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2023

Untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022, kita perlu melihat





komponen-komponen utama dalam PAD yang dapat berkontribusi terhadap pendanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah analisis realisasi berdasarkan tabel di atas.

Pajak daerah mengalami peningkatan yang stabil setiap tahun, dengan pertumbuhan signifikan antara tahun 2019 hingga 2022. Ini menunjukkan adanya potensi pendapatan daerah yang terus bertambah dari sektor pajak, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan.

Retribusi daerah mengalami lonjakan besar pada tahun 2021, yang bisa jadi disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi atau layanan publik yang dikenakan biaya retribusi. Meskipun ada fluktuasi, retribusi daerah masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor yang langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat miskin. Pendapatan dari hasil pengolahan kekayaan daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Ini menunjukkan bahwa kabupaten ini mungkin memiliki aset daerah yang semakin dikelola dengan baik, seperti perusahaan daerah atau sumber daya alam lainnya, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap PAD. Peningkatan ini bisa menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan, terutama jika hasil dari pengolahan kekayaan daerah dialokasikan untuk sektor-sektor yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Pendapatan dari kategori lain-lain ini juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2020, namun kembali meningkat pesat pada tahun 2021 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa kabupaten ini mungkin mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber lain, seperti hibah, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, atau sumber lain yang sah. Peningkatan tajam pada tahun 2022 bisa memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ini ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan langsung, pengembangan infrastruktur sosial, atau program kesehatan dan pendidikan.

Pendapatan asli daerah (PAD) memainkan peran yang sangat penting dalam pendanaan program-program pemerintah, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Beberapa komponen utama PAD yang dapat berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan adalah:





#### 1. Pajak Daerah

Kenaikan pajak daerah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan pendapatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mengarah pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan dari retribusi ini dapat digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.

#### 3. Hasil pengolahan kekayaan daerah

Hasil pengolahan kekayaan daerah menunjukkan potensi pendapatan yang besar, terutama jika dikelola dengan efisien dan transparan. Pendapatan ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat miskin. Pengelolaan kekayaan daerah yang baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jika tren ini berlanjut, maka semakin banyak dana yang dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor sosial dan ekonomi yang langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak daerah, retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan lain-lain, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Buton Selatan untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang transparan, alokasi yang tepat, dan fokus pada pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalkan potensi PAD untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun-tahun mendatang.





#### 4.2.2. Keleluasaan Fiskal

Keleluasaan daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mengelola anggaran masuk dalam kategori tinggi, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemandirian yang baik yaitu mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Untuk aspek Belanja Pendidikan Kabupaten Buton Selatan fokus pada belanja “bantuan” pendidikan dengan mengalokasikan Belanja Subsidi dan Bantuan Pendidikan terdiri dari Belanja Hibah BOS sedangkan Bantuan Pendidikan cukup rendah alokasinya, selanjutnya Belanja untuk Sarana Prasarana, Keaksaraan Fungsional (KF), PKBM dan Kejar Paket. Sedangkan belanja administrasi dan belanja rutin untuk keperluan dinas yang relatif kecil. Untuk aspek kesehatan, Belanja Kesehatan terdiri dari Belanja Urusan Kesehatan yang porsinya cukup besar kemudian Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan. Rasio Belanja Kesehatan yang berorientasi *Pro Poor* terhadap Belanja Daerah masih relatif kecil. Hampir semua belanja strategis kesehatan *Pro Poor* digunakan untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan, selanjutnya digunakan untuk peningkatan kesehatan penduduk miskin dan juga perbaikan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Untuk aspek infrastruktur dasar, Pembangunan infrastruktur yang relevan terhadap penanggulangan kemiskinan terdiri dari jalan dan jembatan skala desa, serta penunjang sarana dan prasarana sanitasi, air bersih, dan irigasi. Anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang porsinya cukup besar, kemudian irigasi, air bersih dan sanitasi. Aspek penunjang ekonomi, Terdapat dua kegiatan penunjang ekonomi masyarakat miskin, yaitu bantuan modal dan fasilitasi pasar atau pemasaran.

#### 4.3. Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Intervensi

Dari dimensi kemiskinan konsumsi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan berada jauh di atas nasional dan provinsi. Pada tahun 2023, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar 14,76%, sementara capaian Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 11,43% dan capaian Nasional sebesar 9,36%. Dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat 4 teratas. Hal ini menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum cukup efektif untuk menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Adanya pandemi Covid-19 juga telah





menyebabkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat.

Dari dimensi ketenagakerjaan, permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buton Selatan perlu diperhatikan mengingat capaian TPT Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat kedua tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Terlebih, TPT di Kabupaten Buton Selatan cenderung naik dalam kurun waktu 2018-2022. Dengan demikian, mengingat secara umum TPT di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 cenderung naik, sedangkan TPT provinsi dan nasional cenderung menurun, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan ketenagakerjaan pada tahun 2018-2022 masih kurang efektif untuk menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020-2022 Kabupaten Buton Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional dan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM, serta pemberdayaan di Kabupaten Buton Selatan telah cukup efektif untuk meningkatkan TPAK.

Dari Dimensi Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Buton Selatan telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik sesuai target SDGs. Pada tahun 2021, AKI Kabupaten Buton Selatan berada pada angka 284 dan berhasil diturunkan menjadi 52 di tahun 2022. Hal ini berarti kebijakan dan program untuk mengatasi AKI di Kabupaten Buton Selatan telah cukup berhasil. Di sisi lain, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Buton Selatan masih berada pada kondisi yang fluktuatif naik turun setiap tahunnya, dan pada tahun 2022 berada pada posisi naik dengan capaian pada angka 8,4. Selanjutnya, Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian AHH Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian AHH menunjukkan rata-rata lamanya hidup secara sehat penduduk Kabupaten Buton Selatan adalah selama 67-68 tahun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian AHH Sulawesi Tenggara, yang berada pada tingkat 71,47 atau rata-rata penduduk hidup secara sehat sampai usia 71 tahun. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat AHH terendah. Demikian pula kondisi *stunting* di Kabupaten Buton Selatan telah menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ini menggambarkan bahwa program upaya kesehatan masyarakat belum cukup efektif untuk menurunkan persentase atau nilai intervensi *stunting* di Kabupaten Buton Selatan.





Dari Dimensi Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Tenggara dan trennya masih fluktuatif cenderung turun. Sebaliknya, APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan meskipun memiliki tren menurun namun capaiannya masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. Selanjutnya, APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan provinsi dengan tren yang menurun. Demikian juga dengan kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, APM SMP/MTs, maupun APM SMA/MA yang menunjukkan performa yang tidak jauh berbeda dengan kondisi capaian APK. Berbagai program dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya peningkatan APK dan APM, seperti program/kegiatan pendidikan beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan. Sementara itu capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 sebesar 13,26 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,26 tahun. Capaian Angka Harapan Sekolah Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 lebih baik daripada capaian nasional yang sebesar 13,15 tahun namun masih berada di bawah capaian provinsi yang sebesar 13,70 tahun. Angka HLS Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat keenam di Provinsi Sulawesi Tenggara atau berada pada posisi tengah.

Dari Dimensi Infrastruktur, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan berada di bawah tingkat provinsi namun telah berada di atas tingkat nasional. Kabupaten Buton Selatan menunjukkan sanitasi layak dengan urutan terendah keenam dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 berada di atas capaian provinsi dan nasional dan menduduki urutan ke delapan dibanding kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 menunjukkan angka ketercapaian persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik sebesar 99,76%. Angka ini sedikit di bawah capaian provinsi yang sebesar 99,78% namun masih lebih baik dibandingkan dengan capaian tingkat nasional yang sebesar 97,26%. Terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022 menunjukkan posisi capaian Kabupaten Buton Selatan pada urutan terendah ketiga





setelah Kabupaten Buton Utara dan Konawe Kepulauan. Sementara data yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Selatan mencatatkan bahwa persentase rumah layak huni Kabupaten Buton Selatan menunjukkan capaian 48% di tahun 2018, 51% di tahun 2019, 54 % di tahun 2020, dan 82% pada tahun 2021.

Terakhir, dari dimensi ketahanan pangan masih perlu diperbaiki karena ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein per kapita, jumlah jenis sampel pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, skor pola pangan harapan, dan produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Buton Selatan menunjukkan kecenderungan menurun.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tentu telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, namun demikian, dalam implementasinya mengalami berbagai hambatan dan juga dukungan dari beberapa faktor pendorong yang diidentifikasi dari beberapa dokumen sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.13 berikut.

**Tabel 4.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi**

| No | Bidang / Urusan            | Pendorong   | Penghambat   |
|----|----------------------------|---|--|
| 1  | Bidang Kemiskinan Konsumsi | Terdapat bantuan dasar hidup (sembako rutin) untuk masyarakat miskin dan rentan. Adanya bantuan dari Dinsos seperti bantuan Covid-19. Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan antara lain: pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Bantuan alat (tenun). Bantuan untuk kelompok usaha bersama/KUB untuk UMKM. Terdapat Program penanganan fakir miskin, Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat dan PMKS lainnya (seperti Pelatihan | Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus secara teknis dalam penanganan PMKS. Belum optimalnya upaya pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Masih belum sinkron dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran. Adanya pandemi Covid-19. Proses pendataan penerima bantuan Covid-19 yang kurang valid. Belum optimalnya proses monitoring dan |





|   |                        |  |   |
|---|------------------------|--|---|
|   |                        | <p>Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin)</p> <p>Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>Adanya program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan daerah (jaminan sosial dan pemberian bantuan bagi PMKS)</p> <p>Adanya program bantuan pangan non tunai.</p>                                   | <p>pendampingan secara berkelanjutan, terutama dikaitkan dengan sinkronisasi program antar OPD dan antar pemangku kepentingan.</p>  |
| 2 | Bidang Ketenagakerjaan | <p>Terlaksananya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.</p> <p>Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>Adanya program pengembangan sistem pendukung bagi pengusaha kecil dan menengah (seperti penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, penyelenggaraan promosi produk UKM).</p> | <p>Perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 dalam pemulihan kondisi ekonomi dan reformasi sosial yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.</p> <p>Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.</p> <p>Tingginya jumlah pengangguran terbuka.</p>             |
| 3 | Bidang Kesehatan       | <p>Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.</p> <p>Terselenggaranya jaminan persalinan (seperti terbayarnya jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir dan terlaksananya <i>skrining hipotiroid kongenital</i>).</p> <p>Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam</p>                 | <p>Masih kurang optimalnya petugas dalam memberikan KIE dan pelayanan KB, karena keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan petugas pemberi pelayanan KB yang belum mendapatkan pelatihan.</p> <p>Masih adanya kasus balita <i>stunting</i> karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan</p> |





|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>pelayanan KB/KR yang mandiri.</p> <p>Adanya kegiatan perbaikan gizi masyarakat seperti tertanganinya anak gizi buruk standar BB/TB, tersedianya MP-ASI bagi balita keluarga miskin, tertanganinya ibu hamil dan tertanganinya anak yang orang tuanya HIV.</p> <p>Adanya kegiatan-kegiatan inovasi untuk menarik minat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan SPM.</p> | <p>perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik.</p> <p>Belum optimalnya pelayanan terhadap kelompok lansia, karena kurangnya kader kesehatan posyandu lansia dan kegiatan lansia terhenti selama pandemi.</p> <p>Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar karena selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi, belum dilakukan pembenahan administrasi puskesmas selama pandemi covid dan ada aturan baru terkait akreditasi puskesmas.</p> <p>Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar, belum terpenuhinya alat kesehatan, sarana dan prasarana, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dan belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD.</p> <p>Belum tercapainya UHC akibat dari masyarakat</p> |
|--|--|---|





|   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
|   |                   |   | <p>mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri dan verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos. Belum optimalnya implementasi GERMAS, masih diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemauan dalam melaksanakan pola hidup sehat, belum optimalnya peran stakeholder dalam pergerakan GERMAS, belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik di instansi.</p>                         |
| 4 | Bidang Pendidikan | <p>Adanya pemberian beasiswa kurang mampu.</p> <p>Terdapat penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs.</p> <p>Terlaksananya program pengembangan Pendidikan Non Formal seperti penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.</p> <p>Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kualitas sarpras di satuan pendidikan. Alokasi dana hibah di satuan PAUD, alokasi dana untuk peningkatan sarpras di PNF, bantuan sarpras PAUD dan pengembangan PAUD.</p> | <p>Rendahnya motivasi diri anak untuk sekolah yang disebabkan faktor keluarga serta kurang maksimalnya pendataan ATS.</p> <p>Kurangnya kesadaran Orang Tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD .</p> <p>Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMA/MA.</p> <p>Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar.</p> <p>Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan non formal.</p> |





|   |                            |  |   |
|---|----------------------------|--|---|
|   |                            |  | <p>Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar. Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak. Adanya anak putus sekolah karena pernikahan dini ataupun alasan ekonomi. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.</p>   |
| 5 | Bidang Infrastruktur Dasar | <p>Adanya program penyediaan rumah layak dan sehat yang terjangkau bagi warga miskin</p> <p>Adanya program penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar yang layak dan sehat (seperti kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku).</p> <p>Adanya program pengembangan perumahan dan kawasan perkantoran terpadu.</p> <p>Adanya program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan penataan lingkungan permukiman penduduk.</p> <p>Infrastruktur masih menjadi acuan masyarakat dalam menilai keberhasilan pembangunan, sehingga usulan masyarakat maupun pendanaan untuk kegiatan infrastruktur menjadi prioritas strategis.</p> | <p>Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.</p> <p>Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada masyarakat.</p> <p>Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.</p> <p>Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum.</p> |





|   |                         |   |  |
|---|-------------------------|---|--|
|   |                         | <p>Pendataan jaringan irigasi serta alokasi APBD untuk pemeliharaan/rehabilitasi dan pembangunan Jaringan Irigasi.</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.</p> <p>Adanya program Bantuan RTLH bagi masyarakat miskin.</p> <p>Terdapat bantuan dari Dinas Perkim seperti bedah rumah.</p> <p>Terdapat bantuan penataan kawasan kumuh.</p>   | <p>Belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.</p>  |
| 6 | Bidang Ketahanan Pangan | <p>Adanya program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yaitu penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan</p> <p>Adanya bantuan untuk kelompok tani dan nelayan seperti alat-alat pertanian, alat tangkap ikan, bantuan bibit dan juga pemberdayaan kelompok tani/nelayan, pengadaan sarpras usaha pertanian/perikanan dan UMKM.</p> <p>Adanya program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (seperti pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan penanganan daerah rawan pangan)</p> <p>Penggunaan SDA berupa pemanfaatan Program Pangan Lestari yang di <i>back up</i> dana dekon dan dana APBN</p> | <p>Masih ada rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.</p> <p>Adanya penurunan ketersediaan pangan utama. Harga yang cenderung naik dan pasokan pangan yang berkurang.</p> <p>Belum tersedianya fasilitas <i>Cold Storage</i> yang memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan.</p> <p>Nilai tawar petani/nelayan dalam memasarkan hasil produksi sangat rendah terutama pada saat panen raya, petani/nelayan belum mampu menentukan harga dari komoditas yang dihasilkan.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan pemasaran hasil produksi masyarakat masih</p> |





|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | melalui DAK Non Fisik pada lokasi percepatan penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Buton Selatan. Adanya KUD/BUMDES yang mewadahi kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat interaksi antar wilayah untuk <i>supply</i> kebutuhan pokok. | bergantung pada luar daerah. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat daerah. |
|--|--|---|---|

#### 4.4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

##### 4.4.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Di tingkat Pusat, pengentasan kemiskinan dijalankan melalui dua kerangka kebijakan utama yang saling melengkapi, yaitu kerangka kebijakan makro dan kerangka kebijakan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, peran pemerintah sangat krusial untuk memastikan terwujudnya kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang perlu diambil dalam kebijakan ini antara lain adalah menjaga stabilitas inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang mampu melibatkan semua lapisan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor penting lainnya, seperti menjaga iklim investasi yang kondusif, memperkuat regulasi perdagangan yang mendukung ekspansi sektor ekonomi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang merupakan sumber utama penghidupan bagi sebagian besar penduduk miskin, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal agar dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, dalam kerangka kebijakan mikro, pengentasan kemiskinan lebih difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat langsung dan konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Upaya ini dikelompokkan dalam dua strategi utama yang saling berkaitan. Strategi pertama adalah penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik. Selain itu, kebijakan





ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di kalangan kelompok masyarakat yang rentan. Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program-program ekonomi produktif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berusaha dan menghasilkan pendapatan secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan berbagai inisiatif yang dapat membantu kelompok miskin dan rentan agar mereka lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. Hal ini bertujuan agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial pemerintah, tetapi dapat bertransformasi menjadi individu atau kelompok yang mandiri dan berkelanjutan dalam perekonomian.

Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang atau 9,03%, dan merujuk laporan BPS pada Juli 2024 yang menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 mencapai 0,83 persen, atau menurun jika dibandingkan Maret 2023 yang masih sebesar 1,12 persen. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan.

Prasyarat Utama *Upaya Extraordinary* untuk mencapai target kemiskinan Ekstrem:

1. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi perlu didorong dengan meningkatkan daya beli khususnya dari kelompok 60% terbawah yang didukung kebijakan fiskal pemerintah.
2. Mengembangkan dan Memutakhirkan Basis Data untuk Pensasaran Program
  - a. DTKS: perlu perluasan dan pemutakhiran DTKS selain memastikan validitas NIK
  - b. Basis data UMKM: pengembangan basis data ini dimulai dari data UMKM yang sudah ada di K/L dilengkapi dengan membuka pendaftaran mandiri yang selanjutnya diverifikasi.
  - c. Basis data wilayah: berisikan agregat indikator kesejahteraan dan sosial ekonomi level provinsi kabupaten untuk pensasaran wilayah yang terkait dengan kemiskinan ekstrem





3. Konvergensi Program antar K/L dengan Program Khusus dan Program Daerah untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem
  - a. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin ekstrem.
  - b. Aset transfer untuk meningkatkan produktifitas bagi kelompok miskin ekstrem.
  - c. Program daerah sumber pembiayaan APBD).
  - d. Program khusus spesifik daerah untuk mengatasi penyebab kemiskinan ekstrem yang unik khas daerah tersebut.

#### 4.4.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara

Di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kemiskinan menjadi salah satu dari lima sasaran visi pembangunan hingga 2045 sebagai upaya dalam pencapaian **Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan**. Fokus penanganan kemiskinan di Sulawesi Tenggara sekaligus dengan upaya mengatasi ketimpangan. Saat yang sama, upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita dianggap sebagai instrumen dalam mendukung visi pengentasan kemiskinan.

Ada empat sasaran pokok rencana pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Sulawesi Tenggara antara tahun 2025-2045, yakni tingkat kemiskinan, rasio gini, kontribusi PDRB, dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana termaktub dalam RPJPD Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045, bahwa target angka kemiskinan yang diharapkan pada tahun 2045 adalah antara 0,44 atau 0,94% dengan capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-9%. Target pendapatan perkapita penduduk yang diharapkan tahun 2045 adalah berkisaran antara 300,03-361,33. Kemudian tercipta daya saing sumber daya manusia menjadi 5,00.





| 1. Peningkatan Pendapatan per Kapita |  | 2025<br>(Baseline) | 2045<br>(Target) |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1.                                   | PDRB per Kapita (Rp Juta)**            | 70,1 – 70,49       | 300,03- 361,33   |
| 2.                                   | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)** | 49,72              | 88,57            |
| 3.                                   | Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) | 8,94-9,53          | 13,51-14,40      |

| 2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan |                              | 2025<br>(Baseline) | 2045<br>(Target) |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Tingkat Kemiskinan (%)       | 10,04-10,54        | 0,44 – 0,94      |
| 2.  | Rasio Gini                   | 0,365-0,371        | 0,303-0,347      |
| 3.  | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 0,87               | 0,75             |
| 4.  | Pertumbuhan ekonomi (%)      | 5,96 -6,46         | 6,76 – 9,12      |

| 3. Kepemimpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah |                          | 2025<br>(Baseline) | 2045<br>(Target) |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Indeks Inovasi Daerah    | 35 -60             | 60-100           |
| 2.  | Indeks Daya Saing Daerah | 3,46               | 5,00             |

| 4. Peningkatan Daya Saing Daya Manusia |                      | 2025<br>(Baseline) | 2045<br>(Target) |
|--|----------------------|--------------------|------------------|
|  | Indeks Modal Manusia | 0,52               | 0,68             |

| 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Net Zero Emission |   | 2025<br>(Baseline) | 2045<br>(Target) |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1.   | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)      | 28,93              | 92,88            |
| 2.   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 82,39              | 88,68            |

**Gambar 4.14. Sasaran Visi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045**

Agenda pembangunan yang menjadi sasaran pokok yang berkaitan dengan kemiskinan dilakukan pada beberapa Langkah strategis. Langkah-langkah dimaksud adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antar wilayah, melalui penjabaran transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dengan landasan transformasi; dan





3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena Pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas Masyarakat. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

#### **4.4.3. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan**

Kabupaten Buton Selatan menjadi salah satu fokus prioritas dan dapat dilihat pada RPJPD Kabupaten Buton Selatan sebagai haluan pembangunan utama. RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2045 merupakan tahap pembangunan jangka panjang kedua, serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2025-2045 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Buton Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Ekonomi Biru Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”**.

Terwujudnya visi tersebut, tercermin dalam 6 (enam) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi yang Tinggi;
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang;
3. Kepemimpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana; dan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Visi kedua dari pembangunan Kabupaten Buton yang bertujuan agar ***kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang*** mencerminkan upaya untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan serta mengatasi





ketimpangan ekonomi yang ada di daerah. Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan telaahan permasalahan pembangunan dan isu serta kebijakan daerah, isu strategis Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 mencakup beberapa prioritas penting, salah satunya adalah **penanggulangan stunting dan kemiskinan / kemiskinan ekstrem**. Isu ini menjadi sangat krusial karena stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan masalah sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini mencakup berbagai sektor yang saling terkait, yang diharapkan dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif. Sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat dan derajat Kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan produktifitas sektor perekonomian unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan memiliki fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa strategi, sasaran, dan prioritas pembangunan yang jelas. Berikut adalah **strategi, sasaran, dan prioritas pembangunan** Kabupaten Buton Selatan:

1. Strategi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Penanggulangan Stunting dan kemiskinan /kemiskinan ekstrem

2. Sasaran

Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat

3. Prioritas pembangunan

Peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dan layanan pendidikan.





Strategi pembangunan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, prioritas pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas. Melalui kebijakan yang tepat dan terfokus, diharapkan Kabupaten Buton Selatan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan memiliki keterampilan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Buton yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam upaya mencegah agar masyarakat yang rentan tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya peluang pekerjaan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan perhatian yang tepat, diharapkan masyarakat yang rentan dapat terhindar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan dimuat dalam dokumen perencanaan. Pada Dokumen RPD Kabupaten Buton Selatan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat yang dijabarkan pada **Tujuan 2** yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan”** dengan indikator *laju pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Serta mendukung prioritas 6 (Enam) pembangunan nasional* yaitu *Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*, dan mendukung **prioritas 2 (dua) pembangunan Sulawesi Tenggara**, yaitu *Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik*.

#### 4.5. Target Penurunan Angka Kemiskinan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah untuk mengatasi masalah





kemiskinan di daerah ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sejumlah indikator kinerja utama telah ditetapkan sebagai alat ukur untuk memantau dan menilai kemajuan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Indikator kinerja utama tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, yang merupakan faktor-faktor kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan menganalisis data realisasi yang ada serta target-target yang ditetapkan untuk periode 2025-2030, kita dapat memahami sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan selama periode tersebut dapat berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis terkait realisasi dan target untuk periode 2025-2030 berdasarkan indikator-indikator tersebut akan memberikan insight yang lebih dalam mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan.

**Tabel 4.14. Indikator Realisasi dan Target Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan RPD/RPJMD di Kabupaten Buton Selatan**

| Indikator Kinerja Utama        | Realisasi |       |       |       |       | Target RPD/RPJMD |       |      |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|
|                                | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024             | 2025  | 2026 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 14,66     | 14,11 | 14,62 | 14,41 | 14,76 | 14,50            | 14,25 | 14   |

Sumber : RPD/RPJMD, Tahun 2024

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan, dapat dilakukan analisis terhadap realisasi dan target penurunan angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2026. Realisasi persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase kemiskinan tercatat sebesar 14,66%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 14,11% pada tahun 2020. Setelah itu, persentase kembali meningkat sedikit pada tahun 2021 (14,62%) dan tahun 2023 (14,76%), sebelum kembali menurun di 2022 (14,41%). Tahun 2019 hingga 2022 pada periode ini, meskipun ada beberapa tahun dengan penurunan (2019 ke 2020, dan 2022), angka kemiskinan masih relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Tahun 2023 menunjukkan sedikit kenaikan (14,76%), yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penurunan angka kemiskinan. Proyek target dalam penurunan kemiskinan merupakan suatu langkah strategis untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan secara terukur dan efektif. Dalam hal ini, berdasarkan target RPD/RPJMD Kabupaten Buton Selatan, penurunan angka kemiskinan bertujuan untuk





mengurangi persentase penduduk miskin dari 14,76% pada 2023 menjadi 14,00% pada 2026, dengan target penurunan bertahap setiap tahunnya.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan, terdapat dua indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem : persentase penduduk miskin dan persentase penduduk miskin ekstrem. Di bawah ini, kita akan menganalisis realisasi kemiskinan berdasarkan Tabel 4.14.

Tren Realisasi persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai angka 14,11% , angka ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Buton Selatan. Pada Tahun 2021 mencapai angka 14,62% , terjadi sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, Pada Tahun 2022 mencapai angka 14,41% , terjadi penurunan yang moderat meskipun masih berada pada angka yang tinggi, mungkin karena adanya pemulihan ekonomi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mulai berdampak. Dan Pada Tahun 2023 mencapai angka 14,76% , kenaikan lagi pada tahun ini, menunjukkan adanya tantangan baru dalam pengentasan kemiskinan yang perlu dievaluasi dan diatasi.

**Tabel 4.15. Indikator Realisasi dan Target Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan RPKD di Kabupaten Buton Selatan**

| Indikator Kinerja Utama                | Realisasi |       |       |       | Target RPKD |      |      |      |      |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|------|
|  | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase Penduduk Miskin (%)         | 14,11     | 14,62 | 14,41 | 14,76 | 13,0        | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0  |
| Persentase Penduduk Miskin ekstrem (%) | 4,91      | 2,57  | 1,74  | 1,39  | 0,80        | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |

Sumber : RPD/RPJMD, Tahun 2024

Tren Realisasi persentase penduduk miskin ekstrem pada tahun 2020 mencapai 4,91% angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi pada tahun 2020, menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan parah. Pada tahun 2021 mencapai angka 2,57%, penurunan signifikan yang mencerminkan kemajuan dalam program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022 mencapai angka 1,74% kemiskinan ekstrem terus menurun, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Dan pada Tahun 2023 mencapai angka 1,39% angka ini menunjukkan keberhasilan yang berkelanjutan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem.





Analisis indikator target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan daerah (RPKD) dapat dilakukan dengan melihat dua indikator utama, yaitu persentase penduduk miskin dan persentase penduduk miskin ekstrem. Berikut adalah analisis terhadap target RPKD untuk periode 2025 hingga 2029: Indikator Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2025, Target persentase penduduk miskin adalah 13,0%. Artinya, sekitar 13% dari total penduduk Kabupaten Buton Selatan diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun ini. Pada Tahun 2026, target menurun menjadi 12,0%, yang menunjukkan penurunan 1% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2027, target lebih lanjut turun menjadi 11,0%, menunjukkan keberlanjutan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1% per tahun. Pada Tahun 2028, target penurunan menjadi 10,0%, mengarah pada penurunan kemiskinan yang lebih signifikan pada tahun ini. Pada tahun 2029, target mencapai 9,0%, yang berarti 9% penduduk diperkirakan masih berada di bawah garis kemiskinan pada tahun ini. Ada penurunan yang konsisten sekitar 1% per tahun dari 13% pada 2025 menjadi 9% pada 2029. Ini menunjukkan adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan dalam jangka waktu lima tahun. Penurunan sebesar 4% dalam lima tahun ini dapat dicapai dengan kebijakan yang lebih efektif dan adanya perubahan kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Indikator Persentase Penduduk Miskin Ekstrem pada tahun 2025, Target persentase penduduk miskin ekstrem adalah 0,80%. Artinya, sekitar 0,80% dari penduduk Kabupaten Buton Selatan diperkirakan hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah pada tahun ini. Pada tahun 2026 target menurun menjadi 0,70%, menunjukkan adanya penurunan 0,10% dari tahun sebelumnya. Pada 2027 target penurunan lebih lanjut menjadi 0,50%, dengan penurunan sebesar 0,20% per tahun. Pada tahun 2028 target turun menjadi 0,40%, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah penduduk miskin ekstrem. Pada tahun 2029 target mencapai 0,30%, yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dan diharapkan hanya ada sekitar 0,30% dari penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun ini. Tren penurunan yang relatif signifikan pada angka penduduk miskin ekstrem, dari 0,80% pada 2025 menjadi 0,30% pada 2029. Penurunan ini cukup tajam dan bisa mencerminkan kebijakan yang sangat difokuskan untuk mengatasi kemiskinan yang paling parah. Penurunan ini menunjukkan upaya yang lebih intensif dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang sering kali melibatkan program





bantuan sosial, akses pendidikan, dan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat yang paling rentan.

Rencana target penurunan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan arah yang positif, dengan penurunan persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem secara signifikan dari tahun 2025-2030. Keberhasilan pencapaian target ini akan bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif dan perhatian terhadap kebutuhan dasar penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan yang terukur dan konsisten setiap tahunnya mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengurangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Pencapaian ini sangat bergantung pada program yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

#### **4.6. Arah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan tahun 2025-2030**

Mendasarkan pada analisis permasalahan, program prioritas, fiskal, dan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RPJPD) serta target rencana pengetasan kemiskinan hingga tahun 2019, berikut ini disajikan matrik prioritas program penanggulangan kemiskinan daerah. Matrik ini menyajikan program/kegiatan, indikator kegiatan, target capaian antar tahun, dan sumber pendanaan berdasarkan instansi pelaksana.

Matrik prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan tahun 2025-2029 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.16 yang termuat dalam Lampiran 1.





## BAB V. LOKASI PRIORITAS

Analisis mengenai penentuan lokasi prioritas untuk percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Buton Selatan menggunakan basis data historis yang tersedia di basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

### 5.1. Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton Selatan menjadi langkah strategis yang sangat esensial dan mendasar dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan fokus pada pengentasan kemiskinan yang paling parah, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, dengan menjadikan kemiskinan sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU), pemerintah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di wilayah ini. Mengingat bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton Selatan mencatatkan jumlah yang signifikan, yaitu sebanyak 6707 orang pada tahun 2023.

Pemerintah memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebagai sasaran utama program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi. wilayah-wilayah tersebut menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas infrastruktur, layanan dasar, serta terbatasnya peluang ekonomi. Dengan pendekatan berbasis wilayah ini, diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

**Tabel 5.1. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2023**

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1   | Batauga   | 889                            |
| 2   | Batu Atas | 1290                           |





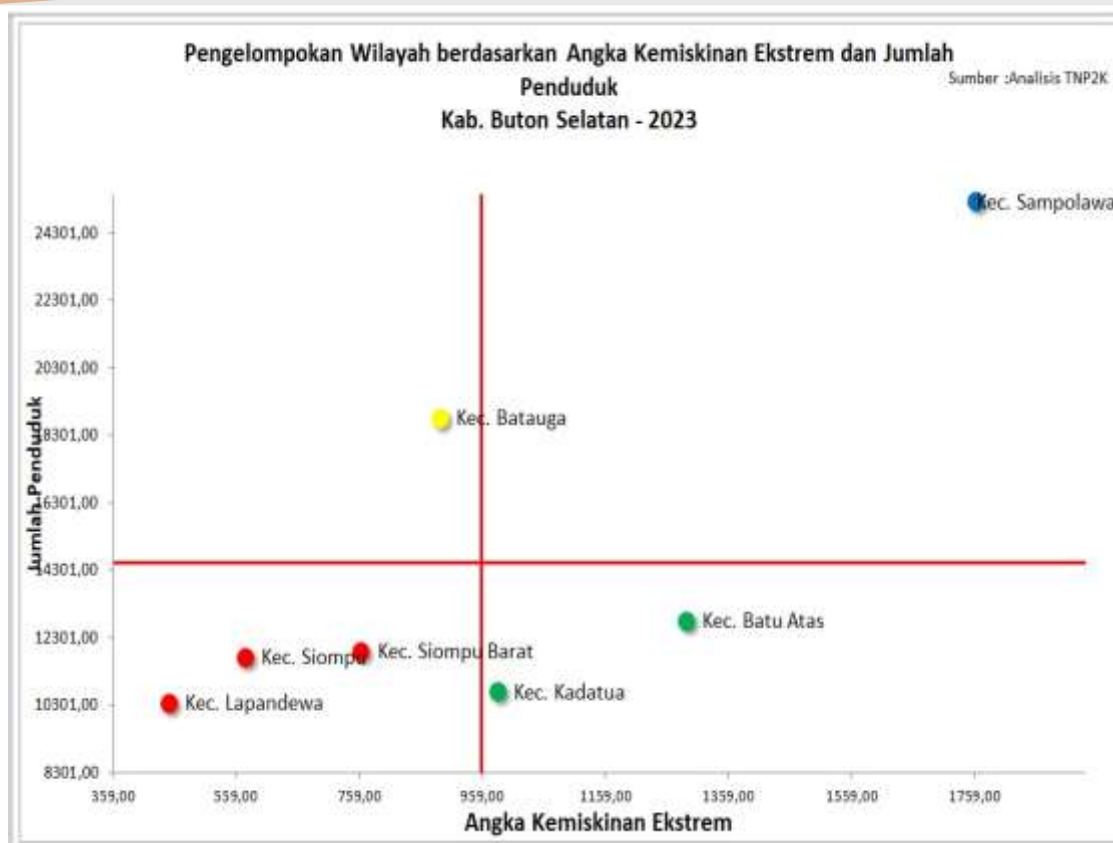
|                                |              |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| 3                              | Kadatua      | 984         |
| 4                              | Lapandewa    | 449         |
| 5                              | Sampolawa    | 1761        |
| 6                              | Siompu       | 573         |
| 7                              | Siompu Barat | 761         |
| <b>Kabupaten Buton Selatan</b> |              | <b>6707</b> |

Sumber : Data BNBA KEMENKO PMK Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 5.1** yang menunjukkan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2023, kita dapat melakukan beberapa analisis terkait kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Total penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2023 adalah **6,707 orang**. Ini menunjukkan seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

**Sampolawa** memiliki persentase terbesar (26.23%), yang berarti hampir **1 dari setiap 4 penduduk miskin ekstrem** di Kabupaten Buton Selatan tinggal di kecamatan ini. Ini menunjukkan bahwa Sampolawa mungkin memiliki masalah struktural atau kesulitan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. **Batu Atas, Kadatua, dan Batauga** juga memiliki persentase yang relatif tinggi, masing-masing dengan 19.25%, 14.67%, dan 13.26%. Kecamatan-kecamatan ini perlu perhatian khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. **Lapandewa**, dengan persentase terendah (6.69%), menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di kecamatan ini lebih terkendali dibandingkan kecamatan lainnya. **Siompu** dan **Siompu Barat** juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap jumlah penduduk miskin ekstrem, dengan persentase masing-masing 8.55% dan 11.33%. **Tantangan terbesar** dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton Selatan terletak pada kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi seperti Sampolawa dan Batu Atas.

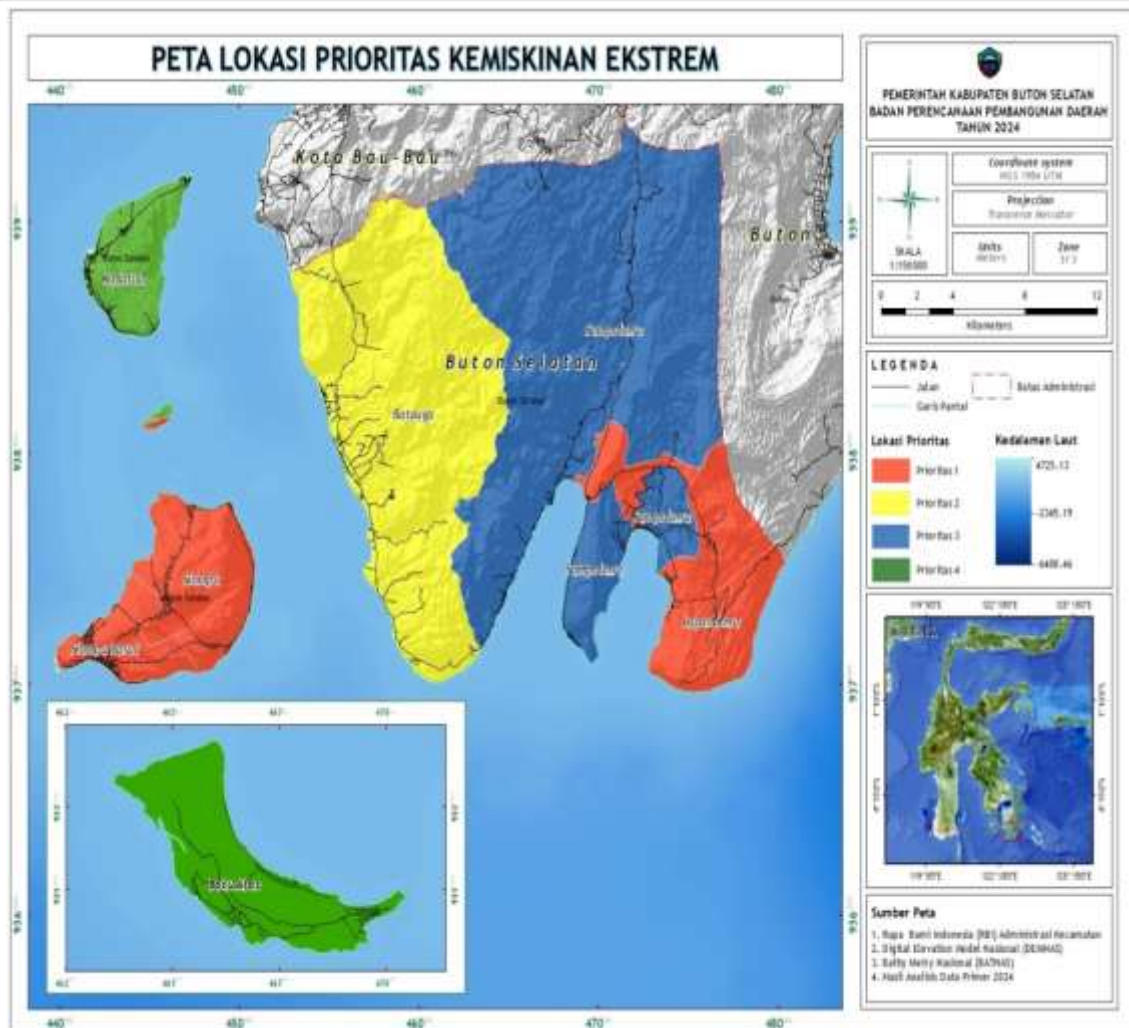




Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.1 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan analisis perbandingan antara angka kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk di Kabupaten Buton selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang dibagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah), Prioritas 2 (kuning), Prioritas 3 (biru), dan Prioritas 4 (hijau). Prioritas 1 (merah) mencakup beberapa kecamatan yang memerlukan perhatian paling intensif, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat. Prioritas 2 (kuning) mencakup Kecamatan Batauga yang membutuhkan perhatian lebih, namun dengan tingkat urgensi yang sedikit lebih rendah. Prioritas 3 (biru) terdiri dari Kecamatan Sampolawa yang masih membutuhkan intervensi, namun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Prioritas 1 dan 2.



**Gambar 5.2** Peta Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem

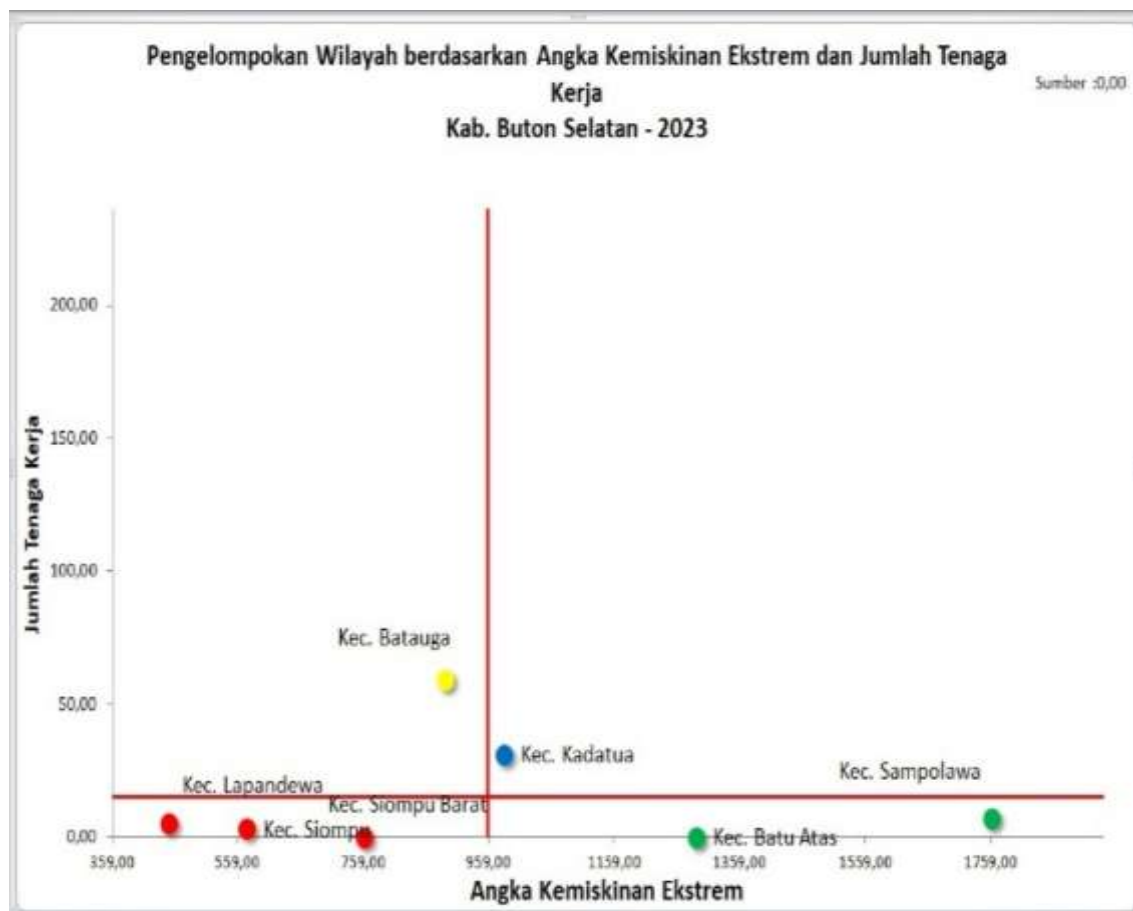
Sementara itu, Prioritas 4 (hijau) mencakup Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batu Atas yang memerlukan perhatian lebih sedikit terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan memetakan angka kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk di berbagai kecamatan Kabupaten Buton Selatan, pemerintah dapat menetapkan skala prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Wilayah yang masuk dalam Prioritas 1 membutuhkan intervensi yang lebih besar dan lebih cepat.

## 5.2. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan tingkat kemiskinan ekstrem dan tenaga kerja bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pengembangan ketenagakerjaan dan pengurangan kemiskinan. Analisis ini dilakukan dengan mengkombinasikan dua faktor utama, yaitu jumlah penduduk miskin ekstrem dan kondisi tenaga kerja di setiap



kecamatan. Hasil pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan kedua faktor tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



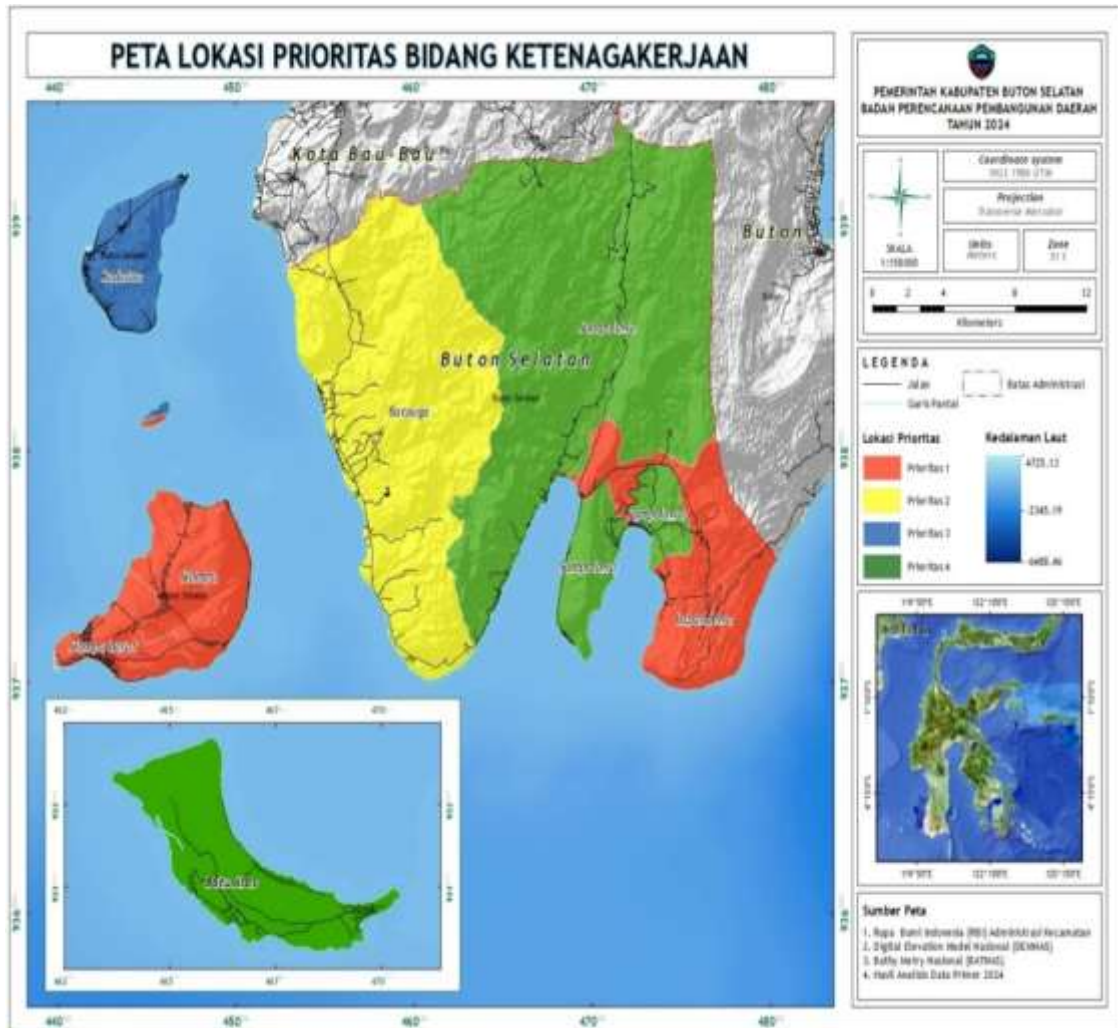
Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.3 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Tenaga Kerja di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan tingkat tenaga kerja di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu Prioritas 1 (merah), Prioritas 2 (kuning), Prioritas 3 (biru), dan Prioritas 4 (hijau). Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat, yang menjadi target utama intervensi karena menghadapi tantangan terbesar dalam hal kemiskinan ekstrem dan ketersediaan lapangan kerja. Prioritas 2 (kuning) meliputi Kecamatan Batauga, yang memerlukan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian lokal dan keterampilan tenaga kerja. Prioritas 3 (biru) terdiri dari Kecamatan Kadatua, sementara Prioritas 4 (hijau) terbatas pada Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batu Atas, yang meskipun memiliki tantangan



lebih ringan, tetap membutuhkan perhatian untuk mempertahankan dan memperkuat kemajuan sosial dan ekonomi.



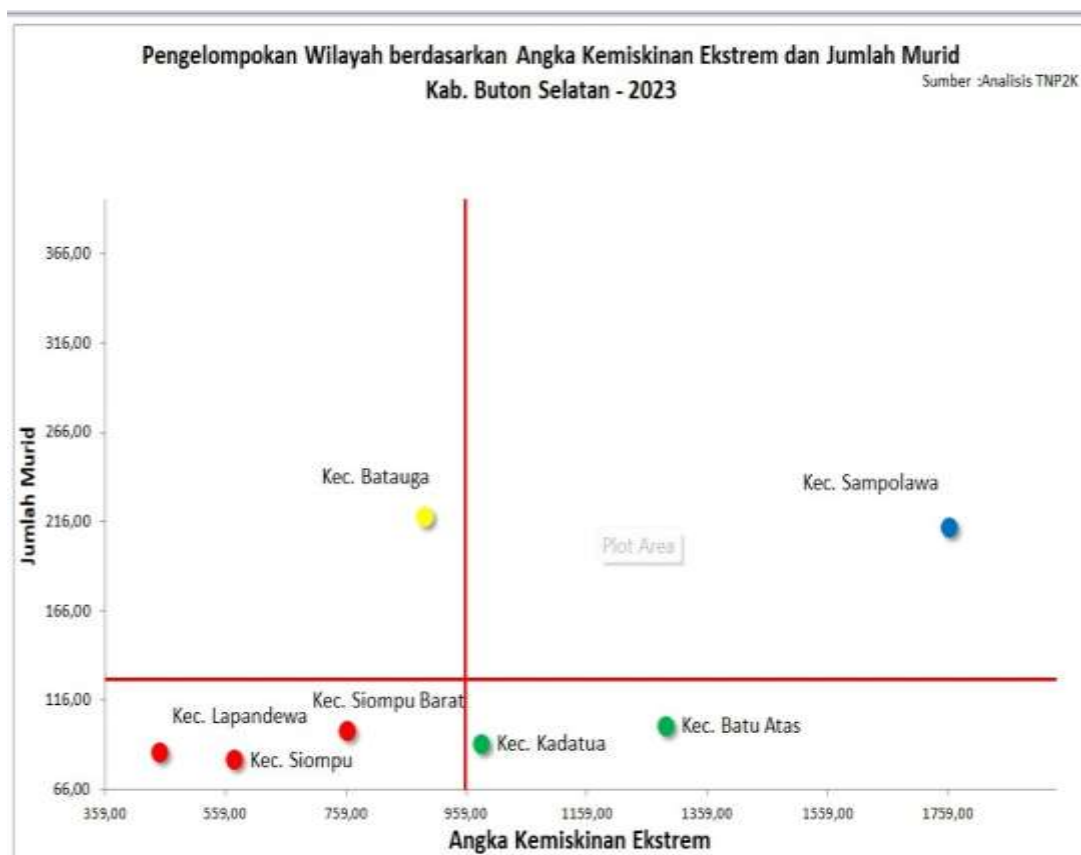
**Gambar 5.4** Peta Lokasi Prioritas Bidang Ketenagakerjaan

### 5.3. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pendidikan bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian dan intervensi khusus, baik dalam pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kualitas pendidikan. Dengan mempertimbangkan kombinasi dari dua faktor utama ini, wilayah-wilayah di Kabupaten Buton dikelompokkan dalam empat kategori prioritas, yaitu: Prioritas 1 (merah), Prioritas 2 (kuning), Prioritas 3 (biru), dan Prioritas 4 (hijau). Pengelompokan ini dilakukan dengan menganalisis tingkat kemiskinan ekstrem dan kondisi pendidikan di setiap kecamatan, yang meliputi jumlah murid. Berdasarkan hasil kombinasi kedua faktor tersebut, setiap kecamatan akan



dikelompokkan dalam kategori yang sesuai dengan tingkat kebutuhan intervensi di bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Kabupaten Buton Selatan.



Sumber : Analisis TNP2K

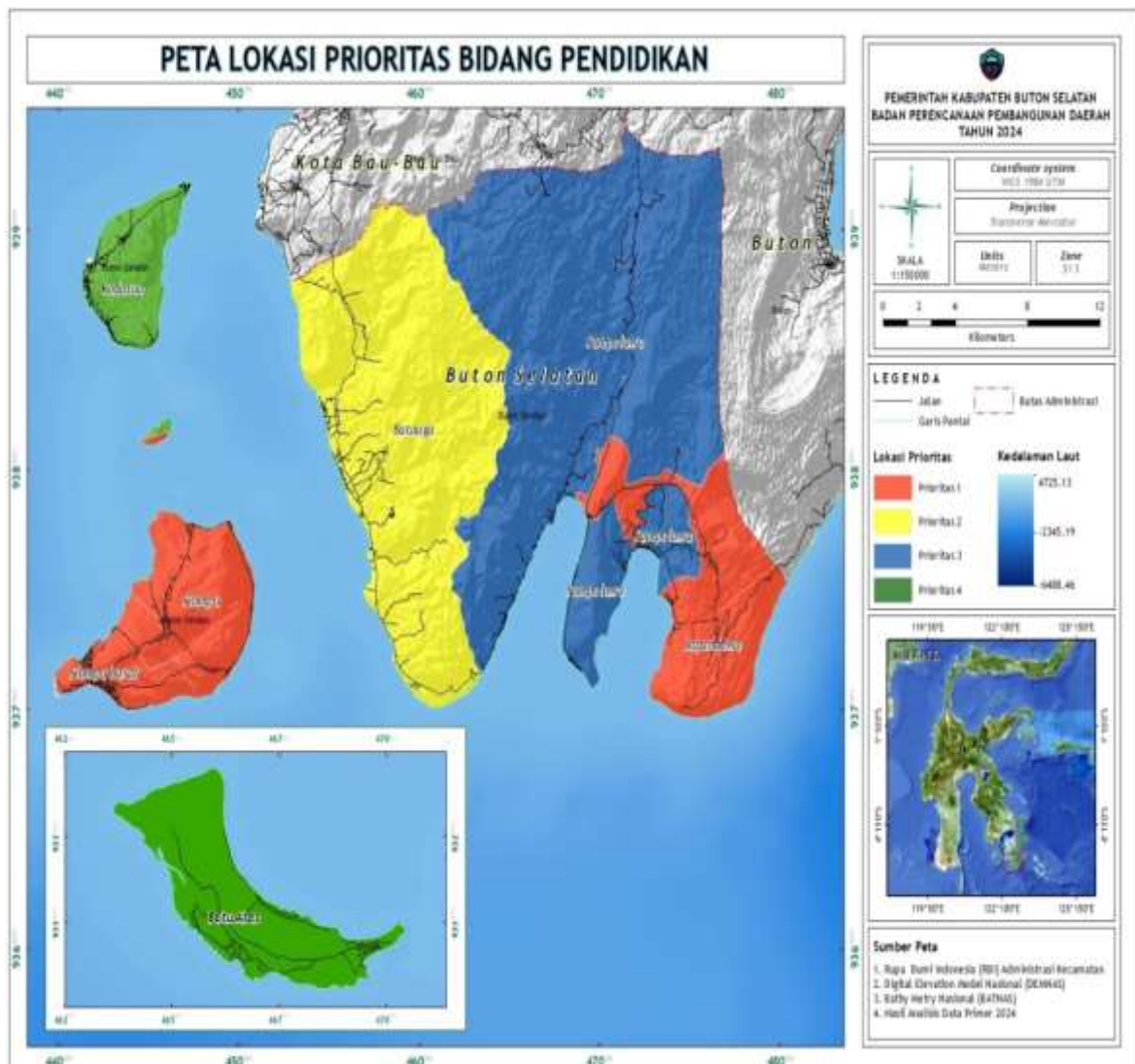
**Gambar 5.5** Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Murid di Kabupaten Buton Selatan

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan jumlah murid di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah), Prioritas 2 (kuning), Prioritas 3 (biru), dan Prioritas 4 (hijau). Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat, yang menjadi target utama intervensi karena menghadapi tantangan terbesar dalam hal kemiskinan ekstrem dan akses pendidikan. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Batauga, yang membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi sosial dan pendidikan. Prioritas 3 (biru) hanya terdapat di Kecamatan Sampolawa, sementara Prioritas 4 (hijau) mencakup Kecamatan Kadatua dan Kecamatan



Batu Atas, yang meskipun memiliki tantangan yang lebih ringan, tetap memerlukan perhatian untuk memastikan pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Skema prioritas ini akan membantu pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, fokus pada wilayah dengan kebutuhan yang paling mendesak, dan memperkuat akses pendidikan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton Selatan.



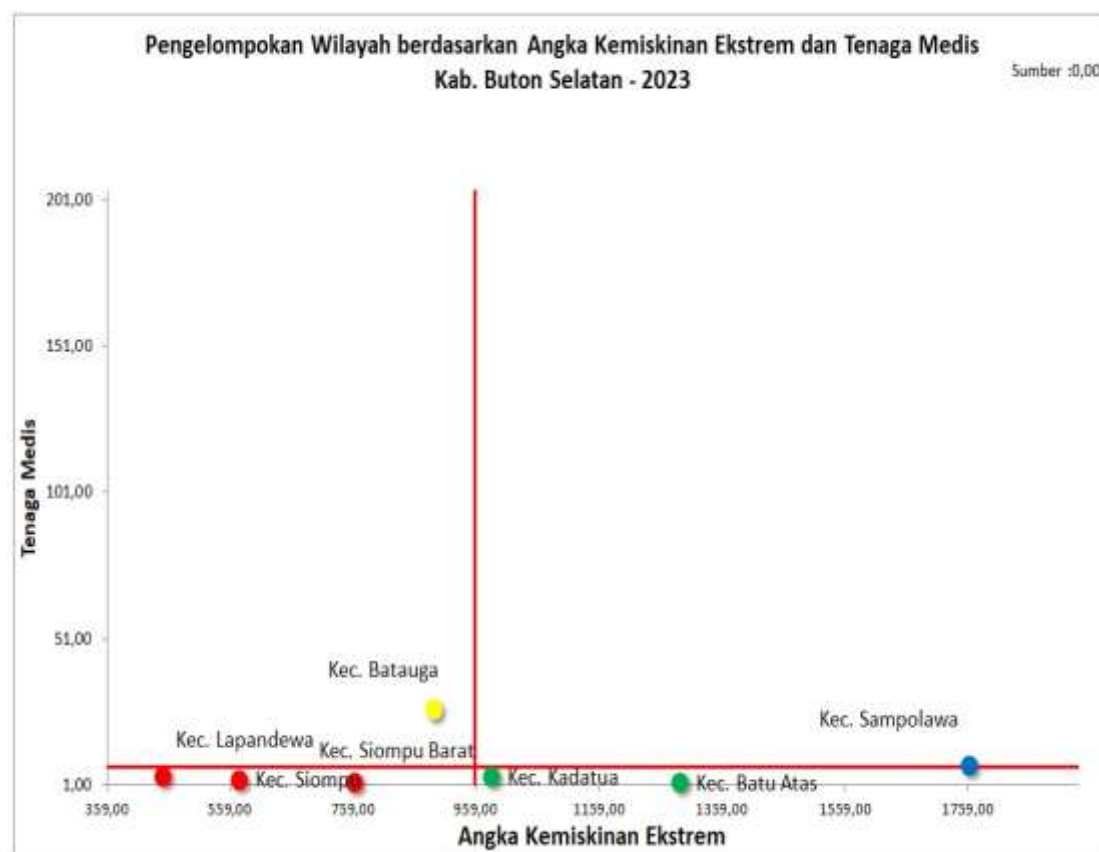
Gambar 5.6 Peta Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan

#### 5.4. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan tenaga medis bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Kebijakan dan program yang



diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di masing-masing kecamatan. Dengan pengelompokan ini, kebijakan serta program intervensi di bidang kesehatan dapat diarahkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Proses pengelompokan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan tenaga medis ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan tindakan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Pengelompokan wilayah ini dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut:



Sumber : Analisis TNP2K

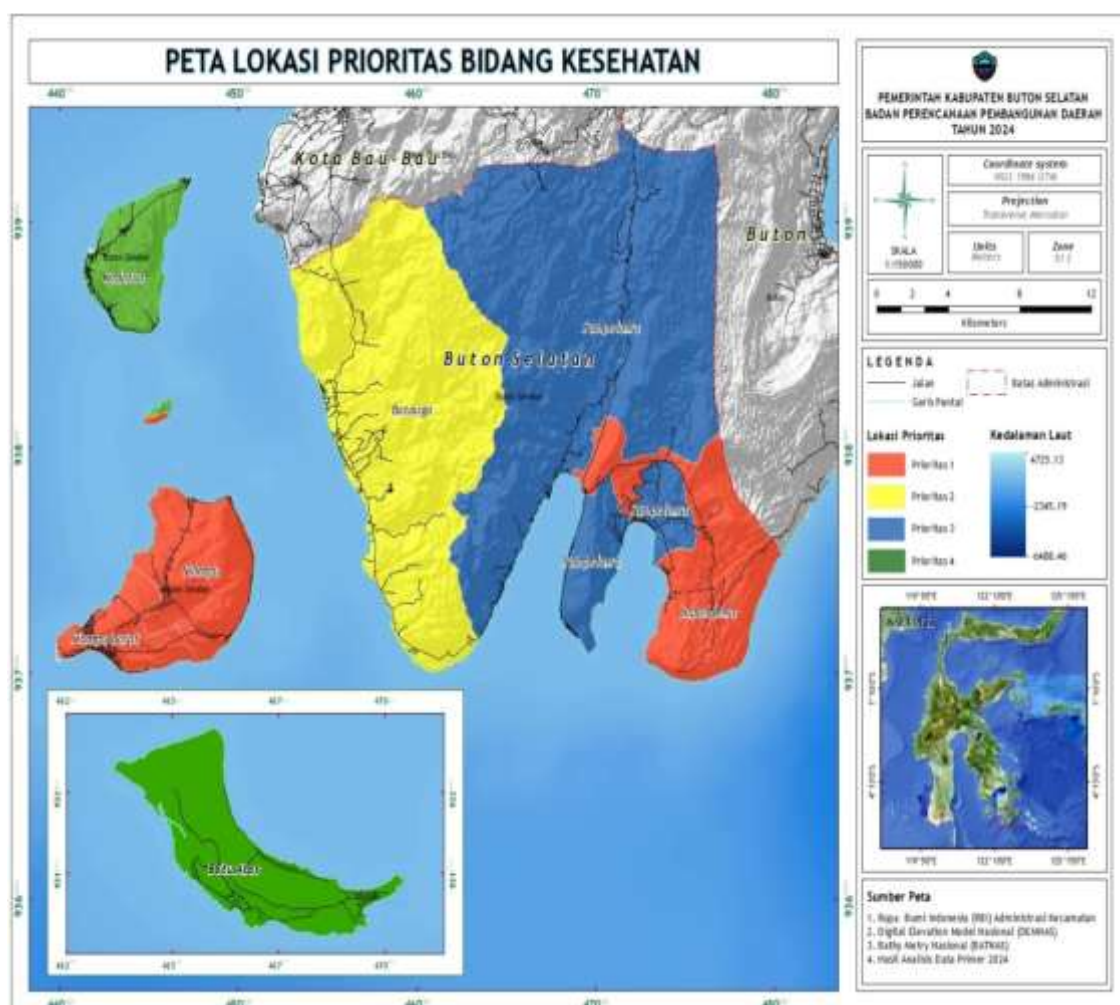
**Gambar 5.7 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Jumlah Angka Kemiskinan Ekstrem dan Tenaga Medis di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan jumlah penduduk miskin ekstrem dengan jumlah tenaga medis di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat, yang menjadi target utama intervensi karena memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi dan tenaga medis yang terbatas. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Batauga, sementara Prioritas 3 (biru) hanya terdapat di



Kecamatan Sampolawa. Prioritas 4 (hijau) meliputi Kecamatan Batu Atas dan Kecamatan Kadatua.

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan yang membandingkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan tenaga medis, prioritas intervensi telah dibagi dalam empat kategori untuk memastikan kebijakan yang lebih terfokus dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas 1 (merah) menjadi prioritas utama intervensi, karena wilayah ini menghadapi tantangan terbesar dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi dan keterbatasan tenaga medis. Oleh karena itu, intervensi utama di wilayah ini adalah meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan penyediaan tenaga medis yang cukup, baik dengan menambah jumlah tenaga medis maupun meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada.



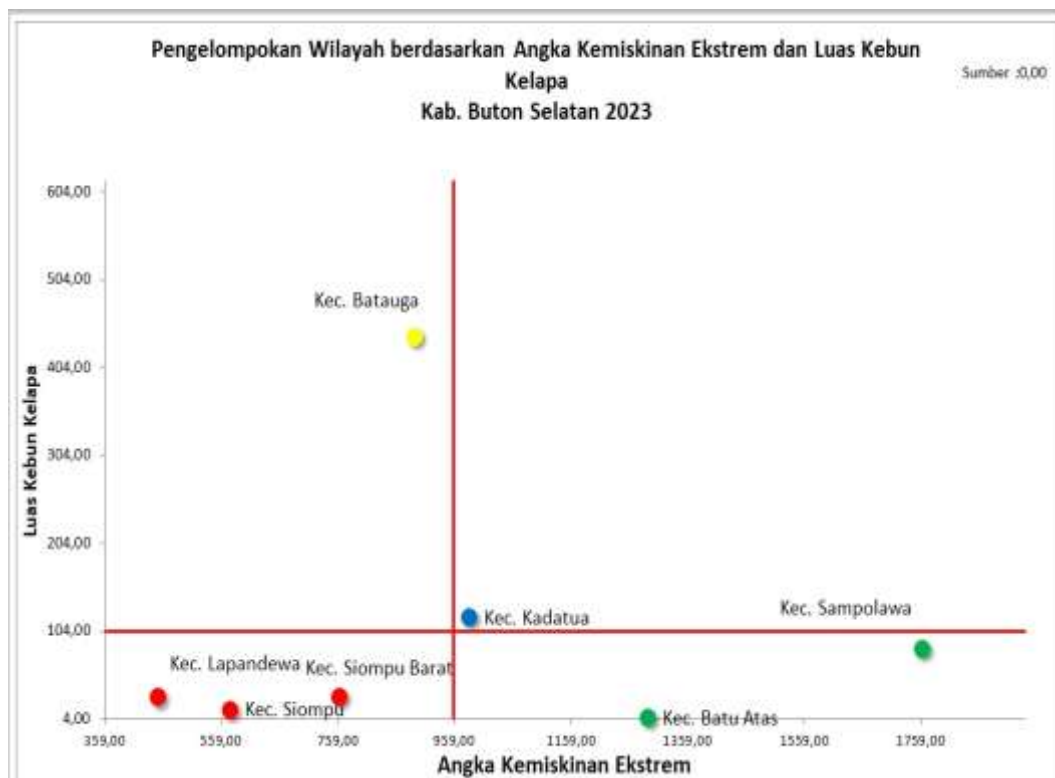
Gambar 5.8 Peta Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan



## 5.5. Prioritas Wilayah Bidang Perkebunan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan sektor perkebunan kelapa bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor perkebunan dalam mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Produksi perkebunan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan, memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga miskin ekstrem, asalkan dikelola dengan baik.

Berdasarkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan potensi produksi perkebunan, wilayah di Kabupaten Buton Selatan dikelompokkan dalam empat kategori prioritas, yaitu: Prioritas 1 (Merah), Prioritas 2 (Kuning), Prioritas 3 (Biru), dan Prioritas 4 (Hijau). Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengembangan sektor perkebunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing prioritas dapat di lihat pada grafik sebagai berikut :

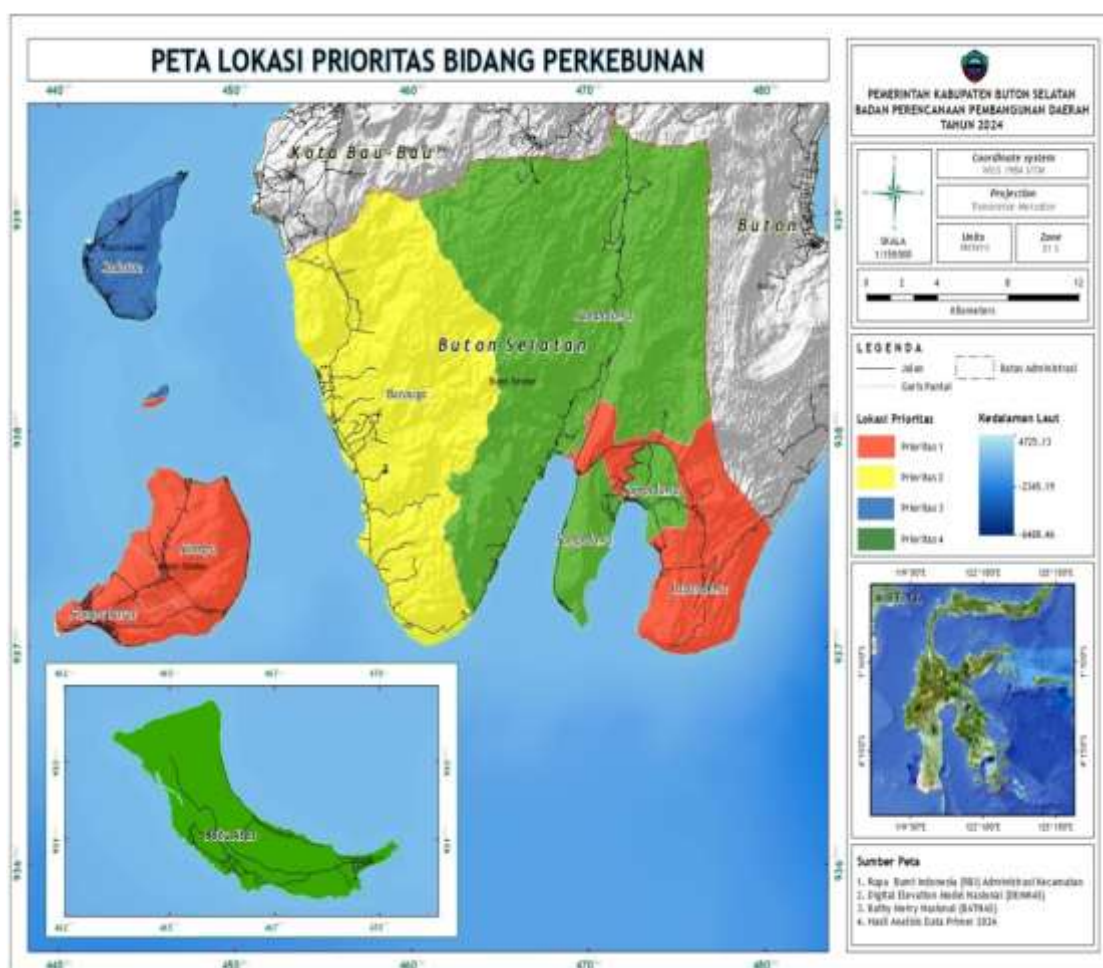


Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.9 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Luas Kebun Kelapa di Kabupaten Buton Selatan**



Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan jumlah penduduk miskin ekstrem dengan produksi perkebunan di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Batauga. Prioritas 3 (biru) mencakup Kecamatan Kadatua, sementara Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batu Atas.



**Gambar 5.10 Peta Lokasi Prioritas Bidang Perkebunan**

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan potensi sektor perkebunan, wilayah-wilayah yang memiliki penduduk miskin ekstrem tinggi dan potensi sektor perkebunan yang belum maksimal perlu mendapatkan Prioritas 1 (merah). Wilayah tersebut adalah Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat. Di wilayah



ini, intervensi yang diperlukan mencakup peningkatan produksi perkebunan, diversifikasi produk, dan penguatan akses pasar bagi petani. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, serta membuka peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

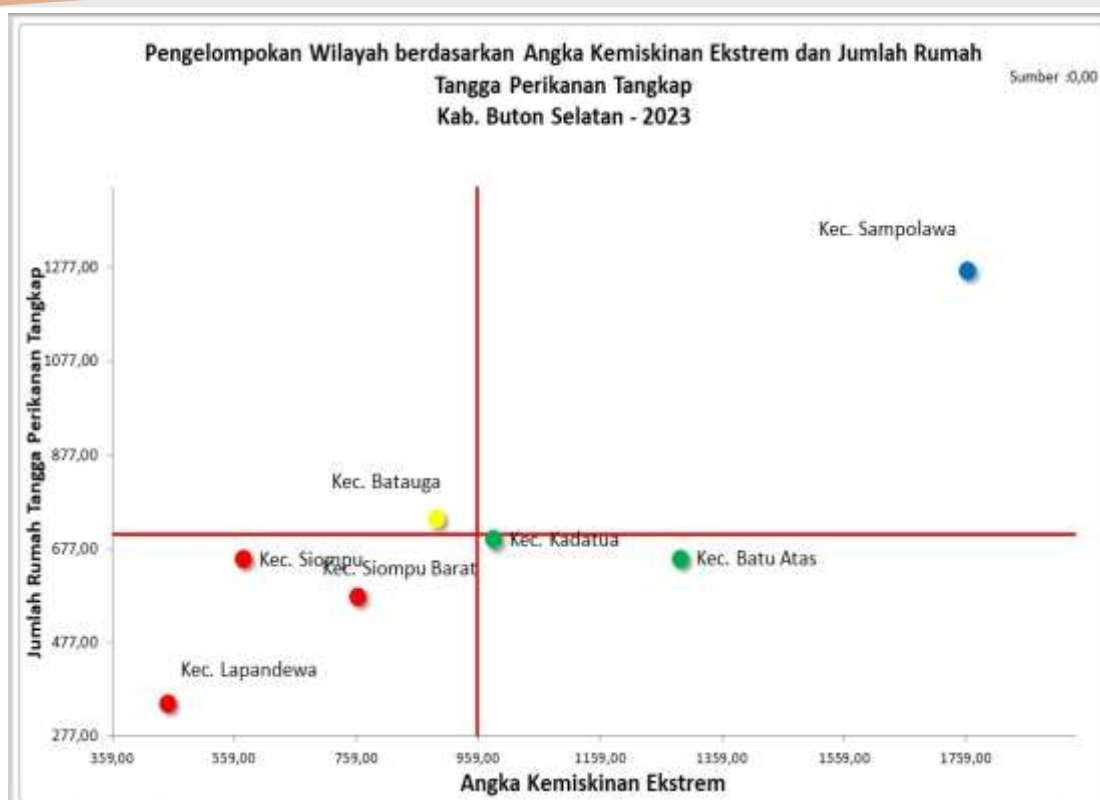
## 5.6. Prioritas Wilayah Bidang Perikanan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan sektor perikanan tangkap bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi lebih lanjut, khususnya di sektor perikanan tangkap, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Sektor perikanan tangkap, yang merupakan sumber pendapatan utama di daerah pesisir, berpotensi besar dalam membantu peningkatan pendapatan masyarakat miskin, terutama jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan potensi sektor perikanan tangkap, wilayah di Kabupaten Buton dikelompokkan dalam empat kategori prioritas, yaitu: Prioritas 1 (Merah), Prioritas 2 (Kuning), Prioritas 3 (Biru), dan Prioritas 4 (Hijau). Masing-masing prioritas menggambarkan tingkat kebutuhan intervensi di sektor perikanan tangkap untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing prioritas dapat dilihat pada grafik Gambar 5.11 berikut.

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu, dan Kecamatan Siompu Barat, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Batauga. Prioritas 3 (biru) terdapat di Kecamatan Sampolawa, sementara Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batu Atas.

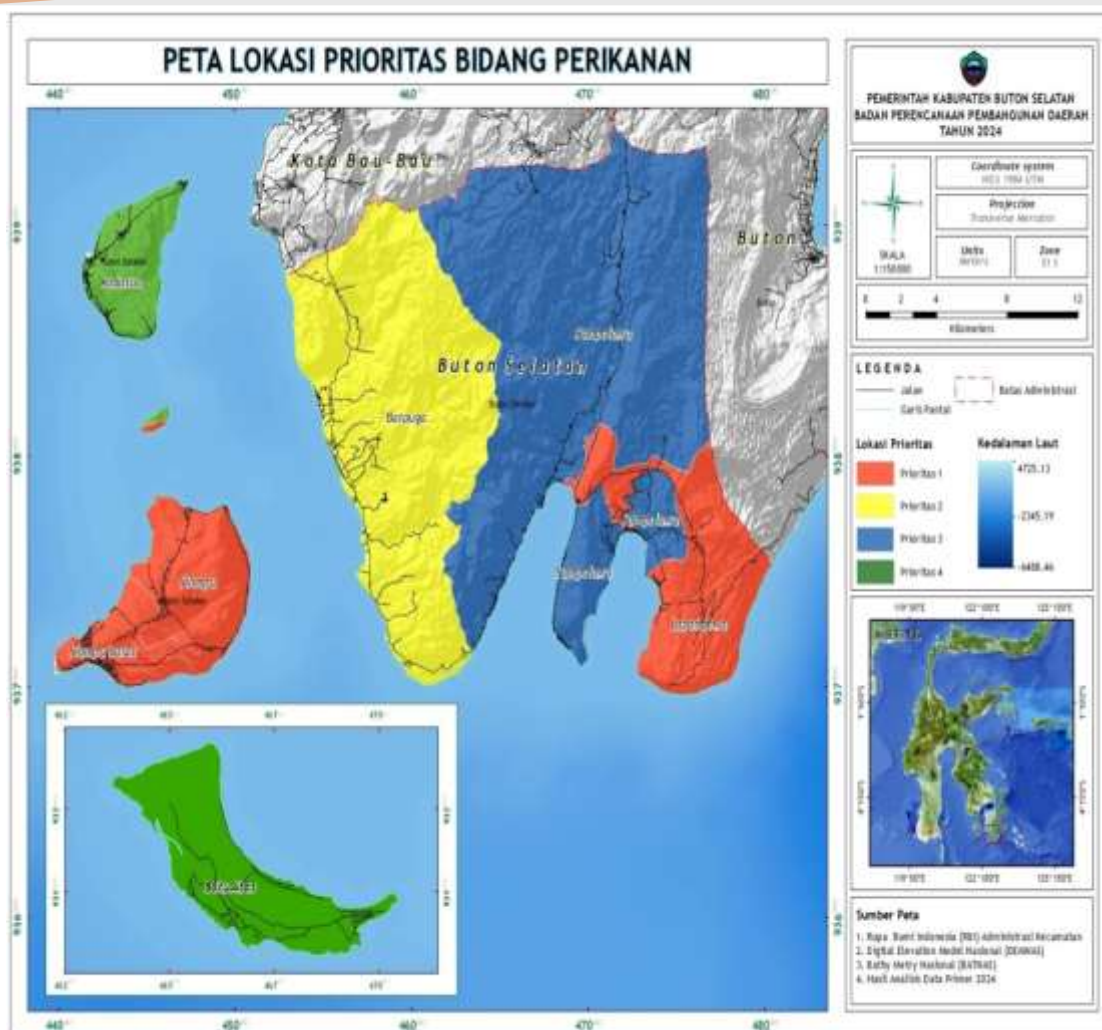




Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.11 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Perikanan Tangkap di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan sektor perikanan tangkap, Prioritas 1 (merah) mencakup wilayah-wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi dan sektor perikanan tangkap yang perlu ditingkatkan. Intervensi yang dibutuhkan di wilayah Prioritas 1 adalah peningkatan kapasitas nelayan, perbaikan alat tangkap, dan penguatan akses pasar bagi hasil tangkapan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap, memperluas kesempatan pasar bagi hasil perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pendapatan yang lebih tinggi. Intervensi yang tepat di wilayah ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan sektor perikanan sebagai sumber ekonomi utama bagi masyarakat setempat.



**Gambar 5.12** Peta Lokasi Prioritas Bidang Perikanan

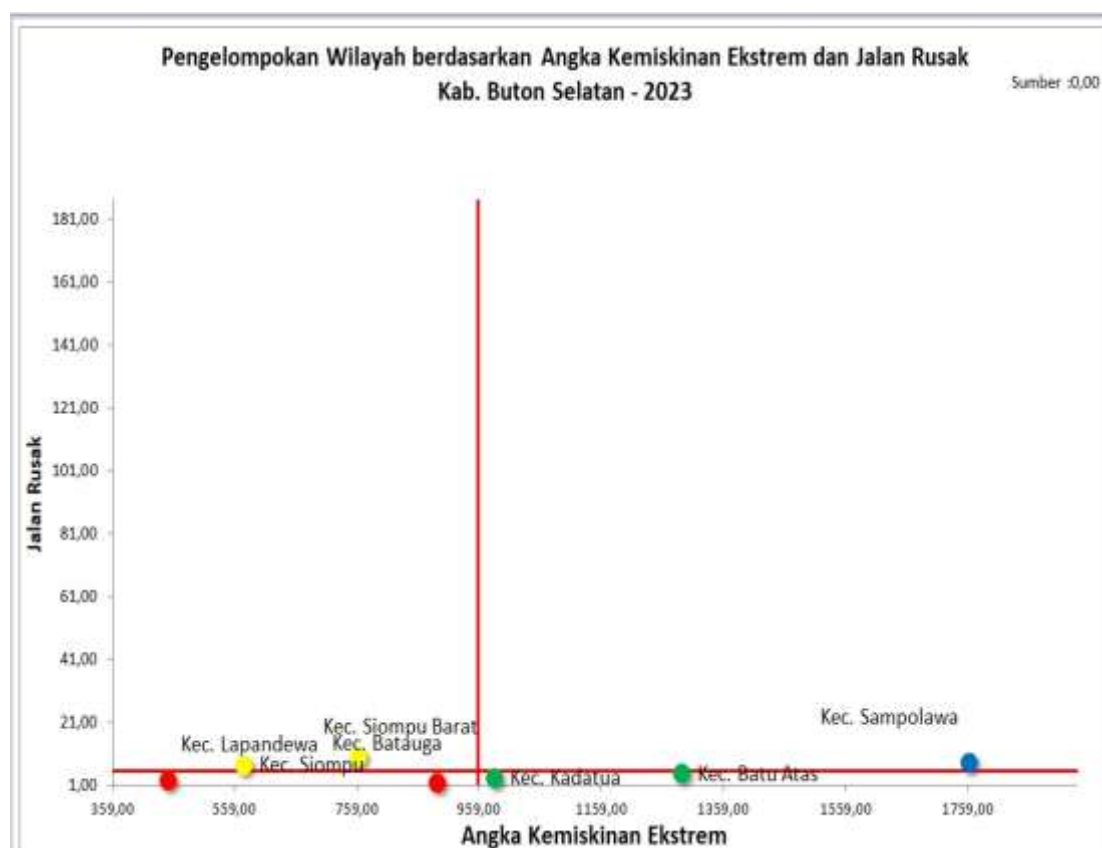
## 5.7. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur

### 5.7.1. Prioritas Wilayah Jalan

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan infrastruktur jalan rusak bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akses terhadap jalan rusak dengan angka kemiskinan ekstrem di setiap kecamatan. Berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan kondisi jalan rusak, wilayah di Kabupaten Buton Selatan dikelompokkan dalam empat kategori prioritas, yaitu: Prioritas 1 (Merah), Prioritas 2 (Kuning), Prioritas 3 (Biru), dan Prioritas 4 (Hijau). Setiap kategori prioritas menggambarkan tingkat urgensi dan kebutuhan intervensi dalam perbaikan infrastruktur jalan rusak untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Wilayah yang masuk dalam prioritas lebih tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan jalan yang dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa,



serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing prioritas dan langkah-langkah intervensi yang diperlukan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Analisis TNP2K

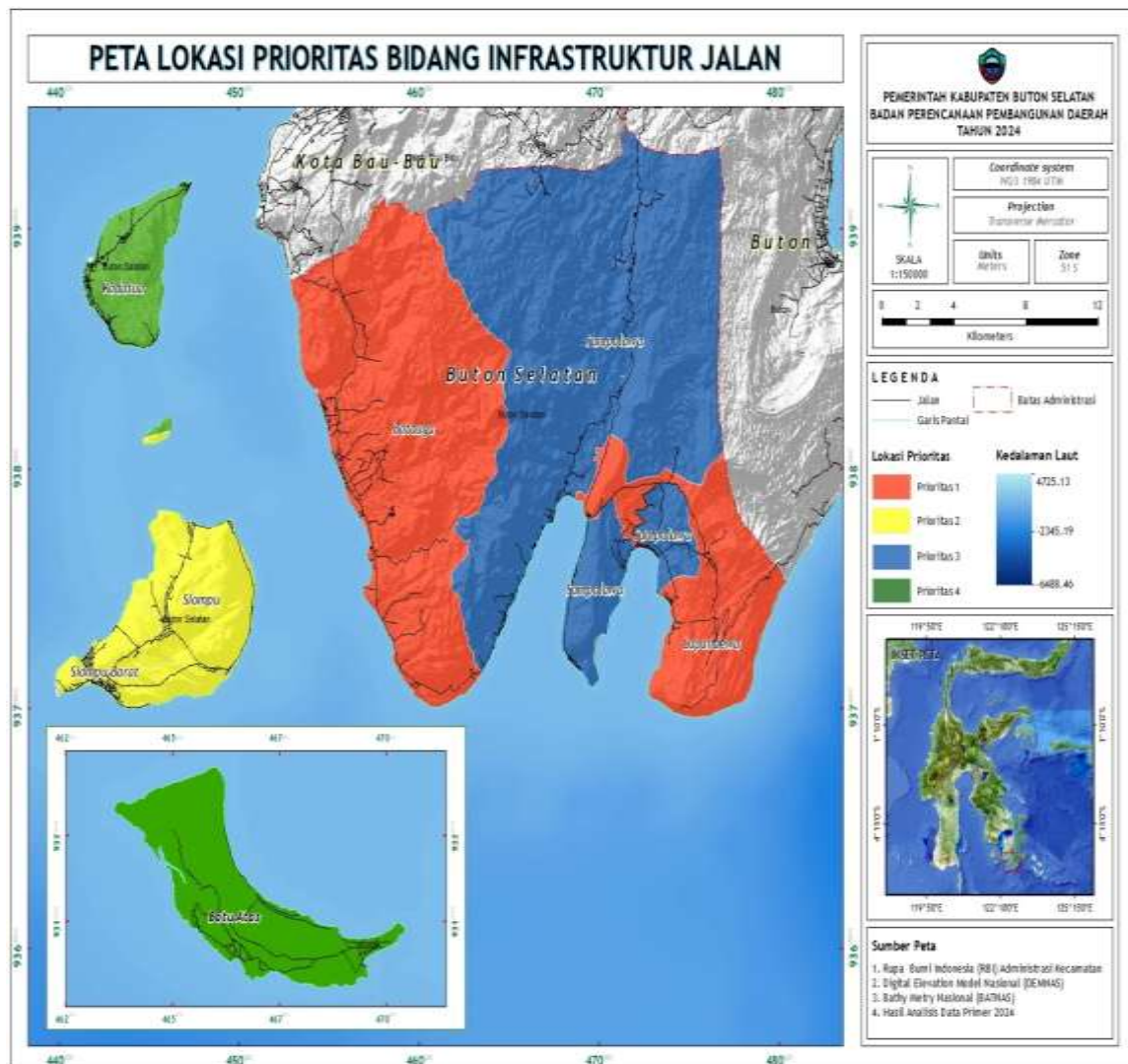
**Gambar 5.13 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemsikinan Ekstrem dan Jalan Rusak di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan kondisi jalan rusak di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu Prioritas 1 (merah) mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga dan Kecamatan Lapandewa, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Prioritas 3 (biru) terdapat di Kecamatan Sampolawa, sementara Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batu Atas.

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan kondisi jalan rusak, Prioritas 1 (merah) mencakup wilayah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi dan



akses jalan yang rusak, seperti Kecamatan Batauga dan Kecamatan Lapandewa. Di wilayah ini, fokus utama intervensi adalah perbaikan infrastruktur jalan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik, baik untuk transportasi masyarakat maupun distribusi barang dan hasil produksi. Peningkatan infrastruktur jalan ini akan mendukung mobilitas ekonomi dan sosial, memperlancar akses ke pasar dan fasilitas publik. Intervensi ini diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses ekonomi dan sosial di wilayah yang paling membutuhkan.



**Gambar 5.14 Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Jalan**

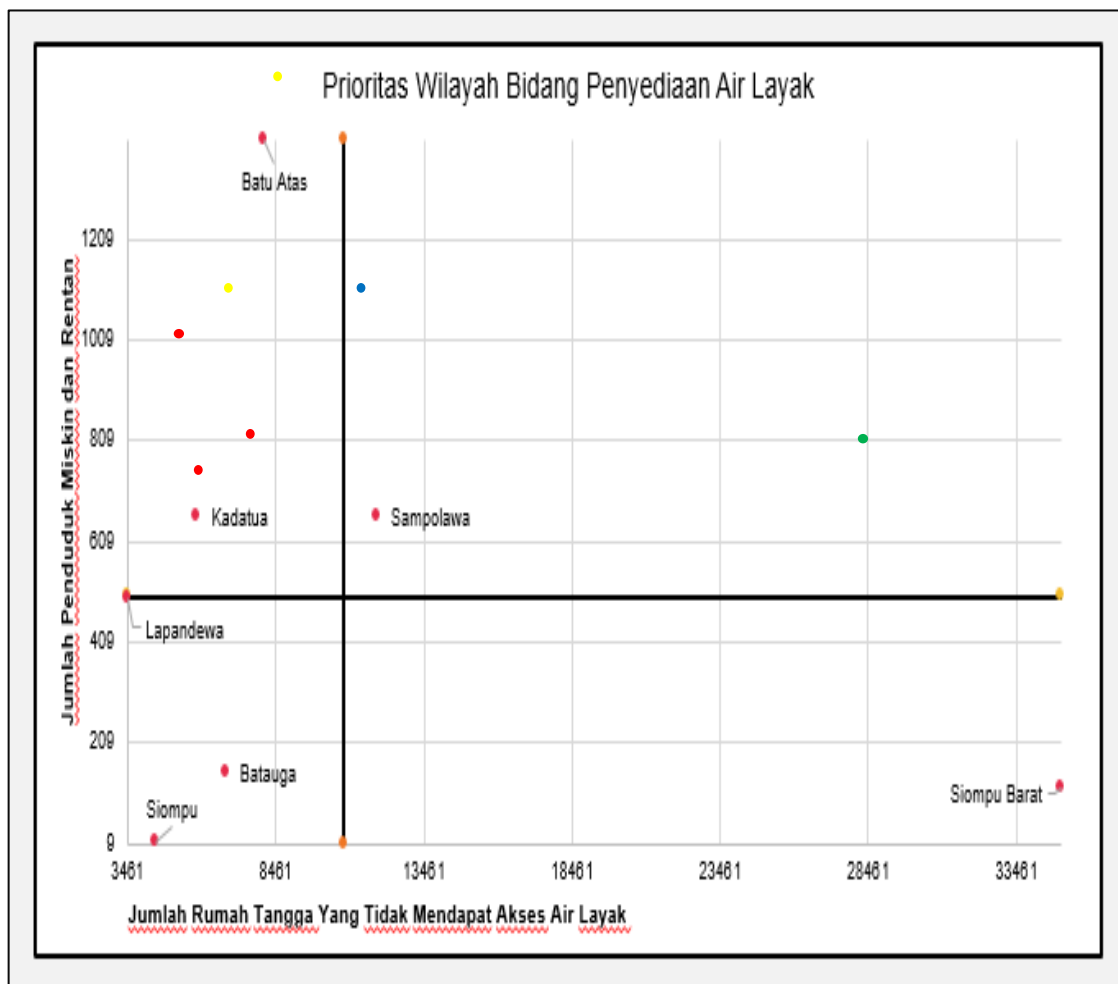
### 5.7.2. Prioritas Wilayah Air Bersih

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan penyediaan air layak bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akses terhadap penyediaan air bersih dan tingkat kemiskinan ekstrem di setiap kecamatan.



Akses terhadap air bersih merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber air yang layak dan aman. Kekurangan akses terhadap air bersih dapat memperburuk kondisi kesehatan dan kualitas hidup mereka, yang pada gilirannya semakin memperburuk kemiskinan yang mereka alami.

Pengelompokan ini menjadi bagian dari upaya lebih besar dalam pengentasan kemiskinan, di mana akses terhadap air bersih bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengetahui wilayah yang paling membutuhkan intervensi, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang program yang lebih tepat sasaran untuk memastikan bahwa semua masyarakat, terutama yang berada di wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi, dapat menikmati akses yang layak terhadap air bersih.

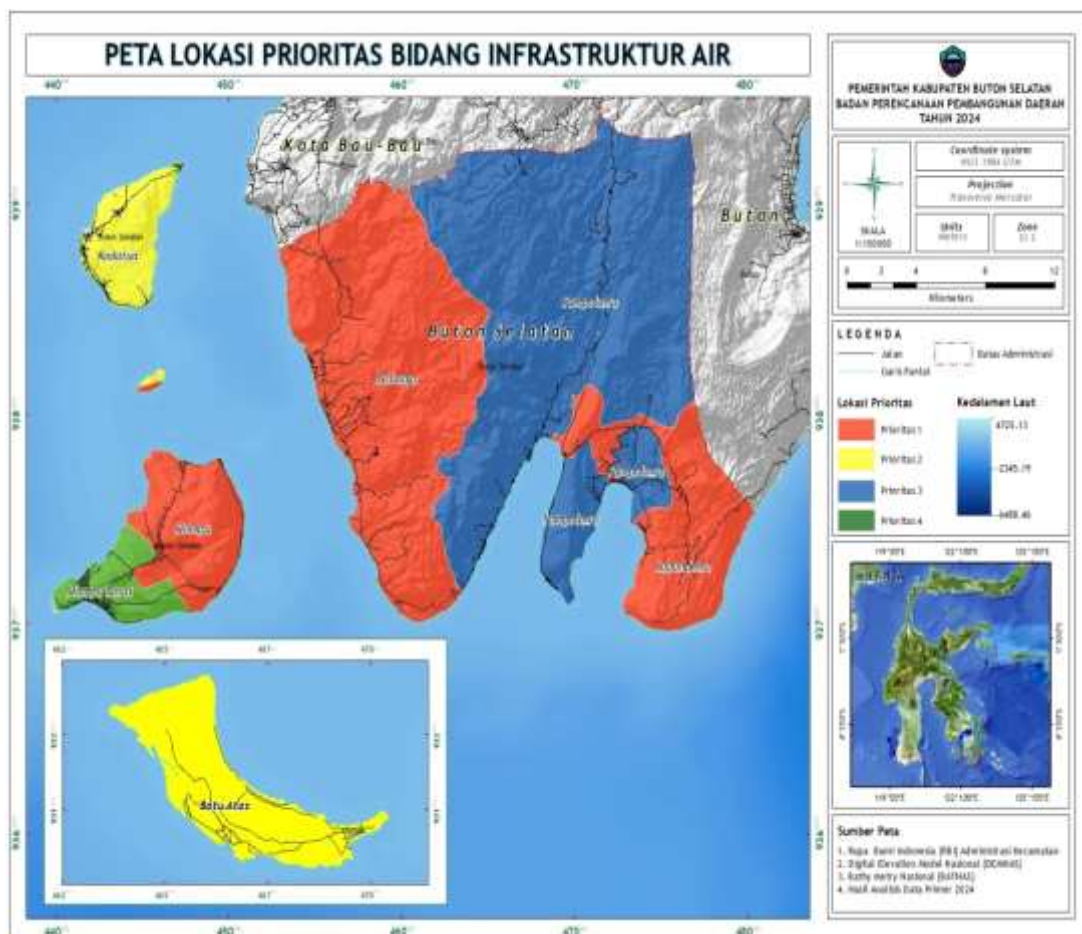


Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.15** Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penyediaan air Layak di Kabupaten Buton Selatan



Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan penyediaan air layak di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, dan Kecamatan Siompu, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Kadatua dan Batu Atas, sementara Prioritas 3 (biru) hanya terdapat di Kecamatan Sampolawa. Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Siompu Barat.



**Gambar 5.16 Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Air**

Hasil analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dan penyediaan air layak, Prioritas 1 (merah) mencakup wilayah seperti Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, dan Kecamatan Siompu yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi dan akses terhadap air bersih yang terbatas. Di daerah ini, intervensi yang utama adalah peningkatan penyediaan air layak melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur sumber air bersih, seperti sumur,



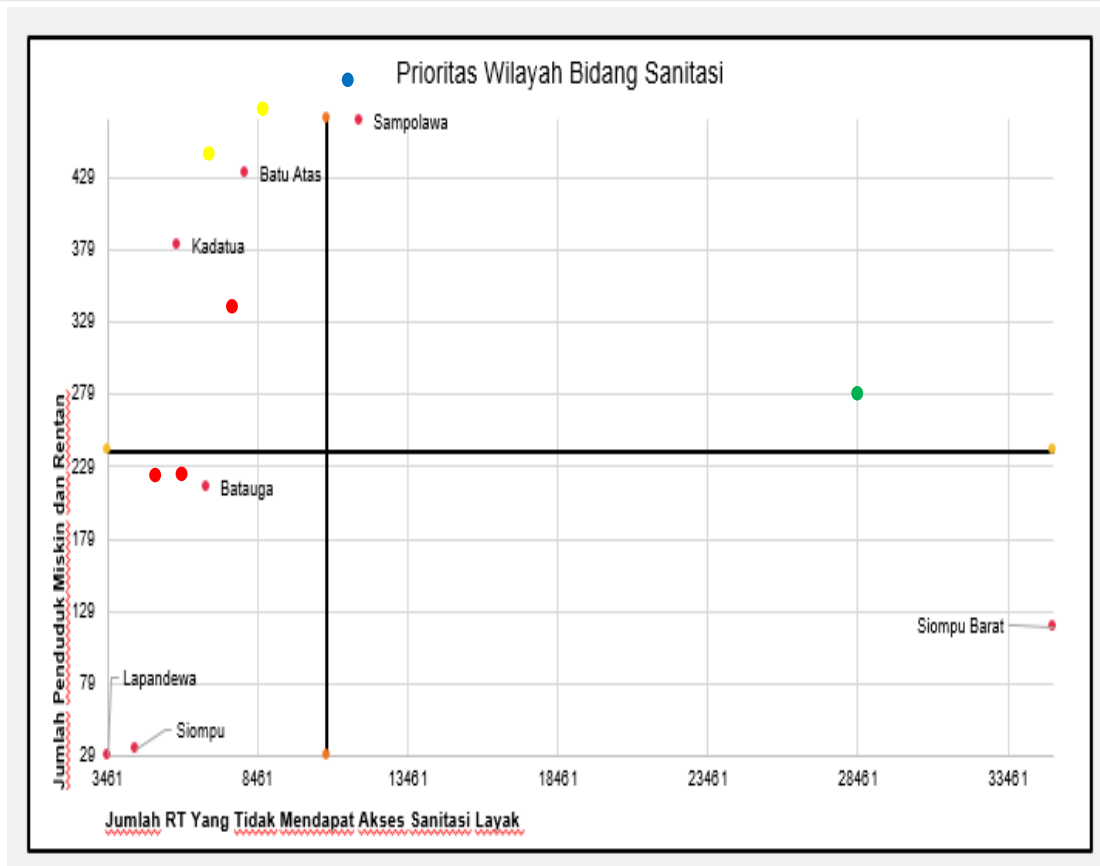
jaringan pipa, dan fasilitas pengolahan air. Selain itu, program edukasi mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari intervensi ini. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat miskin yang terkendala oleh kesulitan mendapatkan air bersih, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

### **5.7.3. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Sanitasi**

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan sanitasi bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akses terhadap penyediaan sanitasi yang layak dan tingkat kemiskinan ekstrem di setiap kecamatan. Sanitasi yang buruk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang sering kali kesulitan untuk memperoleh fasilitas sanitasi yang memadai. Kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air, yang pada gilirannya semakin memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan menganalisis hubungan antara angka kemiskinan ekstrem dan kondisi sanitasi, pengelompokan wilayah ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan akses terhadap sanitasi. Pengelompokan ini juga memungkinkan untuk merancang kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran, yang dapat memperbaiki kondisi sanitasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan beban kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kondisi lingkungan dan fasilitas dasar yang memadai.

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan penyediaan air layak di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, dan Kecamatan Siompu, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batu Atas, sementara Prioritas 3 (biru) hanya terdapat di Kecamatan Sampolawa. Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Siompu Barat.

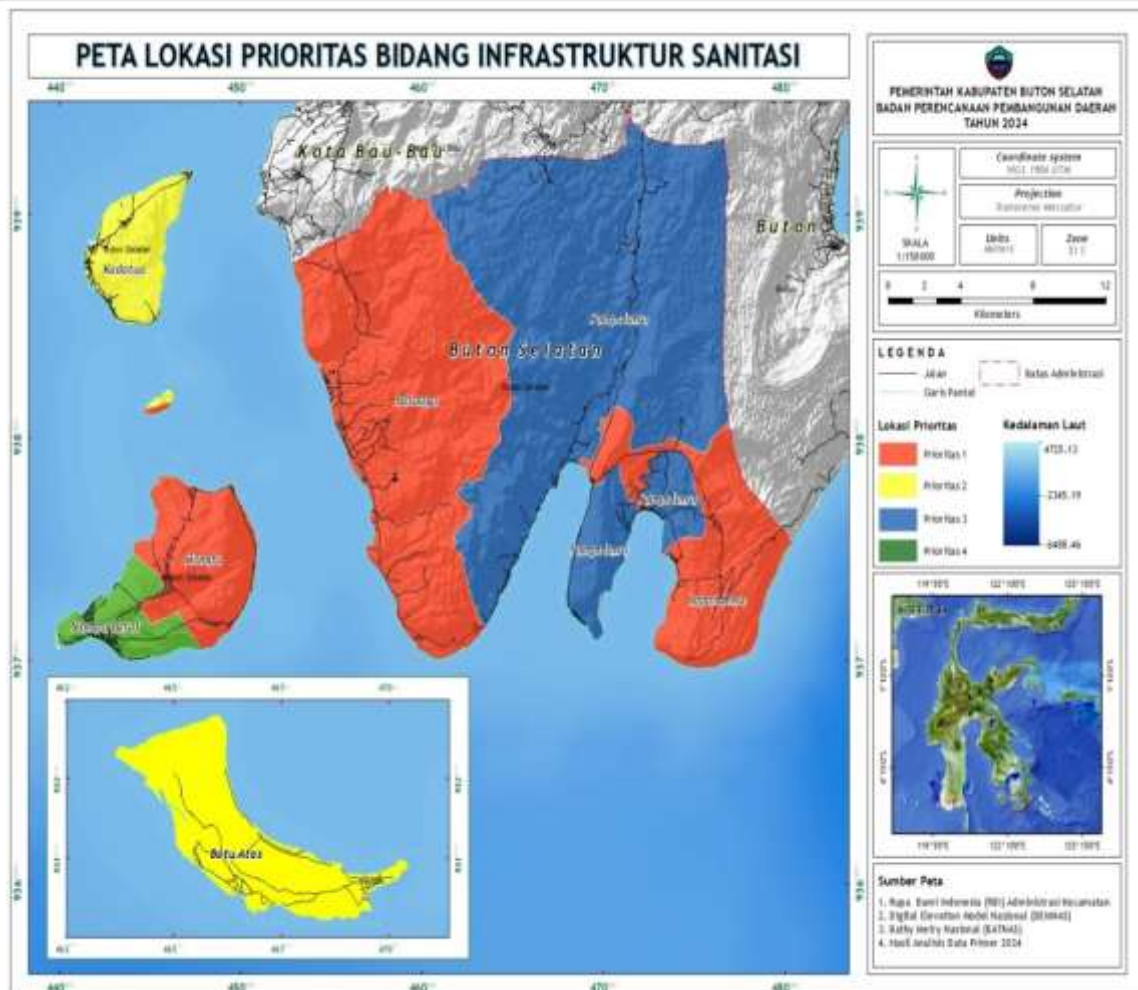




Sumber : Analisis TNP2K

**Gambar 5.17 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penyediaan air Layak di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan penyediaan air layak, Prioritas 1 (merah) mencakup wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem yang tinggi dan akses terhadap air bersih yang terbatas, seperti Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, dan Kecamatan Siompu. Di wilayah ini, intervensi yang utama adalah peningkatan akses terhadap penyediaan air layak, melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur sumber air bersih, seperti pipa distribusi, sumur bor, dan fasilitas pengolahan air. Selain itu, penguatan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan dan pengelolaan sanitasi yang lebih baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan akses air bersih di daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



**Gambar 5.18 Peta Lokasi Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Sanitasi**

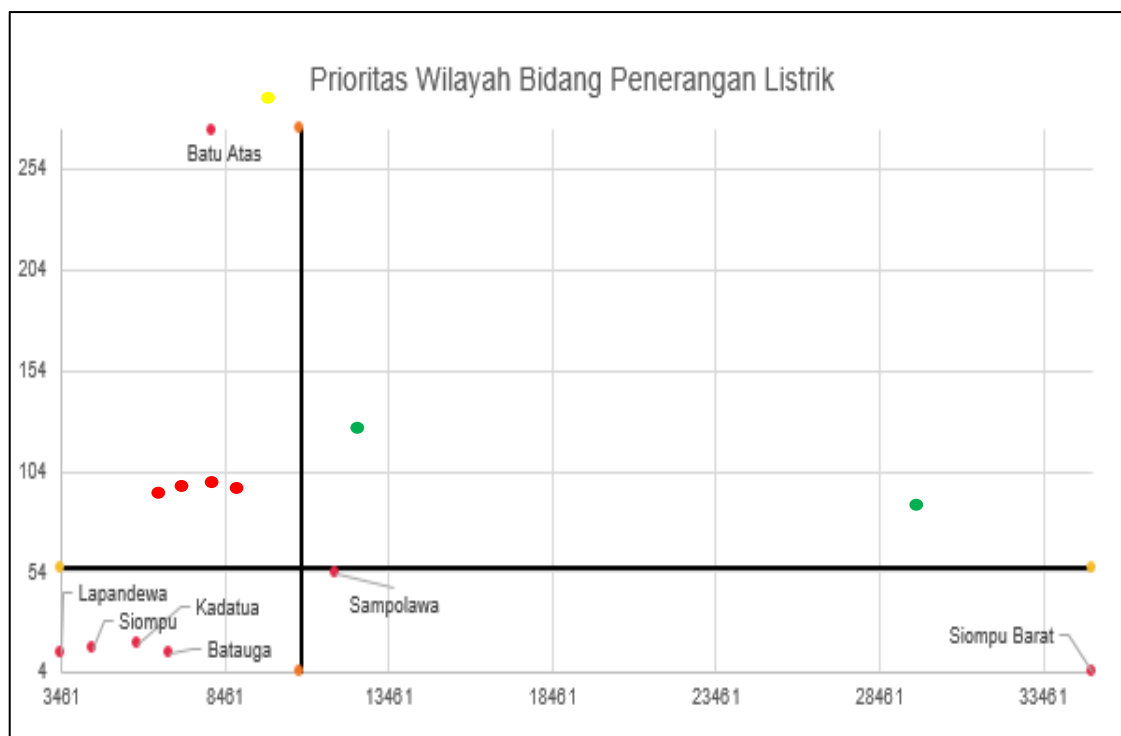
#### 5.7.4. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Listrik

Pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan sumber penerangan bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akses terhadap penyediaan sumber penerangan dan tingkat kemiskinan ekstrem di setiap kecamatan. Bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses terhadap sumber penerangan dapat menghambat berbagai aktivitas, termasuk pendidikan, produktivitas kerja, dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pengelompokan wilayah berdasarkan angka kemiskinan ekstrem dan sumber penerangan sangat penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi dalam penyediaan akses listrik atau sumber penerangan lainnya.

Melalui pengelompokan ini, kebijakan dan program intervensi dapat lebih terarah dan efisien, membantu masyarakat miskin ekstrem memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber penerangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup,



membuka peluang ekonomi, serta memperbaiki kondisi sosial di setiap kecamatan.



Sumber : Analisis TNP2K

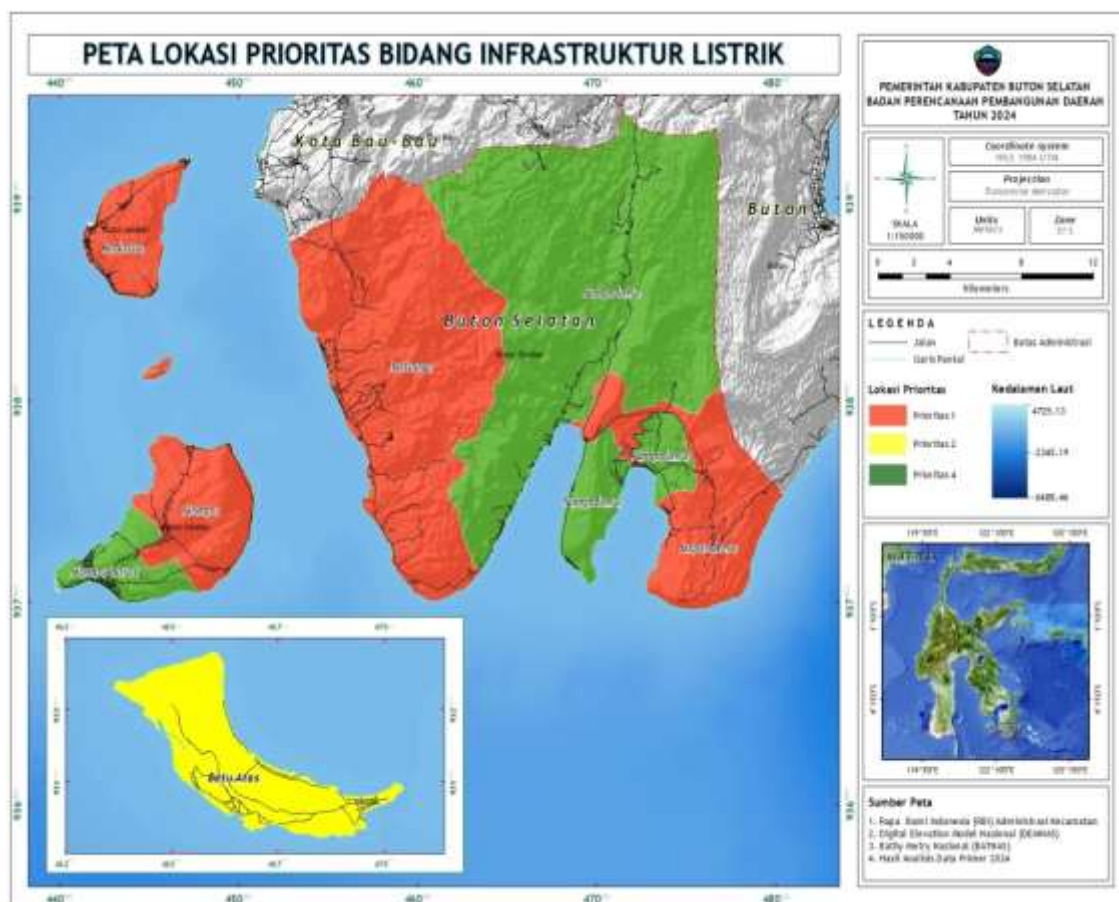
**Gambar 5.19 Grafik Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penerangan Listrik di Kabupaten Buton Selatan**

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah yang membandingkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penerangan Listrik di Kabupaten Buton Selatan, dapat disusun skema intervensi prioritas yang terbagi dalam empat kategori, yaitu: Prioritas 1 (merah) mencakup tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Siompu, yang menjadi target utama intervensi. Prioritas 2 (kuning) terdapat di Kecamatan Batu Atas, sementara Prioritas 4 (hijau) hanya terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Siompu Barat.

Berdasarkan analisis pengelompokan wilayah Kabupaten Buton Selatan yang membandingkan angka kemiskinan ekstrem dengan penerangan listrik, Prioritas 1 (merah) mencakup wilayah-wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap penerangan listrik, seperti Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Kadatua, dan Kecamatan Siompu. Di wilayah ini, intervensi utama adalah penyediaan dan penguatan infrastruktur listrik, baik dengan menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya, ataupun dengan memperluas jaringan listrik ke seluruh wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, peningkatan akses listrik di daerah ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi,



mempermudah pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.



**Gambar 5.20 Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Listrik**

### 5.8. Hasil Komposit Wilayah Prioritas

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin serta kondisi tiap bidang kemiskinan. Penentuan hasil komposit prioritas wilayah ditentukan dari kemiskinan ekstrim, bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perkebunan, bidang perikanan, dan bidang infrastruktur dasar yang meliputi wilayah jalan, wilayah air bersih, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur listrik. Dengan adanya wilayah prioritas intervensi yang mempresentasikan distribusi penduduk sangat miskin-rentan miskin maka perlunya upaya yang dilakukan melalui kolaborasi intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hasil komposit prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan tiap bidang kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan membagi klasifikasi menjadi empat yaitu



wilayah prioritas intervensi I, II, III, dan IV. Kecamatan-kecamatan dengan prioritas I adalah kecamatan dengan kondisi tiap bidang relatif berada pada kuadran I atau prioritas I, kecamatan-kecamatan dengan prioritas II adalah kecamatan dengan kondisi tiap bidang relatif berada pada kuadran II atau prioritas II, kecamatan-kecamatan dengan prioritas III adalah kecamatan dengan kondisi tiap bidang relatif berada pada kuadran III atau prioritas III, dan kecamatan-kecamatan dengan prioritas IV adalah kecamatan dengan kondisi tiap bidang relatif berada pada kuadran IV atau prioritas IV (Tabel 5.2).

Secara kewilayahan, kecamatan-kecamatan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan (Tabel 5.1) Hasil Komposit Prioritas Wilayah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tiap Bidang Kemiskinan adalah Kecamatan Lapandewa dan Siompu sebagai wilayah prioritas I, Kecamatan Batauga dan Siompu Barat sebagai wilayah prioritas II, kecamatan Kadatua dan Sampolawa sebagai wilayah prioritas III, dan kecamatan Batu Atas sebagai wilayah prioritas IV.





**Tabel 5.2 Hasil Komposit Prioritas Wilayah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tiap Bidang Kemiskinan**

| Kecamatan    | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem | Kemiskinan Ekstrem       | Bidang Ketenagakerjaan   | Bidang Pendidikan        | Bidang Kesehatan         | Bidang Perkebunan        | Bidang Perikanan         | Bidang Infrastruktur Dasar |                          |                          |                         | Hasil Komposit           |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Fasilitas Jalan            | Sumber Air Minum Layak   | Sanitasi Layak           | Penerangan Listrik      |                          |
| Batauga      | 889                            | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi I     | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I  | Prioritas Intervensi II  |
| Batu Atas    | 1.290                          | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV    | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II | Prioritas Intervensi IV  |
| Kadatua      | 984                            | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV    | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi II  | Prioritas Intervensi I  | Prioritas Intervensi III |
| Lapandewa    | 449                            | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I     | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I  | Prioritas Intervensi I   |
| Sampolawa    | 1.761                          | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi III   | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi III | Prioritas Intervensi IV | Prioritas Intervensi III |
| Siompu       | 573                            | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi II    | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I  | Prioritas Intervensi I   |
| Siompu Barat | 761                            | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi I   | Prioritas Intervensi II    | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV  | Prioritas Intervensi IV | Prioritas Intervensi II  |





## BAB VI. PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buton Selatan 2025-2030 adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan, Indonesia. RPKD ini berfokus pada langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam jangka waktu lima tahun untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. RPKD telah menyajikan setidaknya; a) Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan pengurangan kemiskinan yang terukur, termasuk penurunan persentase penduduk miskin, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi Masyarakat; b) Pendekatan dan Strategi: Menyusun strategi yang berbasis pada analisis akar penyebab kemiskinan, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Ini termasuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri lokal; c) Program Prioritas: Menyusun program-program prioritas, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; d) Pemetaan Masalah: Identifikasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan menetapkan intervensi yang sesuai untuk tiap wilayah; e) Sumber Daya dan Pendanaan: Menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendanai program-program ini, yang bisa melibatkan dana pemerintah daerah, pusat, serta dukungan dari sektor swasta dan lembaga internasional; dan f) Monitoring dan Evaluasi: Membuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar mengarah pada pengurangan kemiskinan.

### 6.2. Saran

RPKD Kabupaten Buton Selatan 2025-2030 disarankan tidak saja menjadi panduan dalam upaya kolektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh adalah menjadi





bagian integral dari percepatan target penanggulangan pada tingkat provinsi dan nasional. Dengan langkah-langkah kolektif, kemiskinan di Buton Selatan dapat ditekan dibawah 10%, sekaligus berkontribusi dalam capaian pada tingkat provinsi yang menargetkan dibawah 1% atau 0,0%.

### 6.3. Rekomendasi Kebijakan

#### 1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- a. Dukungan politik, komitmen dan kesungguhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. Kepemimpinan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Meningkatkan efektivitas setiap nilai rupiah, program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah agar menjawab apa masalah, menjawab akar masalah, menjawab di mana masalah itu terjadi dan memastikan ketepatan individu dan rumah tangga penerima manfaat secara tepat dan benar.
- d. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.
- e. Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau.
- f. Menggunakan data P3KE dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah.
- g. Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
- h. Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkankan oleh pemerintah pusat dapat diterima secara tepat oleh masyarakat sasaran.





## 2. Kebijakan Pendidikan

- a. Perlunya perhatian pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjangkaran anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 12 tahun.
- c. Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus.
- d. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan melakukan *regrouping* atau penggabungan beberapa sekolah yang tidak dapat memenuhi standar minimal pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan produktivitas proses belajar mengajar di kelas, meningkatkan minat dan semangat anak untuk hadir dan belajar di sekolah, memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah, dan terjadinya pemerataan guru.
- e. Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer, khususnya di daerah-daerah pelosok dan kepulauan.
- f. Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.
- g. Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi.
- h. Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- i. Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas.
- j. Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.





- k. Perlu dilakukannya pemuktahiran data dalam Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan yang dilakukan setiap tahun dan dapat diakses oleh publik melalui media *online* (*website* pemerintah daerah).

### 3. Kebijakan Kesehatan

- a. Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan kesehatan, dimana pemerintah menanggung premi asuransi bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, cakupan pelayanan ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan dan pelayanan kesehatan anak juga tersedia dalam skema jaminan kesehatan.
- b. Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan berkualitas antar kecamatan atau desa/kelurahan, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pustu, polindes, posyandu, dan rumah sakit.
- d. Meningkatkan pelayanan antar-jemput gratis persalinan terutama penduduk yang tinggal di wilayah terpencil, disertai dengan peningkatan akses infrastruktur terutama jalan menuju tempat persalinan terdekat.
- e. Penguatan sistem rujukan internal baik untuk *maternal* maupun *neonatal* terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD.
- f. Penguatan sosialisasi oleh seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu mengenai pentingnya kesadaran ibu hamil agar melahirkan di tempat fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih/embangkan sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit/wabah dengan melibatkan peran serta dari masyarakat di lingkungan setempat, terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
- g. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas kabupaten hingga tingkat desa, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA.
- h. Meningkatkan kompetensi bidan dalam penatalaksanaan pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* (ANC) terpadu sehingga tidak hanya mampu mendeteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi tetapi juga mampu mengetahui faktor risiko penyebab komplikasi
- i. Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas.





- j. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.
- k. Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialisasi penundaan usia perkawinan.
- l. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan implementasi kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat terealisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- m. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- n. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.

#### 4. Kebijakan Infrastruktur Dasar

- a. Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan.
- b. Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- c. Program dan kegiatan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- d. Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada *evidence based* dan data yang tersedia.
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kabupaten Buton Selatan.





- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.

## 5. Kebijakan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan/Kelautan

- a. Perlunya dukungan dan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bagi peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dengan berfokus pada peningkatan penghasilan petani/nelayan miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- b. Perlunya melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh tani/nelayan, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan agar manfaat program pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan juga diterima oleh buruh tani dan nelayan dengan status miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin sehingga tidak hanya berfokus pada kelompok tani/nelayan.
- c. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan yang kurang memadai terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan luas lahan dan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan tinggi serta kecamatan-kecamatan dengan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan juga tinggi.
- d. Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembagian alat dan mesin pertanian/perikanan/kelautan, bantuan bibit, bantuan pupuk, pelatihan petani dan nelayan bagi penduduk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan.
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan sektor peningkatan kesejahteraan petanidan nelayan dapat dilakukan berdasarkan pada *evidence based* dan data-data mikro yang tersedia.
- f. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang tersedia setiap tahun dalam APBD Kabupaten Buton Selatan, dengan memperbesar porsi untuk kebermanfaatan yang lebih besar bagi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh dan petani/nelayan.
- g. Perlunya peningkatan penajaman program, kegiatan dan anggaran pada kecamatan-kecamatan dengan status sosial, ekonomi dan kesejahteraan rendah dengan penduduk miskin tinggi bekerja sebagai buruh dan petani/nelayan miskin.





## 6. Kebijakan UMKM

- a. Perlunya penetapan Pelaku Usaha Mikro yang termasuk dalam katagori miskin. Kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan dan pendampingan sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM dalam waktu singkat dan program UMKM naik kelas dapat terwujud.
- b. Perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha kecil mikro dan menengah bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin.
- c. Perlunya dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin.
- d. Pemberian prioritas kemudahan/bantuan modal usaha bagi pelaku usaha yang termasuk dalam katagori miskin dan rentan miskin.

Demikian kesimpulan, saran, dan rekomendasi kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2030. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya-upaya dalam RPKD ini. Amin.

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**H. MUHAMMAD ADIOS**



**MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN 2025-2029**

| Program/Kegiatan (Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota)                                | Indikator Program   | Target     |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   | Lokasi Prioritas        | Sumber Pendanaan |
|---|---|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|-------------------------|------------------|
|   |   | Tahun 2025 |        |                   | Tahun 2026 |        |                   | Tahun 2027 |        |                   | Tahun 2028 |        |                   | Tahun 2029 |        |                   |                         |                  |
|   |   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   |                         |                  |
| <b>1 Dinas Sosial</b>   |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Rehabilitasi Sosial   | Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan  | 360        | Orang  | Rp 417.500.000    | 360        | Orang  | Rp 417.500.000    | 360        | Orang  | Rp 417.500.000    | 360        | Orang  | Rp 417.500.000    | 360        | Orang  | Rp 417.500.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Jumlah pemberdayaan sosial yang diberdayakan  | 100        | Orang  | Rp 100.000.000    | 100        | Orang  | Rp 100.000.000    | 100        | Orang  | Rp 100.000.000    | 100        | Orang  | Rp 100.000.000    | 100        | Orang  | Rp 100.000.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | Persentase perlindungan dan jaminan sosial  | 90         | Persen | Rp 543.500.000    | 90         | Persen | Rp 549.500.000    | 90         | Persen | Rp 549.500.000    | 90         | Persen | Rp 549.500.000    | 90         | Persen | Rp 549.500.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Penanganan Bencana  | Persentase jumlah penanganan bencana  | 90         | Persen | Rp 112.500.000    | 90         | Persen | Rp 112.500.000    | 90         | Persen | Rp 112.500.000    | 90         | Persen | Rp 112.500.000    | 90         | Persen | Rp 112.500.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                     |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA   | Persentase Peningkatan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksana                      | 40         | Persen | Rp 56.180.000     | 50         | Persen | Rp 59.550.800     | 50         | Persen | Rp 59.550.800     | 50         | Persen | Rp 59.550.800     | 50         | Persen | Rp 59.550.800     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Penataan Desa   | Presentase Desa yang berstatus maju   | 8          | Persen | Rp 112.360.000    | 9          | Persen | Rp 119.101.600    | 9          | Persen | Rp 119.101.600    | 9          | Persen | Rp 119.101.600    | 9          | Persen | Rp 119.101.600    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Presentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan dan lembaga adat | 15         | Persen | Rp 516.856.000    | 15         | Persen | Rp 547.867.360    | 15         | Persen | Rp 547.867.360    | 15         | Persen | Rp 547.867.360    | 15         | Persen | Rp 547.867.360    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>                                       |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | Rata-rata lama pengurusan dokumen pendaftaran penduduk  | 2          | Jam    | Rp 105.000.000    | 1          | Jam    | Rp 106.050.000    | 1          | Jam    | Rp 106.050.000    | 1          | Jam    | Rp 106.050.000    | 1          | Jam    | Rp 106.050.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | Persentase pemanfaatan profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab.Buton Selatan                       | 100        | Persen | Rp 20.026.912     | 100        | Persen | Rp 20.227.181     | 100        | Persen | Rp 20.227.181     | 100        | Persen | Rp 20.227.181     | 100        | Persen | Rp 20.227.181     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                             | Persentase sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola                                 | 100        | Persen | Rp 194.000.000    | 100        | Persen | Rp 195.940.000    | 100        | Persen | Rp 195.940.000    | 100        | Persen | Rp 195.940.000    | 100        | Persen | Rp 195.940.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Pencatatan Sipil  | Rata-rata lama pengurusan dokumen pencatatan sipil  | 2          | Jam    | Rp 215.000.000    | 1          | Jam    | Rp 217.150.000    | 1          | Jam    | Rp 217.150.000    | 1          | Jam    | Rp 217.150.000    | 1          | Jam    | Rp 217.150.000    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>4 Dinas Pendidikan</b>   |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Pengelolaan Pendidikan  | Angka partisipasi kasar PAUD  | 83         | Persen | Rp 33.700.638.294 | 84         | Persen | Rp 35.284.680.907 | 84         | Persen | Rp 35.284.680.907 | 84         | Persen | Rp 35.284.680.907 | 84         | Persen | Rp 35.284.680.907 | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Angka partisipasi kasar SD/MI   | 98,20      | Persen |                   | 98,30      | Persen |                   | 98,30      | Persen |                   | 98,30      | Persen |                   | 98,30      | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Angka partisipasi kasar SMP/MTs   | 98         | Persen |                   | 99,00      | Persen |                   | 99,00      | Persen |                   | 99,00      | Persen |                   | 99,00      | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Angka partisipasi murni PAUD  | 58         | Persen |                   | 60,00      | Persen |                   | 60,00      | Persen |                   | 60,00      | Persen |                   | 60,00      | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Angka partisipasi murni SD/MI   | 88         | Persen |                   | 89,00      | Persen |                   | 89,00      | Persen |                   | 89,00      | Persen |                   | 89,00      | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Angka partisipasi murni SMP/MTs   | 78         | Persen |                   | 79,00      | Persen |                   | 79,00      | Persen |                   | 79,00      | Persen |                   | 79,00      | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Presentase Satuan Pendidik yang terakreditasi   | 96         | Persen |                   | 98         | Persen |                   | 98         | Persen |                   | 98         | Persen |                   | 98         | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>5 Dinas Kesehatan</b>  |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat        | Presentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat   | 20         | Persen | Rp 85.081.606.975 | 22         | Persen | Rp 85.932.423.044 | 22         | Persen | Rp 85.932.423.044 | 22         | Persen | Rp 85.932.423.044 | 22         | Persen | Rp 85.932.423.044 | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
|   | Presentase pemenuhana upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat                     | 45         | Persen |                   | 50         | Persen |                   | 50         | Persen |                   | 50         | Persen |                   | 50         | Persen |                   | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>6 Dinas Koperasi dan UMKM</b>  |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |

| Program/Kegiatan (Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota)                    | Indikator Program   | Target     |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   | Lokasi Prioritas        | Sumber Pendanaan |
|---|---|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|-------------------------|------------------|
|   |   | Tahun 2025 |        |                   | Tahun 2026 |        |                   | Tahun 2027 |        |                   | Tahun 2028 |        |                   | Tahun 2029 |        |                   |                         |                  |
|   |   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   | Kinerja    | Pagu   |                   |                         |                  |
| Program Pemberdayaan UMKM   | Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif   | 5          | Persen | Rp 354.669.235    | 6          | Persen | Rp 374.902.696    | 6          | Persen | Rp 374.902.696    | 6          | Persen | Rp 374.902.696    | 6          | Persen | Rp 374.902.696    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Pengembangan UMKM   | Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkembang   | 35         | Persen | Rp 5.093.550      | 40         | Persen | Rp 5.348.228      | 40         | Persen | Rp 5.348.228      | 40         | Persen | Rp 5.348.228      | 40         | Persen | Rp 5.348.228      | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>7 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>                            |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja                  | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi                               | 65         | Persen | Rp 21.879.113     | 70         | Persen | Rp 22.973.068     | 70         | Persen | Rp 22.973.068     | 70         | Persen | Rp 22.973.068     | 70         | Persen | Rp 22.973.068     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan                                      | 70         | Persen | Rp 121.837.281    | 75         | Persen | Rp 128.429.145    | 75         | Persen | Rp 128.429.145    | 75         | Persen | Rp 128.429.145    | 75         | Persen | Rp 128.429.145    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                | Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi  | 100        | Persen | Rp 174.776.250    | 100        | Persen | Rp 183.575.663    | 100        | Persen | Rp 183.575.663    | 100        | Persen | Rp 183.575.663    | 100        | Persen | Rp 183.575.663    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                | Persentase Transmigran yang ditempatkan   | 60         | Persen | Rp 21.879.113     | 65         | Persen | Rp 22.973.068     | 65         | Persen | Rp 22.973.068     | 65         | Persen | Rp 22.973.068     | 65         | Persen | Rp 22.973.068     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>8 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman</b>                     |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Kawasan Permukiman  | Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | 2          | Persen | 1.750.000.000     | 2          | Persen | 2.850.000.000     | 2          | Persen | 2.850.000.000     | 2          | Persen | 2.850.000.000     | 2          | Persen | 2.850.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                          | Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya                             | 57,40      | Persen | Rp 40.000.000     | 58,22      | Persen | Rp 40.000.000     | 58,22      | Persen | Rp 40.000.000     | 58,22      | Persen | Rp 40.000.000     | 58,22      | Persen | Rp 40.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Pengembangan Perumahan  | Persentase ketersediaan perbaikan rumah bagi korban bencana/ relokasi                       | 40         | Persen | 1.965.000.000     | 40         | Persen | 1.325.000.000     | 40         | Persen | 1.325.000.000     | 40         | Persen | 1.325.000.000     | 40         | Persen | 1.325.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                        |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum        | Persentase program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terlaksana | 76         | Persen | Rp 157.295.371    | 78         | Persen | Rp 158.868.325    | 78         | Persen | Rp 158.868.325    | 78         | Persen | Rp 158.868.325    | 78         | Persen | Rp 158.868.325    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik  | 72         | Persen | Rp 26.439.297.114 | 72         | Persen | Rp 26.703.690.085 | 72         | Persen | Rp 26.703.690.085 | 72         | Persen | Rp 26.703.690.085 | 72         | Persen | Rp 26.703.690.085 | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                    | Persentase menurunnya kawasan rawan genangan  | 31         | Persen | Rp 180.922.231    | 33         | Persen | Rp 182.731.453    | 33         | Persen | Rp 182.731.453    | 33         | Persen | Rp 182.731.453    | 33         | Persen | Rp 182.731.453    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>10 Dinas Pertanian</b>   |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang terlaksana                     | 75         | Persen | 1.053.000.000     | 75         | Persen | 1.190.000.000     | 75         | Persen | 1.190.000.000     | 75         | Persen | 1.190.000.000     | 75         | Persen | 1.190.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang terlaksana                  | 55         | Persen | 1.230.000.000     | 58         | Persen | 2.123.000.000     | 58         | Persen | 2.123.000.000     | 58         | Persen | 2.123.000.000     | 58         | Persen | 2.123.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase peningkatan populasi ternak  | 7          | Persen | Rp 234.632.400    | 7          | Persen | Rp 230.749.400    | 7          | Persen | Rp 230.749.400    | 7          | Persen | Rp 230.749.400    | 7          | Persen | Rp 230.749.400    | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana                | 75         | Persen | Rp 70.000.000     | 75         | Persen | Rp 70.000.000     | 75         | Persen | Rp 70.000.000     | 75         | Persen | Rp 70.000.000     | 75         | Persen | Rp 70.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| Program Penyuluhan Pertanian  | Persentase peningkatan kelompok tani yang berwawasan agribisnis                             | 50         | Persen | Rp 950.000.000    | 55         | Persen | 1.180.000.000     | 55         | Persen | 1.180.000.000     | 55         | Persen | 1.180.000.000     | 55         | Persen | 1.180.000.000     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |
| <b>11 Dinas Ketahanan Pangan</b>  |   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |            |        |                   |                         |                  |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat       | Persentase capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)   | 100        | Persen | 1.120.474.989     | 100        | Persen | 1.176.498.739     | 100        | Persen | 1.176.498.739     | 100        | Persen | 1.176.498.739     | 100        | Persen | 1.176.498.739     | Kabupaten Buton Selatan | APBD             |

| Program/Kegiatan (Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota)                | Indikator Program  | Target     |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               | Lokasi Prioritas | Sumber Pendanaan |            |               |                         |      |
|---|--|------------|-------------|------|---------------|------------|-------------|------|---------------|------------|-------------|------|---------------|------------|-------------|------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|------|
|   |  | Tahun 2025 |             |      |               | Tahun 2026 |             |      |               | Tahun 2027 |             |      |               | Tahun 2028 |             |      |               |                  |                  | Tahun 2029 |               |                         |      |
|   |  | Kinerja    |             | Pagu |               | Kinerja    |             | Pagu |               | Kinerja    |             | Pagu |               | Kinerja    |             | Pagu |               |                  |                  | Kinerja    |               | Pagu                    |      |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                 | Persentase Tingkat Capaian Indeks Ketahanan Pangan   | 100        | Persen      | Rp   | 43.387.253    | 100        | Persen      | Rp   | 45.556.616    | 100        | Persen      | Rp   | 45.556.616    | 100        | Persen      | Rp   | 45.556.616    | 100              | Persen           | Rp         | 45.556.616    | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan                                  | Angka ketersediaan energi  | 100        | Persen      | Rp   | 116.655.551   | 100        | Persen      | Rp   | 122.488.329   | 100        | Persen      | Rp   | 122.488.329   | 100        | Persen      | Rp   | 122.488.329   | 100              | Persen           | Rp         | 122.488.329   | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| <b>12 Dinas Kelautan dan Perikanan</b>                              |  |            |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               |                  |                  |            |               |                         |      |
| Program Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan                    | Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  | 5          | Ton         |      | 895.604.960   | 5,2        | Ton         |      | 938.196.480   | 5,2        | Ton         |      | 938.196.480   | 5,2        | Ton         |      | 938.196.480   | 5,2              | Ton              |            | 938.196.480   | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan               | Jumlah sumber daya perikanan yang terawasi   | 2          | Sumber Daya | Rp   | 84.152.005    | 2          | Sumber Daya | Rp   | 88.506.440    | 2          | Sumber Daya | Rp   | 88.506.440    | 2          | Sumber Daya | Rp   | 88.506.440    | 2                | Sumber Daya      | Rp         | 88.506.440    | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                               | Volume Produksi Perikanan Tangkap  | 36.850     | Ton         |      | 4.980.569.443 | 36.950     | Ton         |      | 5.197.115.940 | 36.950     | Ton         |      | 5.197.115.940 | 36.950     | Ton         |      | 5.197.115.940 | 36.950           | Ton              |            | 5.197.115.940 | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                              | Volume Produksi Perikanan Budidaya   | 750        | Ton         |      | 462.619.225   | 800        | Ton         |      | 482.472.235   | 800        | Ton         |      | 482.472.235   | 800        | Ton         |      | 482.472.235   | 800              | Ton              |            | 482.472.235   | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| <b>13 Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>                       |  |            |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               |            |             |      |               |                  |                  |            |               |                         |      |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | 8          | Persen      | Rp   | 65.545.200    | 10         | Persen      | Rp   | 66.856.104    | 10         | Persen      | Rp   | 66.856.104    | 10         | Persen      | Rp   | 66.856.104    | 10               | Persen           | Rp         | 66.856.104    | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Presentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | 35         | Persen      | Rp   | 161.262.000   | 40         | Persen      | Rp   | 164.487.240   | 40         | Persen      | Rp   | 164.487.240   | 40         | Persen      | Rp   | 164.487.240   | 40               | Persen           | Rp         | 164.487.240   | Kabupaten Buton Selatan | APBD |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                        | Presentase meningkatnya perluasan pemenuhan sarana prasarana dan pelaku UKM melalui pemanfaatan potensi daerah | 18         | Persen      |      | 1.105.945.200 | 20         | Persen      |      | 1.128.064.104 | 20         | Persen      |      | 1.128.064.104 | 20         | Persen      |      | 1.128.064.104 | 20               | Persen           |            | 1.128.064.104 | Kabupaten Buton Selatan | APBD |